

MEMBENTUK IDENTITAS INDONESIA DALAM ARUS GLOBALISASI

**PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL V  
FAKULTAS FILSAFAT  
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA**

**MEMBENTUK IDENTITAS INDONESIA  
DALAM ARUS GLOBALISASI**

**Editor:**

Simon Untara  
Aloysius Widyawan  
Anastasia Jessica Adinda S.  
Datu Hendrawan

*Surabaya, 2 April 2016*

**PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL V  
FAKULTAS FILSAFAT UNIVERSITAS WIDYA MANDALA SURABAYA**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Copyright @2016

Penyunting:  
Simon Untara  
Aloysius Widyawan  
Anastasia Jessica Adinda S.  
Datu Hendrawan

Desain Sampul: Ferdinandus Eltyson Prayudi  
Layout isi : Andre Yuris

Diterbitkan oleh:  
Fakultas Filsafat  
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya

Alamat Penerbit:  
Jl. Raya Kalisari Selatan no. 1, Pakuwon City, Surabaya,  
Tower B, lt. 8, Telp. 031-99005299

**ISBN : 978-602-17055-7-5**

## KATA PENGANTAR

Simposium Nasional V Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang diselenggarakan pada tanggal 2 April 2016 mengambil tema “Membentuk Identitas Indonesia dalam Arus Globalisasi”. Acara ini merupakan upaya Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya untuk merefleksikan kondisi masyarakat masa kini secara filosofis. Berbagai fenomena yang terjadi dalam proses globalisasi Indonesia menunjukkan bahwa globalisasi masa kini bukan proses yang sepenuhnya bersih dari persoalan. Di balik banyak janji tentang kemudahan, kesejahteraan dan kebahagiaan yang akan diperoleh oleh masyarakat, globalisasi ternyata membawa juga banyak persoalan sosial seperti kemiskinan, ketimpangan kesejahteraan, gaya hidup materialistis dan ketidakadilan. Tentu saja keliru bila kita kemudian menilai bahwa globalisasi melulu menghancurkan kemanusiaan. Akan tetapi, sangat naif pula bila kita melihat bahwa globalisasi melulu sebagai proses yang tanpa cela mengingat bahwa kesejahteraan dan kemakmuran secara global masih jauh panggang dari api. Dalam tegangan antara dua penilaian tentang globalisasi itulah kita menentukan sikap. Sikap yang nampaknya netral ini bukanlah sikap tanpa keberpihakan. Justru dengan memahami kedua tegangan dan menemukan sisi kritisnya, kita akan mengerti di mana kita akan menentukan posisi dan bagaimana kita akan berperan dalam arus globalisasi. Oleh karena itulah, sikap kritis menjadi sangat penting. Upaya untuk menghadirkan sikap kritis terhadap globalisasi inilah yang kami coba hadirkan dalam diskusi Simposium Nasional V.

Globalisasi bukanlah diskursus baru di Indonesia. Sekurangnya sejak dua puluh tahun yang lalu, gagasan tentang globalisasi telah menghiasi ruang wacana Indonesia. Meski demikian, perjalanan Indonesia di era globalisasi sering gagal menampakkan kemampuannya untuk kritis terhadap zaman. Makin berkembangnya fundamentalisme transnasional, makin masifnya eksploitasi terhadap kekayaan dan potensi negara serta kondisi pembangunan sumber daya manusia yang serba terombang-ambing dan sering berubah arah menunjukkan bahwa Indonesia masih harus bekerja keras untuk hadir, bekerja dan membentuk identitasnya. Dalam konteks proses pembentukan identitas Indonesia inilah, diskusi Simposium Nasional V ini kami selenggarakan.

Atas terselenggaranya acara Simposium Nasional V dan buku prosiding ini, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang terlibat. Secara khusus, ucapan terima kasih ini kami sampaikan pada Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, seluruh dosen, pegawai dan mahasiswa Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, para pembicara yang berkenan hadir dan menyumbangkan gagasannya, para peserta yang meluangkan waktunya untuk ikut berdiskusi, para donatur dan semua pihak lainnya yang ikut terlibat dan membantu terselenggaranya acara ini.

*Surabaya, Mei 2016*

Ketua Steering Committee

Simon Untara

**DAFTAR ISI**

**Halaman Judul ..... i**  
**Kata Pengantar..... iii**  
**Daftar Isi ..... v**

**Prolog**

Oleh Anastasia Jessica Adinda Dan Simon Utara..... 1

**MAKALAH DISKUSI KELAS POLITIK EKONOMI**

**Menyoal Keadilan Di Indonesia Yang Mengglobal**

**Catatan Diskusi Kelas Politik Ekonomi**

Oleh Simon Utara..... 8

**Supir Taksi, Globalisasi Dan Pencarian Identitas Yang Sejati**

Oleh Reza A.A Wattimena ..... 15

**Menyingkap Tangan-Tangan Kekuasaan**

**Di Balik Eforia Hedonis-Konsumen Global: Quo Vadis Indonesia ?**

Oleh Valentinus Saeng ..... 22

**Politik-Ekonomi Indonesia Di Era Globalisasi**

Oleh I Basis Susilo ..... 38

**MAKALAH DISKUSI KELAS PENDIDIKAN BUDAYA**

**Merefleksikan Visi Dan Praksis Pendidikan Di Tengah Arus Globalisasi**

**Catatan Diskusi Kelas Pendidikan - Budaya**

Oleh Aloysius Widyawan ..... 54

**Globalisasi Pendidikan Dan Keraguan Garuda**

**Sikap Tarik-Ulur Indonesia Dalam Globalisasi Ekonomi Dan Pendidikan**

Oleh Ramon Nadres ..... 59

**Menuju Pendidikan Yang Manusiawi Di Era Globalisasi**

Oleh St Kartono ..... 75

## MAKALAH DISKUSI KELAS INTERRELIGIUS

### **Globalisasi Dan Inter-Religi**

#### **Catatan Diskusi Kelas Interreligiusitas**

Oleh Anastasia Jessica Adinda Susanti ..... 83

#### **Dialog Antariman: Dari Kata Ke Karya (Catatan Pengantar Diskusi)**

Oleh Ahmad Zainul Hamdi ..... 88

### **KEBERANIAN MEMAKNAI GLOBALISASI: BERSAING JADI**

#### **BERSALING BERTANDING JADI BERSANDING**

Oleh Simon Filantropa ..... 94

## MAKALAH DISKUSI PANEL PEMBICARA UTAMA

### **Globalisasi: Masalah Bagi Identitas Indonesia?**

#### **Catatan Diskusi Panel Pembicara Utama**

Oleh Agustinus Ryadi ..... 100

#### **Apakah Globalisasi (Bahan Bacaan 1)**

Oleh Armada Riyanto ..... 103

#### **“De-Pancasila-Isasi” Dan Nasionalisme (Bahan Bacaan 2)**

Oleh Armada Riyanto ..... 126

#### **Globalisasi Sebagai Neo-Imperialis Dan Gerakan Resistensinya**

Oleh K Ng H Agus Sunyoto..... 133

#### **Id/Entitas Kosmopolitan Global (Di) Jawa Timur**

Oleh Budi Susanto ..... 141

**BIODATA PENULIS .....155**

## PROLOG

### **Simposium Nasional V Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 'MEMBENTUK IDENTITAS INDONESIA DALAM ARUS GLOBALISASI'**

Oleh Anastasia Jessica Adinda dan Simon Untara

*Salam Sejahtera bagi Bapak/Ibu/Saudara/Saudari Peserta Simposium Nasional V.*

Hari ini dan di sini kita duduk bersama membicarakan persoalan Identitas Indonesia dalam arus Globalisasi. Mengapa membicarakan Globalisasi? Pernah ada pertanyaan yang menggelitik, apakah kita mendiskusikan dan mengkritisi Globalisasi karena kita negara miskin, atau lebih tepatnya, karena kita masih miskin? Barangkali bila kita sudah makmur, kaya dan berkelimpahan kita tidak lagi membicarakan Globalisasi secara kritis. Pertanyaan tersebut akan terjawab pertama-tama dengan menjelaskan potret Globalisasi yang selama ini kita ketahui. Perkenankanlah kami memberi sedikit gambaran mengenai Globalisasi. Globalisasi bukanlah sesuatu yang jauh dari kita, terutama kita yang hidup di abad 21 ini. Bahkan seolah tidak ada celah dalam hidup kita yang tidak tersentuh oleh globalisasi. Globalisasi menyentuh baik dari hal-hal besar, seperti negara dan pemerintahan, ideologi, ekonomi, agama, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, pendidikan, hingga hal-hal ringan dalam ranah hidup sehari-hari, seperti gaya berpenampilan, kebiasaan konsumsi, penggunaan media, pilihan-pilihan pribadi, berbagai kenikmatan badani dan bahkan kenikmatan rohani-spiritual. Globalisasi mengisi ruang-ruang kerja, kelas, kantor, pasar hingga kamar tidur kita, mengisi waktu senggang maupun waktu kerja. Mengisi peristiwa-peristiwa gembira maupun bencana. Globalisasi hadir dalam tontonan di saluran televisi asing, ambisi studi ke luar negeri, perjalanan jarak jauh secara teratur, sistem perbankan hingga apresiasi bagi seniman-seniman yang berpameran ke seluruh dunia.<sup>1</sup>

Globalisasi disadari membawa kontribusi yaitu meringankan banyak pekerjaan manusia karena mudahnya berbagai teknologi transportasi dan komunikasi diakses. Kemudahan ini, salah satunya, ditandai oleh semakin meningkatnya pertumbuhan

---

<sup>1</sup> Francois Chaubet, *Globalisasi Budaya (judul asli: "Que Sais-Je?" La Mondialisation Culturelle)*, Feybe I. Mokoginta (Penerj.), Penerbit Jalasutra, Yogyakarta, 2013, ix.

akses internet dan pengguna ponsel pintar (*smartphone*) di kawasan Asia. Indonesia memiliki tingkat pertumbuhan pengguna ponsel pintar tertinggi ketiga setelah Cina dan India. Jepang yang dikenal sebagai penghasil teknologi justru berada di bawah Indonesia bersama dengan Korea Selatan, Filipina, Thailand dan Vietnam.<sup>2</sup> Mudah-mudahan berbagai teknologi diakses di era globalisasi, tidak berarti bahwa Globalisasi hadir tanpa persoalan. 'Menjadi persoalan' terutama apabila Globalisasi, **pertama**, dimaknai melulu sebagai Liberalisasi. Pada 31 Desember 2015 lalu, Indonesia mulai memberlakukan secara efektif aturan-aturan MEA (Masyarakat Ekonomi Asean). Timbul berbagai respon atas keputusan ini. Berlakunya perdagangan internasional yang bebas tarif diharapkan memberi manfaat bagi kemajuan kondisi ekonomi di Indonesia. Para pelaku bisnis dipacu untuk bekerja lebih keras mengatasi dampak persaingan. Indonesia yang mengalami ketimpangan kesejahteraan ekonomi sedemikian tinggi kini harus ditambah lagi bersaing dalam pasar bebas MEA. Teori liberalistis semacam ini memang menawarkan pembacaan globalisasi yang bercorak kapitalis-ekonomistik. Globalisasi dilihat sebagai pertumbuhan dunia melalui pasar dan teknologi. Kaum Liberal yakin bahwa Globalisasi akan membawa pada kesejahteraan tapi mereka lupa bahwa Globalisasi yang bercorak liberal-kapitalistik menciptakan dikotomi 'yang menang' dan 'yang kalah', serta semakin memperdalam jurang antara kaya dan miskin karena melulu mengedepankan kompetisi individualistis hingga hanya ada sedikit ruang bagi kemanusiaan atau bahkan lenyap sama sekali. Konsekuensi paling nyata dari globalisasi yang liberal-kapitalistik seperti ini ialah ketidakadilan struktural. Ketidakadilan struktural tidak memungkinkan orang yang telah bekerja keras sekali sekali pun untuk bisa mendapat kesejahteraan, sebab struktur yang tidak memungkinkan. pun untuk bisa mendapat kesejahteraan, sebab struktur yang tidak memungkinkan.<sup>3</sup>

**Kedua**, Globalisasi menjadi persoalan juga apabila dimaknai sebagai Internasionalisasi. Pelekatan kata 'internasional' pada berbagai institusi dan produk di Indonesia tentu sudah tidak asing bagi kita sekarang. Sekolah bertaraf Internasional, Jurnal internasional, Kurikulum berbasis pendidikan Internasional, Standar Kerja Internasional, Pelatihan dengan Standar Internasional, Bahasa Internasional, Makanan selera Internasional, dsb. Kemudian, ada anggapan umum bahwa segala hal yang dilekati kata 'internasional' dipahami sebagai yang berkualitas tinggi, sesuai dengan harapan semua orang di seluruh dunia. Namun realitanya istilah

<sup>2</sup> Data dari eMarketer dalam [m.okezone.com/read/2015/09/19/57/1217340/2015-pengguna-smartphone-di-indonesia-capai-55-juta](http://m.okezone.com/read/2015/09/19/57/1217340/2015-pengguna-smartphone-di-indonesia-capai-55-juta)

<sup>3</sup> Anthony Mc Grew, *Globalization in Hard Times...*, 36-37



‘internasional’ hanya dijadikan komoditas agar dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi, tanpa menunjukkan ciri-ciri kualitas tinggi yang dicita-citakan.

**Ketiga**, Globalisasi yang hanya dilihat sebagai universalisasi juga membawa persoalan. Kelompok yang memandang Globalisasi sebagai universalisasi meyakini bahwa globalisasi niscaya harus terjadi dan akan membawa pada kehidupan yang lebih baik. Segala ‘yang partikular’ harus dilebur dalam ‘yang universal’. Globalisasi dengan ciri pemusatan budaya ini disebut juga sebagai homogenisasi atau Mc-Donaldisasi. Budaya dengan modal yang lebih besar mampu memasuki teritori-teritori lokal, namun dengan ciri dominatif yang kuat. Ciri Mc-Donaldisasi ini kita temukan dalam jaring-jaring praktik korporasi trans-nasional seperti restoran cepat saji McDonald yang membuka gerai hampir di seluruh benua, Starbucks yang hadir di Amerika Latin, London, Timur Tengah dan Rim Pasifik; Walmart (toko swalayan) dibuka pertama kali di Meksiko pada 1991 dan kini telah memiliki lebih dari 1000 toko di seluruh dunia; atau The Body Shop (perusahaan kosmetik dari Inggris yang sensitif terhadap isu ekologis) punya 1900 gerai di 50 negara tahun 2003.<sup>4</sup> Mc-Donaldisasi merupakan usaha kaum pemilik modal untuk meng-hegemoni pasar-pasar lokal dan cenderung melihat manusia melulu sebagai target konsumsi. Dampak utamanya adalah homogenisasi. Homogenisasi akan menjadi dehumanisasi ketika semua yang lokal dan partikular direndahkan demi menjadi ‘universal’. Padahal, bukankah yang universal itu bermula dari ‘yang lokal’?

**Keempat**, Globalisasi yang diartikan semata-mata sebagai ‘pembaratan’ juga akan menimbulkan persoalan. Segala produk dan konsep pemikiran yang berasal dari ‘barat’ (Eropa dan Amerika) dianggap memiliki kualitas unggul, maka, perkembangan dan kemajuan harus mengacu pada negara Barat. Tapi, benarkah yang non-barat itu sedemikian rendah dan yang Barat itu sedemikian unggul? Pemaknaan ini umumnya menimbulkan ketegangan: sebagian orang demikian memuja budaya Barat, sebagian lain sedemikian anti budaya barat. Padahal, dalam Globalisasi sesungguhnya ada perjuangan dalam tegangan polarisasi antara global-lokal, barat-nonbarat. Manusia tidak dapat sepenuhnya jatuh pada ekstrem yang melulu global atau yang melulu lokal (vakum dari pengaruh luar seperti dalam gerakan fundamentalisme dan teritorialisme). Pada kenyataannya, ‘pembaratan’ yang murni tidak pernah bisa terjadi. Beberapa budaya lokal yang bertemu akan membentuk suatu hibridisasi budaya dan kreolisasi budaya. Hibridisasi budaya merupakan budaya baru hasil percampuran berbagai budaya lokal karena batas-batas budaya yang tidak lagi

<sup>4</sup> George Ritzer, *Teori Sosiologi* (Judul Asli: *Sociological Theory*), Saut Pasaribu, Rh. Widada dan Eka A. (Penerj.), edisi kedelapan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, 993-997.

mapan, misalnya, musik rap asal Amerika dinyanyikan dengan bahasa Jawa oleh kelompok Hip-Hop Foundation dari Yogyakarta atau kemeja batik dengan gambar logo-logo klub sepakbola dunia, dan banyak lagi contoh bagaimana budaya lokal bersenyawa dengan budaya lokal lain tanpa berusaha melebur dalam keseragaman. Sedangkan, Kreolisasi merupakan pengangkatan unsur-unsur budaya lokal dengan melepaskan konteks aslinya, misalnya gaya punk (rambut Mohawk, celana panjang mengkerucut ke bawah, pakaian non-formal) dipakai oleh anak-anak muda saat ini walaupun mungkin tanpa pemahaman akan perlawanan komunitas punk terhadap kelas menengah mapan di era industrialisasi Eropa; atau rantai sabuk di celana yang menjuntai panjang bagi kaum rasta Jamaika ialah bentuk solidaritas untuk kawan-kawannya di penjara, tetapi di sini rantai seperti itu digunakan sebagai hiasan atau pengikat dompet. Demikianlah, mereduksi globalisasi dalam pembaratan justru melupakan unsur utama dalam hidup manusia, yaitu bagaimana manusia dari berbagai budaya saling mengkritisi demi pembangunan manusia berbudaya yang makin manusiawi.

\*\*\*

Berdasar beberapa anggapan yang kurang memadai mengenai Globalisasi di atas, muncul pertanyaan, 'Apakah yang disebut Globalisasi itu?' Kami melihat bahwa pada dasarnya, globalisasi adalah proses perkembangan cara hidup manusia yang ditandai kemampuan manusia untuk mengatasi berbagai halangan fisik dunianya.<sup>5</sup> Elemen pembentuk utama globalisasi kontemporer adalah sistem teknologi informasi dan teknologi transportasi. Karena perkembangan kedua sistem itu, kesadaran manusia akan dunianya berubah: jarak ribuan kilometer bukan lagi penghalang berarti bagi perpindahan material maupun distribusi tanda, baik audio maupun visual. Kemampuan manusia dalam mengatasi halangan jarak ini dimanfaatkan dengan baik oleh para pemilik kapital.

Dalam perkembangan sejarahnya, para pemilik kapital ini menganut keyakinan akan pentingnya kebebasan individual, khususnya agar mereka menang dalam persaingan distribusi modal. Jadilah globalisasi kontemporer yang menekankan kehidupan ekonomi materialistis yang berciri kapitalistis dan neoliberal. Globalisasi dengan ciri ini dapat kita lihat hasilnya dalam berbagai produk perusahaan multinasional yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Mereka menawarkan komoditas yang mengarahkan pada corak kehidupan yang seragam: hidup yang menyenangkan

<sup>5</sup> Bdk. JAN AART SCHOLTE, "What is Globalization? The Definitional Issue – Again", CSGR Working Paper No. 102/02, University of Warwick, Coventry, Desember 2002, 18.

adalah hidup yang penuh dengan kenikmatan material, jasmaniah dan individual. Andaiannya, bila kebebasan untuk mengejar kenikmatan itu nantinya tercapai oleh setiap orang di seluruh dunia, semua orang akan bahagia, makmur dan sejahtera.<sup>6</sup>

Tanpa mengabaikan berbagai kemudahan dan kemajuan yang dicapai melalui globalisasi ekonomi dengan corak ini, refleksi kritis terhadap arus globalisasi ini perlu dihadirkan. Upaya kritis ini penting dihadirkan sekurangnya karena dua hal. Pertama, meski keyakinan akan kesejahteraan bersama itu telah lama diperjuangkan oleh semakin banyak orang di seluruh dunia, kesejahteraan bagi semua orang tidak juga tercapai. Di banyak tempat, justru nampak semakin tingginya ketimpangan. Di Indonesia, koefisien gini tahun 2000 sebesar 0,30 dan ini justru memburuk pada tahun 2014 menjadi 0,42.<sup>7</sup> Nampak bahwa keyakinan para pendukung globalisasi yang menekankan ciri ekonomi kapitalis-neoliberal ini abai terhadap fakta bahwa setiap orang dan setiap kelompok telah memiliki 'modal' yang berbeda-beda (modal ekonomi maupun sosial), sehingga kompetisi yang 'adil' hanya memenangkan mereka yang bermodal besar. Kedua, salah satu ciri penting globalisasi yang menekankan sisi ekonomi kapitalis-neoliberal adalah bahwa tingkat kesejahteraan manusia diukur melalui secara ekonomi-materialistis. Ini adalah reduksi terhadap konsep kemanusiaan yang luas menjadi sekedar homo economicus. Penyeragaman konsep tentang manusia ini menimbulkan berbagai masalah sosial: konsumerisme dan konsumtivisme, kemiskinan dan kesenjangan kaya-miskin serta semakin parahnyanya kerusakan lingkungan hidup.

Ketidakadilan dan reduksi terhadap konsep kemanusiaan ini bertambah subur karena dalam globalisasi terjadi pula universalisasi yang dimaknai sebagai penyeragaman. Rasionalitas setiap orang dari berbagai budaya yang berbeda diarahkan sedemikian rupa untuk tunduk pada satu jenis rasionalitas lokal yang diglobalkan. Di sinilah gambaran identitas komunitas-komunitas lokal memasuki masa krisis: 'identitas lokal' dianggap memiliki derajat lebih rendah daripada 'identitas global'. Senada dengan itu, masyarakat dalam teritorialitas mereka pun menyetujui gagasan ini karena terpana globalitas.<sup>8</sup> Dalam kondisi ini muncul rasa rendah diri bila tidak menggunakan atribut-atribut internasional seperti bahasa internasional, sekolah internasional, selera dan lifestyle internasional atau bila tidak tergabung dalam perusahaan internasional, komunitas internasional dan berbagai institusi

<sup>6</sup> Bdk. Manfred B. Steger dan Ravi K. Roy, *Neoliberalism, a very Short Introduction*, Oxford University Press, Oxford 2010, 15-20

<sup>7</sup> Bdk. Herry Priyono, "Meledakkan Ketimpangan", Basis No. 11-12, tahun ke-63, 2014, 6.

<sup>8</sup> Bdk. Benedict Anderson, *Imagined communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, Verso, London 1991, 6-7.

atau organisasi lintas negara. Dalam suasana penyeragaman budaya inilah lahir berbagai persoalan sosial lain seperti punahnya penanda budaya lokal, teritorialisme, fundamentalisme dan terorisme.

Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS) melihat bahwa upaya untuk bersikap di tengah berbagai arus globalisasi bukanlah hal yang mudah. Pandangan yang melulu negatif terhadap globalisasi kontemporer akan membutakan mata terhadap berbagai kemajuan peradaban manusia. Sikap ini sering mendorong pada tindakan mengutuki globalisasi, menolaknya lalu lari pada teritorialisme, tradisionalisme yang menolak teknologi atau yang lebih parah, terorisme. Di sisi lain, pandangan yang silau terhadap kemajuan peradaban manusia dan pemujaan terhadap globalisasi akan menumpulkan daya kritis terhadap kondisi zaman yang berkembang melalui berbagai sistem yang dalam banyak bidang mencipta ketidakadilan. Sikap ini membutakan diri terhadap berbagai penindasan yang terjadi pada masa ini. Fakultas Filsafat UKWMS berupaya untuk kritis seraya menghidupi tegangan kreatif di antara dua sisi ekstrem tersebut. Upaya ini kami wujudkan dengan menyelenggarakan simposium nasional V 2016.

Kegiatan simposium nasional V 2016 Fakultas Filsafat UKWMS mengambil tema “Membentuk Identitas Indonesia dalam Arus Globalisasi”. Simposium nasional adalah kegiatan yang secara berkala dilakukan oleh Fakultas Filsafat UKWMS dalam rangka memahami dan mengkritisi zaman. Dalam kegiatan ini, kami mengundang beberapa pakar untuk mendiskusikan berbagai masalah aktual untuk menghasilkan rekomendasi yang membantu masyarakat untuk mengembangkan kehidupannya. Tema umum refleksi Fakultas Filsafat UKWMS tahun ini adalah ‘Mengkritisi Arus Globalisasi’. Dari refleksi kami, sekalipun hidup dalam arus globalisasi kontemporer, manusia selalu terikat oleh ruang dan waktu yang tertentu yang menantang untuk menentukan pilihan hidup. Pilihan-pilihan hidup ini menentukan identitasnya dalam kancah global. ‘Identitas’ sebagaimana disebut dalam tema di atas bukanlah identitas yang telah final namun harus didialogkan, didiskusikan dan dibentuk terus-menerus sesuai dengan konteks zaman. Atas dasar inilah, tema simposium nasional V 2016 ini “Membentuk Identitas Indonesia dalam Arus Globalisasi”. Kami berharap melalui diskursus ini, masyarakat luas semakin mampu berpikir kritis dan mendalam dalam rangka membentuk identitas Indonesia di tengah pusaran berbagai arus globalisasi.

Terkait dengan diskusi ini, kami melihat ada tiga bidang penting terkait dengan tema ‘Membentuk Identitas Indonesia dalam Arus Globalisasi’, yaitu: Inter-religius, pendidikan-budaya dan politik-ekonomi. Inter-religius terkait dengan pertanyaan-pertanyaan fundamental seperti: Apakah globalisasi terkait dengan agama? Apakah

hidup beragama (religiusitas) dipengaruhi oleh globalisasi? Apakah hidup beragama membuat kita semakin manusiawi di era globalisasi? Adakah religiusitas yang khas Indonesia di tengah arus Globalisasi yang menyodorkan banyak tawaran model religiusitas? Bagaimana hidup beragama yang manusiawi di tengah globalisasi? Perlukah/mungkinkah dialog iman dan dialog karya? Dlsb. Pendidikan-budaya terkait dengan berbagai pertanyaan kritis seperti: Apakah pendidikan kita inferior dari pendidikan di negeri lain? Apakah sistem pendidikan kita menyiapkan manusia yang utuh? Benarkah gaya hidup lokal-tradisional itu kampungan dan rendahan? Benarkah budaya yang baik itu berasal dari luar negeri? Apakah pendidikan Indonesia memiliki daya kritis terhadap arus globalisasi? Bagaimana pengaruh globalisasi bagi Pendidikan Indonesia? Bagaimanakah manusia yang berbudaya dan manusiawi di era globalisasi itu? Bagaimana membentuk manusia Indonesia di era Globalisasi? Dlsb. Politik-ekonomi berkuat dengan pertanyaan kritis seperti: Perubahan apa yang 'diciptakan' oleh Globalisasi di bidang Politik-ekonomi? Apakah kita saat ini hidup dalam sistem yang adil? Keadilan macam apa yang dihadirkan di era globalisasi? Dalam konteks Indonesia, kehidupan berpolitik semacam apakah yang dibutuhkan oleh Indonesia pada saat ini? Bagaimana kita menilai arah pemerintahan saat ini dalam konteks Indonesia sebagai bagian dunia yang berada dalam arus globalisasi? Mungkinkah negara memiliki kekuatan untuk menghadapi eksistensi sistem kapital global yang tidak adil?

Saudara-saudari yang baik, kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Anda sekalian untuk hadir. Kami mengundang Anda sekalian untuk berdiskusi tentang berbagai persoalan di sekitar kita terkait dengan globalisasi. Kita akan membagi pertemuan kita ini dalam dua sesi. Sesi pertama, setelah ini, kita akan berdiskusi di kelas: kami membagi dalam 3 kelas yang harus Anda pilih karena diadakan secara paralel: kelas Interreligius, kelas pendidikan-budaya dan kelas politik-ekonomi. Kemudian, setelah makan siang, akan ada Sesi Kedua, di Auditorium ini, yaitu diskusi bersama Para Pembicara Utama kita yakni Prof. Dr. FX. Armada Riyanto, Dr. Alb. Budi Susanto dan K. Ng. H. Agus Sunyoto, M. Pd. Dalam seluruh sesi ini, kami ingin mendengar sebanyak mungkin perspektif dan pandangan sehingga nalar yang kritis yang diimbangi oleh pikiran yang jernih akan mampu menciptakan pilihan-pilihan hidup kita yang menjadi semakin bijak dalam mengarungi zaman.

Akhir kata, selamat berdiskusi! Salam!

**MENYOAL KEADILAN**  
**DI INDONESIA YANG MENGGLOBAL**  
 Catatan diskusi Kelas Politik Ekonomi

Oleh Simon Untara

*“Ketidakadilan di suatu tempat  
 adalah ancaman bagi Keadilan di manapun”*

Dr. Martin Luther King Jr.<sup>9</sup>

Pembicaraan tentang globalisasi tidak dapat dilepaskan dari kaitannya dengan persoalan keadilan. Globalisasi terkait dengan sistem-sistem yang terbangun dan saling berhubungan di seluruh dunia. Karena mencakup sebuah pemahaman yang demikian luas, globalisasi sering dimaknai secara tidak tepat. Sebagai proses yang kompleks, globalisasi juga sering dinilai secara sederhana sebagai (melulu) baik atau buruk. Memang globalisasi telah membawa banyak hal yang berguna bagi perkembangan kemanusiaan namun itu tidak berarti bahwa globalisasi tidak perlu dipermasalahkan. Tendensi untuk menilai secara sederhana, hitam-putih tanpa ‘ruang’ untuk ‘sisi abu-abu’ justru sering menjerumuskan kita pada kegagalan menangkap persoalan sehingga terninabobokan oleh arug globalisasi.

Penting dicatat tentang dinamika globalisasi masa kini adalah terjadinya ketidakadilan dalam tata kehidupan masyarakat global sebagai efek dari proses globalisasi. Ketidakadilan itu membawa pada ketimpangan sosial-ekonomi yang semakin mempertajam ketidakadilan. Dinamika ini menstimulus munculnya dinamika sosial lain seperti kemiskinan, penindasan terhadap pekerja, konflik horizontal antar pelaku usaha, penyingkiran terhadap mereka yang gagal berkompetisi dan lain-lain. Di sisi lain, tidak semua orang sadar akan kondisi yang terjadi. Berbekal keyakinan akan kesejahteraan, kebahagiaan dan kebebasan yang akan semakin meluas melalui ‘globalisasi’, para Liberalis mendorong agar berbagai sistem mengabdikan pada satu sistem (ekonomi). Hasilnya, ketimpangan yang semakin mencolok terjadi, khususnya di negara berkembang (baca= negara miskin). Ketidaksadaran ini pun bukan hanya terjadi pada mereka yang memiliki kapital besar di era global. Mereka yang berada

<sup>9</sup> Dikutip dari Amartya Sen, *The Idea of Justice*, Cambridge: The Belknap Press, 2009, 403

di posisi paling tidak diuntungkan pun sering merasa bahwa ketidakadilan yang mereka terima adalah sesuatu yang wajar. “Kalau mau sukses ya ikuti saja sistemnya: bekerja lebih keras dan ‘bertarung’ lebih gigih”, demikian mereka berkeyakinan. Padahal, seringkali, seberapapun keras mereka berusaha, posisi mereka telah dipetakan. Di sinilah, kita bisa bicara tentang ketidakadilan struktural dalam proses globalisasi. Dalam kondisi ini, negara sebagai salah satu sistem dalam globalisasi ditantang keberpihakannya. Bagaimanapun juga, negara dengan segala kebijakannya menentukan ke arah mana perkembangan globalisasi akan dituju. Inilah yang secara umum didiskusikan dalam kelas politik ekonomi dalam simposium Nasional Fakultas Filsafat 2016.

Diskusi di kelas politik ekonomi dimulai dengan upaya Reza Wattimena membedah wacana tentang pemogokan para sopir taksi di Jakarta pada akhir bulan Maret 2016. Reza Wattimena melihat bahwa demonstrasi para supir taksi di Jakarta waktu itu adalah soal pertarungan pelaku pasar dalam rangka ekonomi. Dari fenomena itu, Reza menunjukkan bahwa kondisi real ekonomi di Indonesia menguntungkan sebagian orang saja. Antar warga negara terjadi ketimpangan ekonomi dan ketimpangan ini adalah cermin ketimpangan kemakmuran antar warga negara dan antar negara dalam konteks global. Terkait dengan kondisi itu, Reza Wattimena mengajukan gagasan tentang ‘rekonsiliasi’. Rekonsiliasi yang dimaksudnya terkait dengan intensifikasi peran negara dalam menjaga fluktuasi relasi antar warga negara yang telah dicirikan oleh ketimpangan ini. Mencontoh sistem yang dijalankan oleh Jerman modern, Reza menunjukkan bahwa penyelenggaraan jaringan pengaman sosial oleh negara adalah persoalan yang mendesak. Jaringan pengaman ini dilakukan dengan sistem asuransi jaminan sosial bersama yang membiayai hidup setiap warga negara dalam waktu tertentu bila ia mengalami kondisi-kondisi batas ekonomi: selama menjadi pengangguran (kalau dipecat atau resign), pensiun (masa tua), dll. Karena sistemnya merupakan jaminan sosial, pembiayaan itu dilakukan dengan sistem subsidiaritas antar warga negara. Dalam hal ini, negara berperan menjadi penyelenggara dengan membuat aturan pajak progresif. Konkretnya, semakin tinggi penghasilan seseorang (perusahaan), semakin besar pula pajaknya. Selain menjaga solidaritas antar warga negara karena sistem subsidiaritas, pajak progresif ini diyakini pula akan menurunkan ketimpangan karena semakin tinggi penghasilan, semakin besar pula pajaknya. Reza menceritakan bahwa kondisi di Jerman yang ditemuinya menunjukkan bahwa selisih gaji antara pemimpin perusahaan dan karyawan baru di perusahaan tersebut tidak sangat timpang karena sistem ini. Pada satu sisi, tingginya pemasukan pemerintah memudahkan mereka mengurus seluruh persoalan publik

baik infrastruktur maupun pembiayaan lain. Di sisi lain, warga negara yang membayar pajak tinggi pada negara memaksa negara untuk menjaga kredibilitasnya di mata warga negara. Karena itulah, pengawasan terhadap pejabat publik dilakukan dengan ketat bukan melulu oleh aparat negaranya tapi oleh masyarakat yang membiayai kehidupan publik. Bagi Reza Wattimena, peran negara dalam penyelenggaraan negara dengan cara demikian merupakan strategi rekonsiliasi antar pihak yang rentan berselisih dalam globalisasi.

Senada dengan Reza Wattimena, Basis Susilo memperluas pemahaman tentang globalisasi dengan gagasan tentang liberalisme dan neoliberalisme yang diyakini oleh banyak orang sebagai penyebab globalisasi ekonomi yang menyebabkan berbagai ketimpangan kesejahteraan. Menurutnya, Liberalisme adalah paham yang mengagendakan pasar (kegiatan ekonomi) yang bebas dari campur tangan negara. Sementara itu, Neoliberalisme yang dimulai pada sekitar 1980an memiliki agenda yang lebih radikal: semua sektor non-ekonomi (termasuk politik pemerintahan) harus melayani kegiatan ekonomi dalam pasar bebas seluruh dunia. Dalam hal ini, Liberalisme menekankan sektor ekonomi riil, sementara Neoliberalisme sudah mulai 'bermain' ekonomi virtual (saham, nilai tukar mata uang, dll). Terkait dengan negara, Basis Susilo mengarisbawahi bahwa pada Liberalisme, negara 'hanya' diminta untuk absen dari pasar, sementara pada Neoliberalisme, negara digunakan untuk melayani kepentingan liberalisasi pasar dengan menerbitkan berbagai kebijakan dan undang-undang yang membebaskan/menguntungkan proses liberalisasi pasar. Hal ini nampak mulai dari kebijakan pemerintah Amerika Serikat pada masa presiden Ronald Reagan dan Inggris pada masa perdana menteri Margareth Thatcher di era 1980an. Agenda konkret dari Neoliberalisme nampak dari Washington Consensus yang harus diterapkan oleh negara-negara sekutu Amerika Serikat dan Inggris pada era 1990an yang mendukung pasar bebas sehingga menguntungkan negara-negara maju dan merugikan (mengeksplorasi) negara berkembang. Bagaimana mengatasi kondisi itu? Basis Susilo mengusulkan pentingnya sharing keamanan sosial sebagaimana telah mulai nampak dalam bentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan penerapan upah minimum bagi para pekerja. Dalam hal ini, Basis Susilo melihat bahwa negara yang kuat dan betul-betul didukung oleh rakyatnya akan mampu membentuk jaringan pengaman sosial ini. Kekuatan negara ini akan nampak nyata ketika pajak diperoleh dan digunakan secara optimal oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya.

Lebih jauh, Basis Susilo menunjukkan bahwa pertarungan antara kebijakan negara dan strategi Neoliberalisme di era globalisasi sangat nampak dalam perpindahan



kekayaan alam negara Indonesia ke luar negeri yang terjadi secara sistematis. Dalam hal ini, Indonesia sering nampak tidak berdaya sehingga rakyat yang seharusnya menikmati kekayaan alam negaranya justru tidak bisa mengoptimalkan potensi-potensinya dan malahan semakin 'dijajah' oleh negara lain yang menampakkan dirinya dalam bentuk perusahaan multinasional. Kegagalan mengoptimalkan potensi dalam negeri ini dibaca sebagai peluang oleh negara lain untuk menawarkan barang-barang produksi mereka ke negeri kita. Jadilah, negeri kita yang sedemikian kaya ini mengeksport kekayaan alamnya ke luar negeri dan menjadi pasar bagi barang jadi yang bahan bakunya berasal dari negeri kita sendiri dengan harga yang jauh lebih mahal daripada harga yang kita peroleh saat menjual bahan baku. Negeri yang sedemikian kaya ini pun dihuni oleh masyarakat yang semakin hari semakin konsumtif karena tidak pernah 'dipaksa' untuk memaksimalkan potensinya.

Terkait dengan kegagalan menjadi bangsa produktif dan kejatuhan masyarakat Indonesia dalam gaya hidup konsumtif, pembicara ketiga, Valentinus Saeng mengajukan gagasan yang sangat menarik. Ide utamanya adalah bahwa kondisi masyarakat Indonesia yang berciri konsumtif itu sebenarnya bukan kebetulan terjadi. Ia meyakini bahwa ada tangan-tangan yang memiliki kuasa untuk 'mengendalikan' arah pemerintahan Indonesia sehingga membuat masyarakatnya berciri konsumtif. Ia melihat bahwa Indonesia ini bukanlah negara yang masyarakatnya tidak mampu menjadi produktif tapi dibuat tidak mampu produktif. Terinspirasi oleh gagasan Herbert Marcuse, Valentinus Saeng melihat bahwa telah terjadi beberapa proses alienasi (pengasingan) terhadap manusia dalam sejarah filsafat Barat. Alienasi pertama adalah alienasi agama: menjadikan agama sebagai yang paling berkuasa, namun justru membuat agama sibuk pada hal-hal luaran dan kekuasaan sekaligus tidak memberi ruang bagi originalitas kehidupan beriman personal umat. Alienasi kedua adalah alienasi kerja sebagaimana digagas oleh Marx: melalui kerja, manusia diasingkan dari kondisi manusiawinya (manusia menjadi instrumen produksi) dan disisihkan dari hasil kerjanya sehingga pekerjaan manusia bukan lagi ekspresi diri dan hasilnya dinikmati oleh orang lain (pemilik modal). Alienasi ketiga adalah alienasi konsumsi: karena masyarakat kapitalis membutuhkan pasar untuk hasil produksi mereka yang berlimpah, masyarakat 'dibuat' membutuhkan berbagai barang produksi yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Mereka ini diasingkan dari dirinya sendiri (kebutuhan, keinginan, hasrat, cita-cita, dll) tapi 'dibentuk' sedemikian rupa melalui iklan dan berbagai proses komunikasi massa sehingga membutuhkan dan melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak mereka inginkan. Di sinilah terjadi instrumentalisasi kesadaran. Kesadaran manusia 'dibentuk' sedemikian rupa sehingga sesuai

dengan keinginan masyarakat industri kapitalis: suka mengkonsumsi barang tanpa pertimbangan matang karena mementingkan gengsi artifisial daripada guna. Dari sinilah, tercipta manusia yang ‘bermental robot’: orang-orang yang hidup dengan dunia mereka sendiri yang berciri mekanis, tunduk pada dominasi massa dan tidak kritis.

Melihat globalisasi mendorong pembentukan manusia ‘bermental robot’, apa yang mungkin menjadi rekomendasi? Reza Wattimena menyebut bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang memiliki ingatan pendek, termasuk pada dasar negara yang telah menjadi visi bersama. Oleh karena itu, ajakan untuk kembali pada Pancasila menjadi sangat mendesak. Basis Susilo menekankan kembali pentingnya negara dalam memaksimalkan potensi yang dimiliki dan meminimalkan ekses yang muncul. Sementara itu, Valentinus Saeng menekankan pentingnya manusia kritis dalam rangka membentuk negara yang kuat. Pengandaiannya, bila negara kuat, negara akan mampu ‘membentuk’ manusia yang kuat dan kritis. Manusia yang kuat dan kritis akan membuat negara kuat. Melalui pembentukan manusia yang kuat dan kritis itu, manusia Indonesia diharapkan mampu membentuk kesadaran yang tidak selalu ikut arus namun memiliki sikap yang jelas dalam mengarungi berbagai arus dominasi dan instrumentalisasi terhadap kesadaran.

\*\*\*

Dalam sesi diskusi, ada sekurangnya tiga bahan diskusi yang menurut penulis penting dihadirkan disini untuk mempertajam analisa kita. Tiga hal tersebut penulis ringkas sebagai berikut:

1. Globalisasi masa kini tidak mungkin ditolak; Globalisasi bahkan sudah menjadi kebutuhan karena memungkinkan manusia mengatasi halangan ruang dan waktunya. Globalisasi yang kapitalistis ini juga anti terhadap berbagai kejahatan kemanusiaan (korupsi, misalnya). Oleh karena itu, bukankah yang diperlukan dalam globalisasi masa kini ini bukan lagi soal penilaian kritis mengenai globalisasi tapi justru bagaimana melanjutkan proses globalisasi sambil menghilangkan ekses-eksesnya? Dengan demikian, diskusi yang kita adakan ini perlu juga lebih proporsional dalam melihat fenomena globalisasi sehingga tidak hanya memfokuskan diri pada sisi negatif saja.
2. Kesadaran bahwa globalisasi dengan corak kapitalisme menciptakan ketidakadilan, bagaimana cara kita mengatasinya (*going beyond*)? Apakah gagasan tentang Nasionalisme (khususnya gagasan nasionalisme

sebagaimana diyakini pada era Soekarno) perlu dimunculkan pada masa kini? Mungkinkah gagasan seperti regulasi UU agraria membantu upaya ‘bertahan’ di era globalisasi? Sudah siapkah Indonesia ‘mengurus’ dirinya sendiri di era globalisasi dalam kondisi Indonesia seperti sekarang?

3. Globalisasi bukan melulu soal wacana dalam pikiran manusia namun sebuah ‘pertarungan’ di dunia nyata oleh para pelakunya. Mungkinkah penilaian kritis terhadap sisi politik-ekonomi globalisasi masa kini diterapkan dalam strategi konkret dunia bisnis sehingga tercipta bisnis yang manusiawi?

Menanggapi persoalan tentang kondisi ketidakmungkinan globalisasi untuk ditolak dan perlunya melihat globalisasi tidak melulu pada sisi buruknya, para pembicara menanggapi bahwa memang betul bahwa kita tidak boleh buta terhadap berbagai kemajuan yang dialami masyarakat di era globalisasi. Akan tetapi yang penting menjadi gagasan kritis kita adalah bahwa dalam globalisasi terjadi kolonialisme kultural yang tidak hanya mengarahkan budaya namun mentalitas kita. Budaya dalam hal ini terkait dengan struktur sosial, sementara mentalitas terkait dengan habitus pribadi. Terkait dengan Neoliberalisme, masyarakat kapitalistis selalu mendorong individualisasi. Individualisasi akan membuat setiap orang secara pribadi mudah dikuasai dan dikontrol, khususnya melalui media massa. Dalam hal ini, kontrol terhadap manusia tidak lagi melalui paksaan tapi melalui segala hal yang sepertinya wajar, masuk akal dan umum, padahal, seringkali tidak manusiawi. Hasilnya, manusia yang mekanis, tunduk pada ‘rezim iklan’. Tujuannya adalah kontrol atas manusia dan sumber daya di suatu wilayah tertentu (negara berkembang). Ketidakadilan inilah yang terjadi pada globalisasi masa kini di balik segala wajah yang nampak sangat baik. Dalam hal ini, kebiasaan, tradisi dan struktur yang merendahkan martabat manusia dalam proses globalisasi ini harus terus-menerus dikritisi. Dalam konteks politik pemerintahan yang demokratis, masyarakat kritis inilah yang akan mampu memaksa agar seluruh dimensi negara mengoptimalkan potensi yang ada bagi kebaikan seluruh rakyatnya. Apa jaminan bahwa masyarakat mendorong optimalisasi potensi negara? Masyarakat akan mendorong optimalisasi potensi negara bila kebutuhan dasarnya terpenuhi. Negara yang rakyatnya kritis justru akan merasa nyaman menjalankan kebijakan yang membangun kemanusiaan yang integral. Oleh karena itu, langkah pertama yang penting dijalankan oleh negara adalah memenuhi jaringan pengaman sosial dasar bagi tiap warga negara.

Terkait dengan globalisasi kapitalisme yang menawarkan berbagai nilai kemanusiaan yang luhur, para pembicara menanggapi bahwa globalisasi memang

memberi banyak kemudahan bagi manusia seluruh dunia. Namun, di manapun, kapitalisme selalu perlu diwaspadai sebab tendensi untuk melulu memaksimalkan satu dimensi dalam kehidupan manusia (yaitu dimensi ekonomi material) selalu berada dalam bahaya menyingkirkan dimensi-dimensi hidup manusia yang lainnya. Hal ini nampak dalam kasus korupsi: nampak bahwa kapitalisme anti terhadap korupsi, namun mengapa kapitalisme justru ‘mengincar’ negara-negara yang sistem pemerintahannya lemah dan mudah dimanipulasi? Ini karena negara yang lemah dan korup memberi ruang yang subur bagi kapitalisme. Sementara itu, negara yang maju dengan sumber daya manusia yang kritis memandang kapital (khususnya kapital ekonomi material) hanya sebagai instrumen bagi kesejahteraan seluruh rakyat dan pengejaran keadilan berkelanjutan. Negara yang kuat ini berusaha mengendalikan kapitalisme sedemikian rupa sehingga kapitalisme ‘hanya’ berkembang secukupnya demi menunjang pencapaian keadilan. Oleh karena itu, penting bahwa kita mengkritisi dengan mengajukan pertanyaan: globalisasi seperti apa yang kita harapkan?

Terkait dengan langkah untuk bersikap di era globalisasi, para pembicara menyebut bahwa upaya untuk membentuk agen perubahan yang sejauh mungkin masuk dalam struktur pemerintahan dan mengubah struktur adalah hal yang sangat penting. Bagaimana cara membentuk agen perubahan itu? Dalam hal ini, negara perlu memberi wadah bagi gerakan-gerakan sosial yang berkelanjutan melalui berbagai organisasi dan kelompok yang peduli dan memiliki solidaritas sosial. Dalam hal ini, Kapitalisme yang mementingkan pengejaran kapital ekonomi material dapat ‘dilawan’ dengan penguatan kapital sosial. Penguatan kapital sosial yang saling bersinergi dengan kapital-kapital lain dalam rangka memaksimalkan potensi Indonesia menjadi sangat penting agar negeri ini dapat benar-benar ‘menentukan nasibnya sendiri’. Dalam negara yang serius mementingkan kepentingan rakyatnya, nasionalisme yang sehat akan bertumbuh. Nasionalisme sehat yang semakin bertumbuh ini akan mendukung upaya pembentukan masyarakat yang adil.

## SUPIR TAKSI, GLOBALISASI DAN PENCARIAN IDENTITAS YANG SEJATI

Oleh Reza A.A Wattimena<sup>1</sup>

### Abstrak

*Melalui globalisasi relasi antar hal di dunia ini menjadi semakin intensif. Intensifikasi relasi dalam globalisasi tidak jarang menimbulkan ketegangan dan konflik. Konflik dan ketegangan itu nyata dalam kaitannya dengan kehidupan politik ekonomi di tiap negara di dunia, khususnya Indonesia. Di Indonesia ini, konflik dan ketegangan yang terjadi tidak dapat dilihat melulu sebagai persoalan partikular sebab konflik dan ketegangan yang terjadi di era globalisasi ini selalu terkait secara struktural dengan berbagai konflik dan ketegangan lain. Fenomena konflik perlu dilihat sebagai akibat dari banyak sebab yang akan menjadi sangat panjang ketika dirunut. Salah satu akar struktural itu adalah kondisi politik ekonomi Indonesia yang nampak dalam berbagai kebijakan negara. Melalui kebijakan-kebijakan negara inilah, peluang untuk rekonsiliasi atas konflik yang terjadi dimungkinkan. Melalui rekonsiliasi inilah, Indonesia membentuk identitasnya dalam era globalisasi.*

**Kata Kunci:** *Globalisasi, rekonsiliasi, identitas, cara berpikir ekologis.*

---

Apa hubungan antara demo supir taksi di Jakarta pada 22 Maret 2016 lalu dengan globalisasi? Sekilas, kita tidak bisa melihat hubungan langsung. Namun, jika ditelaah lebih dalam, hubungannya langsung tampak: perkembangan informasi dan teknologi dari negara lain kini memasuki Indonesia, dan mempengaruhi industri transportasi di Jakarta. Pendek kata, para supir taksi itu merasa dirugikan oleh perkembangan industri informasi dan komunikasi yang mengurangi penghasilan mereka per harinya. Siapapun yang diancam mata pencahariannya pasti akan bergerak protes. Sayangnya, ini seringkali berakhir pada kekerasan yang tidak menguntungkan siapapun.

Ini juga terjadi, karena globalisasi, yang salah satunya ditandai dengan perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi, masih belum mencapai titik rekonsiliasi. Artinya, globalisasi masih menghasilkan ketimpangan di berbagai bidang yang juga melahirkan berbagai kemungkinan konflik. Namun, ini janganlah dilihat sebagai titik final. Globalisasi masih mungkin berubah, dan itu semua amat tergantung dari para aktor globalisasi yang adalah manusia-manusia juga. Tulisan

---

<sup>1</sup> Peneliti, Penulis dan Doktor Filsafat dari Universitas Filsafat Muenchen Jerman

ini ingin menawarkan sebuah model di dalam memandang globalisasi dalam konteks Indonesia, yakni globalisasi sebagai rekonsiliasi. Di dalam rekonsiliasi ini, semua aspek kehidupan manusia, mulai dari politik, agama, pendidikan sampai dengan budaya, menemukan titik seimbang yang bersifat dinamis. Titik seimbang yang dinamis memungkinkan terciptanya keadilan dan kemakmuran untuk masyarakat Indonesia.

Pertanyaan yang menggantung kemudian adalah, bagaimana rekonsiliasi ini dapat dicapai? Bagaimana titik seimbang yang dinamis di era globalisasi ini dapat dicapai dan kemudian dipertahankan? Satu jawaban yang pasti terkait dengan identitas keIndonesiaan. Jika identitas tersebut jelas dan tegas di dalam berbagai sisi kehidupan bersama di Indonesia, maka globalisasi akan berpeluang masuk ke dalam fase rekonsiliasi. Kejelasan dan ketegasan identitas tersebut tidak boleh lepas dari ingatan kolektif bangsa Indonesia yang dicita-citakan oleh para bapak bangsa, seperti Sukarno, Hatta, Sjahrir dan sebagainya. Maka, identitas disini tidak bisa dilepaskan dari ingatan dan cita-cita mereka, yakni bangsa yang berketuhanan, berperikemanusiaan, hidup dalam kesatuan, demokrasi serta keadilan sosial. Hanya dengan mewujudkan inilah Indonesia bisa memetik buah-buah manis globalisasi, tanpa terjatuh pada sisi gelapnya yang paling berbahaya, yakni ketimpangan sosial ekstrem antara si kaya dan si miskin, sebagaimana kita saksikan sekarang ini.

## Globalisasi

Sebelum maju lebih jauh, pemahaman tentang makna globalisasi kiranya diperlukan. Ribuan buku ditulis dengan tema ini. Kebanyakan mengulang hal yang sama. Mungkin, sedikit ringkasan kiranya bisa membantu. Christian Hartmann dalam tulisannya di *Bundeszentrale für politische Bildung* menjelaskan beragam perubahan sosial yang muncul sebagai dampak dari globalisasi, yakni meningkatnya jaringan global antar manusia di seluruh dunia (*Vernetzung*), kemudahan investasi lintas benua, sampai dengan beragam masalah sosial dan ekologis yang muncul.<sup>2</sup> Dari beragam gejala yang dijabarkan bisa disimpulkan secara lugas, bahwa globalisasi adalah pemadatan ruang dan waktu. Tempat yang sebelumnya tak terjangkau kini bisa ditempuh dalam waktu yang amat singkat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi jelas memainkan peranan besar disini. Dua dampak langsung dari keadaan ini terhadap hubungan antar manusia adalah ‘menjauhkan yang dekat’, dan ‘mendekatkan yang jauh’. Orang di depan mata diabaikan demi komunikasi dengan

<sup>2</sup> Hartmann, Christian, *Globalisierung, Zahlen und Fakten*, <http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/globalisierung/52498/voraussetzungen>, 23 Maret 2016.

orang yang nun jauh disana. Ini dengan mudah ditemukan di dalam pola komunikasi antar manusia sekarang ini, terutama terkait dengan perkembangan *gadget smartphone*.

Ini semua memungkinkan diketahuinya satu peristiwa di belahan dunia lain dalam hitungan detik. Bom yang meledak di Brussel langsung diketahui mereka yang sedang menonton TV di Kupang. Alhasil, rasa cemas, akibat konflik nun jauh di tempat lain pun meningkat. Orang hidup terus dalam keadaan siaga setiap saat. Ini tentunya memberikan pengaruh besar pada hubungan antar manusia serta cara hidup beragam masyarakat dewasa ini. Tingkat depresi dan bunuh diri di beragam negara kini juga cenderung meningkat. Kesalingterpautan erat antar beragam negara di seluruh dunia membawa pula peningkatan rasa cemas kolektif global. Mungkin inilah salah satu sisi gelap globalisasi yang terus perlu dicermati secara kritis.

Peningkatan rasa cemas kolektif ini juga dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi politik di era globalisasi ini. Beragam analisis menegaskan, bahwa globalisasi kerap hanya sekedar topeng bagi proses perluasan neoliberalisme, yakni paham yang melihat semua dimensi kehidupan manusia semata dari kaca mata keuntungan ekonomi. Dampak politisnya adalah penerapan kebijakan pasar bebas di berbagai negara yang menghantam beragam industri lokal, dan itu juga berarti memiskinkan penduduk lokal. Buahnya kemudian adalah ketimpangan global, yakni perbedaan yang begitu tajam antara kelompok kaya dan kelompok miskin di berbagai belahan dunia. Ketimpangan yang semakin lebar ini ditambah dengan sepak terjang perusahaan multinasional yang tanpa ampun menguras kekayaan sumber daya alam beragam negara, sambil membiarkan rakyatnya tetap hidup miskin. Jika dibiarkan seperti ini, globalisasi justru akan meruntuhkan perdamaian. Sebuah proses rekonsiliasi yang mendalam sekaligus meluas kiranya diperlukan.

## Rekonsiliasi

Bagaimana kita memahami rekonsiliasi di dalam arus globalisasi sekarang ini? Beberapa poin tentang teori rekonsiliasi tentu perlu untuk dijabarkan. Berbagai teori rekonsiliasi menjelaskan proses berhentinya konflik dan tegangan di masa lalu, serta mulainya masa-masa damai yang dinantikan. Dengan kata lain, rekonsiliasi adalah masa peralihan dari keadaan perang menuju keadaan damai. Di dalam jantung rekonsiliasi terdapat beberapa hal, yakni pelestarian ingatan, pengakuan terhadap keberadaan korban serta pelaku maupun hak-haknya, perbaikan terhadap hidup para korban serta penciptaan maupun perawatan budaya perdamaian yang berkelanjutan<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Wattimena, Reza A.A., *Zwischen kollektivem Gedächtnis, Anerkennung und Versöhnung*, Hochschule für Philosophie München, München, 2016

Teori-teori rekonsiliasi tidak secara langsung berbicara soal globalisasi. Namun, idenya kiranya tetap, bahwa globalisasi membawa perubahan yang juga merugikan banyak orang. Rekonsiliasi ini dapatlah dilihat sebagai upaya untuk membuat sistem jaringan pengaman sosial (asuransi kesehatan universal, pendidikan gratis untuk semua, asuransi kehilangan pekerjaan, serta asuransi hari tua) universal bagi semua warga, sehingga mereka tidak begitu rentan dihantam sisi gelap arus globalisasi yang terjadi. Globalisasi, dengan demikian, harus diarahkan pada semacam rekonsiliasi, supaya ia bisa mencapai titik seimbang yang dinamis. Buah manis globalisasi, yakni keterpauteratan seluruh dunia yang menghasilkan keadilan dan kemakmuran bagi semua, baru dapat dirasakan, jika ia dipandang sebagai sebuah proses rekonsiliasi terus menerus. Ini kiranya sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa Indonesia yang tertuang di dalam ingatan kolektif bangsa Indonesia di dalam Pancasila.

### Soal Identitas

Globalisasi jelas mengubah identitas kita sebagai bangsa. Pancasila tentu saja bisa tetap dijadikan pegangan teguh di dalam globalisasi, supaya kita tidak kehilangan arah sebagai bangsa. Namun, pemahaman kita tentang identitas, pada hemat saya, harus digali lebih dalam. Kita perlu melihat diri kita tidak hanya sebagai warga negara Indonesia, namun juga sebagai warga dunia, dan bahkan warga semesta. Identitas global dan kosmik inilah yang kiranya tepat untuk direnungkan di era globalisasi sekarang ini. Apa yang dimaksud dengan identitas global kosmik ini? Ini adalah kesadaran mendasar, bahwa diriku bukanlah semata bagian dari identitas sosialku, tetapi juga merupakan alam semesta ini. Kesadaran ini terletak sebelum semua identitas sosial yang diberikan oleh masyarakat. Siapa aku, sebelum aku menyebut diriku orang Indonesia, atau orang Jawa, atau Muslim, dan sebagainya? Siapa aku, sebelum itu semua?

Di titik ini, aku dan semesta adalah satu. Tidak ada perbedaan. Semua perbedaan muncul berikutnya. Di titik terdalam keberadaanku sebagai manusia ini, aku melihat hewan, tumbuhan dan semua makhluk sebagai diriku. Sebenarnya, ini adalah kesadaran alamiah kita sebagai manusia. Artinya, kita semua memiliki ini. Namun, dalam perjalanan waktu, kesadaran ini terlupakan. Kita pun terjebak dengan hanya melihat diri kita melulu sebagai bagian dari identitas sosial kita di dalam masyarakat. Ketika identitas sosial kita terganggu, dan ini pasti terjadi, karena hidup tak pernah asti, maka kita pun akan mengalami krisis hidup.<sup>4</sup> Kesadaran mendasar

<sup>4</sup> Bdk, Wattimena, Reza A.A., *Tentang Manusia. Dari Pikiran, Pemahaman, sampai dengan Perdamaian Dunia*, Maharsa, 2016.



akan identitas global dan kosmik ini hanya dapat dicapai, jika kita sungguh bertanya, siapa kita sesungguhnya. Kita perlu menjawab pertanyaan itu dengan sungguh-sungguh, tanpa terjebak pada pandangan-pandangan dangkal yang telah diajarkan oleh masyarakat kepada kita. Pada titik terdalam, kita akan sadar, bahwa kita adalah bagian sekaligus alam semesta itu sendiri.<sup>5</sup> Pengalaman langsung akan kesadaran ini membawa kita pada keterbukaan total tidak hanya terhadap manusia lain, tetapi juga kepada seluruh alam semesta.

Inilah yang disebut sebagai cara berpikir ekologis. Kita menyadari, bahwa kita adalah bagian yang tak terpisahkan dari alam semesta, beserta segala isinya. Kita tidak lagi melihat diri kita semata sebagai bagian dari masyarakat ataupun lingkungan sosial kita. Ketika ini terjadi, maka moralitas yang berpijak pada keterbukaan alami terhadap segala sesuatu pun akan terbentuk.<sup>6</sup> Kita akan hidup dengan tolok ukur moral yang mengalir alami dari kesadaran kita, dan bukan dari perintah-perintah moral semata. Moralitas semacam ini akan bersifat ajeg. Ia tidak akan mudah berubah, karena digerakkan oleh perubahan sosial yang memang terus terjadi. Moralitas alami yang lahir dari kesadaran akan identitas global kosmik inilah yang kiranya pas untuk digunakan di dalam era globalisasi sekarang ini.<sup>7</sup> Untuk keperluan politis, Pancasila tetap bisa menjadi dasar yang kokoh. Namun, pada dirinya sendiri, ini tidaklah cukup. Identitas Pancasila harus juga berpijak pada sesuatu yang lebih dalam, yakni kesadaran global kosmik yang nantinya melahirkan kesadaran ekologis. Rekonsiliasi di dalam proses globalisasi baru bisa sungguh terjadi, ketika mayoritas orang hidup dengan menggunakan cara pandang ini.

### **Supir Taksi.. and beyond**

Ini tentunya terdengar indah, walaupun sulit. Apa kiranya tantangan yang menghalangi untuk terwujudnya globalisasi sebagai rekonsiliasi ini? Kiranya ada dua tantangan besar yang perlu dicermati dan dilampaui. Yang pertama adalah kelupaan bangsa Indonesia pada cita-cita berdirinya bangsa Indonesia. Kelupaan ini mendorong lahirnya tantangan kedua, yakni berbeloknya Indonesia menjadi semata perluasan identitas lokal, seperti yang dengan mudah ditemukan pada upaya menerapkan hukum-hukum Islam sebagai bagian dari peraturan daerah, ataupun undang-undang

<sup>5</sup> Bdk, Watts, Alan, *On The Taboo Against Knowing Who You Are*, Vintage Books, 1989. Watts berpendapat, bahwa pemahaman akan identitas sejati kita sebagai manusia dianggap terlarang di beberapa budaya, karena dianggap bisa merusak tatanan sosial yang sudah ada.

<sup>6</sup> Bdk, Wattimena, Reza A.A., *Bahagia, Kenapa Tidak?* Maharsa, Yogyakarta, 2015.

<sup>7</sup> Bdk, Jäger, Willigis, *Westöstliche Weisheit: Vision einer integralen Spiritualität*, Theseus. Jäger berbicara soal spiritualitas yang berpijak pada kesatuan kita dengan seluruh alam semesta. Spiritualitas semacam ini yang kiranya cocok untuk era globalisasi sekarang ini.

nasional. Ketika cita-cita dan ingatan terlupakan, maka Indonesia juga terlupakan. Jika ini terjadi, maka bangsa Indonesia akan menjadi korban globalisasi, tanpa bisa bangkit dari keterbelengguannya. Jika seperti itu, maka bukan hanya para supir taksi yang mengamuk, karena haknya terinjak-injak, tetapi juga seluruh rakyat. Revolusi mental bisa berubah wajahnya menjadi revolusi politik berdarah yang memakan banyak korban. Semoga tidak sampai ke situ.<sup>8</sup>

### Daftar Pustaka

- Butterwegge, Christoph, et.al (editor), *Neoliberalismus. Analysen und Alternativen*, VS Verlag, Wiesbaden.
- Felber, Christian, *Die Gemeinwohl-Ökonomie, Eine demokratische Alternative wächst*, Deuticke im Paul Zsolnay Verlag, Wina, 2012.
- Jäger, Willigis, *Westöstliche Weisheit: Vision einer integralen Spiritualität*, Theseus.
- Noller, Peter, *Globalisierung, Stadträume und Lebensstile. Kulturelle und lokale Repräsentationen des globalen Raums*, Leske + Budrich, Opladen 1999.
- Paul, Axel T., Pelfini, Alejandro, Rehbein, Boike (Editor), “*Globalisierung Süd*”, *LEVIATHAN. Zeitschrift für Sozialwissenschaft Sonderheft 26/2010*, VS Verlag, Wiesbaden.
- Watts, Alan, *On The Taboo Against Knowing Who You Are*, Vintage Books, 1989.
- Wattimena, Reza A.A., *Zwischen kollektivem Gedächtnis, Anerkennung und Versöhnung*, Hochschule für Philosophie München, München, 2016
- Wattimena, Reza A.A., *Tentang Manusia. Dari Pikiran, Pemahaman, sampai dengan Perdamaian Dunia*, Maharsa, 2016.
- Wattimena, Reza A.A., “*Pemikiran Christian Felber tentang Ekonomi Kesejahteraan Publik*”, *Jurnal Respons*, Jakarta, hal. 213-256.
- Wattimena, Reza A.A., *Filsafat sebagai Revolusi Hidup*, Kanisius, Yogyakarta, 2015.
- Wattimena, Reza A.A., *Bahagia, Kenapa Tidak?* Maharsa, Yogyakarta, 2015.

### Internet:

- <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20141009194757-120-5963/penerapan-hukum-syariah-yang-kontroversial/> 24 Maret 2016.
- <http://megapolitan.kompas.com/read/2016/03/22/12455551/Pengemudi.Go-Jek.Babak.Belur.Dipukuli.Oknum.Sopir.yang.Berdemonstrasi> 24 Maret 2016.
- Hartmann, Christian, *Globalisierung, Zahlen und Fakten*, <http://www.bpb.de/>

<sup>8</sup> Bdk, Wattimena, Reza A.A., *Filsafat sebagai Revolusi Hidup*, Kanisius, Yogyakarta, 2015.

nachschlagen/zahlen-und-fakten/globalisierung/52498/voraussetzungen, 23  
Maret 2016.

**MENYINGKAP TANGAN-TANGAN KEKUASAAN  
DI BALIK EFORIA HEDONIS-KONSUMEN GLOBAL:  
QUO VADIS INDONESIA ?**

Oleh Valentinus Saeng

**Abstrak**

*Eforia hedonis-konsumen global bukanlah sebuah realita yang terjadi secara sampingan dan kebetulan, melainkan hasil dari sebuah desain yang sangat intensif, sistematis, kontinyu dan struktural. Dengan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki, kekuasaan status quodapat menghalalkan segala cara dan upaya untuk mewujudkan apa yang hendak diraih, baik dalam ranah sosial maupun mental-spiritual. Menyesuaikan diri dengan mentalitas jaman yang sangat menghargai harkat dan martabat manusia, para pemangku kepentinganstatus quo melindungi, mempertahankan dan melanggengkan kekuasaannya lewat cara dan rupa yang manusiawi, familiar dan menarik. Bidang garapan pun dialihkan dari dominasi dan eksploitasi territorial ke dominasi dan eksploitasi mental-spiritual, sehingga secara visual sungguh sulit dicerap dan secara sosial-politik-kultural kurang dirasakan keburukannya. Bertolak dari realitas ini, maka tampak jelas bahwa tangan-tangan kekuasaan tetap mengemudikan semua aktivitas yang mengatur ruang publik.*

**Kata Kunci:** *kekuasaan statusquo, dominasi, eksploitasi, alienasi konsumsi, konsumerisme, hedonisme, Indonesia, realitas teknologis, mentalitas teknologis, administrasi total, consumer society, kebutuhan sejati, kebutuhan semu-palsu.*

**Pendahuluan**

Di tengah peradaban kontemporer yang tersekat-sekat dan terkoyak-koyak oleh beragam konflik, kekerasan dan pertumpahan darah akibat perbedaan Suku, Agama, Ras, Antar golongan (SARA), kita disuguhkan oleh spirit kebersamaan yang lintas SARA di pasar global dan pusat-pusat perbelanjaan. Di sana semua bersatu dan berpadu dalam gerak dan irama perilaku yang seragam: bersenang-senang, mengkonsumsi dan menikmati. Semua bersaudara dan satu hati.

Apakah ada yang salah dengan eforia massa berskala global yang memadati pasar dan pusat-pusat perbelanjaan, menghabiskan uang masing-masing untuk beragam kesenangan? Dari sudut kebebasan dan hak milik pribadi, menghabiskan uang dan tabungan sendiri untuk bersenang-senang, mengkonsumsi dan menikmati beragam tawaran merupakan hak dan wewenang individu yang tidak dapat diganggu-gugat oleh siapa dan pihak mana pun. Setiap individu berhak dan bebas menggunakan hak miliknya dan hasil pekerjaannya untuk keperluan dan tujuan apapun. Jika

demikian, mengapa dipertanyakan eforia massa?

Pertanyaan yang dilontarkan di atas tidak bermaksud menghalangi dan mencampuri wewenang serta melanggar hak seseorang atas harta milik dan hasil usahanya. Alasan utama di balik pertanyaan itu justru menampilkan keinginan untuk menghargai harkat dan martabat manusia serta menjaganya dari manipulasi, dominasi dan eksploitasi oleh pihak yang tak bertanggung jawab. Kita berniat mengetahui dan menganalisa apa yang mendasari *eforia massa berskala global*, mengapa ada eforia sedemikian masif, kontinyu dan terstruktur dan bagaimana masyarakat global dapat bersatu padu, sehati dan sepaham ketika berada di pasar dan pusat-pusat perbelanjaan. Singkat kata, apakah eforia massa berskala global menampilkan kebutuhan riil dan sejati manusia atau kebutuhan palsu-semu yang telah direkayasa sedemikian canggih, menarik dan genial oleh sebuah regim *status quo*, sehingga dianggap normal dan wajar?<sup>1</sup>

### Dominasi Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan positif dan teknologi yang dirintis oleh Galileo Galilei terus menerus dikembangkan dan disempurnakan dari waktu ke waktu. Hasil pengembangan dan penyempurnaan yang berkelanjutan tersebut berpuncak pada Revolusi Industri. Sejak itu, peradaban dunia memasuki era baru: era pengetahuan ilmiah dan teknologi. Ilmu pengetahuan ilmiah dan terutama teknologi telah “membuat terang alam bawah-sadar, menjadikan kuantitatif apa yang kualitatif, membuat jelas dan tepat sketsa alam, menguasai khaos dan membuatnya teratur”.<sup>2</sup>

Lebih dari itu, teknologi telah mengubah secara radikal aktivitas individu, relasi dan interaksi antar-manusia, manusia dengan alam-lingkungan dan manusia dengan Tuhan. Dari sudut pandang aktivitas, teknologi merevolusi cara kerja manusia. Kalau pada masa lampau, orang-orang masih mengandalkan diri pada tenaga manusia atau hewan untuk memanfaatkan dan mengolah alam, sekarang semua pekerjaan itu sudah diambil alih oleh mesin-mesin pintar. Pada masa kini, bukan alat yang harus menyesuaikan diri dengan manusia, melainkan manusia yang dipaksa menyesuaikan diri dengan alat-alat teknis dalam dunia kerjanya. Maka, tepatlah apa yang dikatakan oleh Lewis Mumford bahwa manusia sudah menjadi *factum* dan alat-alat teknis sebagai *factor*.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Lih. Herbert Marcuse, *One-Dimensional Man: Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society*, Boston: Beacon, 1991, 3-4.

<sup>2</sup> Jacques Ellul, *The Technological Society*, New York: Vintage, 1964, 43.

<sup>3</sup> Lewis Mumford, *Technics and Civilization*, New York: Harcourt, 1934, 361.

Dari sudut relasi dan interaksi, teknologi sedang menyulap dunia menjadi kampung global, mereduksi jarak dan mempersingkat waktu. Dewasa ini hidup manusia dimanja oleh beragam sarana transportasi darat, laut dan udara yang mampu menjangkau semua pelosok dunia dalam waktu yang relatif singkat. Momen hidupnya didominasi oleh media komunikasi massa, mulai dari telepon biasa sampai telepon pintar dan berkat penemuan internet, aneka jenis media sosial serta program komunikasi yang lintas benua, sehingga semua berita dan peristiwa dapat disaksikan secara simultan dan *real time*.<sup>4</sup> Semua perangkat teknis tersebut menjadi teman setia dan pada tahap tertentu sudah menyebabkan ketergantungan dan kecanduan.

Akibat lain lagi dari kehadiran perangkat teknis secara masif dalam beragam aktivitas ialah perubahan secara radikal cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam-lingkungan dan Tuhan. Alam semesta dan semua isinya tidak lagi dipandang sebagai ancaman yang tak tertaklukkan atau sesuatu yang misterius dan memantulkan jejak-jejak Pencipta, melainkan sekedar realitas material-fisik yang diatur oleh hukumnya sendiri. Alam semesta dipandang dan diperlakukan sekedar sebagai entitas obyektif untuk dieksplorasi dan dieksploitasi demi kepentingan hidup manusia.

Secara personal, sosial dan kultural bahkan religius teknologi sudah menjadi bagian integral hidup dan aktivitas manusia. Dari pagi hingga malam seluruh hidup manusia dikelilingi oleh beragam perangkat teknis dan semua perangkat teknis itu berubah fungsi serta arti dari sekedar alat bantu ke kebutuhan hidup yang seakan mustahil diabaikan. Orang menjadi gagap, cemas, panik dan histeris bila salah satu saja dari media komunikasi sosialnya tertinggal atau hilang. Dengan demikian tampak jelas bahwa alat-alat teknologi telah bermetamorfosis dari sekedar instrumen menjadi kaidah operasional, kriteria eksistensial, paradigma fundamental dan kebutuhan riil manusia kontemporer.<sup>5</sup>

Satu hal mendasar dan sangat penting yang sering dilupakan ketika berbicara tentang teknologi adalah alasan kemunculannya dalam hidup manusia. Teknologi bukan sekedar *eine Weise des Entbergens und der Realisierung der Vernunft* – sebuah sarana penyingkapan dan perwujudan kemampuan nalar dalam rangka mengungkapkan diri dan berkelana,<sup>6</sup> tetapi menghadirkan suatu cara dan upaya kita untuk menjinakkan, mengeksplorasi, mendominasi, mentransformasi dan mengeksploitasi alam guna

<sup>4</sup> Bdk. Richard Jackson Harris, *A Cognitive Psychology of Mass Communication*, Mahwah-New Jersey: LEA, 2004, 6-13

<sup>5</sup> Albert Borgmann, *Technology and the Character of Contemporary Life. A Philosophical Inquiry*, Chicago-London: The University of Chicago Press, 1984, 3.

<sup>6</sup> Bdk. Heidegger, *Die Technik und die Kehre*, Tübingen: Pfullingen, 1922, 24.

memenuhi kebutuhan hidup dan melestarikan eksistensi.<sup>7</sup> *Kebutuhan*, tegas Herbert Marcuse, merupakan ibu dari segala penemuan dan rekayasa teknis,<sup>8</sup> sehingga teknologi dan mentalitas teknologis an sich memuat karakter dominatif, transformatif dan eksploitatif.

Terlepas dari semua kemudahan, keunggulan, keuntungan dan kenyamanan atau dampak positif dari teknologi, kita perlu mengembangkan kesadaran dan sikap kritis terhadap teknologi. Sikap kritis demikian lahir dari fakta dan realita bahwa teknologi dan prinsip-prinsipnya atau rasionalitas instrumentalis telah ditransformasikan ke dalam mentalitas dan perangkat normatif untuk mengatur, menata dan mengelola kehidupan sosial. Secara faktual dan riil, peradaban manusia kontemporer merupakan peradaban teknologis dan masyarakat global dewasa ini merupakan sebuah sosietas teknologis yang dipimpin oleh regim teknokratis. Prinsip-prinsip yang berlaku dan bekerja dalam perangkat teknologis kini menjadi standard dan kriteria untuk menilai perilaku, aktivitas dan prestasi manusia di segala bidang.<sup>9</sup> Karena itu, masuk akal bila Herbert Marcuse mengatakan bahwa manusia dan masyarakat modern-kontemporer adalah manusia dan masyarakat teknologis satu dimensi.<sup>10</sup>

### Realitas Teknologis

Penggunaan alat-alat teknologi dalam dunia aktivitas hidup manusia, terutama dalam dunia kerja memberikan akibat ganda yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, kehadiran perangkat teknologi yang demikian canggih dan berkemampuan raksasa sangat memudahkan usaha, meringankan beban, menghemat tenaga, meningkatkan produktivitas dan menyediakan banyak peluang kerja serta waktu luang. Alat-alat teknis telah memberikan dampak positif yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Di sisi lain, penerapan alat-alat teknis di dalam aktivitas kerja menimbulkan akibat negatif yang tidak sedikit dan mendatangkan bahaya besar yang multi-aspek. Tanpa mengabaikan aspek positif teknologi, tulisan ini akan menyoroti dan menghadirkan beberapa aspek negatif teknologi yang membahayakan individu sebagai subyek yang bebas, bermartabat dan berkesadaran serta mengancam keseimbangan dan kohesi

<sup>7</sup> Bdk. Herbert Marcuse, "*Einige gesellschaftliche Folgen moderner Technologie*" dalam Herbert Marcuse, *Schriften* (Bd.III.Aufsätze aus der Zeitschrift für Sozial-forschung 1934-1941), Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1979, 293.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Lih. Valentinus Saeng, *Herbert Marcuse. Perang Semesta Melawan Kapitalisme Global*, Jakarta: Gramedia, 2012, Bab VI, 193-24.

<sup>10</sup> Bdk. Herbert Marcuse, *One-Dimensional Man*, Boston: Beacon, 1991, 1-170.

sosial.

Aspek negatif dalam lingkup individual adalah teknologi menjadi faktor primer dan manusia sebagai faktor sekunder. Pendapat Lewis Mumford bahwa manusia menjadi *factum* dan teknologi sebagai *factor* hendak menegaskan perubahan makna, peran dan fungsi manusia dan teknologi dalam hirarki nilai. Kini bukan teknologi yang harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan aktivitas hidup manusia, melainkan manusia harus menyesuaikan diri dengan irama dan daya kerja mesin. Mesin-mesin berperan sebagai *quasi* subyek dan penguasa yang mensyaratkan setiap orang untuk menyelaraskan diri dengan mentalitas, hukum, fungsi dan tuntutannya.

Perubahan kedudukan dan fungsi tersebut tampak jelas dalam dunia industri modern-kontemporer. Para pekerja, mulai dari yang berada di level terendah hingga level tertinggi praktis dikontrol oleh tuntutan alat-alat teknis, meskipun bentuk tuntutan demikian dapat mengambil aneka rupa yang tidak selalu dapat diceraap dan dipahami secara langsung. Sebagai contoh, seorang mandor atau asisten yang bertugas menjaga mesin dan mengoperasikannya harus memiliki kecakapan dan ketrampilan yang memadai untuk menjalankannya. Ia harus terus menerus menyegarkan pengetahuannya dan kecakapannya melalui berbagai pelatihan agar selalu *up to date* dengan sistem dan fungsi mesin yang terus meningkat dan berubah. Jika pemilik perusahaan berpendapat bahwa kemampuan mandor atau asisten tersebut sudah *mentok* – mencapai batas akhir, maka dia akan dilengserkan dan diganti oleh orang lain yang lebih trampil dan mahir.

Aspek negatif berikut ialah penerapan prinsip-prinsip teknologi ke dalam hidup manusia. Istilah-istilah teknis sudah merasuk ke dalam pikiran dan kesadaran individu di seluruh dunia dan diterapkan sebagai ukuran dan pedoman untuk menilai kemampuan, kecakapan dalam pekerjaan dan hasil karya manusia. Istilah-istilah seperti *otomatis, efektif, efisien, transparan, terukur, tepat sasaran* merupakan prinsip kerja yang berlaku di dalam dunia mesin dan dialihkan pada hidup manusia. Dewasa ini mekanika keseragaman telah menyebar dari tatanan teknologis ke tatanan masyarakat; *mekanika keseragaman ini mengatur prestasi bukan hanya di pabrik-pabrik dan toko-toko, melainkan juga di kantor-kantor, sekolah-sekolah, pertemuan-peremuan, dan terakhir dalam wilayah rileks dan hiburan.*<sup>11</sup> Penerapan prinsip-prinsip mesin menandakan bahwa mentalitas teknologis telah merasuki pikiran dan menjiwai tindakan individu. Adakah yang salah dengan pengalihan prinsip mesin ke dalam pikiran dan perilaku manusia?

Dalam masyarakat dan mentalitas teknologis ada upaya untuk menyamaratakan

---

<sup>11</sup> Herbert Marcuse, *One-Dimensional Man...*, 29-30.



manusia dengan mesin. Namun harus diingat bahwa secara hakiki terdapat perbedaan yang besar antara mesin dan manusia dalam segala dimensi. Pola berpikir dan cara kerja mesin merupakan proyeksi dari pola pikir dan cara kerja manusia, sehingga manusia secara hakiki tetap menduduki posisi kunci. Aspek lain yang harus diperhatikan dengan serius adalah mesin merupakan sebuah benda mati yang tunduk pada kaidah berpikir dan sistem operasional yang telah diprogramkan, sehingga bekerja teratur, tepat waktu, terkontrol, presisi, siap sedia setiap saat, tanpa kata dan tanya. Sementara manusia adalah makhluk hidup yang memiliki inteligensi dan kehendak, sehingga mampu bertanya, mempersoalkan, menyeleksi, menerima, menolak, memberontak, mengkritisi, ngawur maupun ngelantur. Manusia adalah misteri, sehingga sulit diprediksi.

Dalam lingkup sosio-ekonomis penerapan teknologi secara masif mengubah secara radikal pola kerja individu dan hasil produksinya. Jika sebelum penggunaan alat-alat teknis berkemampuan raksasa dan supercanggih, manusia mengandalkan diri secara total pada energi sendiri dan hasil yang didapat sangat kecil dalam jumlah. Namun, begitu alat-alat teknologi digunakan secara masif, kemampuan berproduksi manusia dan produk yang dihasilkan berubah 180 derajat. Mesin dapat berproduksi tanpa kenal lelah sepanjang waktu sejauh semua persyaratan teknis dipenuhi, sehingga produktivitas dapat ditingkatkan ke level maksimal dan keuntungan berlipat-ganda mungkin didapatkan. Dengan kata lain, mesin memberikan nilai tambah yang sangat besar bagi pemilik modal baik dari sudut finansial, produktivitas, kapasitas produksi, profit dan daya tawar secara sosial-politik dan kekuasaan dalam hidup sosial.

### **Regim Totalitarian dan Masyarakat Konsumen**

Penggunaan perangkat teknis secara masif dan terstruktur dalam dunia kerja memunculkan beragam akibat, baik dalam lingkup ekonomi-finansial, dunia kerja dan industri maupun bidang sosial, politik dan kultural.<sup>12</sup> Dari beberapa akibat yang ada, kesenjangan antara kapasitas produksi dan daya serap pasar yang terus melebar merupakan isu yang paling krusial dan sangat berbahaya bagi seluruh masyarakat untuk rentang waktu yang panjang. Tepat sekali apa yang dikatakan Jean Baudrillard bahwa *persoalan utama kapitalisme kontemporer bukan lagi kontradiksi antara 'pemaksimalan keuntungan' dan 'rasionalisasi produksi' (dari sudut pandang pengusaha), melainkan antara produktivitas yang secara potensial tanpa batas (pada level teknostruktur) dan kebutuhan untuk menyerap produk. Hal itu menjadi vital bagi sistem pada fase ini untuk mengontrol*

<sup>12</sup> Bdk. Marx-Engel, *Werke (Bd. III Deutsche Ideologie)*, Berlin: Dietz, 1958, 76.

*permintaan konsumen dan bukan sarana produksi; bukan mengontrol harga melainkan apa yang diinginkan dari harga demikian.*<sup>13</sup>

Kesenjangan yang terjadi secara logis pasti menimbulkan gejolak dan krisis yang multi-dimensi jika kalangan pemangku kekuasaan tidak mampu menemukan solusi yang tepat. Yang dibahayakan oleh krisis multi-dimensi bukan hanya bidang ekonomi dan finansial, melainkan kehidupan sosial-politik-kultural-keamanan dan eksistensi kelas penguasa sendiri. Pabrik-pabrik akan ditutup, harga produk jatuh, terjadi pengangguran, kriminalitas meningkat, pemutusan hubungan kerja terpaksa dilakukan, demonstrasi buruh pasti merajalela, ketegangan atau friksi di antara partai pendukung pemerintah dan pemerintah dengan oposisi akan memuncak, sehingga tuntutan pergantian regim pasti tidak terhindarkan. Apa yang harus dilakukan?

Langkah **pertama** adalah melakukan konsolidasi dan sinergi di antara para pemangku kepentingan di berbagai bidang kehidupan. Daripada mereka saling menjegal dan mematikan lebih baik melakukan sinergi untuk memperkuat posisi, menguasai sumber-sumber penghidupan seluas mungkin dan mendominasi panggung sosial-politik-pertahanan-keamanan selama mungkin. Dalam bidang ekonomi, konsolidasi dan sinergi tampak dalam fenomena merger dan dalam ruang politik terungkap dalam kebijakan *bipartisan* atau sistem *bicameral*-sistem dua kamar yang sarat dengan lobi dan kompromi.<sup>14</sup>

Sinergi dan konsolidasi dari beragam kepentingan memperlihatkan bahwa masyarakat teknologis bukan hanya mempertahankan *status quo* belaka, melainkan cenderung ke arah situasi yang totalitarian. Totalitarianisme demikian terungkap dalam rangkap jabatan dan beragam jabatan yang diemban oleh seseorang dalam masyarakat: seorang panglima militer atau polisi adalah sekaligus pengusaha, seorang pengusaha mengemban jabatan sebagai ketua partai politik, seorang politikus adalah pemain saham di pasar lokal, regional dan global.<sup>15</sup> Jadi, semua kekuatan sosial, politik, ekonomi, militer, kultural, seni dan agama menyatu dan berpadu dalam sebuah bangunan bekumasyarakat teknologis satu-dimensi.

Langkah **kedua** adalah mengintegrasikan kalangan oposisi ke dalam lingkaran kekuasaan untuk meminimalisir ancaman. Sejak jaman purba, manusia telah diposisikan sebagai makhluk rasional, personal dan sosial. Rasionalitas mengacu pada kemampuan khas manusia sebagai makhluk yang berakal budi, berkehendak

<sup>13</sup> Jean Baudrillard, *Consumer Society: Myths & Structures*, London-Thousand Oaks-New Delhi, Sage Publications, 1998, 71.

<sup>14</sup> Bdk. Valentinus Saeng, *Herbert Marcuse...*, 281.

<sup>15</sup> Bdk. Dr. Valentinus, *Kritik Ideologi. Menyibak Selubung Ideologi Kapitalis dalam Imperium Iklan*, Yogyakarta: Kanisius, 2011, 193.

dan berkesadaran. Personal merujuk pada hakikat manusia sebagai subyek yang unik dan keunikan demikian menggambarkan perannya yang tak tergantikan. Sosialitas menggarisbawahi jatidiri manusia sebagai makhluk *dependens* - tergantung secara timbal balik dengan pihak lain. Dengan semua daya yang demikian istimewa, manusia merupakan makhluk yang bermartabat dan sulit diprediksi.

Hakikat manusia sebagai makhluk rasional, personal dan sosial menandakan dan menegaskan bahwa setiap individu adalah subyek yang memiliki harkat dan martabat yang sama dan setara. Masing-masing individu adalah subyek yang bebas, merdeka dan otonom, karena berpartisipasi pada citra Sang Khalik sendiri. Konsekuensi dari kebebasan, kemerdekaan, keunikan dan kesadaran diri yang melekat pada natura individu adalah penghargaan yang tulus dan ikhlas kepadanya secara absolut. Itu berarti bahwa secara implisit dihargai keanekaragaman sebagai bagian integral dan kodrati dari masyarakat manusia.

Namun, dari sudut pandang politik, ekonomi, keamanan dan kebudayaan, keanekaragaman merupakan ancaman bagi stabilitas, kesatuan dan persatuan, karena secara potensial memuat benih-benih konflik, kekerasan, salah paham, prasangka dan perpecahan. Mengelola keragaman memerlukan modal dan usaha yang sangat besar serta membutuhkan waktu yang panjang dan proses pendidikan yang humanis, terarah, intensif supaya tumbuh saling pengertian, toleransi dan kerjasama. Karena itu, banyak regim berusaha sekuat tenaga meminimalisir keanekaragaman-pluralitas dengan mengintroduksi politik keseragaman-konformitas secara sistematis di seluruh negeri. Semua anasir antagonis diserap menjadi unsur pendukung dan pelindung setia regim *status quo* dan bekerja seperti antivirus untuk meronda dan mendeteksi setiap potensi ancaman.

Integrasi oposisi ke dalam lingkaran kekuasaan tidak dilakukan dengan kekerasan dan ancaman, tetapi melalui persuasi-propaganda, penciptaan musuh bersama dan penerapan prinsip-prinsip teknis ke dalam kehidupan sosial. Gambaran tentang politik penyeragaman dan penafian oposisi diuraikan secara lugas dan kritis oleh Herbert Marcuse secara demikian: mekanika keseragaman telah menyebar dari tatanan teknologis ke tatanan sosial; *mekanika keseragaman ini mengatur prestasi bukan hanya di pabrik-pabrik dan toko-toko, melainkan juga di kantor-kantor, sekolah-sekolah, pertemuan-pertemuan dan terakhir di dalam wilayah rileks dan hiburan.*<sup>16</sup>

Begitu proses integrasi dan penyeragaman berjalan lancar, maka potensi ancaman berhasil direduksikan sedemikian rupa sehingga penguasa dapat

<sup>16</sup> Herbert Marcuse, *One-Dimensional Man...*, 29-30.

menerapkan kebijakan-kebijakan berskala nasional tanpa ada kritik dan resistensi yang memadai. Berkat kepiawaian menjalankan propaganda, pada tahap tertentu banyak orang merasa nyaman, aman dan sejahtera di bawah kekuasaan *status quo* yang sedang melakukan praktik administrasi total yang sangat tak manusiawi. Dengan demikian tampak jelas bahwa manusia teknologis kontemporer sedang menghidupi sebuah paradox eksistensial baru: penjajahan dan perbudakan yang meleggakan dan menenangkan.<sup>17</sup>

Langkah *ketiga* adalah *menumpulkan nalar dan menggelorakan insting*. Nalar adalah kemampuan khas manusia; khas karena dari semua makhluk hidup di dalam ruang dan waktu semesta ini, hanya dan hanya manusia dibekali daya berpikir, menyadari diri, sesama dan lingkungan hidupnya serta bahkan menembus batas cakrawala dan realitas fisik-material untuk menemukan jejak-jejak Sang Absolut. Kemampuan berpikir yang lintas ruang dan waktu serta kesadaran diri sebagai subyek yang unik di tengah makhluk yang lain menandakan bahwa manusia adalah makhluk yang sangat istimewa.

Akan tetapi, keunggulan dan keistimewaan sebagai *animal rationale* tidak selamanya menguntungkan secara sosial-ekonomis-politik-kultural-pertahanan-keamanan. Di balik rasionalitas terkandung perbedaan pandangan, pemahaman, keyakinan dan penilaian tentang baik-buruk, adil-durjana, benar-salah, betul-keliru, manfaat-mubazir, untung-rugi. Keragaman visi, klaim dan kredensi tentang makna dalam sistem nilai merupakan tantangan utama dan krusial bagi setiap penguasa yang berkeinginan kuat menancapkan pengaruh, melanggengkan kekuasaan dan melestarikan keuntungan-keunggulan yang sekian lama telah dinikmati. Untuk itu, nalar harus ditumpulkan, dinabobokkan dan ditundukkan di bawah dominasi dunia insting dan semuainsting terus digelorakan sedemikian rupa sehingga dapat menjadi prinsip operasional dalam hidup dan karya individu. Dewasa ini, peradaban teknologis memasuki *verdinglichungs* proses,<sup>18</sup> sebuah proses reifikasi nalar yang sangat sistematis.

Proses reifikasi nalar yang terjadi secara massif, intensif dan struktural dalam hidup harian bermaksud menciptakan *consumer society*<sup>19</sup> – masyarakat konsumen atau sekumpulan manusia rakus yang akan melahap apa pun yang ada di sekitarnya tanpa lagi sanggup bertanya tentang kegunaannya. *Sarana-sarana produksi barang*

<sup>17</sup> *Ibid.*, 1

<sup>18</sup> Id., *Reason and Revolution: Hegel and The Rise of Social Theory*, London & New York: Routledge, 2000, 279.

<sup>19</sup> Istilah dan arti *Consumer Society* mengacu pada karya Jean Baudrillard, *op cit* dan Herbert Marcuse dalam *Counter revolution and Revolt*, Boston: Beacon, 1972, 16.

*dan jasa yang diproduksi, – tegas Herbert Marcuse – ‘menjual’ atau menekan sistem sosial sebagai suatu keseluruhan. Sarana transportasi dan komunikasi massa, komoditas untuk akomodasi, makanan dan pakaian, luaran industri hiburan dan informasi yang tidak terkendali menyertakan sikap dan kebiasaan yang diresepkkan, reaksi intelektual dan emosional tertentu yang mempertalikan para konsumen secara nyaman dengan produsen dan melalui produsen dengan segala hal yang lain.*<sup>20</sup>

Kreasi masyarakat dan manusia konsumen memang perlu disikapi secara kritis dan bijak. Yang diawasi dan dicermati bukanlah konsumsi sebagai konsumsi, melainkan beragam kepentingan ideologis yang ada di balik konsumsi. Dipandang dari perspektif ekonomi, tingkat konsumsi masyarakat memantulkan daya beli warga atau salah satu petunjuk bahwa aktivitas jual-beli, perdagangan dan ekonomi bertumbuh serta meningkat secara kontinyu. Dengan kata lain, daya konsumsi suatu masyarakat menandakan bahwa relasi antara penawaran dan permintaan, produksi dan konsumsi masih seimbang dan terjaga, sehingga tidak perlu takut akan terjadi krisis ekonomi.

Jika daya konsumsi masyarakat tersebut dikaji dari aspek lain dan diterapkan beberapa kriteria yang bertalian dengan kebebasan, realisasi diri, keadilan, solidaritas, tanggung jawab dan penghargaan terhadap manusia, maka akan muncul fenomena dan makna yang berbeda sekali. Ternyata kemampuan konsumsi masyarakat menyembunyikan persoalan kemanusiaan, politik dan ideologis yang serius, sehingga narasi yang muncul dapat bertentangan dengan optimisme ekonomi. Artinya, kuantitas dan kualitas kebutuhan dan pola pemenuhannya yang melampaui tingkat normal selalu diprakondisikan, sehingga daya konsumsi masyarakat secara implisit menampilkan alur kebijakan dan kepentingan kekuasaan.

Daya konsumsi masyarakat tidak menggambarkan secara obyektif keperluan riil individu, tetapi menyembunyikan kebijakan, strategi dan kepentingan regim penguasa *status quo*. Dengan demikian, makna konsumsi telah terdistorsi dan terdeviasi dari muatan aslinya sebagai pemenuhan kebutuhan hidup ke pemenuhan kepentingan kelas penguasa, sehingga dunia kebutuhan dan pemuasannya berada dalam ranah ideologi dan berciri historis. Sekarang ini semua kebutuhan dan pemuasannya memuat arti dan fungsi sosial, ditentukan oleh kekuatan eksternal dan *ruling class* yang sama sekali berada di luar kontrol individu manapun.<sup>21</sup> Jadi, makna konsumsi dalam dunia modern-kontemporer sudah melampaui realitasnya sebagai pemenuhan kebutuhan yang disyaratkan tubuh untuk hidup secara wajar, sehat dan

<sup>20</sup> Herbert Marcuse, *One-Dimensional Man...*, 11-12.

<sup>21</sup> *Ibid.* 4.

berkecukupan.

Melalui beragam cara dan upaya, rakyat jelata dicegah tumbuh serta berkembang menjadi pribadi yang cerdas-bernas-kritis dan produktif. Mereka terus dibujuk, dirayu, digoda dan direkayasa sedemikian rupa sebagai robot-robot bernyawa supaya terus lapar dan dahaga dengan berbagai program dan propaganda yang ditransmisikan secara sistematis lewat media komunikasi massa. Dengan menciptakan litani kekurangan diri atas nama ketenaran, kemewahan, ketampanan, kecantikan, keperkasaan (secara seksual), intimitas, keakraban dan semua nilai ideal-adiluhung dan desain resep magis *produk therapy*, kekuasaan status quo menciptakan individu sebagai binatang pelahap dan masyarakat konsumen.

### **Alienasi Konsumsi**

Gagasan konseptual tentang kreasi manusia pelahap (*homoconsumptionis*) dan masyarakat konsumen (*consumer society*) global oleh regim status quo mendapat penegasan dari suara yang berasal dari luar ranah politik-ekonomi dan kultural, yaitu Paus Fransiskus. Beliau memperlihatkan praksis politik kekuasaan global dewasa ini yang berupaya membangun manusia dan negara yang konsumeristik tanpa kesadaran kritis. *Berbagai mekanisme ekonomi aktual mendorong suatu kegusaran konsumsi, tetapi hasilnya bahwa konsumsi yang lepas kendali, dipadu dengan kesenjangan, membahayakan jalinan sosial secara berlipat-ganda. Dengan cara itu disparitas sosial akan melahirkan kekerasan...Beberapa orang berpuas diri dengan menyalahkan kaum miskin dan negara-negara miskin atas semua kesulitan mereka, dengan generalisasi yang kasar, dan berandai-andai menemukan solusi dalam suatu 'edukasi' yang menenangkan dan mengubah mereka menjadi makhluk yang jinak dan tidak ofensif.*<sup>22</sup>

Konsekuensi dari politik kekuasaan status quokontemporer yang membangun otoritas, menjustifikasi eksistensi dan melanggengkan dominasi dengan menciptakan manusia dan masyarakat yang konsumtif adalah kehadiran sebuah alienasi baru. *Kadang kala kita keras hati dan kepala batu, kita lupa, kita bersenang-senang, kita berekstasi dengan peluang maha besar konsumsi dan distraksi yang ditawarkan masyarakat ini. Dengan ini dihasilkan suatu **spesiesalienasi** yang menimpa semua, karena 'teralienasi suatu sosietas yang, dalam beragam bentuk organisasi sosial, produksi dan konsumsinya, membuat sulit realisasi donasi ini dan formatio perwujudan solidaritas antar-manusia'.*<sup>23</sup>

Alienasi baru yang sedang melanda manusia dan masyarakat hedonis-

<sup>22</sup> Papa Francesco, *Evangelii Gaudium. Esortazione apostolica*, (intr. Mons. Marcello Semeraro), Città del Vaticano: San Paolo, 2013, No. 60, h. 86.

<sup>23</sup> Ibid.,No. 196, 210. *Garis tebal dari penulis.*

konsumeristik kontemporer dapat kita namakan dengan **ALIENASI KONSUMSI**<sup>24</sup> dan semboyannya ialah *consumo, ergo sum*.<sup>25</sup> Dalam peradaban dewasa ini konsumsi bukan lagi sekedar serapan (penggunaan dan penikmatan) produk oleh individu dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan demi bertahan hidup semata. Namun, konsumsi telah transformasi sebagai instrumen *neo*-kolonialisme dan *neo*-imperialisme serta *locus* untuk mendominasi dan mengeksploitasi semua sumber daya alam dan manusia untuk menjaga dan melanggengkan kekuasaan. Jadi, konsumsi telah menjadi sebuah doktrin dan sistem ideologi bernama KONSUMERISME.

*Credo* konsumerisme disempurnakan dengan hedonisme. Hedonisme merupakan sebuah paham dan praksis hidup yang berpusat pada kesenangan (*hedone*): semua orang menginginkan kesenangan dalam setiap langkah hidupnya. Kebenaran doktrin hedonis dibuktikan dari fakta dan realita bahwa semua orang sepanjang jaman selalu mencari kesenangan dan menghindari kesakitan. Jadi, kesenangan adalah prinsip dan sekaligus tujuan hidup manusia.

Secara historis hedonisme dipelopori oleh Aristippos dan dilanjutkan oleh Epikuros serta para penganutnya. Aristippos mengatakan: *Bagiku, saya menempatkan diri dalam sekelompok orang yang ingin melewati hidupnya dengan cara yang paling mudah dan sebisa mungkin menyenangkan....Petunjuk bahwa kesenangan merupakan tujuan adalah satu fakta yang begitu akrab bagi kita sejak kecil tanpa perlu dipilih, tetapi sudah berlangsung begitu saja dan ketika terjadi, kita tidak mencari yang lain lagi dan tidak pula menjauhkan diri seperti kalau merasa sakit.*<sup>26</sup> Dengan tekanan yang berbeda Epikuros menjelaskan: *Kita berkeyakinan bahwa kesenangan adalah prinsip dan tujuan hidup sederhana, karena kita mengenalnya sebagai kebaikan pertama dan bagi kita adalah bawaan sedari lahir. Padanya kita mengambil inspirasi untuk setiap pilihan dan penolakan, serta kita memilih setiap kebaikan atas dasar rasa senang dan sakit.*<sup>27</sup>

Penguasa dunia kontemporer sadar bahwa menggembar-gemborkan konsumerisme tanpa kesenangan dan kepuasan sama dengan memasak sayur tanpa garam. Orang akan tertarik, terobsesi dan bahkan berani berkorban untuk membeli, memakai dan menggunakan suatu produk hanya ketika memberikan kepuasan-kenikmatan dalam segala dimensi kehidupan. Dengan kata lain, konsumsi harus memberikan nilai tambah dan superioritas tertentu kepada konsumen. Karena itu, penguasa memperkenalkan dan mempromosikan beraneka macam nilai ideal yang

<sup>24</sup> Dr. Valentinus, *op cit.*, 229.

<sup>25</sup> *Ibid.*, 233

<sup>26</sup> Giovanni Reale, *Storia della Filosofia Antica*, vol. I, Milano: Vita e Pensiero, 1997, 411,412.

<sup>27</sup> Epicuro, *Lettera sulla Felicità, a cura di Angelo Pellegrino*, Torino: Einaudi, 2012, 9.

menempel pada produk dan saat mengkonsumsinya.

Nilai-nilai ideal itu disimpulkan dalam konsep “TER” dan “PALING” yang diwartakan siang dan malam melalui media propaganda supaya terjadi identifikasi langsung antara subyek dengan produk yang dikonsumsi. Jika seseorang membeli dan memakai produk tertentu, maka ia akan menjadi orang yang terpandang, terseksi, tercantik, terkaya, paling menarik, paling perkasa, paling tampan, paling mempesona di lingkungannya, komunitasnya, negaranya dan sejangad raya. Jadi, harkat dan martabat manusia dewasa ini disamakan dengan beragam produk yang dikonsumsi.

Bertitik tolak dari identifikasi subyek dengan produk yang dikonsumsi, maka tampak jelas bahwa dewasa ini dunia kebutuhan dan semua pemenuhannya berkarakter ideologis. *Bahan pangan, kesenangan, hiburan, barang, perhiasan, lokasi hunian dan hiburan, hobi, kartu kredit dan lain sebagainya dialih-gunakan sebagai instrumen manipulasi dan eksploitasi, sarana alienasi dan neo-kolonialisme, obyek pertarungan sosio-politis-kultural-ideologis. Dalam pertarungan ini, tekanan bukan lagi pada substansi kebutuhan atau produk in se, melainkan pada aksiden, label, merek, prestise, kesan dan status sosial.*<sup>28</sup>

Konsumsi telah mengalienasikan manusia dari dirinya sendiri, sesama dan dunia sekitarnya. Individu mengenal diri, sesama dan dunia sekitar dengan memakai kategori produk yang dikonsumsi menurut sabda para “nabi kontemporer”. Mereka terus meyakinkan individu di seluruh dunia secara teliti, sistematis, intensif dan terstruktur bahwa hakikat setiap orang terletak pada tindakan melahap semua produk yang telah disediakan melalui berbagaislogan ideologis: *Yang direkomendasikan oleh dokter, Telah teruji di laboratorium, Extra kuat, Kualitas extra, Enervit, di mana olah raga berjaya, Orang pintar minum Tolak Angin, Jadilah orang pertama yang memiliki produk ini.*<sup>29</sup> Jadi, konsumerisme-hedonisme merongrong kemanusiaan, memandulkan kesadaran, memudarkan kesetiakawanan sosial, melemahkan nilai-nilai etis-moral, mengganggu kesehatan, dengan menggelorakan insting dan emosi, sehingga manusia dikembalikan ke status generisnya sebagai binatang.

Sayang sekali bahwa orang-orang yang sadar akan spesies baru alienasi: *alienasi konsumsi masih amat sedikit. Padahal, alienasi konsumsi merupakan taraf tertinggi alienasi dan eksploitasi terhadap manusia, justru karena di dalamnya dimaklumkan secara terbuka kultus pada insting dan irrasionalitas. Kebebasan yang disodorkan penguasa membuat subyek kehilangan kesadaran, memabukkan individu dan masyarakat sehingga mereka dengan sukarela mengantri untuk dijadikan sebagai obyek terjajah. Kaum terjajah ini pun menghidupi*

<sup>28</sup> Dr. Valentinus, *op cit.*, 227.

<sup>29</sup> *Ibid.*, 79, 122, 170.



*menu dan solusi yang disodorkan penguasa dengan kesadaran bahagia dan akhirnya perilaku menyimpang ini diterima dengan mulus dan dihayati dengan tulus.*<sup>30</sup> Sungguh, manusia dan masyarakat kontemporer sedang mengalami alienasi dan eksploitasi yang menyenangkan.

### **Quo Vadis Indonesia**

Ketidaktahuan, ketidakpahaman dan ketidakacuhan terhadap cara dan rupa baru alienasi, manipulasi dan eksploitasi atau bahasa *keren*-nya *neo*-kolonialisme dan *neo*-imperialisme terjadi juga di Indonesia. Orang Indonesia yang peduli dan bersikap kritis terhadap situasi Indonesia sebagai negara konsumen secara kuantitatif masih super-sedikit. Upaya membangun bangsa Indonesia yang otonom dan berdaulat hanya sebatas wacana dan bualan politik semasa kampanye politik.

Peta jalan yang sudah tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk membangun sebuah masyarakat, bangsa dan negara yang produktif, inovatif dan kreatif tidak pernah ditindaklanjuti dalam langkah dan tindakan konkrit. Amanat Konstitusi tetap tinggal dan kita perlakukan sebagai warisan indah dari para Pendiri Bangsa, bukti historis bahwa negeri Nusantara ini pernah memiliki orang-orang hebat dan berwawasan luas serta mimpi indah penghias tidur, tetapi bukan dianggap amanat, perintah dan kewajiban yang harus diwujudkannyatakan.

Asumsi tersebut di atas didasarkan pada fakta dan realita bahwa setelah 71 tahun Indonesia merdeka, Indonesia tetap tinggal sebagai pasar bagi produk negara lain, jumlah orang Indonesia yang meyakini dan mencintai produk dalam negeri hanya masyarakat miskin yang tidak punya uang alias karena terpaksa keadaan. Belum lagi, sebagian besar pemimpin dan aparatur negeri ini berlaku sebagai *broker* atau pegadai kekayaan Nusantara untuk kepentingan diri sendiri dan kaum kerabatnya semata, korupsi merajalela di semua tingkat birokrasi dan kepemimpinan nasional mulai dari level terbawah hingga tertinggi. Semua dana yang dianggarkan menjadi bancakan kalangan penguasa-pengusaha yang menguasai negeri ini, sehingga pembangunan nasional tersendat-sendat dan hampir tanpa hasil yang nyata.

Masuk akalkah jika hingga hari ini masih ada puluhan ribu kampung yang tanpa listrik dan jalan raya, jutaan orang hidup digubuk-gubuk dan tempat-tempat kumuh sekedar untuk bertahan hidup, bahkan menjalani ritual bergilir tidur karena hanya punya satu tempat tidur di dalam gubuk kumuhnya? Semua potret buram ini

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, 231.

bukan cerita, tetapi fakta yang ada di sekitar kita. Dengan kata lain, Indonesia masih belum merdeka; kita tetap terjajah seperti semula. Hanya rupa, cara dan pelakunya yang sudah berbeda dari cara, rupa dan pelaku sebelumnya. Maka, *Quo vadis, Indonesia?*

## Penutup

Perilaku penguasa sama dengan perilaku bunglon, yaitu berubah bentuk dan cara sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang berlangsung. Ketika peradaban kontemporer menekankan penghargaan yang tinggi terhadap harkat dan martabat manusia, para pemangku kekuasaan global pun ikut mengubah pola dominasi, eksploitasi dan alienasi supaya tidak bertubrukan dengan kesadaran aktual tersebut. Akibatnya pola dominasi, eksploitasi dan alienasi mengalami metamorphosis.

Dari sekian bidang kehidupan yang memungkinkan kekuasaan *status quo* untuk terus melakukan dominasi, eksploitasi dan alienasi tanpa perlawanan, maka konsumsi produk merupakan ranah yang memberi ruang dan peluang terbaik. Akibatnya, makna konsumsi produk pun berubah dari sekedar upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat niscaya menjadi tempat dan sarana untuk melindungi dan melanggengkan kekuasaan *status quo* atas seluruh masyarakat. Kita memasuki era rekayasa kebutuhan, sehingga lahirlah distingsi tentang kebutuhan sejati (*trueneeds*) dan kebutuhan semu (*falseneeds*).

Manipulasi kebutuhan mengalir dari pengetahuan dan desain yang cerdas tentang nilai-nilai yang dominan bagi manusia di era masyarakat industri maju kontemporer. Karena itu, penguasa kapitalis dalam rangka melanggengkan dominasi, eksploitasi dan alienasi mengintrodusir sebuah perspektif dan paradigma baru, yaitu manusia dan masyarakat yang konsumeristik dan hedonis. Manusia pun direduksikan pada makhluk pelahap dan penikmat murni, di mana hakikat kemanusiaannya diubah dari *animal rationale ke animal consumptionis*. Jadi, manusia kontemporer menghidupi sebuah gaya hidup yang menyenangkan, makmur secara material dan tentram, tetapi secara hakiki berada dalam administrasi totalitarian yang sungguh tidak manusiawi. Apakah manusia Indonesia telah menyadari metamorphosis dominasi, eksploitasi dan alienasi terbaru ini? Waktu akan menjawab dan menjadi saksi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Baudrillard, Jean. *Consumer Society: Myths & Structures*, London-Thousand Oaks-New Delhi, Sage Publications, 1998.
- Borgmann, Albert. *Technology and the Charakter of Contemporary Life. A Philosophical Inquiry*, Chicago-London: The University of Chicago Press, 1984.
- Dr. Valentinus, *Kritik Ideologi. Menyibak Selubung Ideologi Kapitalis dalam Imperium Iklan*, Yogyakarta: Kanisius, 2011.
- Ellul, Jacques. *The Technological Society*, New York: Vintage, 1964.
- Epicuro, *Lettera sulla Felicità, a cura di Angelo Pellegrino*, Torino: Einaudi, 2012.
- Francesco, Papa. *Evangelii Gaudium. Esortazione apostolica*, (intr. Mons. Marcello Semeraro), Città del Vaticano: San Paolo, 2013.
- Harris, Richard Jackson. *A Cognitive Psychology of Mass Communication*, Mahwah-New Jersey: LEA, 2004.
- Heidegger, *Die Technik und die Kehre*, Tübingen: Pfullingen, 1922.
- Herbert Marcuse, *Counterrevolution and Revolt*, Boston: Beacon, 1972.
- \_\_\_\_\_, "Einige gesellschaftliche Folgen moderner Technologie" dalam Herbert Marcuse, *Schriften (Bd. III. Aufsätze aus der Zeitschrift für Sozial-forschung 1934-1941)*, Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1979.
- \_\_\_\_\_, *One-Dimensional Man: Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society*, Boston: Beacon, 1991.
- \_\_\_\_\_, *Reason and Revolution: Hegel and The Rise of Social Theory*, London & New York: Routledge, 2000.
- Marx-Engel, *Werke (Bd. III Deutsche Ideologie)*, Berlin: Dietz, 1958.
- Mumford, Lewis. *Technics and Civilization*, New York: Harcourt, 1934.
- Reale, Giovanni. *Storia della Filosofia Antica*, vol. I, Milano: Vita e Pensiero, 1997.
- Saeng, Valentinus. *Herbert Marcuse. Perang Semesta Melawan Kapitalisme Global*, Jakarta: Gramedia, 2012.

## POLITIK-EKONOMI INDONESIA DI ERA GLOBALISASI <sup>1</sup>

Oleh I Basis Susilo<sup>2</sup>

Abstrak :

*Makalah ini membahas pentingnya pemerintah yang amat kuat dalam menghadapi globalisasi dan neoliberalisme. Dimulai dengan pembahasan beberapa konsep seperti globalisasi, liberalisme, neoliberalisme, dampak dari berkelindannya globalisasi dan neoliberalisme, penentang-penentang globalisasi dan liberalisme, makalah ini terutama membahas soal eksistensi negara-bangsa dalam menghadapi dinamika globalisasi. Diasumsikan bahwa walau negara-bangsa ditantang dan dilemahkan oleh aktor-aktor non-negara, negara-bangsa masih bisa berperan penting dan berpengaruh dalam dinamika globalisasi karena hanya negara-bangsa yang punya kedaulatan dan kekuasaan mengatur rakyat di wilayah kedaulatannya itu. Makalah ini ditutup dengan saran-saran bagaimana secara politik-ekonomi identitas Indonesia dibentuk untuk bisa menyiasati dan menjadikan globalisasi strategis bagi kemajuan politik-ekonomi Indonesia. Intinya adalah bagaimana membentuk pemerintah Indonesia yang sangat kuat secara demokratis dan didukung oleh masyarakat sipil sehingga mampu melindungi rakyat dari pengaruh-pengaruh negatif globalisasi dan neoliberalisme.*

**Kata-kata Kunci:** *globalisasi, liberalisme, neoliberalisme, negara-bangsa, pemerintah kuat, Indonesia.*

### Pengantar

Globalisasi itu bersifat ambivalen. Di satu pihak, globalisasi menimbulkan pengaruh negatif berupa pengabaian dimensi-dimensi non-ekonomi dari masyarakat, marjinalisasi dan kesenjangan sosial-ekonomi dalam masyarakat dan meningkatkan kegiatan terorisme dan radikalisasi. Di lain pihak, globalisasi menimbulkan pengaruh positif berupa potensi memperbesar pertumbuhan ekonomi dan produksi kekayaan secara makro, menawarkan kesempatan dan peluang orang dan kebudayaan yang berbeda-beda untuk menjadi lebih dekat satu sama lain. Peran dan fungsi negara-bangsa dalam globalisasi juga bisa lemah atau kuat tergantung perpektif yang mana yang kita pakai dalam melihat globalisasi. Memang globalisasi melemahkan peran negara-bangsa, tetapi ia juga memberi peluang negara-bangsa berperan penting dan

<sup>1</sup> Makalah untuk Diskusi Kelas dalam Simposium “Membentuk Identitas Indonesia dalam Arus Globalisasi” di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Sabtu, 2 April 2016.

<sup>2</sup> Dosen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya. Surel: [ib\\_susilo@yahoo.com](mailto:ib_susilo@yahoo.com)

berpengaruh dalam dinamika globalisasi itu.

Dimulai dengan pembahasan beberapa konsep seperti globalisasi, liberalisme, neoliberalisme, dampak dari berkelindannya globalisasi dan neoliberalisme, penentang-penentang globalisasi dan liberalisme, makalah ini terutama membahas soal eksistensi negara-bangsa dalam menghadapi dinamika globalisasi. Diasumsikan bahwa walau negara-bangsa ditantang dan dilemahkan oleh aktor-aktor non-negara, negara-bangsa masih bisa berperan penting dan berpengaruh dalam dinamika globalisasi karena hanya negara-bangsa yang punya kedaulatan dan kekuasaan mengatur rakyat di wilayah kedaulatannya itu.

Makalah ini ditutup dengan saran-saran bagaimana secara politik-ekonomi identitas Indonesia dibentuk untuk lebih bisa menyiasati dan menjadikan globalisasi strategis bagi kemajuan politik-ekonomi Indonesia. Intinya adalah bagaimana membentuk pemerintah Indonesia yang sangat kuat secara demokratis dan didukung oleh masyarakat sipil sehingga mampu melindungi rakyat dari pengaruh-pengaruh negatif globalisasi dan neoliberalisme.

### **Globalisasi, Liberalisme dan Neoliberalisme**

Untuk memperjelas persoalan yang kita bahas di sini, diperlukan kesepakatan tentang beberapa konsep utama, yaitu globalisasi, liberalisme dan neoliberalisme. Menurut M. Mohtar Mas' oed, globalisasi pada dasarnya adalah proses penciptaan dan pengintegrasian ekonomi global di bawah hegemoni kapitalis.<sup>3</sup> Semangat globalisasi itu pada dasarnya adalah perdagangan bebas untuk barang dan jasa, kebebasan sirkulasi kapital, serta kebebasan investasi. Menurut Martani Huseini, globalisasi adalah proses transformasi global yang makin nyata di pelbagai bidang (politik, budaya, dan ekonomi), berupa pengintegrasian pasar barang, jasa investasi serta jaringan dan organisasi.<sup>4</sup> Sementara menurut Thomas L. Friedman, proses globalisasi itu sebenarnya bukanlah hal yang baru, tetapi sudah berlangsung sejak satu-dua abad lalu, hanya tingkat dan skalanya meningkat hebat sejak dasawarsa 1980-an seiring dengan kemajuan pesat di bidang teknologi komunikasi dan informasi, dan kemenangan kekuatan kapitalis atas kekuatan sosialis/komunis.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Prof. Dr. Mohammad Mohtar Mas' oed, "Tantangan Internasional dan Keterbatasan Nasional: Analisis Ekonomi-Politik tentang Globalisasi Neo-Liberal," Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, 19 Oktober 2002.

<sup>4</sup> Prof. Dr. Martani Huseini, "Mencermati Misteri Globalisasi: Menata Ulang Strategi Pemasaran Internasional Indonesia melalui Pendekatan Resource-Based," dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, No 5/Tahun II, Desember 2001, 180.

<sup>5</sup> Thomas L. Friedman, *Memahami Globalisasi: Lexus dan Pohon Zaitun*, Penerjemah Tim Penerbit ITB, Penerbit ITB, Bandung, 2002>2000, 13-14.

Bila globalisasi yang berlangsung sejak satu-dua abad lalu itu lebih berkelindan dengan paham liberalisme dan kolonialisme, maka globalisasi yang tingkatnya menaik dan skalanya meluas di kuartal terakhir abad ke-20 itu berkelindan dengan kapitalisme dan paham neoliberalisme, yang didasari oleh Konsensus Washington 1989 yang terdiri dari 10 poin: (1) Disiplin Anggaran Pemerintah, (2) Pengalihan Subsidi ke Sektor Publik, (3) Reformasi Pajak, (4) Bunga sesuai Pasar, (5) Nilai Tukar Positif, (6) Liberalisasi Pasar, (7) Perlakuan sama Investasi Asing/Nasional, (8) Privatisasi BUMN, (9) Deregulasi, dan (10) Jaminan Hak Kepemilikan.

Neoliberalisme berbeda dari liberalisme dalam tiga hal. Pertama, bila liberalisme adalah paham pengaturan kegiatan ekonomi yang beda (dan bebas) dari kegiatan-kegiatan nonekonomi (seperti politik, kebudayaan, sosial), neoliberalisme, sebagaimana dinyatakan B. Herry-Priyono, adalah paham ekonomisasi seluruh dimensi hidup manusia dan masyarakat. Artinya, kalau liberalisme hanya menghendaki pemisahan (dan pembebasan) kegiatan ekonomi dari kegiatan bidang-bidang nonekonomi, maka neoliberalisme memaksakan kegiatan bidang-bidang nonekonomi itu tunduk, mengikuti dan melayani kegiatan ekonomi.<sup>6</sup> Kedua, bila liberalisme masih mendasarkan pada ekonomi riil, neoliberalisme mengutamakan dominasi sektor ekonomi finansial atas sektor ekonomi riil; di mana ekonomi tidak lagi dianggap sebagai proses pengadaan dan distribusi barang dan jasa kebutuhan hidup riil, namun sebagai proses transaksi “uang-atas-uang-dan-untuk-uang” dengan seluruh sifat virtualnya.<sup>7</sup> Ketiga, bila liberalisme menuntut negara tidak ikut mengurus kegiatan ekonomi, neoliberalisme justru berusaha menggunakan negara untuk memfasilitasi dan melayani proses ekonomisasi kehidupan manusia melalui pembuatan dan pemberlakuan legislasi yang memudahkan dan menguntungkan liberalisme.

### **Perspektif-perspektif Globalisasi**

Terhadap globalisasi David Held *et al.* menunjukkan tiga perspektif: skeptisis, hiperglobalis, dan transformasionalis. Globalisasi dilihat dari sembilan isu utamanya: apa yang baru, fitur dominan, kekuasaan pemerintah nasional, penggerak, pola stratisikasi, motif dominan, konseptualisasi, lintasan sejarah, dan argumennya. Di dalam perspektif skeptisis, posisi negara-bangsa, misalnya, diperkuat atau ditingkatkan (*reinforced and enhanced*), karena globalisasi pada dasarnya adalah proses

<sup>6</sup> B. Herry-Priyono, “*Ekonomi dan Budaya yang Menjelma*,” makalah untuk Pernas FMKI di Surabaya, 27-30 September 2007.

<sup>7</sup> *Ibid.*

internasionalisasi yang didukung negara (*state-backed internationalization*). Dalam perspektif hiperglobalis, posisi negara menurun dan tergerus (*declining and eroding*), karena globalisasi mengakhiri negara-bangsa (*the end of nation-state*). Dalam perspektif transformasionalis, posisi negara dibentuk ulang dan direstruktur (*reconstituted and restructured*); karena pada dasarnya globalisasi mentransformasi politik dunia (*transforming world politics*).<sup>8</sup>

Tabel 1  
Tiga Perspektif Globalisasi menurut Held et al.

Issues	Hyperglobalist	Scepticist	Transformationalist
What New?	Global Age	Trading Blocs	Global Interconnectedness
Dominant Features	Global Capitalism/Global Governance	World Less Interdependence than 1890s	Thick Globalization
Power of National Government	Declining or Eroding	Reinforced or Enhanced	Reconstituted, Restructured
Driving Forces of Globalization	Capitalism and Technology	State and Market	Combined forces of Modernity
Pattern of Stratification	Erosion of Old Hierarchies	Increased Marginalization of South	New Architecture of World Order
Dominant Motif	McDonald, and Madonna, etc.	National Interests	Transformation of Political Community
Conceptualization of Globalisation	Reordering of Framework for Human Action	Internationalization and Regionalization	Reordering of Interregional Relations, Action at Distance
Historical Trajectory	Global Civilization	Regional Bloc/Clash of Civilization	Indetermined Global Integration and Fragmentation
Summary Argument	The End of Nation-States	States-backed Internationalization	Transforming World Politics

Sumber: Held *et al.* (1999: 10).

<sup>8</sup> David Held et al., "Introduction," in *Global Transformations: Politics, Economics and Culture*, Stanford University Press, Stanford, 1999, 10.

Sementara, Joko Susanto melihat globalisasi dengan tiga perspektif berbeda: kontemporeris, historis dan modernis. Globalisasi dilihat dari enam isu utama: kapan mulai, pemantik sejarah, locus kritis, agen penggerak, modus hubungan, dan lintasan (*trajectori*). Dalam perspektif modernis, misalnya, negara mempunyai peran dan pengaruh penting dalam menentukan dinamika kehidupan masyarakat di era globalisasi.<sup>9</sup>

**Tabel 2**  
Tiga Perspektif Globalisasi menurut Susanto

Isu	Kontemporeris	Historis	Modernis
Date	1970s and After	1400s and After	1700s and After
Historical Precursor	Information Revolution	Capitalism	Modernity
Critical Locus	Industrial	Economy	Politics
Driven Agent	Society	Market	State
Mode of Relations	Flexibility	Domination	Reflexivity
Trajectory	Information Society	Empire/New Imperialism	Global Democracy

Sumber: Susanto (2015).

Kendati perspektif hiperglobalis dan kontemporeris menjelaskan bahwa negara tidak lagi relevan, namun perspektif skeptisis dan transformasionalisnya Held et al. maupun perspektif historis dan modernisnya Susanto sama-sama menjelaskan bahwa negara masih bisa menentukan dinamika politik-ekonomi globalisasi.

### **Pengaruh Globalisasi: Negatif dan Positif**

Globalisasi, sebagaimana dikemukakan oleh Panitia Simposium ini, menghasilkan ketidakadilan dan reduksi terhadap konsep kemanusiaan, kendati memang ada fakta bahwa kegiatan ekonomi di era globalisasi dan neoliberalisme ini produksi barang dan jasa yang jauh lebih banyak, dan bahwa akses terhadap barang dan jasa itu tidak terbuka bagi seluruh masyarakat, yang nyata-nyata lebih memarjinalkan banyak orang. Sementara reduksi terhadap konsep kemanusiaan hanya sebagai *homo economicus* “menimbulkan berbagai masalah sosial: konsumerisme dan

<sup>9</sup> Joko Susanto., “*Handouts Kuliah Pengantar Globalisasi*,” 10 Maret 2015, FISIP Universitas Airlangga, Surabaya.



konsumptivisme, kemiskinan dan kesenjangan kaya-miskin serta semakin parahnya kerusakan lingkungan hidup.”<sup>10</sup>

Globalisasi yang berlangsung akhir-akhir ini, dibantu teknologi komunikasi dan informasi, secara hakiki masih merupakan proses marjinalisasi dan eksploitasi terutama di masyarakat-masyarakat di negara-negara berkembang. Karena teknologi komunikasi dan informasi mempercepat proses globalisasi, marjinalisasi dan eksploitasi atas masyarakat di negara-negara berkembang pun berlangsung lebih cepat daripada masa-masa sebelumnya.

Dengan cara lihat lain, globalisasi membantu proses penyedotan (*drainase*) sumberdaya dari masyarakat ke masyarakat lain. Proses drainase itu tetap berlangsung hingga kini, bahkan lebih sistematis dan masif.<sup>11</sup> Dua kutipan berikut kiranya cukup mendasari jawaban itu. Pertama, dari Robin Broad dan Christina M Landi: “*We examine other resources of continued South-to-North drain, namely the declining terms of trade suffered by the South, as well as human and natural resource flows.*”<sup>12</sup> Kedua, dari Martin Rochester: “[*Third World countries*] are being buffeted by forces from without and within which are undermining the ability of national governments to engage in purposive, goal-directed behavior and to achieve objectives.”<sup>13</sup> Secara makro dunia juga terjadi proses marjinalisasi: pada 1960, 1/5 kelompok terkaya menguasai 72,2 persen kekayaan dunia, 1/5 kelompok termiskin menguasai 2,3 persen kekayaan dunia; pada 1989, 1/5 kelompok terkaya menguasai 82,7 persen kekayaan dunia, sementara 1/5 kelompok termiskin cuma menguasai 1,4 persen kekayaan dunia.

Menurut Paus Johannes Paulus II,<sup>14</sup> secara ekonomi, globalisasi cenderung membawa bangunan ekonomi dunia yang tidak adil dan tidak manusiawi. Ia menyatakan sistem sekarang ini tidak menjamin distribusi barang yang adil di antara penduduk dunia. Yang terjadi adalah kekayaan yang diproduksi sering terkonsentrasi di tangan-tangan kelompok kecil orang, yang kemudian memperlemah kedaulatan negara-negara nasional. Keputusan mengenai masa depan di seluruh planet diambil hanya oleh sedikit negara. Beberapa negara memang bisa menyesuaikan keputusan itu dengan kepentingan rakyatnya, tetapi banyak negara lemah kesulitan dan harus mengorbankan rakyatnya dalam upaya menyesuaikan diri dengan keputusan itu.

<sup>10</sup> Panitia Simposium, “*Term of Reference Simposium Nasional ‘Membentuk Identitas Indonesia dalam Arus Globalisasi’*,” Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya, 2 April 2016.

<sup>11</sup> I. Basis Susilo, “*Renungan Kemerdekaan: Melindungi Rakyat dari Eksploitasi*,” Jawa Pos, 14 Agustus 2004.

<sup>12</sup> Robin Broad and Christina Melhorn Landi, “*Whither the North-South Gap?*,” *Third World Quarterly*, Vol 17, No 1, 1996

<sup>13</sup> Martin Rochester, dalam W. Andy Knight, “*Towards a subsidiary model for peacemaking and preventive diplomacy: Making Chapter VIII of the UN Charter operational*,” *Third World Quarterly*, Vol 17, No 1, 1996.

<sup>14</sup> I. Basis Susilo, “*Paus dan Globalisasi Kemanusiaan*,” Jawa Pos, 5 April 2005.

Struktur dan bangunan ekonomi dunia saat ini dikritik tegas pada Ensiklik 1988. Ia menyatakan perkembangan kemanusiaan diblok secara global oleh “struktur-struktur yang berdosa” (*“sinful structures”*). Motif dasar struktur-struktur ekonomi yang dominan adalah semata-mata pencarian laba dan kehausan akan kekuasaan atas kerugian martabat manusia. Ia juga menganggap globalisasi ekonomi telah berlangsung sebagai perusakan atas yang miskin, cenderung mendorong negara-negara miskin ke pinggirannya dalam hubungan ekonomi dan politik internasional. Globalisasi menjadi versi baru kolonialisme. Dalam kenyataan, kekayaan yang diproduksi sering mengarah ke sistem global yang dikuasai oleh beberapa pusat dalam tangan individu-individu swasta. Dan banyak negara di Dunia Ketiga tidaklah cukup kuat untuk menahan pusaran ekonomi pasar global. Bahkan Mei 2004, ia masih tegas menyatakan bahwa dalam proses globalisasi, jurang antara negara kaya dan miskin justru melebar.

Tetapi selain pengaruh negatif, ada juga pengaruh positifnya. Paus Johannes Paulus II menganggap globalisasi sebagai gejala yang ambivalen. Menurutnya, pada dasarnya globalisasi adalah proses yang dibuat manusia, dan ke arah mana globalisasi dibawa tergantung pada manusia juga. Karenanya, ia tidak begitu optimistis, walau juga tidak terlalu pesimistis. Ia melihat ada aspek positif dari globalisasi, tetapi ada juga banyak aspek negatif bahkan bahaya dari globalisasi. Ia sendiri mengatakan: “Globalisasi bisa berpotensi baik untuk kemanusiaan, tetapi juga bisa menjadi bencana sosial yang mencemaskan. Globalisasi secara apriori tidak bisa dikatakan baik atau buruk. Tergantung kita manusia yang membuatnya”. Aspek positif globalisasi dilihat dari potensinya memperbesar pertumbuhan ekonomi dan produksi kekayaan secara makro. Selain itu, globalisasi menawarkan kesempatan dan peluang orang dan kebudayaan yang berbeda-beda untuk menjadi lebih dekat satu sama lain. Pada Perayaan Hari Perdamaian Dunia, pada 1 Januari 2000 Paus berpesan: “Di samping pelbagai risikonya, globalisasi juga menawarkan kesempatan-kesempatan yang menakjubkan dan menjanjikan, tepatnya dengan suatu pandangan untuk memampukan kemanusiaan menjadi suatu keluarga utuh, yang dibangun atas nilai-nilai keadilan, persamaan dan solidaritas.”

### **Penentang Globalisasi**

Terutama terhadap pengaruh negatifnya, globalisasi menimbulkan gerakan-gerakan yang menentangnya. Dalam sejarah, berkelindannya globalisasi, liberalisme, kapitalisme dan kolonialisme mendapat tantangan kuat dari dua isme: komunisme dan nasionalisme. Komunisme cukup kuat dan berani menentang, tetapi toh akhirnya

harus kalah pada akhir 1980-an, sehingga sejak akhir millenium ke-20 itu, sebagaimana dinyatakan oleh Francis Fukuyama, sejarah sudah selesai dengan kemenangan kapitalisme atas komunisme. Nasionalisme cukup berhasil membebaskan banyak negara-bangsa di Asia dan Afrika pada pasca Perang Dunia II dan kini masih tetap bertahan di tengah-tengah globalisasi dan neoliberalisme. Nasionalisme menjadi alternatif dan tumpuan masyarakat-masyarakat lokal untuk berlandung dari ancaman dan penyedotan kekuatan dari luar itu. Konsep nasionalisme yang menghasilkan negara-negara bangsa baru pada pertengahan abad ke-20 di Asia dan Afrika pada dasarnya merupakan konsep yang mereaksi globalisasi dan liberalisme yang berlangsung pada waktu itu. Globalisasi dan liberalisme dengan menggunakan sistem kolonisasi dan penjajahan selama beberapa abad menggerakkan proses drainase di masyarakat-masyarakat Asia dan Afrika. Sumberdaya di masyarakat-masyarakat kolonial disedot secara sistematis dan mengalir ke negara-negara kolonialis.

Masih ada negara yang secara frontal menentang globalisasi dan neoliberalisme itu, seperti Korea Utara. Secara susah payah negara itu mencegah dinamika globalisasi masuk ke negerinya, dengan mengorbankan nasib ekonomi rakyatnya. Negara itu menjadi satu-satunya yang masih berkuat pada ultranasionalisme dan xenophobia.

Penentang globalisasi lain yang bisa disebut adalah jaringan terorisme dan radikalisme. Globalisasi mendorong menguatnya terorisme karena dua hal. Globalisasi meningkatkan kuantitas dan kualitas terorisme dalam dua cara.<sup>15</sup> Pertama, globalisasi membentuk masyarakat yang mempunyai sifat-sifat yang sangat cocok untuk berhasilnya aksi-aksi teror. Artinya, ciri-ciri khas kehidupan yang didorong kemajuan teknologi komunikasi dan informasi sangat membantu dan memudahkan cara kerja teroris. Kedua, globalisasi juga menyuburkan ladang bagi calon-calon teroris. Sebab, globalisasi menciptakan kondisi-kondisi yang sesuai bagi tumbuhnya keinginan untuk melakukan terorisme. Globalisasi pada dasarnya meningkatkan dan meluaskan proses marjinalisasi kehidupan masyarakat di negara-negara berkembang, baik secara ekonomis, sosial, politik, maupun psikologis. Sebagaimana dipercayai selama ini, perasaan kemiskinan dan ketidakadilan mengakibatkan orang mudah untuk diajak melakukan tindakan-tindakan agresif. Radikalisme akibat marjinalisasi ekonomi, sosial, psikologi, dan agama juga bermunculan di era globalisasi ini.

Selain terorisme dan radikalisme, penentang globalisasi lain adalah gerakan anti-globalisasi atau gerakan melawan globalisasi. Gerakan ini adalah gerakan sosial yang bergerak secara global yang kritis terhadap globalisasi kapitalisme korporat.

<sup>15</sup> I. Basis Susilo, "Globalisasi dan Terorisme," Jawa Pos, 7 Oktober 2004.

Gerakan ini menentang nafsu korporasi multinasional (MNCs). Pada 30 November 1999, gerakan ini menunjukkan eksistensinya dengan mengganggu Sidang WTO di Seattle, AS; dan pada 20 Juli 2001 berusaha membatalkan KTT G-8 di Genoa, Italia. Gerakan ini juga yang mengilhami gerakan Occupy Wall Street (OWS) pada 17 September 2011, yang pada dasarnya menentang ketidakadilan sosial dan ekonomi dunia yang disebabkan oleh makin tidak terkontrolnya pengaruh korporasi multinasional.

### **Negara-bangsa dan Globalisasi**

Posisi negara-bangsa bisa lemah dan kuat tergantung dari mana kita melihatnya. Sebagaimana di atas sudah dibahas, dalam perspektif hiperglobalis, negara-bangsa sudah tidak berkuat, bahkan mati, karena globalisasi membuat dunia ini tanpa batas (*borderless*), dan memunculkan aktor-aktor non-negara<sup>16</sup> yang pengaruhnya semakin kuat; tetapi dalam perspektif lain, seperti skeptisis, transformasionalis, historis dan modernis, negara-bangsa bisa menentukan dinamika politik-ekonomi globalisasi, karena negara-bangsa punya kedaulatan dan kekuasaan mengatur di dalam wilayah kedaulatannya itu.<sup>17</sup>

Ada dua opsi negara-bangsa dalam menghadapi globalisasi: menolak (*disosiasi*) atau menerima (*asosiasi*). Ada negara-bangsa yang mengambil opsi diasosiasi ternyata tidak berhasil dan secara ekonomi melemah. Misalnya, Tiongkok semasa Mao Tse-tung atau India sampai 1995 atau Korea Utara, Myanmar dan Uni Soviet (dulu). Indonesia pun diasosiasif pada era sebelum Orde Baru. Ketika Tiongkok dan India mengambil opsi asosiasi, maka dua negara besar itu menunjukkan kemajuan ekonomi, sehingga bisa meningkatkan kapasitas ekonominya dan sehingga bisa mengurangi secara signifikan pengangguran dan kemiskinan. Globalisasi dan opsi asosiasi menjadi satu-satunya keniscayaan yang sulit dibantah.

Namun, ketika opsi yang tersedia tinggal asosiasi, maka asosiasi itu tidak hanya berisiko untuk menyebabkan drainase/marjinalisasi serta menghadapi ancaman terorisme dan radikalisme dari dalam (lokal) maupun dari luar (internasional) sebagaimana dijelaskan di atas, namun juga menjanjikan perbaikan ekonomi

<sup>16</sup> Sebagaimana jumlah MNC bertambah dan makin kuat pengaruhnya, jumlah NGO dan INGO pun bertambah: di awal abad ke-20 hanya ada 170, di tahun 1980 ada 2.500. Sekarang, ada 5.500. Jadi 100 persen pada kurun 20 tahun. Karenanya, tahun-tahun dasawarsa 1980-an adalah titik penting dalam sejarah globalisasi.

<sup>17</sup> Tentang peran dan pengaruh negara lihat Peter Dicken, "A New Geo-Economy," dalam David Held and A McGrew, eds., *The Global Transformation Reader: An Introduction to the Globalization Debate*, Polity Press, Cambridge, 2003.

sebagaimana dilakukan negara-negara lain seperti Tiongkok dan India. Di sinilah letak pentingnya negara-bangsa untuk menjadikan globalisasi strategis bagi negara-bangsa, bukan hanya menjadi strategis bagi kekuatan-kekuatan ekonomi luar (terutama MNCs dan TNCs). Semakin kuat identitas ekonomi-politik suatu negara-bangsa, maka semakin mampu negara-bangsa itu mendiktekan dinamika ekonomi-politik dunia ke arah yang menguntungkan kemajuan ekonomi-politik negara-bangsa itu. Sebaliknya, semakin lemah identitas ekonomi-politik suatu negara-bangsa, maka semakin tidak berdaya negara-bangsa itu mengambil untung dan manfaat dari proses globalisasi.

Opsi asosiasi selektif itu mudah diwacanakan secara akademik, tetapi sulit dilaksanakan, karena MNCs dan kekuatan neoliberalisme punya sumber-sumber kekuasaan untuk mendiktekan agendanya untuk mempengaruhi (bahkan menguasai) pejabat-pejabat negara agar membuat legislasi yang memuluskan agenda neoliberalisme. Hanya negara yang pemerintahnya sangat kuat yang bisa mempertahankan kedaulatan dari pengaruh-pengaruh negatif globalisasi dan neoliberalisme itu. Ke dalam, pemerintah yang kuat itu mesti yang kuat dalam melindungi kepentingan rakyatnya yang masih lemah, bukan pemerintah yang mampu melawan rakyatnya sendiri. Ke luar, pemerintah yang kuat itu mesti mampu mendorong warganya yang cukup atau sudah kuat untuk lebih aktif bermain dan menentukan nasibnya demi keuntungan mereka.

### **Indonesia dalam Dinamika Globalisasi**

Indonesia mengalami proses penyedotan atau drainase dalam globalisasi di masa lalu. Tentang hal ini Bung Karno menulis di tahun 1933:

... bahwa Indonesia adalah terutama sekali tempat penanaman modal asing jang nistjaja hatsil-hatsilnja lalu dibawa keluar; bahwa Indonesia dus dihinggapi imperialisme jang terutama sekali mengekspor, imperialisme jang didalam masa jang 'normal' rata-rata dua kali djumlah harganja rezeki jang ia angkut keluar daripada jang ia masukkan kedalam; bahwa Indonesia dus sangat sekali menderita *drainage*.<sup>18</sup>

Pada saat globalisasi akhir-akhir ini, Indonesia pun mengalami proses drainase

<sup>18</sup> Ir. Soekarno, "*Mentjapai Indonesia Merdeka*" (1933) dalam *Dibawah Bendera Revolusi*, Panitia Penerbit *Dibawah Bendera Revolusi*, Jakarta, 1964.

yang bahkan meningkat. Bambang Budiono<sup>19</sup> mengatakan IMF, ADB, dan Bank Dunia mendikte bangsa kita --melalui syarat-syarat utang-- untuk melepaskan BUMN-BUMN strategis (listrik, air, migas, semen) ke tangan swasta asing, menaikkan tariff/harga listrik, air minum, minyak, bensin (yang merembet menjadi kenaikan harga kebutuhan hidup lainnya) melalui mekanisme pencabutan subsidi. Lembaga-lembaga internasional itu —yang notabene menjadi perpanjangan tangan perusahaan-perusahaan trans-nasional dan negara-negara imperialis, mendikte para pemimpin negara-bangsa kita untuk merubah atau membuat UU (misalnya migas, kelistrikan, sumberdaya air, keuangan negara) yang mendukung bekerjanya eksploitasi kekuatan ekonomi luar. Saham-saham perusahaan semen, minyak dan gas, telkom, listrik dan air minum kini mulai dirambah oleh perusahaan-perusahaan swasta asing dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) melarang negara (kita) membatasi masuknya modal asing, dan keluarnya keuntungan yang dikeruk perusahaan asing dari tanah air kita.

Selanjutnya Bambang Budiono<sup>20</sup> mengatakan pengaruh dan penguasaan asing semakin luas dan ekspansif melalui campurtangan mereka terhadap proses legislasi di lembaga legislatif maupun eksekutif negara kita. Di bidang komunikasi, misalnya, 80 persen XL dikuasai asing, 66,67 persen dikuasai Malaysia. Provider Axis juga dikuasai asing; di sektor agro-industri, 65 persen kecap dikuasai AS, Sariwangi 100 persen dikuasai Unilever, Aqua oleh Danone, Ades 100 persen Coca Cola, Dji Sam Soe diambil alih oleh Philip Morris; di sektor industri pun sebagian besar dikuasai asing, terutama AS; sektor perbankan tidak luput dari pengaruh asing, seperti Bank Danamon, UOB, NISP, Swadhesi, Indomax, dan seterusnya; dari sektor pemukiman, warga asing dapat memiliki rumah dengan hak sewa 90 tahun dengan tujuan investasi; dan di sektor-sektor lain, seperti telekomunikasi, laut, kesehatan, retail dan garmen sebanyak 50 persen dikuasai asing. Proses drainase itu menunjukkan bahwa negara-bangsa kita masih lemah.

Di era globalisasi ini, Indonesia juga harus menghadapi problem terorisme dan radikalisme itu. Masalahnya adalah bagaimana identitas politik-ekonomi negara-bangsa kita kuat sehingga tidak mudah dipengaruhi atau dikuasai oleh kekuatan-kekuatan luar itu. Bahwa kekuatan-kekuatan neoliberalis selalu berusaha untuk mempengaruhi negara kita agar membuat aturan yang memusahkan liberalisasi adalah fakta yang harus dihadapi, dan dicegah. Bahwa negara bisa diperkuat adalah

<sup>19</sup> Bambang Budiono, “Bahan Presentasi” untuk Diskusi ‘*Budaya Krisis Kepemimpinan dan Merosotnya Nilai Kebangsaan*,’ di Surabaya, 10 Januari 2004

<sup>20</sup> Bambang Budiono, “*Tantangan Bangsa Kita (Dulu) Kini dan Nanti*,” Notulensi Sarasehan Kebangsaan dan Kerakayatan di FISIP Universitas Airlangga, 21 Mei 2013.

sesuatu yang harus kita lakukan. Kalau negara kuat, maka tantangan bisa dijadikan peluang untuk memajukan ekonomi-politik masyarakat.

Karena dampak negatif globalisasi dan neoliberalisme itu berupa marjinalisasi, kesenjangan, radikalisme, dan terorisme, maka globalisasi dan neoliberalisme itu tentu mengganggu Indonesia sebagai negara-bangsa. Pancasila tentu terganggu dengan proses globalisasi yang digerakkan neoliberalisme itu. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, tentu terganggu dengan berkembang dan tidak terkontrolnya globalisasi dan neoliberalisme itu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, tentu juga terganggu karena pada dasarnya globalisasi dan neoliberalisme lebih mendorong keseragaman global dan tidak menghendaki adanya ikatan-ikatan sosial-ekonomi-politik-ideologi-budaya. Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, tentu juga tidak bisa berkembang dalam dinamika globalisasi yang digerakkan terutama oleh perusahaan-perusahaan multinasional yang operasionalnya tidak demokratis. Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, pun tentu tergerus oleh dinamika globalisasi dan neoliberalisme yang mendorong adanya kesenjangan dan marjinalisasi itu.

Namun, efek positif globalisasi dan neoliberalisme --berupa peningkatan kegiatan ekonomi serta potensi peningkatan skala dan jumlah pertumbuhan ekonomi dan produksi kekayaan secara makro maupun penawaran kesempatan dan peluang orang dan kebudayaan yang berbeda-beda untuk menjadi lebih dekat satu sama lain, yang menakjubkan dan menjanjikan, karena memungkinkan kemanusiaan menjadi suatu keluarga utuh, yang dibangun atas nilai-nilai keadilan, persamaan dan solidaritas-- negara-bangsa perlu memanfaatkan globalisasi dan neoliberalisme itu untuk mengembangkan dan membangun dasar politik-ekonominya.

### **Sembilan Rekomendasi**

Atas dasar pembahasan di atas, maka persoalan dasar politik-ekonomi bagi Indonesia dalam menghadapi globalisasi dan neoliberalisme adalah bagaimana membangun pemerintah

nasional yang kuat untuk, di satu pihak, menjamin lapisan masyarakat yang rentan di Indonesia bisa mengatasi dampak-dampak negatif dari globalisasi dan neoliberalisme itu di satu pihak dan, di lain pihak, mendorong lapisan masyarakat yang kuat untuk melakukan kegiatan-kegiatan produktif dan kompetitif dengan kekuatan-kekuatan lain dari luar.

*Pertama*, pemerintah Indonesia mesti memperkuat ideologi dan jatidiri negara-bangsa kita, Pancasila. Bagi negara-bangsa kita, Pancasila adalah rujukan

terpenting dalam mengambil langkah-langkah strategis. Selama negara-bangsa kita teguh memelihara dan mewujudkan nilai-nilai Pancasila, negara-bangsa kita akan kuat menghadapi segala macam tantangan, baik dari dalam maupun dari luar. Kita tentu tidak bermaksud untuk tidak mau kompromi dengan dinamika perubahan yang terjadi di sekeliling kita, tetapi setidaknya kita punya sesuatu yang kita selalu pakai sebagai dasar kita memperjuangkan sesuatu, menerima dan/atau menolak sesuatu. Kita mesti menjadikan Pancasila sebagai sumber bagi munculnya kekuatan endogen negara-bangsa kita untuk menghadapi globalisasi dan neoliberalisme.

*Kedua*, Pancasila dan nilai-nilai yang dikandungnya mesti disosialisasikan secara sistematis dan strategis kepada seluruh warganegara Indonesia. Tugas utama pemerintah adalah mengedukasi rakyatnya tentang nilai-nilai dan jatidiri negara-bangsanya dan “bisa mengatakan kepada rakyat apa-apa yang mereka butuhkan sebelum mereka menyadarinya sendiri.”<sup>21</sup> Sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila selama reformasi ini tidak menjadi prioritas setelah pengalaman deviasi penyelewengan terhadap Pancasila berupa hiperindoktrinasi dan menjadikan Pancasila semata-mata sebagai alat kekuasaan pemerintah di masa Orde Baru. Tentu saja metode dan sistem sosialisasinya harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga lebih mudah diterima oleh seluruh masyarakat.

*Ketiga*, pemerintah mesti menolak dan mencegah upaya-upaya kaum neoliberalisme untuk menancapkan pengaruhnya dalam proses legislasi di negeri kita. Sebaliknya, pemerintah mesti membuat dan mengimplementasikan legislasi yang melindungi rakyat dari ancaman globalisasi dan neoliberalisme. Untuk itu, jaminan keamanan sosial bagi rakyat harus diperkuat, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan. Misalnya, pemberlakuan upah minimum/layak, anggaran pendidikan 20 persen, Kartu Sehat dan Kartu Pintar, dan BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan adalah produk legislasi yang jelas-jelas memberi jaminan perlindungan rakyat dari dampak-dampak negatif globalisasi dan neoliberalisme. Bahwa pelaksanaan BPJS itu masih mengalami kesulitan dan hambatan bukanlah alasan untuk menghapus BPJS itu, tetapi justru mesti dipakai sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan sistem dan mekanisme operasionalnya.

*Keempat*, kita perlu mengusahakan supaya para pejabat, terutama yang berurusan dengan pembuatan legislasi (hukum dan aturan), yaitu anggota DPR(D) dan eksekutif serta yudikatif, untuk menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan agar mereka lebih siap untuk mencegah dan menghindari pengaruh agenda neoliberalisme.

<sup>21</sup> Daoed Joesoef, “*Bermasyarakat, Berbangsa*,” Kompas, 14 April 2015.



Sosialisasi nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan kepada para pembuat legislasi itu. Pengawasan melekat terhadap perilaku mereka harus diperkuat, baik oleh para konstituennya maupun oleh media massa dan lembaga-lembaga pengawas independen.

*Kelima*, kita perlu terus mempertahankan dan memperjuangkan sistem politik demokratis untuk mendorong kita mampu membangun nilai-nilai kemanusiaan atas nilai-nilai keadilan, persamaan dan solidaritas. Untuk itu, kita perlu mendorong tumbuh-dan-berkembangnya masyarakat sipil di Indonesia. Secara demikian, maka segitiga negara-pasar-masyarakat sipil bisa tumbuh saling mengecek dan menjadi model segitiga sama-kaki. Kebebasan pers, berserikat dan menyatakan pendapat mesti dipelihara dan diperjuangkan.

*Keenam*, kita perlu menghadapi ancaman terorisme dan radikalisme dengan bijaksana dan lugas. Selain dengan memperkuat sosialisasi nilai-nilai kebangsaan kita, kita perlu terus mengusahakan agar sistem politik kita lebih mampu menyerap dukungan dan aspirasi dari rakyat. Kita perlu menggunakan jaringan teknologi untuk memperkuat dan mensosialisasi nilai-nilai kebangsaan itu kepada seluruh masyarakat, terutama generasi muda.

*Ketujuh*, kita mesti berusaha lebih keras untuk mengenal diri-sendiri sebagai negara-bangsa. Kita tidak bisa meniru negara-negara lain dalam menghadapi globalisasi, karena setiap negara-bangsa punya kapasitas dan cirikhasnya sendiri-sendiri. Indonesia tidaklah sekecil Singapura, sehingga tidak bisa meniru Singapura yang lincah dalam menghadapi permainan tantangan-tantangan globalisasi. Indonesia juga tidak sebesar Tiongkok atau India, sehingga tidak perlu meniru dua negara itu yang kesulitan merubah sikap dan tindakan secara fleksibel dalam menghadapi tantangan-tantangan globalisasi itu. Dengan pengenalan diri-sendiri itu kita bisa melihat potensi, kapasitas dan peluang-peluang yang kita punyai. Misalnya, Indonesia punya penduduk terbesar keempat dunia, yang artinya angkatan kerja (*labor force*) dan pasar yang besar; Indonesia punya wilayah yang begitu luas; Indonesia punya sumberdaya alam, seperti tambang dan gas, yang melimpah; Indonesia punya letak geografis yang strategis bagi SLOCs (*Sea Lane of Communications*). Nilai strategis Indonesia itu tentu menjadi tujuan investasi dan kegiatan ekonomi dalam globalisasi ini. Dengan mengenal kapasitas dan ciri strategis negara-bangsa kita, kita tentu lebih bisa mengambil sikap dan menentukan nasib diri kita sendiri untuk menjadikan globalisasi strategis dan menguntungkan kita.

*Kedelapan*, pemerintah kita perlu memberi kesempatan investasi supaya ada peningkatan kegiatan ekonomi di negeri kita. Bahkan bila perlu pemerintah mesti

bersaing dengan negara-negara lain untuk mendapatkan investasi itu. Hal itu perlu supaya peningkatan kegiatan ekonomi itu bisa mendorong semakin banyak angkatan kerja kita bisa bekerja. Bila lapangan kerja tersedia, maka pengangguran bisa berkurang. Dan bila pengangguran berkurang, maka persoalan kemiskinan bisa diatasi. Tentu saja semua itu harus dibarengi dengan peningkatan jaminan keamanan sosial bagi lapisan masyarakat yang rentan terhadap dampak negatif globalisasi dan neoliberalisme (sebagaimana rekomendasi ketiga di atas).

*Kesembilan*, pemerintah kita perlu mendorong sumberdaya manusia kita untuk tidak hanya aktif dalam kegiatan ekonomi, tetapi terutama menjadi pemain aktif dan penentu dinamika globalisasi itu, dengan cara membangun perusahaan-perusahaan beridentitas nasional. Perusahaan-perusahaan strategis, seperti tambang, otomotif mesti dilakukan dan dimiliki sahamnya oleh anak-anak bangsa kita. Selama ini ada beberapa perusahaan otomotif, tetapi semuanya dari luar seperti Toyota, Mitsubishi, Honda, Hyundai, Daihatsu, KIA, dan Mercy. Negara-bangsa kita mestilah mempunyai perusahaan nasional beridentitas Indonesia dalam bisang otomotif, perbankan, tambang, perfilman, dan lain-lain. Secara demikian, kegiatan ekonomi demikian akan mencegah proses drainase sumberdaya kita.

## Daftar Pustaka

- Broad, Robin and Christina Melhorn Landi, “*Whither the North-South Gap?*,” *Third World Quarterly*, Vol 17, No 1, 1996.
- Budiono, Bambang, “Bahan Presentasi” untuk Diskusi ‘*Budaya Krisis Kepemimpinan dan Merosotnya Nilai Kebangsaan*,’ di Surabaya, 10 Januari 2004.
- Budiono, Bambang, “*Tantangan Bangsa Kita (Dulu) Kini dan Nanti*,” Notulensi Sarasehan Kebangsaan dan Kerakayatan di FISIP Universitas Airlangga, 21 Mei 2013.
- Dicken, Peter, “*A New Geo-Economy*,” dalam David Held and A McGrew, eds., *The Global Transformation Reader: An Introduction to the Globalization Debate*, Polity Press, Cambridge, 2003.
- Friedman, Thomas L., *Memahami Globalisasi: Lexus dan Pohon Zaitun*. Penerjemah Tim Penerbit ITB (Penerbit ITB, Bandung, 2002>2000).
- Held, David; Goldbalt, David; McGrew, Anthony; Perraton, Jonathan, *Global Transformations: Politics, Economics and Culture*, Stanford University Press, Stanford, California, 1999.

- Herry-Priyono, B., “*Ekonomi dan Budaya yang Menjelma*,” makalah untuk Pemas FMKI di Surabaya, 27-30 September 2007.
- Huseini, Prof. Dr. Martani, “*Mencermati Misteri Globalisasi: Menata Ulang Strategi Pemasaran Internasional Indonesia melalui Pendekatan Resource-Based*,” dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, No 5/Tahun II, Desember 2001, hh.17-44.
- Joesoef, Daoed, “*Bermasyarakat, Berbangsa*,” Kompas, 14 April 2015.
- Mas’oed, Prof. Dr. Mohammad Mohtar, “*Tantangan Internasional dan Keterbatasan Nasional: Analisis Ekonomi-Politik tentang Globalisasi Neo-Liberal*,” Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, 19 Oktober 2002.
- Panitia Simposium, “*TOR Simposium ‘Membentuk Identitas Indonesia dalam Arus Globalisasi’*,” Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, 2016.
- Rochester, Martin, dalam W. Andy Knight, “*Towards a subsidiary model for peacemaking and preventive diplomacy: Making Chapter VIII of the UN Charter operational*,” *Third World Quarterly*, Vol 17, No 1, 1996.
- Soekarno, Ir., “*Mentjapai Indonesia Merdeka*” (1933) dalam *Dibawah Bendera Revolusi*, Panitia Penerbit *Dibawah Bendera Revolusi*, Jakarta, 1964.
- Susanto, Joko, “*Handouts Kuliah Pengantar Globalisasi*,” 10 Maret 2015. Surabaya: FISIP Universitas Airlangga.
- Susilo, I. Basis, “*Globalisasi dan Terorisme*,” Jawa Pos, 7 Oktober 2004.
- Susilo, I. Basis, “*Paus dan Globalisasi Kemanusiaan*,” Jawa Pos, 5 April 2005.
- Susilo, I. Basis, “*Renungan Kemerdekaan: Melindungi Rakyat dari Eksploitasi*,” Jawa Pos, 14 Agustus 2004.

**MEREFLEKSIKAN VISI DAN PRAKSIS PENDIDIKAN  
DI TENGAH ARUS GLOBALISASI  
Catatan Diskusi Kelas Pendidikan - Budaya**

Oleh Aloysius Widyawan

*Problem pendidikan adalah problem eksistensi dan harus ditinjau melalui eksistensia manusia dengan segala macam perlibatan dan dialektikanya*<sup>1</sup>

-Driyarkara-

Globalisasi pada hakikatnya adalah proses sosial yang semakin dinamis, kompleks, multidimensional, saling terhubung, dan saling memengaruhi satu sama lain sepanjang sejarah peradaban dunia ini. Segala segi kehidupan seperti ekonomi, politik, kebudayaan, teknologi, religi dan sosial berkelindan dan terus bertransformasi menuju, baik satu kesatuan manusia global maupun ketidakseragaman tujuan. Meskipun demikian, Steger menunjukkan empat ciri pokok globalisasi<sup>2</sup>, yakni: 1) penciptaan hal-hal baru dan multiplikasi jaringan dan aktivitas sosial yang telah ada melampaui batas-batas geopolitik, ekonomi, sosio-kultural tradisional; 2) ekspansi dan perenggangan relasi, aktivitas dan kesalingbergantungan sosial; 3) intensifikasi dan akselerasi perubahan dan aktivitas sosial; 4) bukan sekedar proses material-objektif saja, melainkan juga pada terkait erat dengan kesadaran-subjektif manusia. Dari ciri-ciri itu, Steger kemudian membuat suatu definisi kerja globalisasi sebagai “serangkaian proses sosial multidimensional yang menciptakan, melipatgandakan, merenggangkan, mengintensifkan kesalingbergantungan sosial dan pertukaran yang bersifat mendunia dan pada saat yang sama, (proses tersebut) mendorong orang untuk semakin bertumbuh dalam kesadaran akan keterkaitan yang mendalam antara hal-hal yang lokal dan yang berjarak.”<sup>3</sup>

Hanya saja, pada era sekarang ini, globalisasi didominasi oleh corak kapitalistis dan neoliberal yang diwakili oleh raksasa industri dan perdagangan dengan merek global, seperti Microsoft, Coke, McDonald’s, Ford, dsb. Hampir seluruh raksasa

<sup>1</sup> A. Sudiarja, dkk. (eds.), *Karya Lengkap Driyarkara*, Kompas Media Nusantara, Gramedia Pustaka Utama, Kanisius, dan Ordo Serikat Jesus Provinsi Indonesia, Jakarta 2006, 272.

<sup>2</sup> Bdk. Manfred B. Steger, *Globalization: a Very Short Introduction*, Oxford University Press, New York 2003, 9-12

<sup>3</sup> *Ibid.*, 13.

perusahaan multinasional yang memberi corak kuat pada globalisasi kontemporer ini menawarkan hal yang seragam, yakni hidup yang nikmat, materialistis, dan individualistis serta kebebasan bagi setiap orang untuk mewujudkan hidup ideal tersebut.<sup>4</sup> Secara ringkas, ada semacam upaya mereduksi manusia dan kompleksitas hidupnya dalam kategori ekonomi-materialistis sehingga gambaran manusia yang seolah hendak dibentuk oleh globalisasi bercorak kapitalistis dan neoliberal ini adalah homo economicus. Tentu saja, hal ini berimbas pada setiap sendi kehidupan manusia kontemporer, baik secara individual maupun komunal. Salah satu sendi kehidupan yang terimbas pada globalisasi adalah pendidikan.

Pada hakikatnya, pendidikan tak pernah bisa dilepaskan dari tujuan asalnya, yakni memanusiakan manusia. Karena itu, dasar filosofis pendidikan tak pernah bisa dilepaskan dari gambaran manusia macam apa yang hendak dibentuk atau lebih dimanusiawikan. Tentu saja, dimensi-dimensi lain, seperti dimensi sosial, kultural, religioetas, politik, dan ekonomi akan semakin mempertajam cakrawala proses pendidikan manusiawi yang utuh. Karena itu, pendidikan perlu merefleksikan secara lebih mendalam pengaruh globalisasi kontemporer yang cenderung menawarkan manusia satu dimensi, yakni manusia yang berdimensi ekonomis-material-individualistis.

Dalam diskusi kelas budaya-pendidikan dalam Simposium Nasional Filsafat Fakultas Filsafat 2016, tiga orang pembicara mengemukakan pendapatnya tentang pendidikan dan pengaruh arus globalisasi. Diskusi diikuti oleh para pemerhati pendidikan, pendidik, dan pelajar. Diskusi sangatlah dinamis karena kami menyadari betapa luas dan kompleksnya problematika pendidikan di Indonesia ini. Meskipun demikian, kami memfokuskan perbincangan dalam diskusi ini pada visi pendidikan dan bagaimana visi itu dihidupi dalam praksis pendidikan.

Ramon Nadres, pembicara pertama, melihat globalisasi sebagai sebuah keniscayaan proses sosial yang mengarah pada kebersatuan umat manusia. Pendidikan perlu menyiapkan para peserta didik tak hanya siap bersaing dalam dunia ekonomi, tapi juga berkarakter dan berkeutamaan manusiawi. Ia menyoroti dunia pendidikan Indonesia yang masih sibuk berpikir tentang tergerusnya nilai-nilai lokal karena pengaruh nilai-nilai global yang cenderung materialistis dan individualistis. Akan tetapi, pendidikan Indonesia lupa bahwa globalisasi juga menantang semua elemen pendidikan untuk meningkatkan standar kualitas manusia Indonesia, sekurang-kurangnya standar kognitifnya. Globalisasi, diyakini oleh Nadres, membawa pula nilai

<sup>4</sup> Bdk. Manfred B. Steger dan Ravi K. Roy, *Neoliberalism, a Very Short Introduction*, Oxford University Press, Oxford 2010, 15-20.

positif, yakni keberanian terbuka pada keberadaan sesama yang sama sekali berbeda sehingga ketika berhadapan dengan berbagai persoalan, seperti soal pengungsi Suriah di Eropa, orang pertama-tama harus terbuka pada keberadaan sesamanya sebagai bagian dari keutuhan umat manusia.

St. Kartono, pembicara kedua, menyoroti persoalan yang berbeda. Ia mengajukan pandangan bahwa sekolah sudah cenderung berevolusi menjadi pabrik yang memiliki logika khusus: ketepatan waktu, ketaatan, dan hafalan yang terus menerus diulang-ulang, efektivitas, efisiensi, orientasi produksi dan pasar serta peran vital guru pendidik dalam proses pendidikan di era globalisasi ini. Berangkat dari pengalaman sebagai pengajar di sebuah SMA swasta di Yogyakarta, ia menyoroti, misalnya, kebijakan sekolah yang sering kali tidak toleran pada kesalahan siswa. Sekolah lupa bahwa siswa adalah manusia yang rentan sekali melakukan kesalahan karena berbagai macam keterbatasan. Siswa bukanlah robot atau mesin yang jika diprogram, siswa akan menjadi ‘sesuatu’ sesuai dengan program yang diterapkan. Di samping itu, tidak ada proses dialog reflektif antara pendidik dan siswa, misalnya ketika siswa berbuat salah, kesalahan itu dipandang hanya sebagai masalah ketidaksiapan dengan prosedur atau aturan, bukan soal peluang pada pengenalan pribadi siswa secara utuh. Secara khusus, St. Kartono juga menyoroti peran guru sebagai pendidik karena baginya, keberadaan dan kehadiran guru dalam proses pendidikan melampaui segala bentuk sistem yang diberlakukan. Guru harus bisa menjamin bahwa dalam sistem dan situasi yang terus menerus diombang-ambingkan pada ketidakpastian, guru tetap bisa menuntun siswa menjalani proses belajar dan berefleksi.

Pembicara ketiga, Moksha, adalah seorang pemuda yang membagikan pengalamannya belajar, baik di lembaga pendidikan formal (sekolah) maupun lembaga pendidikan alternatif. Ia bercerita bahwa sekolah terlampaui mengekang kebebasannya sebagai anak. Ia merasa masa kanak-kanaknya direnggut oleh sistem pendidikan yang formalistik. Untunglah, orangtuanya benar-benar mampu memahami kondisi anaknya itu. Ia diijinkan oleh orangtuanya menikmati pendidikan alternatif di “Qoryah Thoyyibah”, Salatiga. Di sana, ia menjalani sekolah menengah pertamanya sambil belajar dan berkarya sepuasnya sehingga bisa menghasilkan banyak sekali karya yang ia sukai, seperti film, puisi, lukisan, dsb. Orangtua Moksha sendiri juga adalah pendiri komunitas anak “Tanoker” di kota Jember yang belajar sambil memainkan permainan tradisional egrang yang dipandu dengan berbagai unsur seni tradisional dan modern. Moksha berkisah bahwa pengalaman menjalani pendidikan alternatif di “Qoryah Thoyyibah” adalah masa-masa sekolah terindah yang ia miliki. Ia belajar sungguh nilai-nilai kehidupan seperti multikulturalisme,

kejujuran, keterbukaan lewat hal-hal yang menyenangkan dan secara langsung menyapa pribadinya.

Setelah para pembicara memaparkan gagasan dan sharing pengalaman mereka, kelas mendiskusikan lebih lanjut pengaruh globalisasi dan pendidikan. Ada beberapa tema diskusi yang menarik yang terlontar, antara lain: tentang “Generasi Z” yang mekanistik, apatis, a sosial, dan individualistik dan bagaimana sistem pendidikan kita mampu melihat hal ini sebagai tantangan bersama, tentang peran keluarga yang tak tergantikan dalam pendidikan, tentang minimnya guru-guru yang berkarakter pendidik karena pendidikan guru pun tak luput dari pengaruh arus globalisasi yang materialistik dan berorientasi pada pasar, dan tentang pentingnya penanaman nilai-nilai luhur yang membekali kaum muda kita dengan sikap kritis dan memiliki tanggungjawab etis serta bagaimana sistem pendidikan kita berperan dalam penanaman nilai-nilai keutamaan itu.

Pada bagian akhir diskusi, para pembicara menyampaikan beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti bersama terkait dengan persoalan pendidikan di tengah arus globalisasi. Ramon Nadres menekankan bahwa pada kodratnya, manusia mengarahkan diri pada sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik itu nampak dalam nilai-nilai dan penerapannya yang terus dihidupi oleh manusia. Kurikulum harus memberi ruang kebebasan yang sebesar-besarnya untuk nilai-nilai tersebut, termasuk dialog antara nilai-nilai tersebut dengan kemajuan zaman. Di sinilah sebenarnya, pendidikan kita tidak melulu dibangun oleh sistem kaku, namun juga oleh suatu dialog yang dinamis antara guru, murid, keluarga, dan masyarakat. St Kartono menekankan bahwa kemajuan dalam bentuk apa pun harus diimbangi dengan kemampuan kita memahami, memaknai, menghidupi nilai-nilai keutamaan. Di sinilah, peran guru tak tergantikan, yakni mendidik dengan nilai-nilai hidup yang harus lebih dulu diyakini dan dihidupinya terlebih dahulu. Moksha secara khusus menyoroti generasi Z yang cenderung bersikap apatis dan individualistik. Tentu saja, hal ini menjadi keprihatinan bersama. Karena itu, pendidikan hendaknya mampu mendorong orang untuk keluar dari kepuasan mereka menikmati dunia maya, dunia media sosial atau dunia hasil bentukannya sendiri, lalu berjumpa, bermain, berdialog, berpelukan dengan teman-temannya di dunia nyata.

Masalah pendidikan Indonesia memang sangatlah kompleks. Meskipun demikian, kita seharusnya selalu mengurai setiap permasalahan itu dari visi pendidikan yang kita anut. Pendidikan selalu terkait dengan bagaimana “membentuk

manusia-muda sehingga ia menjadi keseluruhan yang utuh”<sup>5</sup>. Arus globalisasi yang pada hakikatnya merupakan serangkaian perubahan terus menerus dan serba cepat itu, disadari telah membawa pula visi reduktif tentang siapa manusia dan nyaris tidak memberi ruang dan waktu yang cukup untuk merefleksikannya secara kritis. Karena itu, visi pendidikan Indonesia tak pernah boleh mengabaikan siapa manusia Indonesia dengan “segala perlibatan dan dialektikanya”.

---

<sup>5</sup> A. Sudiarja, dkk. (eds.), *Karya Lengkap Driyarkara*, 299



## GLOBALISASI PENDIDIKAN DAN KERAGUAN GARUDA SIKAP TARIK-ULUR INDONESIA DALAM GLOBALISASI EKONOMI DAN PENDIDIKAN

Oleh Ramon Nadres

### Abstrak

*Indonesia ini terus mondar-madir terhadap globalisasi. Walaupun tanah air kita ini sudah berniat untuk berpartisipasi dalam globalisasinya ekonomi, tetapi dia tetap khawatir mengglobal dalam bidang pendidikan. Alasannya adalah karena negara kita ini takut kehilangan kebudayaan uniknya. Tanda-tanda keraguan ini terhadap globalisasi pendidikan adalah: (1) proposalnya kurikulum 2013; dan (2) pembatalan proyek sekolah-sekolah berstandar internasional. Paper ini menasehatkan Indonesia mengglobal saja karena: (1) ada banyak hal positif untuk masyarakat yang bisa didapatkan dan (2) perubahan kebudayaan adalah sesuatu yang mutlak karena kebudayaan itu cenderung berevolusi.*

Kata kunci: *Indonesia, pendidikan, globalisasi, kurikulum 2013, sekolah berstandar internasional*

---

### Pengantar

Mungkin saya salah, tapi terkadang saya berpikir bahwa ada beberapa mahasiswa yang menganggap beberapa mata pelajaran begitu mudah sehingga mereka merasa bahwa mereka bisa lolos dan lulus ujian tanpa memperhatikan di kelas dan tanpa mempelajari bacaan yang diperlukan. Saya bisa membayangkan bahwa hal ini sering terjadi dalam *mata kuliah umum* (MKU), karena mereka dianggap tidak relevan dengan spesialisasinya dan cukuplah untuk memiliki gambaran atau pendapat umum tentang materi pelajaran yang diambil (misalnya pelajaran agama, filsafat manusia, etika, dll).

Saya berpikir demikian karena, ketika saya memeriksa ujian mahasiswa mata pelajaran tersebut, saya kadang-kadang membaca seluruh esai yang tidak mengacu pada satu referensi apapun kepada diskusi atau ceramah di kelas! Dalam hati saya, saya kagum melihat bagaimana siswa ini berharap untuk lulus ujian dengan hanya meniru hal-hal yang mereka baca atau dengar di media atau dalam percakapan santai dengan teman-teman. Mereka hanya mengikuti rekayasa arus opini publik dan berpikir bahwa itu sudah biasa.

Menurut saya, ini adalah cermin dari apa yang terjadi pada kita mengenai Globalisasi. Kita mungkin tidak segera menyadarinya, tapi bisa jadi kita belum

merenungkannya secara mendalam dan hanya membiarkan diri kita dihanyutkan oleh pasangan dansa budaya kita - media - ketika tiba saatnya mencetuskan pendapat tentang globalisasi.

Tulisan ini adalah semacam undangan untuk merefleksikan globalisasi lebih dalam, terutama globalisasi pendidikan di Indonesia. Kegagalan untuk memikirkannya secara mendalam hanya akan membuat kita ditambatkan pada tonggak opini media sehari-hari tanpa adanya minat untuk mengeksplorasi pilihan lain atau mencoba untuk melihat topik itu dari sudut pandang non-Indonesia.

## **Globalisasi: Ekonomi, Ya! Pendidikan, Tidak!**

### **A. Ekonomi, Ya!**

Apapun yang dikatakan para ahli atau kolumnis tentang globalisasi - baik mendukung maupun melawan - adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa pemerintah Indonesia merasa dirinya wajib untuk berpartisipasi dalam upaya globalisasi ekonomi dunia. Tidak hanya pemerintah, tetapi bisnis swasta dan sektor keuangan juga. Ada pandangan umum di antara para tokoh dalam kegiatan ekonomi dunia bahwa jika seseorang tidak terlibat dalam upaya globalisasi, maka ia akan akhirnya menderita konsekuensinya. Meskipun Presiden Jokowi menyatakan di *Nawa Cita* ketujuh bahwa pemerintahnya bertujuan mencapai swasembada ekonomi, kita tahu bahwa sudah ada langkah-langkah baru dan jelas untuk membuka pasar Indonesia secara lebih luas kepada investor asing.<sup>1</sup>

Seperti yang saya sebutkan dalam sebuah artikel yang ditulis untuk *ExtensionCourse* 2015 dari Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang membahas topik yang sama, globalisasi bagi saya adalah sesuatu yang didorong ke depan oleh kecenderungan yang melekat pada semua manusia terhadap globalisme,<sup>2</sup> yaitu kecenderungan batin yang mendalam untuk berkumpul bersama dan berubah menjadi satu bangsa global sehingga kita bisa “hidup sebagai satu” seperti yang dikatakan John Lennon dalam lagunya yang terkenal *Imagine*. Dengan demikian, globalisasi, bersama-sama dengan globalisme, adalah sesuatu yang tak terelakkan.

Keniscayaan globalisasi bukanlah hanya pendapat saya. Ini adalah penilaian yang juga dibuat oleh beberapa peneliti yang telah mempelajari masalah ini dari

<sup>1</sup> SAULON, Victor V., *Liberalizing Indonesia turns up heat on PHL foreign restrictions*, diunggah di Business world Online, February 14, 2016, 09:30:00 PM;

<sup>2</sup> NADRES, Ramon, *Globalization: Bitter-Sweet Fruits on the Road to Globalism*, written for the Extension Course “*Mengkritisi Arus Globalisasi*” organized by the Philosophy Faculty of the Widya Mandala Catholic University during the Odd Semester of the school year akademik 2015-2016, section B, number 3.

segi ekonomi, sosiologi dan filsafat.<sup>3</sup> Ini adalah alasan mengapa, *Extension Course* Fakultas Filsafat di Widya Mandala itu diberi judul *Mengkritisasi Arus Globalisasi* dan bukan *Mengkritisasi Globalisasi*. Dari awal, sudah diandaikan bahwa kita tidak dapat melenyapkan tren globalisasi: kita bisa belajar bagaimana “berenang” di dalamnya, tapi kita tidak bisa membuangnya begitu saja. Kita dapat bertahan hidup dengan mengambil sikap yang lebih dipikirkan dan direnungkanatasnya. Secara kiasan kita dapat mengatakan bahwa kita harus belajar bagaimana untuk “berenang” dalam arus globalisasi, mungkin sehingga kita setidaknya bisa bertahan dan, jika mungkin, tampil sebagai pemenang.

Dalam kasus apapun, di antara berbagai aliran yang membentuk arus globalisasi, kita menemukan arus ekonomi yang kuat. Hal ini cenderung diperhatikan sebagai yang pertama dan utama, dan itu terjadi karena jika orang-orang tidak bisa makan dan memenuhi kebutuhan biologis dasar, semua pertimbangan luhur lainnya seperti budaya, nasionalisme dan kebebasan hanya akan menjadi angan-angan belaka. *Primumvivere, deindephilosophari*.<sup>4</sup> Pertama kita harus hidup sebelum kita bisa berfilsafat.

Karena itulah kita dapat kemudian sangat memahami mengapa ada begitu banyak artikel yang ditulis tentang bagaimana Indonesia bisa mengglobal secara ekonomis. Itu adalah karena ekonomi adalah perhatian utama dari semua bangsa yang mengharapkan untuk masuk ke dalam dunia global. Tapi, bagaimana dengan pendidikan?

### **B. Pendidikan, Tidak! ... Yah, Mungkin ...**

Sementara Indonesia cukup yakin akan globalisasi ekonomi, iamundur teratur ketika menghadapi kemungkinan globalisasi budaya. *Terms of Reference* dari simposium ini mencerminkan kekhawatiran tersebut:

Dalam kondisi ini muncul rasa rendah diri bila tidak menggunakan atribut-atribut internasional seperti bahasa internasional, sekolah internasional, selera dan *lifestyle* internasional atau bila tidak tergabung dalam perusahaan internasional, komunitas internasional dan berbagai institusi atau organisasi lintas negara. Dalam suasana *penyeragaman budaya* inilah lahir berbagai persoalan sosial lain seperti *punahnya penanda budaya lokal*, teritorialisme,

<sup>3</sup> TAYLOR, Timothy, *The Instant Economist: Everything You Need to Know About How the Economy Works*, Plume, New York 2012, pp. 210-216.

<sup>4</sup> NADRES, Ramon, *Globalization: Bitter-Sweet Fruits on the Road to Globalism*.

fundamentalisme dan terorisme.<sup>5</sup>

Budaya terkait erat dengan pendidikan. Pendidikan mencakup penerusan pengetahuan, ciri-ciri budaya dan pelatihan yang akan membuat seorang individu menjadi bagian dari kelompok budaya tertentu dan dapat berpartisipasi dalam kelompok ini secara bermanfaat supaya baik grup maupun individual dapat berkembang bersama. Jika Indonesia memang takut kehilangan warisan budayanya, maka dia secara logis akan terus mencermati proses yang meneruskan pewarisan budaya tersebut, yaitu pendidikan. Dan ini adalah apa yang tampaknya terjadi.

Kita dapat menemukan sebuah kontradiksi antara keinginan Indonesia akan globalisasi ekonomi dan ketakutannya untuk dimanfaatkan secara ekonomis dan dibuat tidak relevan secara budaya. Ekonomi dan pendidikan tampaknya berjalan di arah yang berlawanan ketika menghadapi globalisasi. Bukanlah wewenang saya untuk mengomentari keraguan globalisasi Indonesia dari sudut pandang *ekonomi*. Dalam tulisan ini, saya hanya ingin melihat ke dalam sikap ragu-ragu terhadap globalisasi di bidang pendidikan. Di sini kita menemukan dua peristiwa yang relevan yang mungkin dapat mengungkapkan kepada kita sikap inti Indonesia: (1) upaya untuk menetapkan kurikulum 2013 dan (2) pernyataan bahwa sekolah internasional adalah inkonstitusional.

### 1. Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 tampaknya telah dicanangkan supaya Indonesia dapat bersaing secara global. Lihat analisis yang dibuat oleh Darmaningtyas<sup>6</sup> di bawah ini:

Justifikasi akademiknya adalah di mana pun di dunia ini, kurikulum selalu mengalami penyesuaian dengan perkembangan masyarakat. Maka perubahan kurikulum bukan suatu yang haram, melainkan itu sebagai kebutuhan masyarakat. Justifikasi akademik lainnya adalah atas perubahan kurikulum ini

<sup>5</sup> Terms of Reference dalam *Simposium Nasional V Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang berjudul 'Membentuk Identitas Indonesia dalam Arus Globalisasi'*. Penekanan adalah tambahan kami.

<sup>6</sup> Kita dapat menemukan biografi singkat Darmaningtyas dari <https://pensilujiantepat.wordpress.com/>: Putra Gunung Kidul yang Sukses Menjadi Pakar Pendidikan Nasional dan Tetap Bersahaja Perjalanan hidup. Darmaningtyas, lelaki asal Gunungkidul, kabupaten paling gersang di kawasan propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dapat dijadikan sumber inspirasi ihwal kesetiaan, keteguhan, ketekunan dalam menggeluti suatu bidang yang telah dipilihnya. Nama Darmaningtyas cukup tersohor sebagai pengamat pendidikan nasional dan dapat disetarakan dengan pakar pendidikan nasional bergelar doktor maupun profesor sekalipun. Padahal Darmaningtyas hanya mengantongi gelar kesarjanaan strata satu dari Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

adalah melihat tantangan ke depan yang lebih keras lagi, baik untuk masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi informasi, globalisasi ekonomi, serta kebangkitan industri kreatif dan budaya. Kesemuanya itu membutuhkan kemampuan (kompetensi) dalam berkomunikasi, berpikir jernih dan kritis, mempertimbangkan segi moral dalam menghadapi suatu permasalahan, serta toleran terhadap pandangan yang berbeda, dan memiliki minat luas dalam kehidupan, maupun memiliki kesiapan untuk bekerja sama dalam suatu tim.<sup>7</sup>

Menyesuaikan diri dengan standar global benar-benar tampaknya menjadi motivasi perubahan kurikulum mengingat bahwa konseptualisasi dan implementasi [yang terburu-buru] itu terjadi segera setelah menerima hasil penilaian PISA.<sup>8</sup> Pada tahun 2006, menurut PISA, Indonesia menduduki peringkat nomor 50 di antara 57 negara dalam Matematika, nomor 50 di antara 57 negara dalam Sains dan nomor 48 di antara 56 negara dalam Membaca. Di bawah Indonesia kita menemukan negara-negara seperti Brazil, Argentina, Kolombia, Tunisia, Qatar, Kyrgyzstan. Walaupun tidak menduduki peringkat terbawah cukup menghibur bagi sebagian orang, ini adalah pertanda yang jelas bahwa ada banyak tugas yang harus dilakukan untuk mengangkat kualitas pendidikan di negeri ini.

Pada tahun 2009, dari 74 negara, Indonesia menduduki peringkat 68 dalam Matematika, 66 untuk Sains dan 62 dalam Membaca. Brazil, Kolombia dan Tunisimenyalip Indonesia dalam semua bidang pada tahun itu. Argentina menyalip Indonesia di Matematika dan Sains, dan berada satu tingkat di bawah Indonesia dalam Membaca. Tiga atau empat negara-negara lain di bawah Indonesia dalam peringkat tersebut adalah negara-negara yang baru saja mendaftarkan diri dalam PISA.

Pada tahun 2012, Indonesia adalah nomor 64 di Matematika, nomor 64 dalam Sains dan nomor 60 di Membaca di antara 65 negara peserta. Hanya Peru berada di bawah dalam Matematika dan Sains, disertai dengan Albania, Kazakhstan dan Qatar dalam Membaca. Indonesia buru-buru mencoba untuk menerapkan kurikulum baru pada tahun 2013, tahun sebelum pemilihan presiden. Jika kita melihat hasil PISA, hal logis yang seharusnya dilakukan adalah memperkuat pembelajaran siswa dalam Matematika, Sains dan Membaca.

<sup>7</sup> DARMANINGTYAS, Ketua Dep.Pembudayaan Nilai Kejuangan '45 dan Pendidikan Dewan Harian Nasional (DHN) 45; <http://darmaningtyas.blogspot.co.id/2013/04/1-kurikulum-2013-mengantar-ke.html>.  
*Penekanan dari kami.*

<sup>8</sup> The Programme for International Student Assessment (PISA) is a triennial international survey which aims to evaluate education systems worldwide by testing the skills and knowledge of 15-year-old students. To date, students representing more than 70 economies have participated in the assessment. For more information, visit the PISA website: <http://www.oecd.org/pisa/>

Maka, alangkah mengejutkannya ketika kita melihat bahwa perubahan yang dibuat dalam kurikulum bukanlah semakin memperkuat Sains, melainkan mengesampingkannya untuk membuka jalan bagi tugas yang “lebih penting”<sup>9</sup> yaitu mempelajari Bahasa Indonesia, Pancasila dan Agama. The Jakarta Globe berkomentar:

Kurikulum 2013 telah memancing kemarahan dari sektor pendidikan, baik swasta dan negeri, karena menghilangkan beberapa mata pelajaran penting, termasuk Sains, Bahasa Inggris dan ilmu sosial pada tingkat SD, dan menggantinya dengan jam tambahan bahasa Indonesia, ideologi nasional dan Islam. Baik pakar pendidikan maupun masyarakat berpendapat bahwa sistem baru mata pelajaran itu hanya akan merugikan para siswa Indonesia, membuat mereka kurang kompetitif di tingkat internasional.<sup>10</sup>

Kontradiksi antara resolusi dan solusi itu berguna untuk menunjukkan betapa bingung masyarakat Indonesia tentang globalisasi budaya dan dalam hal pendidikan. Di satu sisi, bergabung dengan PISA harus, pada prinsipnya, berarti bahwa Indonesia ingin membawa siswa setara dengan seluruh dunia. Tapi, di sisi lain, itu hanya benar-benar merusak tekad awal yang berakhir dengan memutuskan menghapus jambilmu pengetahuan dalam kurikulum. Apakah Indonesia berusaha untuk menjadi setara dengan seluruh dunia dalam Matematika, Sains dan Membaca dengan menghapus Sains dari status independennya dalam kurikulum?

#### *HeleHeleBagoquiere*

Di Filipina ada pepatah yang berbunyi seperti ini: *Helehelebagoquiere*.<sup>11</sup> Ini adalah campuran dari Bahasa Spanyol dan Tagalog yang menggambarkan sikap yang seharusnya dimiliki oleh wanita muda di hadapan seorang pelamar yang dia sukai. Secara tradisi, (setidaknya di masa lalu), dia tidak seharusnya menunjukkan minatnya pada sang pria, setidaknya tidak dengan segera. Dia perlu terlihat dari luar seperti menolaknya dan bahkan menunjukkan rasa jengkel. Itu adalah bagian *helehele*. *Hele* mengacu pada lagu nina-bobo Spanyol yang dinyanyikan oleh para ibu kepada bayinya dan para *nanny* kepada anak asuh mereka. Sulit untuk menemukan tafsiran

<sup>9</sup> Kami menulis frase ini dalam tanda kutip bukan karena salah, tapi karena artinya bisa diperdebatkan

<sup>10</sup> From an Online Jakarta Globe article entitled *Indonesia's Curriculum Needs Further Study: Experts*, downloaded on 30 March 2016; url: <http://jakartaglobe.beritasatu.com/news/indonesias-curriculum-needs-study-experts/>. The article did not indicate the name of the author and the date it was published.

<sup>11</sup> Maksudnya kurang-lebih “sepertinya tidak mau tetapi sesungguhnya mau”

yang tepat dari penggunaan kata ini. Kami bahkan tidak bisa memastikan bahwa itu mengacu pada kata Spanyol untuk pengantar tidur. Kami hanya menerima ini karena tampaknya tidak ada kata lain yang dikenal yang terdengar seperti itu dan yang dapat digunakan dalam konteks ini.

*Quiere* adalah kata Bahasa Spanyol untuk “suka” (ya, seperti “suka” dalam *Facebook* tapi bisa lebih jauh lagi sehingga berarti “cinta”).

*Bago* memiliki fungsi yang sama dengan kata *baru* dalam Bahasa Indonesia, seperti dalam *dia mandi dulu baru berangkat*. Dalam konteks kalimat ini, nuansa dalam bahasa Tagalog menyoroti kontradiksi antara *helehele* dan *quiere*: *hele* adalah penolakan atau tindakan apatis atau ketidakpedulian (seperti tertidur ketika ada orang itu atau mulai bosan dengan pembicaraannya); sedangkan *quiere* sebenarnya adalah langkah maju mendekati orang yang, pada akhirnya, sebenarnya dikaguminya secara diam-diam.

Kami bersusah payah menjelaskan kalimat ini karena tampaknya cukup tepat untuk menggambarkan sikap Indonesia ketika menghadapi globalisasi: kita ingin manfaat ekonominya, tetapi kita tidak ingin mengubah cara hidup yang begitu berharga bagi kita.

Tapi, menggunakan konsep *permainan Bahasa Wittgenstein*, kita dapat menunjukkan sebagian bahwa tidak mungkin untuk berglobalisasi ekonomi tanpa mengglobal secara budaya sama sekali.

Untuk berpartisipasi dalam kegiatan bersama (cara hidup) sebuah komunitas manusia, kita perlu membentuk bagian dalam komunitas itu. Saya tidak tahu apakah Anda telah menyaksikan dan ingat akan film berjudul *Avatar* (bagian pertama yang ada suku berkulit biru Navi yang tinggal di sebuah pohon besar di planet Pandora, yang jaraknya enam tahun perjalanan ruang angkasa dari Bumi). Sebuah perusahaan pertambangan dari Bumi menemukan bahwa ada *venaunobtanium* besar persis di bawah pohon mereka dan mereka ingin menambangnya. Proses yang digunakan oleh si perusahaan pertambangan untuk mencoba membuat mereka keluar dari tempat tinggalnya adalah dengan menyelusup dalam komunitas mereka. Dengan memiliki setidaknya satu manusia yang membentuk bagian dari komunitas *Navi*, mereka bisa meyakinkan mereka untuk meninggalkan Rumah Pohon mereka itu secara damai. Jika itu tidak berhasil, maka mereka harus melakukannya dengan kekerasan senjata. Jake Scully, orang yang mereka kirim untuk menyusup ke dalam suku Navi, berhasil diterima dan mendapatkan kepercayaan dari mereka.

Sebuah butir mengenai Wittgenstein di *Stanford Encyclopedia of Philosophy* menjelaskan dinamika fenomena ini:

Tata bahasa tidak abstrak, ia terletak dalam kegiatan rutin di mana Bahasa

dan permainan terjalin bersama: "... kata 'bahasa-permainan' digunakan di sini untuk menekankan fakta bahwa berbicara dalam sebuah bahasa adalah bagian dari suatu kegiatan, atau dari bentuk kehidupan"(PI 23). Apa yang memungkinkan bahasa berfungsi dan karena itu harus diterima sebagai "fakta" adalah justru bentuk kehidupan. Dalam istilah Wittgenstein, "Hal ini bukan hanya kesepakatan dalam definisi tetapi juga (walau aneh kedengarannya) dalam penilaian yang diperlukan" (PI 242), dan ini adalah "kesepakatan bukan dalam pendapat, melainkan dalam bentuk kehidupan" (PI 241).<sup>12</sup>

Bertolak dari kutipan Wittgenstein, kita sekarang dapat menunjukkan bahwa salah satu aspek budaya yang bisa sangat berpengaruh dalam pembentukan jiwa dan raga kaum muda adalah bahasa. Pada bagian berikutnya, kita akan melihat ke dalam tanda-tanda sikap Indonesia dalam pembelajaran bahasa asing, yang adalah pintu gerbang menuju globalisasi dan globalisme.

## 2. Penarikan Proyek Percobaan Sekolah Berstandar Internasional

Deklarasi yang relatif baru bahwa Proyek Percobaan Sekolah Berstandar Internasional di Indonesia adalah tidak konstitusional,<sup>13</sup> walaupun bisa dibayangkan mungkin bertujuan baik karena mencoba untuk memperbaiki distribusi yang tidak adil dalam hal sumber daya, menurut hemat saya, mencerminkan salah satu arus lokal kuat yang bertentangan dengan globalisasi. Langkah ini pada dasarnya menggunakan Nasionalisme untuk mendukung suatu tujuan yang terlihat melawan sesuatu yang tidak adil.

[Konstitusi] pengadilan menegur pemerintah, menyatakan bahwa upaya tersebut selayaknya tidak bertentangan dengan Konstitusi Negara, yang menjamin akses yang sama terhadap pendidikan. "Jika negara ingin meningkatkan kualitas sekolah-sekolah umum, negara harus memperlakukan sekolah secara sama dengan meningkatkan sarana dan prasarana mereka, serta menyediakan lebih banyak dana untuk semua sekolah umum," kata Mahfud. "[perlakuan yang sama] itu akan menghapus perbedaan kualitas

<sup>12</sup> BILETZKI, Anat and MATAR, Anat, "Ludwig Wittgenstein", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Spring 2014 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <<http://plato.stanford.edu/archives/spr2014/entries/wittgenstein/>>.

<sup>13</sup> PARLINA, Ina and ARITONANG, Margareth S., *Court rules international-standard schools illegal for unequal access*, The Jakarta Post, Headlines, Wed, January 09 2013, url: [<http://www.thejakartapost.com/news/2013/01/09/court-rules-international-standard-schools-illegal-unequal-access.html> ], diunduh 19 Februari 2016.



sekolah-sekolah kita.”<sup>14</sup>

Mereka yang mengeluh terhadap Proyek Percobaan Sekolah Berstandar Internasional, menurut saya, ada benarnya. Ini adalah dari sudut pandang penyalurann dana. Sekolah Berstandar Internasional biayanya lebih besar dari sekolah normal dan mereka memang akan membutuhkan anggaran yang lebih besar daripada sekolah biasa.

Pada saat yang sama, anak-anak yang kemungkinan besar akan memenuhi syarat untuk pendaftaran di sekolah-sekolah tersebut adalah mereka yang sudah berada dari segi kesempatan dan finansial, dan dengan demikian, semakin meninggalkan mereka yang berkekurangan, yaitu, orang miskin dan orang-orang yang tidak memiliki akses yang mudah ke pendidikan yang lebih baik.

Di sisi lain, klaim dari mereka yang mendukung proyek ini juga masuk akal. Dengarkan apa yang dikatakan Hakim Konstitusi Achmad Sodiki tentang masalah ini:

Hakim Konstitusi Achmad Sodiki adalah satu-satunya hakim yang mengajukan pendapat yang berlawanan. Sodiki mengatakan bahwa menghapuskan RSBI dan SBI akan menjadi pukulan besar bagi upaya untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik bagi warga negara kita. “RSBI dan SBI masih sekolah konsep, pembubaran mereka akan berarti membuang-buang dana yang telah digunakan dalam proyek percobaan,” katanya. “Ini juga akan menggagalkan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan.”<sup>15</sup>

RSBI dan SBI terutama didirikan untuk memastikan bahwa Indonesia tidak tertinggal di belakang tetangganya dan di belakang seluruh dunia dalam kesiapan rakyatnya untuk menghadapi tantangan di kancah internasional. Mereka tampaknya telah dirancang sebagai reaksi terhadap penilaian PISA yang disebutkan di atas dan juga beberapa studi yang dilakukan oleh UNESCO.<sup>16</sup> Pemerintah takut bahwa orang Indonesia tidak akan kompetitif di pasar sumber daya manusia internasional (ketakutan yang tampaknya dikonfirmasi oleh keengganan Indonesia untuk menerima lebih banyak pekerja asing di Indonesia sendiri; pekerja asing dihambat masuknya karena Indonesia takut bahwa rakyatnya tidak bisa bersaing dengan mereka, dan

---

<sup>14</sup> ibid

<sup>15</sup> ibid

<sup>16</sup> Ag Kustulasari, *The International Standard School Project in Indonesia: a Policy Document Analysis*, naskah tesis yang dipaparkan di Ohio State University padatahun 2009, 7.

bahkan dalam konteks pasar sumber daya manusia di Indonesia sendiri!).

Strategi itu, secara obyektif, bisa diterima: pemerintah Indonesia meningkatkan standar sekolah tersebut dahulu, sambil mengharapkan bahwa sekolah-sekolah lain pada akhirnya mengikuti selaras dengan naiknya kualitas pendidikan dan lebih tersedianya dana bagi sektor pendidikan.

Di antara keberatan yang diajukan oleh penentang proyek ini, kita menemukan tuduhan korupsi dan buruknya pengelolaan proyek secara signifikan sehingga mengurangi keefektifitasannya. Bagaimanapun juga, hemat saya, korupsi dan manajemen yang buruk tidak secara intrinsik terkait dengan hakikat proyeknya. Maksud saya adalah bahwa proyek itu baik pada hakikatnya. Mencabut hak proyek yang baik karena hal-hal yang ekstrinsik sifatnya, menurut saya, tidak benar. Itu akan seperti membuang bayi bersama dengan air mandinya. Apa yang harus dilakukan, jika programnya sudah baik, adalah menghapus korupsi dan inkompetensi dan menjalankannya dengan cara yang seharusnya dilakukan.

Bagi kita yang berpendapat bahwa RSBI dan SBI adalah pilihan yang sangat baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan bangsa, upaya untuk menjatuhkan mereka melalui deklarasi inkonstitusionalitas dapat dilihat sebagai anggur asam. Mengutip ungkapan Filipin lain – kali ini ungkapan Asia, bukan Eropa - kita menyebutnya *isiptalangka*<sup>17</sup> atau “berpikir seperti kepiting”. Istilah ini digunakan untuk merujuk pada sikap mereka yang menarik turun orang ketika mereka berada di ambang keberhasilan. Reaksi ini didorong oleh rasa iri melihat orang lain lebih maju daripada kita. Perilaku ini mirip dengan apa yang dilakukan seekor *talangka* kecil ketika mereka semua ditempatkan di ember dangkal: ketika salah satu hendak merangkak keluar, yang lain merenggut kakinya dan menariknya ke bawah.

Jika Anda berpikir bahwa RSBI dan SBI adalah solusi yang sangat baik bagi masalah pendidikan berkualitas, Anda mungkin akan berpikir bahwa orang-orang yang menjatuhkannya memiliki mentalitas jenis kepiting ini. Jika itu benar, maka sikap itu akan sungguh-sungguh menarik Indonesia ke bawah dan bukannya ke atas maupun keluar.

### **Globalisasi, Mas! Mengglobal aja!**

Dengan pertimbangan tersebut di atas, saya masih akan menyarankan Indonesia untuk ber-globalisasi, bahkan dalam Pendidikan, seperti yang telah saya

<sup>17</sup> *Talangka* adalah kepiting pantai Asia (*Hemigrapsussanguineus*). Di Indonesia mungkin disebut dengan ungkapan *berotak kepiting*.

katakan di artikel saya sebelumnya.<sup>18</sup> Walaupun rasa cinta pada negara dan budaya memang bernilai besar, kita bertanya-tanya apakah benarmenghargai nilai ini dengan mengecualikan semua yang lain. Misalnya, semua negara lain sedang menggenjot kemampuan berbahasa Inggris mereka agar memiliki daya saing global. Indonesia masih setengah hati dalam upaya ini,<sup>19</sup> mungkin karena takut kehilangan identitas budayanya seperti disebutkan di atas.

Tapi saya pikir tidak ada alasan untuk takut. Sayangnya, di jaman sekarang ini, kita telah dikondisikan untuk melindungi budaya kita di sini dan sekarang juga dan harus melawan perubahannya dalam hal sedikit pun. Sikap ini, menurut saya, diperkenalkan ke dunia ini oleh Rousseau. Rousseau meminta kita untuk membayangkan manusia dalam “keadaan alamiah” asali dan yang, oleh karena itu, masih bebas dari segala pengaruh yang tidak semestinya dari peradaban. Menurut pemikirannya, manusia dalam keadaan alami akan menunjukkan semua yang baik dan layak dalam manusia pada umumnya. Manusia sempurna ini telah seringkali disebut “si liar yang mulia”, seseorang yang tidak beradab, tetapi memiliki kebaikan dan kebijaksanaan yang ekstrim justru karena ia tidak beradab, yakni tidak ternoda oleh peradaban sesat ini.<sup>20</sup> Karena gagasan ini, kita enggan untuk meninggalkan apa pun yang kita pikir adalah bagian dari budaya “asli” kita.

Tapi sebenarnya budaya yang “asli” dan murni itu tidak ada. Budaya bukanlah artefak arkeologi yang disimpan dalam lemari besi aman terkunci dalam museum di mana mereka akan tinggal selamanya, statis, dan mengumpulkan debu. Budaya adalah realitas yang berevolusi, terutama karena mereka ada di dalam manusia, bukan di luarnya.

Dan manusia berevolusi, jika tidak secara biologis, setidaknya dalam pikiran dan kebiasaan mereka. Dengan demikian, seperti organisme yang berbeda yang membentuk rantai evolusi menuruni ribuan tahun sejarah biologi, demikian juga budaya dapat berubah. Tapi perubahan itu tidak terjadi begitu tiba-tiba dan drastis sehingga kita tidak bisa mengenali jejak organisme lama di yang baru. Sebagaimana dipaparkan teori evolusi, setiap organisme baru harus memiliki sesuatu dari yang lama supaya ia tetap menjadi milik rantai generasi yang sama. Dengan demikian, setiap organisme baru sekaligus mirip dengan organisme lama dan berbeda darinya.

Budaya, dalam hemat saya, berkembang dengan cara itu: selalu ada sesuatu

<sup>18</sup> NADRES, Ramon, *Globalization: Bitter-Sweet Fruits on the Road to Globalism*.

<sup>19</sup> Cfr. JONG, Hans Nicholas, *RI Suffers Setback in English Proficiency*, Headlines, The Jakarta Post online, 6 November 2015.

<sup>20</sup> DELANEY, James J., Jean Jacques Rousseau (1712-1778), in *Internet Encyclopedia of Philosophy*, url: <http://www.iep.utm.edu/rousseau>, diunduh tanggal 3 Februari 2016.

dari budaya lama di yang sekarang. Tapi, pada saat yang sama, biasanya ada sesuatu yang baru.

Pertimbangkan budaya Bali, misalnya. Sementara kita mungkin berangan-angan tentang pelestarian “budaya aslinya yang murni”, kenyataannya adalah bahwa budaya dan seni dari Bali saat ini adalah campuran dari apa yang ada sebelumnya dan apa yang telah diasimilasi dari budaya Barat.<sup>21</sup>

### *Martin Buber dan Hubungan I-Thou*

Seperti dalam artikel saya sebelumnya tentang globalisasi,<sup>22</sup> saya merujuk pada filosofi personalis dari Martin Buber untuk menekankan kebutuhan bagi manusia untuk bersatu dan membentuk satu komunitas yang harmonis, bahkan di tingkat global. Tapi bahkan sebelum Buber, kita menemukan bahwa Wittgenstein juga menegaskan bahwa memiliki bahasa umum yang dapat digunakan dalam sebuah permainan bahasa tertentu membangun suatu bentuk kehidupan yang umum untuk umat manusia. Biletzki dan Matar menulis:

Bentuk kehidupan dapat dipahami sebagai sesuatu yang berubah dan kontingen, tergantung pada budaya, konteks, sejarah, dll; ketertarikan akan bentuk kehidupan mendasari pemahaman relativistik dari Wittgenstein. Di sisi lain, itu adalah bentuk kehidupan yang umum bagi umat manusia, “perilaku manusia bersama” yang merupakan “sistem referensi yang melaluinya kita menafsirkan bahasa yang tidak diketahui” (PI 206). Ini bisa dipandang sebagai putaran universal, mengakui bahwa penggunaan bahasa dimungkinkan oleh bentuk kehidupan manusia.<sup>23</sup>

Ciri khas pemersatu bahasa berkaitan langsung dengan keinginan alami dalam diri manusia untuk membentuk komunitas. Martin Buber mengatakan bahwa tujuan utama dari sejarah manusia adalah untuk membentuk sebuah komunitas yang tulus.<sup>24</sup> Karena itu kita bisa melihat suatu arah tertentu menuju pembentukan komunitas itu dalam sejarah persoalan manusia. Kita bisa melihat, misalnya,

<sup>21</sup> MANN, Richard, *The Making of Ubud: Bali's Art, Culture and Heritage Village*, Gateway Books, Bali 2013.

<sup>22</sup> Lihat catatan kaki 18 di atas.

<sup>23</sup> BILETZKI, Anat and MATAR, Anat, “Ludwig Wittgenstein”, *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Spring 2014 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <<http://plato.stanford.edu/archives/spr2014/entries/wittgenstein/>>. Penekanan dari kami

<sup>24</sup> SCOTT, Sarah, Martin Buber (1878-1965), dalam *Internet Encyclopedia of Philosophy*, url: <http://www.iep.utm.edu/buber/#SH2c>, diunduh tanggal 27 October 2015.

penyatuan negara-negara yang berbeda yang sekarang membentuk Amerika Serikat atau negara-negara yang berbeda yang sekarang berusaha – dengan penuh kesulitan, tapi masih mencoba - untuk menjaga keutuhan Uni Eropa.

Selain ini, kita menemukan negara-negara seperti Kanada yang merupakan tempat percampuran berbagai macam ras dan budaya, yang kurang lebih secara harmonis terpatri bersama oleh kebutuhan dan keinginan nasional umum. Dengan semakin mudahnya orang melakukan perjalanan saat ini dan dengan pasar global membuka lapangan kerja untuk orang-orang dari berbagai negara, kita tidak akan terkejut jika, pada akhirnya, setelah jangka waktu yang panjang, beberapa negara akan mulai terlihat seperti Kanada.

Bagi Buber, hubungan “I-Thou” bukanlah sebuah hubungan afektif yang eksklusif, yaitu, bahwa ketika terbentuk, ia tidak memasukkan orang lain dalam hubungan itu. Pembentukan kelompok seharusnya tidak meng-atom-kan orang, melainkan membuka mereka kepada persekutuan yang lebih luas dengan kelompok lain, bahkan ketika masing-masing diyakini sebagai keberadaan yang unik dan dibedakan.<sup>25</sup> Sarah Scott mengatakan:

Buber mengemukakan prinsip sosial di mana pemerintah berfungsi untuk mendukung komunitas. Perubahan yang sejati, ia menegaskan, tidak terjadi dari atas ke bawah, tapi hanya dari pembaharuan hubungan manusia. Daripada sentralisasi yang terus ditingkatkan, ia lebih mendukung paham federalisme dan desentralisasi maksimal sesuai dengan kondisi sosial tertentu, yang akan menjadi garis demarkasi kebebasan yang terus berubah.<sup>26</sup>

Buber tidak mendukung jenis nasionalisme yang melihat bangsa sebagai tujuan itu sendiri. Dia tidak melihat negara sebagai realitas yang hanya melihat ke dalam. Walaupun setiap bangsa mencintai budaya dan kedaulatannya sendiri, Buber tidak berpandangan bahwa sebuah bangsa harus menutup pintu kepada budaya dan bangsa lain hanya karena ini. Pada kenyataannya, bahkan sebagai seorang Yahudi, ia melihat Zionisme dengan cara yang berbeda. Mengenai pembentukan bangsa Israel, ia berharap bahwa ia akan menjadi “lebih dari sebuah bangsa”. Dia berharap bahwa Israel akan mengusung era cara keberadaan yang baru, sebuah sikap di mana sang pemukim harus belajar untuk hidup bersama dengan orang-orang Arab dalam kedamaian yang sangat diperlukan, dan bukan hanya dengan perdamaian semu yang

---

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Ibid.

selalu diancam bahaya jatuh ke dalam perang.<sup>27</sup>

### **Kesimpulan dan Usulan: Maju tak Gentar!**

Dengan keyakinan yang sama dalam benak saya seperti yang pernah saya sampaikan dalam artikel untuk *Extension Course* tersebut,<sup>28</sup> saya hanya bisa berkata kepada Indonesia: Maju tak Gentar!

Ada dua hal yang akan memerlukan banyak usaha: (1) meruntuhkan dan menghilangkan seluruh budaya (terutama pada jaman ini ketika teknologi selalu dapat menyimpan semua memorinya); dan (2) mencapai ekonomi yang stabil bagi negara yang akan menjadi dasar bagi pertumbuhan rakyatnya di bidang lain.

Ini berarti bahwa kita tidak boleh takut akan kehilangan budaya Indonesia secara tiba-tiba karena globalisasi. Menurut saya, itu tidak akan terjadi. Bahkan mungkin ada kemungkinan lain: Budaya Indonesia mungkin diasimilasi oleh seluruh dunia dan dilestarikan dalam bangsa lain.<sup>29</sup> Pada saat yang sama, kita harus mengakui bahwa jalan menuju kemajuan yang stabil untuk Indonesia kasar dan curam, sehingga masalah perekonomian Indonesia tidak dapat diselesaikan dalam satu hari.

Mempertimbangkan hal itu, saya ulangi lagi bahwa Indonesia harus mengglobal karena kita tidak akan kehilangan budaya sebegitu mudahnya dan kita secara mendesak memerlukan kemakmuran secara ekonomi demi kepentingan rakyat, kemakmuran yang akan memungkinkan kita untuk melestarikan budaya kita dan menyebarkannya.

Kita tidak perlu takut akan globalisasi jika kita benar dapat mengarahkan bangsa ke arah globalisasi, di mana impiannya adalah bahwa setiap orang, apapun asal atau warna kulitnya, dianggap sederajat, di mana penderitaan di satu tempat yang jauh adalah keprihatinan orang-orang di tempat kita (pikirkan tanggung jawab kita bagi orang-orang yang melarikan diri dari konflik di Timur Tengah), di mana kita semua akan menjadi saudara satu sama lain.

---

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> NADRES, Ramon, *Globalization: Bitter-Sweet Fruits on the Road to Globalism*.

<sup>29</sup> Omong-omong, dalam film *Avatar* yang disebutkan di atas, meskipun tujuannya "inkulturasi" Jake Scully adalah pada dasarnya untuk membuat budaya Navi punah, apa yang terjadi adalah sebaliknya, Jake Scully malah diserap ke dalam budaya *Navi* dan menemukan pemenuhan dirinya di sana.

**Daftar Pustaka:**

- AG KUSTULASARI, *The International Standard School Project in Indonesia: a Policy Document Analysis*, manuscript of a thesis presented at the Ohio State University in 2009, p. 7.
- ANDRI DONNAL PUTERA, *Besok, Surat Edaran untuk Hentikan Kurikulum 2013 Dikirim ke Semua Sekolah*, Kompas.com, Jumat, 5 Desember 2014 | 20:51 WIB.
- BILETZKI, Anat and MATAR, Anat, “Ludwig Wittgenstein”, *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Spring 2014 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <<http://plato.stanford.edu/archives/spr2014/entries/wittgenstein/>>.
- DARMANINGTYAS, KetuaDep.Pembudayaan Nilai Kejuangan '45 dan Pendidikan Dewan Harian Nasional (DHN) 45; <http://darmaningtyas.blogspot.co.id/2013/04/1-kurikulum-2013-mengantar-ke.html>.
- DELANEY, James J., Jean Jacques Rousseau (1712-1778), in *Internet Encyclopedia of Philosophy*, url: <http://www.iep.utm.edu/rousseau>, downloaded on 3 February 2016.
- JAKARTA GLOBE ONLINE, *Indonesia's Curriculum Needs Further Study: Experts*, downloaded on 30 March 2016; url: <http://jakartaglobe.beritasatu.com/news/indonesias-curriculum-needs-study-experts/>. The article did not indicate the name of the author and the date it was published.
- JONG, Hans Nicholas, *RI Suffers Setback in English Proficiency*, Headlines, The Jakarta Post online, 6 November 2015.
- MANN, Richard, *The Making of Ubud: Bali's Art, Culture and Heritage Village*, Gateway Books, Bali 2013.
- NADRES, Ramon, *Globalization: Bitter-Sweet Fruits on the Road to Globalism*, written for the Extension Course “Mengkritisi Arus Globalisasi” organized by the Philosophy Faculty of the Widya Mandala Catholic University during the Odd Semester of the school year akademik 2015-2016, section B, number 3.
- NURCAYOKO, Kunto, *Curriculum 2013: The next oasis or mirage?*, The Jakarta Post Digital, 20 July 2013.
- PARLINA, Ina and ARITONANG, Margareth S., *Court rules international-standard schools illegal for unequal access*, The Jakarta Post, Headlines, Wed, January 09/ 2013, url: [<http://www.thejakartapost.com/news/2013/01/09/court-rules-international-standard-schools-illegal-unequal-access.html>], downloaded 19 February 2016.

SAULON, Victor V., *Liberalizing Indonesia turns up heat on PHL foreign restrictions*, posted on Businessworld Online, February 14, 2016.

SCOTT, Sarah, Martin Buber (1878-1965), in *Internet Encyclopedia of Philosophy*, url: <http://www.iep.utm.edu/buber/#SH2c>, downloaded on 27 October 2015.

TAYLOR, Timothy, *The Instant Economist: Everything You Need to Know About How the Economy Works*, Plume, New York 2012, pp. 210-216.



## MENUJU PENDIDIKAN YANG MANUSIAWI DI ERA GLOBALISASI

Oleh St Kartono

### Abstrak

*Globalisasi menampakkan wajahnya dalam pendidikan yang berupa kurikulum “pabrik”. Ketepatan waktu merupakan faktor yang sangat vital untuk sebuah sistem produksi. Dibutuhkan pekerja pabrik yang akan hadir bila sewaktu-waktu diperlukan, dan akan bekerja sesuai dengan yang diperintahkan tanpa mengajukan pertanyaan. Hanya ada pekerjaan hapalan yang harus diulang-ulang, karena pabrik memerlukan pekerja yang akan menerima kalau seumur hidupnya dibebani dengan pekerjaan yang tak menyita pikiran dan harus diulang-ulang. Pendidikan masa depan harus menjadi pendidikan universal, yang pertama-tama mengajarkan tentang kondisi manusiawi. Kelas harus menjadi sebuah tempat untuk belajar para siswa tentang aturan-aturan debat dan diskusi yang sportif, kesadaran akan kebutuhan-kebutuhan dan prosedur untuk memahami pikiran orang lain, mendengar dan menghormati suara minoritas dan suara-suara yang berbeda. Sekolah kebangsaan dirancang untuk membawa para siswa ke arah manusia susila. Artinya, mengerti sungguh-sungguh tentang keluhuran budi pekerti dan mendapatkan teladan dari para gurunya. Siswa disiapkan agar memiliki kecakapan mengerjakan suatu pekerjaan, baik yang dilakukan dengan tangan maupun pikiran.*

**Kata kunci :** *kurikulum pabrik, pendidikan manusiawi, sekolah kebangsaan, guru*

### Pengantar

Dunia macam apa yang akan kita wariskan pada anak-anak kita? Anak-anak macam apa yang akan kita wariskan pada dunia kita? Dua pertanyaan reflektif di atas digagas dalam pertemuan UNESCO 1989. Alfin Toffler, salah seorang pembicara dalam forum tersebut menunjuk kecenderungan masyarakat industri yang membangun sistem pendidikan masal dengan “kurikulum pabrik” untuk memberikan pelajaran. Sistem pendidikan masal mempunyai kurikulum yang nyata dan tersembunyi, itulah pembentuk anak-anak yang diwariskan kepada dunia.

Kurikulum “pabrik” menunjukkan tiga ciri mendasar. *Pertama*, ketepatan pada waktu; ketepatan waktu merupakan faktor yang sangat vital untuk sebuah sistem produksi. *Kedua*, ketaatan; alasannya karena dibutuhkan pekerja pabrik yang akan hadir bila sewaktu-waktu diperlukan, dan akan bekerja sesuai dengan yang diperintahkan tanpa mengajukan pertanyaan. *Ketiga*, pekerjaan hapalan yang harus diulang-ulang; alasannya karena pabrik memerlukan pekerja yang akan menerima

kalau seumur hidupnya dibebani dengan pekerjaan yang tak menyita pikiran dan harus diulang-ulang.

Jika Toffler memosisikan diri sebagai *futurolog*, maka kekhawatiran dan perkiraannya tentang masa depan dari saat itu tentulah kini bisa kita lihat. Kurikulum pabrik tampaknya kian mencerabut anak-anak dari kemanusiaannya. Sekolah bukanlah pabrik dengan aktivitas industri, sehingga interaksi guru dan siswa dibutuhkan dengan intensitas yang tinggi. Menjadi ironis jika ada sekolah-sekolah yang merasa cukup menampung anak-anak yang pandai dan menyediakan fasilitas fisik, sementara para gurunya semakin jauh dari siswa. Bukan hal yang aneh jika ada guru yang tidak kenal siswanya bahkan sampai lulus, kecuali namanya dan nilai rapor. Hakikat siswa sebagai manusia direduksi sekedar nama dan angka nilai rapor.

Rekomendasi pemikiran atas situasi tersebut mengemuka di forum UNESCO, lima belas tahun lebih setelah Toffler berbicara. Edgar Morin (2005) mengingatkan lagi hal-hal penting yang tidak boleh dilupakan dalam pendidikan di zaman kini. Morin mencoba mengidentifikasi masalah-masalah yang mendasar yang sering diabaikan dalam pendidikan, yakni membumikan pengetahuan, membangun kondisi manusiawi, dan mengajarkan demokrasi. Paparan ini mencoba mengurai, bagaimana membangun pendidikan yang manusiawi? Pemikiran mengenai pendidikan yang manusiawi tersebut lantas ditempatkan dalam paparan mengenai sekolah kebangsaan di negeri ini.

### **Membangun kondisi manusiawi**

Dalam arus globalisasi dan kecenderungan semangat kurikulum pabrik, proses pendidikan yang penting diciptakan adalah pendidikan yang manusiawi. Pendidikan masa depan harus menjadi pendidikan universal, yang pertama-tama mengajarkan tentang kondisi manusiawi. Kondisi manusiawi yang dialami anak-anak kita di sekolah mestinya tersistem, bukan mengandalkan orang per orang yang ada dalam suatu sekolah. Kelas harus menjadi sebuah tempat untuk belajar para siswa tentang aturan-aturan debat dan diskusi yang sportif, kesadaran akan kebutuhan-kebutuhan dan prosedur untuk memahami pikiran orang lain, mendengar dan menghormati suara minoritas dan suara-suara yang berbeda. Belajar memahami sesama haruslah menjadi elemen utama dalam belajar demokrasi.

Ruang bagi siswa untuk mengalami kesalahan penting pula diciptakan. Di sisi lain mesti juga diingatkan kepada siswa untuk tidak nekat berbuat kalau tahu bahwa tindakan itu salah. Berbagai kesalahan siswa ditempatkan dalam konteks sifat manusiawi. Acapkali berbagai kesalahan siswa diletakkan dalam bingkai melanggar

aturan dan tidak disiplin. Seorang siswa yang ketahuan membolos akan diposisikan sebagai melanggar aturan. Pada hal, kalau mau mengembalikan risiko membolos sebagai tanggung jawab sosial, pastilah akan didapat pemahaman yang tidak jatuh dalam sikap legalistis.

Memberikan ruang kebebasan dan kesempatan berbuat salah berarti berani pula terus-menerus mengajak siswa untuk merefleksikan setiap pengalaman. Yang lebih berat lagi adalah usaha keras bersedia memaafkan dan menimbang-nimbang untuk tidak begitu saja menyalahkan siswa. Betapa gampang menyalahkan dan menimpakan setiap kesalahan kepada siswa sebagai biang utama. Semakin hilang dari pengalaman hidup para siswa kesempatan untuk menunjukkan keberanian menanggung risiko, konsekuen, dan dituntunkan cara berpikir yang lurus. Cap mematikan adalah pilihan populer yang diambil untuk memupus kebebasan siswa.

Pemberian pengalaman akan kebebasan tetap saja membutuhkan aturan dan tertib hukum. Menjamin adanya kebebasan tidak bisa disamaartikan dengan anarki. Aturan bersama tetap menjadi bagian yang utuh sutau kebebasan. Meskipun demikian, tetap perlu ditimbang-timbang agar aturan tersebut tidak menghambat apalagi mematikan perkembangan pribadi yang khas yang sedang bertumbuh. Bukankah lebih mudah untuk mendidik anak dengan aturan-aturan keras dan hukuman-hukuman yang langsung membuat anak jera membuat kesalahan dan kekeliruan?

Pemberlakuan ujian nasional di sekolah dasar dan menengah pun menenggelamkan penghargaan pada keberagaman konteks siswa. Saya sepakat dengan Edgar Morin bahwa kelas harus menjadi sebuah tempat untuk para siswa belajar tentang aturan-aturan debat atau diskusi yang sportif. Sekolah menjadi laboratorium kehidupan demokratis secara praktis dan konkret. Di sana mesti ditumbuhkan kesadaran akan kebutuhan-kebutuhan dan prosedur untuk memahami pikiran orang lain, mendengar dan menghormati suara minoritas dan suara-suara yang berbeda. Belajar memahami sesama haruslah menjadi anasir utama dalam belajar demokrasi. Menghargai pihak lain adalah kata kunci demokrasi.

Upaya banyak sekolah mengurangi jumlah siswa setiap kelas dari 40-an anak menjadi 30 siswa saja, patut didukung sebagai upaya memberikan kesempatan kepada guru dapat berinteraksi dengan siswa di kelas lebih dekat. Upaya demikian sebenarnya dilematis bagi sekolah swasta yang hidup matinya tergantung finansial dari siswa. Satu kursi atau dua kursi di setiap kelas akan sangat berarti untuk mendukung pembiayaan operasional. Sekolah negeri tidak terpengaruh perhitungannya jika dikaitkan dengan jumlah siswa. Akan tetapi, yang terjadi justru sekolah negeri

berlomba memadati kelas-kelasnya atau menambah daya tampung kelas.

Sekolahpun mesti mengupayakan pelayanan konseling yang baik. Konselor yang cakap dan sistem pembimbingan yang benar akan sangat menjadi pendukung setiap pribadi siswa. Banyak sekolah yang menempatkan konselor atau instansi bimbingan dan konseling sekedar sebagai “polisi sekolah”. Urusan disipliner siswa mestinya tidak dilekatkan pada konselor. Konselor tetaplah sebagai figur yang netral dalam mendampingi siswa apapun masalahnya. Layanan konseling yang baik berarti di sekolah tersebut ada perhatian pada kebutuhan emosional anak. Konselor yang baik dapat menjadi perantara dengan guru dan membantu melewati masa-masa sulit anak-anak. Seorang konselor yang baik mampu memberikan dukungan emosional yang dirasakan oleh remaja, yang kadang sulit diperoleh dari orang tua sendiri.

### **Sekolah kebangsaan**

Pernahkah ada visi yang dirancang untuk membangun pendidikan anak-anak bangsa ini? Sebuah buku yang berjudul *Djalan Baru untuk Memperbaharui Pendidikan dan Pengajaran SEKOLAH RAKJAT PANTJASILA*<sup>1</sup> memberikan jawaban gamblang, bahwa visi pendidikan di negara ini sudah digagas pada awal kemerdekaan. Mencoba membuka kembali buku ini berarti menimba inspirasi untuk memahami situasi pendidikan sekarang yang tampaknya kian jauh dari cita-cita luhur memanusiakan anak-anak kita.

Dalam gagasan “Sekolah Rakyat Pancasila”, anak-anak Indonesia sejak kecil harus dididik cinta kepada bangsa sendiri. Pembelajaran harus mempunyai hubungan yang erat dengan kehidupan di masyarakat. Artinya, sekolah dengan segala proses pembelajarannya tidak boleh menceraabut anak dari lingkungannya. Dalam pedagogi reflektif, sekolah demikian bersifat kontekstual. Pengalaman kependidikan yang dialami oleh para siswanya selalu ditempatkan dalam konteks masyarakatnya, baik konteks sosial, ekonomi, maupun situasi alam tempat mereka hidup. Pengajaran berdasarkan pengetahuan dan pengalaman anak di alam sekitar.

Pengenalan peta lingkungan terdekat dan situasi geografis yang dekat dengan dunia setiap anak adalah bagian dari rencana pengajaran yang harus disusun dari bahan-bahan yang terdapat dalam lingkungan, sehingga para siswa mengerti lebih

<sup>1</sup> Dalam format aslinya, buku ini masih memakai ejaan lama, ditulis oleh S. (Soetedjo) Bradjanagara dan L. Kartasoebrata, terbit di Jogjakarta, 3 Djuni 1956. Sebagai Ketua Badan Kongres Pendidikan Indonesia pada waktu itu, dia menguraikan secara rinci mengenai Sekolah Rakyat Pancasila, konteks dan alasan keberadaannya. Bahkan pada halaman awal buku ini yang tersaji adalah rancangan gedung sekolah rakyat beserta tata ruang yang sangat memanusiakan siapapun yang belajar di dalamnya, seperti ruangan yang lapang, gedung tidak bertingkat, sampai dengan halaman dan taman yang hijau.

dahulu lingkungan dan masyarakatnya. Jika sebagian besar siswa yang tinggal di desa akan tetap tinggal di desanya, pendidikan dan pengajaran di sekolah harus menolong mereka mengenal dan mempelajari segala hal yang ada di lingkungannya. Pengetahuan tentang lingkungan dan tempat tinggalnya bagi seorang anak akan menjadi pengetahuan yang aktif, dapat menjadi dasar kemajuan pertumbuhan lahir dan batin.

Penamaan "Sekolah Rakyat Pancasila" dengan sengaja agar masyarakat mengetahui dan merasakan sungguh-sungguh bahwa negara kita secara sadar dan teratur menuju kepada pembangunan masyarakat Pancasila. Sekolah ini terutama harus mewujudkan tempat pendidikan, jadi tidak semata-mata sebagai tempat pemberian pengajaran atau pengetahuan. Rencana pendidikan dibedakan dengan rencana pengajaran. Rencana pengajaran bermaksud memberikan pengetahuan secukupnya, intinya atau pokok-pokoknya saja, agar siswa di kemudian hari dapat melanjutkan pelajarannya ke sekolah yang lebih tinggi. Pengajaran bukan semata-mata memberikan pengetahuan, tetapi melatih siswa mempergunakan pengetahuannya untuk terus belajar sendiri.

Rencana pendidikan disusun untuk membawa para siswa ke arah manusia susila. Artinya, mengerti sungguh-sungguh tentang keluhuran budi pekerti dan mendapatkan teladan dari para gurunya. Siswa disiapkan agar memiliki kecakapan mengerjakan suatu pekerjaan, baik yang dilakukan dengan tangan maupun pikiran; menghayati arti demokrasi dalam konteks politik, ekonomi, dan sosial; menghayati arti bertanggung jawab atas diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan negara. Meskipun ada pemilahan perihal pendidikan dan pengajaran, keduanya harus dilaksanakan menurut perkembangan jiwa anak-anak. Pun sekolah harus berhubungan erat dengan masyarakat, harus menjadi pusat sosial.

Penamaan "Sekolah Rakyat Pancasila" berkait dengan lima sila dalam Pancasila yang menjadi azas dalam kehidupan bersama, yang mewarnai seluruh aspek pendidikan di dalamnya. Secara eksplisit dirumuskan bahwa azas ke-Tuhanan tidak sama dengan agama, melainkan pengakuan adanya Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan seluruh alam dan isinya. Ke-Tuhanan berarti "religie", hasrat manusia untuk menghubungkan diri dengan Tuhan. Perihal kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi, dan keadilan sosial, semuanya menjadi keutamaan hidup yang mesti diterjemahkan dalam pendidikan anak-anak kita.

Kelima sila Pancasila menjadi sendi dalam kehidupan bersama. Anak-anak kita mesti dibiasakan dengan pengalaman sistematis agar mampu mewujudkannya dalam kehidupan bersama. Dalam kehidupan sebagai bangsa Indonesia, sila keempat yakni

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, membawa siswa pada pemahaman akan tujuan demokrasi yakni kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan. Kemerdekaan diajarkan sebagai kebebasan berpendapat tanpa melanggar ketertiban umum. Jadi, dalam kemerdekaan termuat pula tanggung jawab. Untuk membangkitkan rasa tanggung jawab, anak-anak kita harus dilatih berpikir secara bebas, dengan kemauan sendiri, tanpa paksaan dari guru. Berpikir secara bebas dapat dibangun secara sistematis lewat membaca pribadi, bekerja bersama, dan mengolah pengalaman lewat proses refleksi bersama.

Ada pendidikan berbasis pluralisme yang bersifat terbuka karena di sana terjadi pertemuan antarbudaya, antarnilai-nilai moral yang dapat dipelajari oleh semua anggota, baik yang berpendapat sama maupun yang berbeda pendapat. Sifat yang terbuka tersebut berarti tidak menyediakan ruangan untuk unsur pemaksaan. Mereka yang terlibat di dalamnya, terutama para siswa, tumbuh lewat kesadaran secara sukarela, meskipun dalam kemudaan mereka membutuhkan tuntunan orang dewasa untuk memilih nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Upaya pendidikan membekali orang-orang muda dalam menghadapi kehidupan, tidak bisa direduksi begitu saja sebatas pemberian bekal ketrampilan. Yang mestinya dibekalkan adalah kebiasaan membentuk sikap hidup dan pilihan nilai-nilai kemanusiaan. Itu akan mungkin terjadi jika sejak dini dibiasakan melakukan refleksi. Pendidikan berbasis pluralisme pun menjadi awal menumbuhkan penghargaan akan perbedaan-perbedaan yang terjadi di sekitar anak-anak kita. Pendidikan demikian menjadi proses sosialisasi untuk menawarkan nilai-nilai guyub bangsanya. Dalam konsep pendidikan sepanjang hayat, keluarga menjadi pusat pendidikan, di sana setiap individu memperoleh nilai-nilai pluralisme dalam hidup bersama. Jika di dalam keluarga dan di sekolah anak-anak kita telah terbiasa mengalami perbedaan sebagai kekayaan yang mengembangkan pribadinya, maka kita boleh berharap akan masa depan Indonesia yang demokratis. Artinya, di sana ada nilai-nilai penghormatan akan keberadaan orang lain.

### **Kuncinya adalah guru**

Jika kebijakan umum dan aturan pendidikan tidak mampu memberikan iklim yang diharapkan untuk menumbuhkan nilai-nilai kebangsaan, satu andalan yang berperan penting di lapangan adalah guru. Guru mesti membekali diri dengan pengetahuan tentang konteks pendidikan termasuk tujuan sistem pendidikan dewasa ini dan tujuan-tujuan kurikulum di sekolah. Pemahaman guru terhadap konteks siswa setempat memang menimbulkan tarik-ulur dengan model kurikulum yang

sentralistis. Anak-anak kita kian sulit menghubungkan pelajaran yang terserak-serak dalam berbagai bidang ilmu. Berkait dengan isi dan praktik pengajaran, acapkali dikritikkan bahwa materi-materi yang disampaikan oleh guru tidak membumi pada siswa.

Dalam dimensi profesionalitas, guru dituntut untuk memotivasi dan melibatkan siswa dalam proses belajar dengan menggunakan gaya, strategi serta teknik pengajaran yang sesuai dengan konteks pembelajaran. Tugas-tugas pembelajaran disusun demi kebutuhan-kebutuhan belajar individu, dan perbedaan-perbedaan latar belakang siswa serta mengoptimalkan waktu belajar. Perlunya memperhitungkan efek-efek perbedaan kemampuan fisik, intelektual, dan ketersediaan alam selama proses belajar dengan mengingat bahwa siswa mempunyai potensi untuk bertumbuh.

Meskipun untuk kondisi guru Indonesia begitu berat, *toh* guru pun perlu menunjukkan sebuah tingkatan pengetahuan tentang disiplin-disiplin ilmu yang relevan, proses pembelajaran siswa, dan sumber-sumber pembelajaran dengan menggunakan pengetahuan itu dalam penerapan di kelas. Bacaan-bacaan mutakhir akan menghadirkan sosok guru yang *well-informed* di depan siswanya. Ketidaksempatan guru membawa siswa melakukan berbagai eksplorasi atau menuntun ke arah nilai humanistik dan pengalaman-pengalaman manusiawi sangat mungkin disebabkan oleh beban kurikulum dan target-target ujian nasional. Beban kurikulum yang begitu berlebih akan mendorong guru memilih jalan aman dengan menempatkan diri sebagai seorang pengajar yang tertib, meskipun harus kehilangan kesempatan untuk memberikan kedalaman materi.

Paul Suparno, dkk menawarkan sebuah rekomendasi penyiasatan kurikulum dengan berkaca dari pengalaman di Amerika. Ada kecenderungan pendidikan yang dikembangkan di sana menekankan *less is more*. Jumlah materi pengajaran dikurangi supaya siswa mempunyai kesempatan meneliti secara mendalam, mempunyai kesempatan untuk merefleksikan setiap pengalaman. Pengurangan jumlah bahan pelajaran dilakukan agar siswa mempunyai banyak waktu luang untuk lebih mendalami bahan tersebut. Siswa tidak diburu waktu serta mempunyai kesempatan untuk berpikir kritis dan berefleksi.

## Daftar Pustaka

- Bradjanagara, S. dan L. Kartasoebrata. 1956. *Sekolah Rakjat Pantjasila*. Jogjakarta.
- Budisantoso, In Nugroho, (Ed). 2015. *Manusia Pembelajar di Dunia Tarik Ulur*.  
Yogyakarta: USD
- Leondhart, Marry. 1997. *Menumbuhkan Kegemaran Minat Baca Pada Anak*.  
Jakarta: Grasindo.
- Morin, Edgar. 2005. *Tujuh Materi Penting bagi Dunia Pendidikan*. Yogyakarta:  
Kanisius.
- Scherer, Savitri, dkk. (Ed.). 1989. *Dunia Macam Apa yang Akan Kita Wariskan pada  
Anak-anak Kita?*. Jakarta: Indira.
- Sindhunata, (Ed.).2000. *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suparno, Paul. 2002. *Reformasi Pendidikan, Sebuah Rekomendasi*.  
Yogyakarta: Kanisius.



## GLOBALISASI DAN INTER-RELIGI

### Catatan Diskusi Kelas Interreligiusitas

Oleh Anastasia Jessica Adinda Susanti

Ada dua pertanyaan mendasar yang berusaha dijawab dalam diskusi panel sub-tema Globalisasi dan Inter-religi ini yaitu (1) ‘apa dampak Globalisasi terhadap kehidupan beragama di Indonesia?’; dan (2) ‘bagaimana dampak tersebut berkaitan dengan pembentukan identitas Indonesia?’. Dr. Ahmad Zainul Hamdi dalam upaya menjawab pertanyaan tersebut menekankan pentingnya Dialog Karya antar agama di era globalisasi. Dialog Karya diperlukan mengingat semakin banyaknya konflik antar agama yang terjadi di Indonesia. Salah satu konflik agama di Indonesia yang telah berlangsung berkepanjangan ialah Kaum Muslim Syiah yang terus ditekan oleh kelompok Sunni melalui marginalisasi kaum Syiah, pelarangan berkembangnya Syiah di berbagai tempat dan pembubaran perayaan hari-hari besar kaum muslim Syiah. Dr. Ahmad Zainul Hamdi mencermati di tingkat praktik beragama di Indonesia ada arus baru yang disebut *Conservative turn* (pembelokkan menuju konservatif). Sedangkan, di tingkat narasi diplomatik, yang terjadi sebaliknya, ‘keberagaman agama yang hidup dalam perdamaian’ masih menjadi narasi utama. Narasi ‘kerukunan hidup antar umat beragama’ memang terdengar kuat di zaman Orde Baru, namun bukan berarti di zaman itu tidak ada konflik agama. Konflik agama bukan hal yang baru di Indonesia. Salah satu manifestasi dari konflik agama ialah munculnya pasal yang mengatur pelarangan penodaan agama. Dikenal pembedaan antara ‘ajaran pokok’ dalam suatu agama dan ‘kelompok sesat’ yang menodai kemurnian agama tersebut. Pasal ini seringkali digunakan sebagai legitimasi untuk menghukum, melakukan tindak kekerasan dan memarginalisasi ‘kelompok-kelompok yang dianggap sesat’.

Fenomena-fenomena konflik agama ini sesungguhnya erat berkaitan dengan Globalisasi, perdangan trans-nasional dan kemajuan teknologi. Globalisasi turut membentuk pandangan beragama melalui kemajuan teknologi informasi dan kebebasan media. Di Indonesia, tahun 1990 belum terdapat jaringan internet yang luas. Sewaktu itu isu konflik agama tidak seramai yang kita dengar sekarang. Satu-satunya konflik agama yang menyedot perhatian publik ialah konflik Palestina. Pada tahun 1970-1980, yang terdengar hanya isu kristenisasi dan islamisasi. Pasca

reformasi internet berkembang dengan sangat pesat. Seseorang yang berada jauh dari pusat kota bisa mengakses informasi bahkan mengadopsi cara hidup beragama tertentu. Konflik Kaum Sunni dan Syiahdi Indonesia tidak lepas dari pengaruh reformasi agama yang terjadi di tingkat global. Di lain pihak, media informasi massajustru menggelembungkan berita-berita penuh sensasi dengan mengabaikan pokok persoalan sosial. Ocehan selebritis yang dianggap menodai pancasila lebih digemari, sedang kelompok yang menuding bahwa pancasila adalah lambang berhala tetap melenggang bebas. Belum lagi, kelompok radikal ISIS (*Iraq and Syria Islamic State*) yang menggunakan kemajuan teknologi informasi untuk menyebarkan ajaran mereka dengan menunjukkan berbagai kekejian. Identitas hidup beragama di Indonesia berada di tengah kepungan arus-arus kepentingan ini.

Konflik beragama tidak hanya terjadi pada agama-agama abrahamik namun juga ‘agama-agama timur’ yang dikenal dengan perdamaianya, misal konflik agama Budha dan Islam di Myanmar. Upaya untuk menekan konflik pun terus dilakukan. Dr. Ahmad Zainul Hamdi memberi apresiasi pada gagasan “Islam Nusantara” dari NU (Nadhatul Ulama). Islam Nusantara bukan ‘meng-Islamkan Indonesia’ tapi ‘meng-Indonesiakan Islam’. ‘Meng-Islamkan Indonesia’ berarti seseorang menjadi warga negara apabila berada di dalam Negara Islam. Ini tak lebih dari politik manipulatif atas ruang publik. Sedangkan, dalam ‘meng-Indonesiakan Islam’ seseorang tetap bisa menjadi Islam dan sekaligus menjadi Indonesia.

Bagi Dr. Ahmad Zainul Hamdi, yang diperlukan dalam mengatasi konflik agama di era globalisasi ialah menubuhkan agama. Agama ditubuhkan bukan melalui dialog antar iman yang ‘narsistik’ karena mengagungkan kelebihan masing-masing agama, tetapi menggesernya menjadi Dialog Karya. Dialog Karya menggeser metafisika ke etika. Dialog karya ini bukan sekedar kata-kata, melainkan bekerja bersama membangun kondisi hidup yang lebih manusiawi.

Pdt. Simon Filantropa setuju dengan Dialog Karya dalam upaya menjawab pertanyaan mendasar terkait Globalisasi dan Inter-religi. Bagi Beliau, masih banyak persoalan-persoalan sosial di Indonesia yang perlu didialogkan daripada selalu berdialog mengenai ‘api-api’ permusuhan antar agama. Agama seringkali menjadi potensi perang identitas. Dalam perang identitas orang saling menyalahkan identitas yang lain dari dirinya. Perang identitas ini terjadi baik di dalam satu agama maupun agama yang berbeda. Berbicara identitas memang hendaknya dibarengi dengan mawas diri agar tidak terjadi konflik.

Di tengah situasi beragama yang demikian, globalisasi terus bergulir. Mau tidak mau cara hidup beragama pun dipengaruhi oleh globalisasi yang menuntut

hidup serba cepat ini. GKI (Gereja Kristen Indonesia), misalnya, merekam khotbah dan meng-unggahnya ke Youtube agar lebih cepat diakses oleh umat. Manusia di era globalisasi hidup berkejaran dengan waktu. Media massa dibuat untuk melayani hidup yang serba cepat ini, bukan untuk mengupas persoalan secara mendalam. Dalam Globalisasi ini, dialog yang diperlukan bukan lagi dialog yang saling mengunggulkan identitas agama masing-masing, tetapi dialog yang membahas cara mengatasi persoalan-persoalan global sebagaimana termaktub dalam Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs merupakan kelanjutan dari Millenium Development Goals (MDGs) yang berakhir tahun 2015. Dalam SDGs memuat 17 tujuan antara lain tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kesehatan yang baik, pendidikan berkualitas, energi bersih, aksi terhadap iklim, institusi peradilan yang kuat dan kedamaian, dll. Indonesia memiliki waktu 15 tahun untuk mewujudkan tujuan-tujuan dalam SDGs ini. SDGs dapat menjadi pintu masuk pembahasan lintas agama. Kini bukan waktunya untuk saling mengalahkan melainkan melakukan dialog yang membangun.

RD. Ag. Tri Budi Utomo (Romo Didik) menyarikan usulan dari Dr. Ahmad Zainul Hamdi sebagai Dialog Karya atau Dialog Etik, sedang dari Pdt. Simon Filantropa sebagai Dialog Kepedulian atau Dialog Keterlibatan. Romo Didik sendiri mengusulkan Dialog Akar yang merupakan upaya kembali ke pengalaman mistik masing-masing agama. Namun demikian, bukan berarti menutup diri terhadap agama yang berbeda. Dialog Akar mengusahakan integritas yang terbuka. Integritas terbuka membangun identitas dari dalam diri masing-masing agama namun tetap terbuka melakukan dialog dengan agama lain.

Terkait identitas, Romo Didik menyadari bahwa identitas merupakan persoalan yang seringkali membingungkan. Beliau pun merasa bingung ketika mengunjungi sedulur sikep/ masyarakat Samin di Blora dan ditanya ‘kamu itu orang apa?’. Saat itu beliau baru sadar bahwa dirinya tidak memiliki identitas yang jelas karena lahir, dibesarkan dan hidup di tempat dan kebudayaan yang berbeda-beda. Identitas memang tidak bersifat pasti dan abadi melainkan terus berubah.

Bukan hanya individu-individu yang dibingungkan oleh persoalan identitas, namun juga institusi-institusi salah satunya agama. Bila Dr. Ahmad Zainul Hamdi setuju dengan gagasan Islam Nusantara atau ‘meng-Indonesiakan Islam’, di Katolik pun mengenal gagasan serupa yang terungkap dalam slogan “100% Indonesia, 100% Katolik” dari Soegijapranata. Dalam Agama Katolik juga muncul manifestasi-manifestasi dari rumusan identitas yang menekankan inkulturasi ini misalnya dalam misa imlek atau misa ruwatan. Sekalipun demikian, Gereja Katolik pun pernah mengalami krisis identitas yang terjadi sekitar tahun 1940an ketika Hitler melakukan

ekspansi ke sebagian wilayah Eropa. Muncul pertanyaan, “di mana Tuhan ketika perang terjadi?”. Ketika menghadapi situasi demikian, langkah pertama yang dilakukan ialah menanyakan “apa yang dikehendaki Tuhan kepadaku?”. Langkah ini merupakan usaha untuk kembali kepada pengalaman beragama yang *Fascinosa et Tremenda* (misteri yang mengagumkan dan menggetarkan jiwa). Terakhir, Romo Didik mengajak semua agama untuk merumuskan kembali “apa yang dikehendaki Tuhan terhadap masing-masing agama dan setiap pribadi?”. Pertanyaan tersebut merupakan upaya untuk merumuskan identitas sekaligus sebagai pembuka Dialog Akar yang mengupayakan integritas terbuka.

Dalam sesi diskusi, muncul berbagai pertanyaan antara lain: Mengapa kita masih perlu membicarakan identitas Indonesia padahal identitas kita sudah jelas yakni Pancasila?; apa peran forum antar umat beragama?; bagaimana kedudukan aliran-aliran keyakinan, bukankah mereka perlu dipertimbangkan dalam perumusan identitas Indonesia?; apakah dialog agama masih dibutuhkan sebab agama seharusnya berada di ranah privat bukan publik?; apakah dialog karya tidak menyimpan potensi bahaya seperti bom waktu karena ke-salingtidakpahaman akar masing-masing agama?; bagaimana mengkonkritkan gagasan-gagasan hasil dialog antar-agama ini?, dll.

Dr. Ahmad Zainul Hamdi menanggapi perihal dialog-dialog yang dilakukan antar agama. Beliau membedakan ada tiga layer kehidupan beragama yaitu dimensi teologis, dimensi kebijakan/legislasi, serta dimensi kehidupan sosial. Tiga dimensi ini merupakan ranah terjadinya konflik agama tapi juga sekaligus ranah yang memungkinkan adanya dialog. Dialog Karya merupakan upaya pada dimensi kehidupan sosial. Dialog pada dua dimensi lain yaitu teologis dan kebijakan/legislasi pun perlu terus diupayakan.

Romo Didik menanggapi persoalan terkait identitas. Identitas bersifat selalu ‘menjadi’. Namun demikian, kita membutuhkan penamaan agar dapat dikenali orang lain. Penamaan tersebut melibatkan atribut-atribut seperti sifat, kegemaran, wajah, dsb. Atribut tersebut harus sesuai (atau paling tidak mendekati) dengan identitas. Integritas terbuka mengakui pembentukan identitas yang terus menerus sembari menyadari selalu ada pintu-pintu yang terbuka terhadap dunia lain di luar diri kita.

Pdt. Simon Filantropa senada dengan pendapat bahwa identitas itu bersifat dinamis. Identitas seringkali tidak dapat dirumuskan secara definitif (misal: aku adalah X) tapi justru lebih secara negatif (aku adalah bukan A, bukan B, bukan C, dst). Definisi definitif seringkali terlalu sempit untuk mengungkapkan identitas kita. Dialog identitas hendaknya selalu dilakukan dengansikap mawas diri agartidak

terjerumus dalam sifat mengagung-agungkan pribadi/kelompok. Dialog inter-religi ini membawa agama dari ranah privat ke ranah publik. Dialog Kepedulian akan persoalan-persoalan sosial menunjukkan ranah publik dari agama. Dengan demikian, keberagaman agama bukan disikapi dengan cara saling meniadakan identitas, melainkan dengan bekerja bersama, saling mengakui dan menghargai identitas seperti bintang-bintang yang tak pernah beradu terang sekali pun hadir bersama-sama.

## DIALOG ANTARIMAN: DARI KATA KE KARYA (Catatan Pengantar Diskusi) <sup>1</sup>

Oleh Ahmad Zainul Hamdi <sup>2</sup>

### Abstrak

*Akhir-akhir ini, ada kecenderungan semakin menipisnya toleransi kehidupan keagamaan masyarakat. Hal ini membuat banyak pihak mulai mempertanyakan makna agama dan keberagaman dalam kehidupan manusia. Tulisan ini mengambil posisi mendorong sebuah dialog agama di mana orang-orang beriman di dalamnya secara tulus dan jujur menerima kesetaraan spiritualitas sehingga terbuka untuk saling memperkaya iman dan bekerja sama tanpa pamrih dalam menghadapi*

*masalah-masalah sosial, ekonomi, dan politik dunia.*

*Propinsi Jawa Timur tidak lepas dari berbagai kasus intoleransi antar umat beragama. Jelas bahwa kecenderungan tindak pelanggaran terhadap hak-hak keyakinan warga negara tidak semakin menyusut namun semakin bertambah. Hal ini merupakan tanda dari menguatnya arus radikalisasi keagamaan dan lunturnya toleransi baik dengan cara kekerasan maupun berlindung di balik ambiguitasi regulasi.*

*Dialog antar iman tidak selayaknya hanya berhenti pada doktrin sambil memamerkan keunikan dan kebenaran masing-masing agama dengan semangat “akulah kebenaran satu-satunya.” Dialog antariman seharusnya bergerak ke arah perwujudan janji penyelamatan (salvation) masing-masing agama. Perlu adanya pergeseran dari perdebatan teologis ke dalam karya bersama demi kebaikan manusia atau disebut oleh John Hick sebagai melampaui dialog antariman.*

**Kata kunci:** *dialog, agama, intoleransi, pluralisme*

---

*“There will be no peace among the people of this world  
without peace among the world religions”*

-Hans Kung-

### Pendahuluan

Akhir-akhir ini, ada kecenderungan semakin menipisnya toleransi kehidupan keagamaan masyarakat. Hasil survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia pada 2011 menunjukkan, 62,4 persen masyarakat Indonesia taat beragama. Namun, tingkat ketaatan ini tidak memiliki hubungan apapun dengan perdamaian dalam kehidupan

---

<sup>1</sup> Disampaikan dalam Simposium Nasional “Membentuk Identitas Indonesia dalam Arus Globalisasi,” Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Sabtu, 2 April 2016

<sup>2</sup> Ketua Program Studi Perbandingan Agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel Surabaya.

sosial. Justru, data-data mengindikasikan sebaliknya. Kekerasan atas nama agama di Indonesia terbilang tinggi. Kegairahan beragama diikuti dengan semangat memvonis sesat terhadap kelompok lain yang berbeda. Agama dijadikan senjata untuk melakukan kekerasan sekaligus perisai untuk menyembunyikan kepentingan-kepentingan sempit yang sebetulnya tidak berkaitan dengan agama.

Masyarakat kita memperlihatkan kecenderungan menolakan terhadap keberadaan orang yang berbeda keyakinan. Hasil penelitian CSIS 2012 menunjukkan adanya erosi toleransi yang cukup mengkhawatirkan. Dari total responden 2.220 orang yang tersebar di 23 provinsi, 33,4% responden menyatakan tidak mau bertetangga dengan orang yang berlainan agama; 25% tidak percaya kepada umat agama lain, dan 68% menentang pembangunan tempat ibadah agama lain di lingkungannya. Sikap inilah yang di beberapa tempat, dengan pemicu yang tepat, melahirkan konflik keagamaan terbuka. Konflik Poso diikuti dengan segregasi kehidupan sosial berdasarkan afiliasi keagamaannya. Penganut Ahmadiyah di Mataram yang hingga kini hidup di asrama transito dan umat Syiah Sampang yang tinggal di GOR adalah contoh nyata kecenderungan ketidakmampuan masyarakat untuk hidup berdampingan bersama kelompok dari tradisi keagamaan yang berbeda.

Melihat ironi seperti ini, banyak pihak yang mulai mempertanyakan makna agama dan keberagaman dalam kehidupan manusia. Jika agama sering mengkhotbahkan kebaikan, kasih sayang, perdamaian, dan segala kualitas baik dalam kehidupan manusia ternyata menjadi penyumbang besar dalam konflik dan kekerasan, apa sesungguhnya yang salah. Apakah Tuhan memang memerintahkan manusia menegakkan kebaikan dengan jalan kekerasan atau bahkan peperangan? Jika memang seperti itu, mengapa kedua belah pihak yang bertikai meyakini Tuhan ada di pihaknya dan mendukungnya? Ataupun, semua gagasan Tuhan dengan berbagai pernak-perniknya tak lebih hanya sebuah ilusi hasil otak manusia sendiri?

Banyak kemungkinan jawaban yang akan muncul. Namun tulisan ini tentu saja tidak berangkat dari perspektif antiagama. Tulisan ini berangkat dari posisi yang memandang iman sebagai sesuatu yang positif dan menjadikannya sebagai kekuatan dalam menghadapi berbagai persoalan yang ada. Namun, pandangan ini bukan menjadikan agama sebagai *panacea*, seperti sebutir pil yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Agama tetap harus diletakkan secara proporsional dan menilainya secara realistsis, tidak hanya potensi kebaikannya, namun juga “keburukannya”.

Tulisan ini mengambil posisi mendorong sebuah dialog agama yang tidak hanya pamer kebaikan agama masing-masing sambil, dinyatakan atau hanya disimpan dalam hati, meletakkan agamanya sebagai superior atas yang lain. Tulisan

ini mendorong sebuah dialog agama di mana orang-orang beriman di dalamnya secara tulus dan jujur menerima kesetaraan spiritualitas sehingga terbuka untuk saling memperkaya iman dan bekerja sama tanpa pamrih dalam menghadapi masalah-masalah sosial, ekonomi, dan politik dunia.

### **Sekilas Situasi Jawa Timur**

Selama ini banyak pihak yang menilai Jawa Timur sebagai propinsi yang cukup memberi ruang bagi kebebasan beragama. Dari perspektif tertentu, penilaian ini bisa diterima. Dalam kasus Ahmadiyah, Jawa Timur bisa dianggap sebagai wilayah surga jika dibandingkan dengan Jawa Barat, misalnya. Akan tetapi, asumsi ini segera memudar jika kita melihat data-data kriminalisasi keyakinan dan kekerasan berbasis agama di Jawa Timur yang berhasil dikumpulkan oleh beberapa lembaga yang melakukan monitoring dalam hal jaminan kebebasan berkeagamaan dan berkeyakinan. Data-data tersebut jelas-jelas menunjukkan kuatnya prasangka anti-pluralisme.

Jika kriminalisasi keyakinan dan kekerasan berbasis agama adalah indikator kuat akan absennya toleransi, maka catatan Jawa Timur tidak kalah merahnya dengan wilayah lain. Penelitian CMARs selama tahun 2008 memperlihatkan bahwa di setiap saat dan waktu, Jawa Timur menyimpan potensi untuk meledak menjadi ketegangan dan konflik keagamaan yang terbuka. Laporan tersebut menyimpulkan bahwa pluralisme masih menjadi barang mewah dalam kehidupan berbangsa. Tuduhan sesat sangat mudah keluar untuk siapa saja yang dianggap berbeda. Sepanjang tahun 2008, ancaman terhadap kebebasan beragama (tuduhan sesat dan penodaan agama), kekerasan berbasis agama, perusakan tempat ibadah, fatwa-fatwa keagamaan bermasalah, dan regulai diskriminatif secara mudah bisa ditemukan.<sup>3</sup>

Secara umum, ancaman terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan juga bisa muncul dari upaya-upaya untuk menerapkan Syariat Islam. Memang, beberapa kabupaten di Jawa Timur mengidap kegairahan untuk “menerapkan syariat Islam”. Wilayah yang cenderung mengeluarkan regulasi diskriminatif dan mencederai pluralisme adalah daerah-daerah yang mengidentifikasi diri sebagai wilayah santri. Hal ini bisa dilihat pada beberapa regulasi berbasis syariah. Peraturan seperti ini secara langsung maupun tidak berpotensi mendiskriminasi kelompok non-Muslim/minoritas karena Islam atau umat Muslim menjadi pertimbangan utama dalam pengusulan raperda tersebut.

<sup>3</sup> Tim, *Profil Kehidupan Beragama/Berkeyakinan di Jawa Timur 2008*, Laporan akhir tahun 2008.



Jelas bahwa kecenderungan tindak pelanggaran terhadap hak-hak keyakinan warga negara tidak semakin menyusut. Di tahun 2009, Jawa Timur tetap tercatat sebagai propinsi yang sangat rawan dalam hal kebebasan beragama/berkeyakinan. Salah satu temuan SETARA Institute yang bertajuk “Ramadhan dan Praktik Kekerasan” dalam rentang waktu 10 Agustus-10 September adalah bahwa Jawa Timur menempati posisi tertinggi praktek kekerasan dengan dalih Ramadhan. Dari 223 angka kekerasan, 65 tindak kekerasan terjadi di Jawa Timur.<sup>4</sup>

Jika orang beranggapan bahwa laporan SETARA tersebut terlalu berlebihan dan tingginya tindakan kekerasan berbasis agama tersebut merupakan kecenderungan wajar di bulan Ramadhan, maka orang tersebut siap-siap untuk kecewa. Annual report CMARs tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan di Jawa Timur tahun 2009 menunjukkan tingginya kasus kriminalisasi keyakinan yang disertai dengan kekerasan dan menguatnya dukungan terhadap berbagai upaya syariaisasi negara. Selama tahun 2009, CMARs mencatat 12 kasus kriminalisasi keyakinan dan kekerasan berbasis agama yang tersebar di 8 wilayah kabupaten/kota; 531 orang menjadi korban kekerasan/pelanggaran HAM selama bulan ramadhan; dan dua regulasi berbasis syariat. Dalam semua pola kekerasan yang terjadi, negara selalu konstan menjadi bagian dari aktor pelanggar HAM baik by commission maupun by omission. Di hampir semua kasus kekerasan, masyarakat umum juga menjadi bagian dari pelaku kekerasan, sementara tidak cukup ada kekuatan civil society yang efektif menjadi penyeimbang dari kecenderungan ini.<sup>5</sup>

Bahkan, di tahun 2010, ditemukan sembilan kasus pelanggaran KBB di Jawa Timur (4 tuduhan sesat, 6 rumah/tempat ibadah), yang tersebar di sepuluh kabupaten/kota.<sup>6</sup> Tahun 2014, di Jawa Timur ditandai dengan lima kasus penyerangan terhadap suatu kelompok yang memiliki pemahaman keagamaan berbeda, dan satu penyerangan terhadap kelompok yang dituduh sesat. Kekerasan atas nama agama ini tersebar di lima kabupaten di Jawa Timur.<sup>7</sup>

Dengan melihat data-data yang ada, terlihat bahwa Jawa Timur, dengan berbagai levelnya, telah memperlihatkan dirinya sebagai bagian dari arus menguatnya radikalisasi keagamaan dan melunturnya toleransi, baik dengan kekerasan maupun berlindung di balik ambiguitas regulasi maupun gabungan keduanya.

<sup>4</sup> Lihat Laporan Monitoring SETARA INSTITUTE, Jakarta, 15 September 2009.

<sup>5</sup> Ahmad Zainul Hamdi & Akhol Firdaus, *Potret Buram Kebebasan Beragama* (Surabaya: CMARs, 2010).

<sup>6</sup> Tim, *Kekerasan Berbasis Agama dan Pelanggaran KBB di Jawa Timur 2010* (Surabaya: CMARs, 2011).

<sup>7</sup> Sumber: Dokumen internal CMARs Surabaya

## Pluralisme yang Diingkari: Pandangan Fungsionalisme

Pengrusakan dan pengusiran adalah sebuah simptom yang jelas tentang hasrat penghancuran. Kelompok perusak biasanya akan mengembangkan logika fungsionalis yang menganggap bahwa setiap perbedaan adalah sebuah penyimpangan dari fungsi kodrati yang seharusnya. Dengan analog pada kesehatan tubuh, kelompok minoritas yang berbeda dianggap sebagai sejenis penyakit kanker. Untuk menjaga kesehatan dan kesempurnaan fungsi tubuh, maka kanker tersebut harus disembuhkan, dalam arti dikembalikan ke fungsi semulanya agar tidak lagi menjadi sesuatu yang “berbeda”. Jika tidak bisa disembuhkan (dipertobatkan), maka organ tubuh itu harus diamputasi.<sup>8</sup> Inilah logika penyingkiran.

Jika logika ini diikuti, maka spirit yang mengendap di baliknya sesungguhnya adalah spirit penghancuran. Jika setiap perbedaan hanya memiliki dua opsi, melebur ke dalam persamaan atau pengusiran, maka sesungguhnya tidak ada tempat bagi setiap kelompok minoritas yang berbeda. Kalau mereka dianggap sebagai kanker yang harus diamputasi dari sebuah kelompok masyarakat tertentu, maka pertanyaannya adalah tubuh masyarakat mana yang mau ditemplei kanker buangan orang lain? Jika semua masyarakat tidak memiliki kapasitas dalam mengelola keragaman, di mana setiap perbedaan dianggap sebagai gangguan yang harus dienyahkan, maka sesungguhnya tidak ada takdir bagi kelompok minoritas berbeda kecuali mereka harus hancur.

Yang patut disedihkan adalah adanya sebuah proses penghancuran terhadap spirit pluralisme dalam masyarakat. Kehidupan keagamaan di Indonesia selama ini dikenal sebagai kehidupan yang penuh damai. Beragam kelompok keagamaan yang berbeda hidup dalam satu lingkungan dengan penuh hormat dan cinta. Namun melihat kecenderungan akhir-akhir ini, kisah indah itu rasanya seperti mitos purba, keindahan yang terlalu jauh untuk direngkuh. Kedamaian hidup bersama dengan umat dari tradisi keagamaan yang berbeda menjadi sasaran olokan sebagai bagian dari proses pendangkalan aqidah yang akhirnya menuju kepada kesesatan. Seakan-akan, seseorang tidak bisa menghormati keimanan orang lain sambil tetap menjaga keimanannya dengan sepenuh hati.

## Melampaui Dialog

Pada 6-9 September 2003, di adakan Konferensi Internasional tentang pluralisme keagamaan di Department of Theology of the University of Birmingham, Inggris. Konferensi ini melibatkan berbagai individu dari berbagai agama untuk

<sup>8</sup> Daniel Rigney, *The Metaphorical Society: An Invitation to Social Theory* (New York: Rowman & Littlefield Publisher, 2001), 17-19.

membicarakan pluralisme sebagai cara terbaik dalam memahami dan merespon realitas keragaman kehidupan beragama. Konferensi ini sengaja mempertemukan sebanyak mungkin tokoh dari latar belakang tradisi keagamaan berbeda yang mungkin memiliki pemahaman yang berbeda tentang pluralisme. Mereka bisa berbagi landasan doktrinal atas pemahamannya tentang pluralisme, problem yang dihadapi, serta prospek ke depannya.

Jelaslah bahwa tidak ada satu pun para tokoh agama ini yang ingin menyatukan agama mereka atau meleburnya dan membentuk satu agama dunia. Sebaliknya, pluralitas dan keragaman adalah sesuatu yang baik dan berharga. Keragaman yang ada di dunia ini, yang di dalamnya dihuni oleh manusia-manusia yang berbeda-beda, budaya dan agama yang bermacam-macam, adalah sesuatu yang mesti dirayakan dan dipahami, bukan sesuatu yang mesti dimusnahkan.

Dialog antar iman tidak selayaknya hanya berhenti pada doktrin sambil memamerkan keunikan dan kebenaran masing-masing dengan semangat “akulah kebenaran satu-satunya.” Dialog antariman seharusnya bergerak ke arah perwujudan janji penyelamatan (*salvation*) masing-masing agama. Keselamatan adalah tujuan utama setiap agama. Setiap agama seharusnya memberi perhatian yang sungguh-sungguh pada realitas ketidakpedulian, kekacauan, ketidakadilan, penindasan, dan kebodohan, yang semua itu menyebabkan penderitaan umat manusia. Semua agama mengakui adanya sebuah tragedi dalam kehidupan kemanusiaan kita saat ini. Masing-masing agama menjelaskan ini dengan bahasa yang berbeda-beda. Tapi seluruh bahasa agama yang sakral itu sesungguhnya merujuk pada realitas yang sama, yaitu perintah untuk memberi kebaikan dan keselamatan kepada manusia, apapun kondisinya. Kesadaran ini dengan sendirinya akan menggeser sumbu agama dari selfisme teologis ke karya bersama demi kebaikan manusia.

Inilah yang disebut John Hick dengan melampaui dialog antariman.<sup>9</sup> Dialog antar iman harus berani melangkah dari kata ke karya. Ketika dialog antariman mentransformasi dirinya menjadi karya bersama, maka klaim *rahmatan lil alamin*, misalnya, tidak hanya menjadi slogan yang diteriakkan, tapi laku yang diwujudkan. Teologi yang mengejawantah menjadi karya kemanusiaan akan menggerus nafsu perang kelompok-kelompok keagamaan. Tidak perlu ada pembantaian di Poso, tidak perlu ada pengusiran terhadap kelompok Ahmadiyah, tidak perlu ada penghancuran gereja, tidak perlu ada pengusiran kaum Syiah, karena kebaikan sebuah agama tidak selayaknya menjadi kesombongan kata-kata, tapi seharusnya diwujudkan dalam

<sup>9</sup> John Hick, “*The Next Step beyond Dialogue*,” dalam Paul F. Knitter (ed.), *The Myth of Religious Superiority* (New York: Orbis, 2005).

**KEBERANIAN MEMAKNAI GLOBALISASI:  
BERSAING JADI BERSALING  
BERTANDING JADI BERSANDING**

Oleh Simon Filantropa

**Abstrak**

*Bangsa Indonesia baru saja memasuki era baru Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Beberapa kalangan memandang bahwa bangsa ini belum siap. Daya saing Indonesia masih lebih rendah daripada beberapa Negara ASEAN lainnya. Tingkat kesenjangan ekonomi Indonesia juga termasuk tinggi. Masih banyak pula persoalan politik, sosial, ekonomi dan budaya yang belum terselesaikan secara tuntas. Di tengah pesimisme tersebut, beberapa hari menjelang berlakunya MEA, Presiden Jokowi menyerukan kepada segenap kalangan untuk berani memasuki era MEA dan menanggapi seluruh tantangan di dalamnya sebagai pemenang. Dengan kata lain, dibutuhkan keberanian untuk tetap optimis di era MEA ini. Tentu saja, sikap berani dan optimis ini tidak sama dengan sikap sembrono, nekat, apalagi ceroboh.*

*Salah satu bentuk keberanian yang perlu dimiliki oleh bangsa ini adalah berani mengakui keberagaman agama dan tradisi religius, menerima serta merawatnya agar menjadi kekuatan yang amat menentukan bagi kemajuan bangsa ini di segala bidang. Dalam keberagaman, janganlah persaingan atau perebutan kekuasaan yang ditonjolkan, tetapi mestinya kerukunanlah yang dijaga dan dirawat bersama. Setiap tradisi memiliki terang yang khas seperti bintang-bintang di langit. Kerukunan tidak dapat dibangun dengan menyepakati siapa yang pantas menjadi 'megabintang'. Kerukunan adalah merawat gemerlap bintang-bintang itu sebagai cahaya kehidupan yang menjaga nurani bangsa demi keadilan, persaudaraan, perdamaian dan keutuhan ciptaan.*

Manakala daku sedang membersihkan buku-buku yang lama tidak kusentuh, sampai lah daku pada sebuah buku berjudul PROVERBIA LATINA, Pepatah-pepatah Bahasa Latin yang sudah kumiliki sejak tahun 2005. Kucoba membacanya, siapa tahu menemukan pepatah yang menarik. Benar saja, kutemukan pepatah bahasa Latin yang tertulis pada judul di atas: *audentes fortuna juvat* yang terjemahannya nasib baik akan membantu mereka yang gagah berani (fortuna = Dewi nasib baik atau “keberuntungan”). Keberuntungan amat berkait erat (akan membantu atau akan mengiringi) dengan keberanian.

Masih kuingat jelas, tatkala Presiden Joko Widodo melantik para Menteri, mereka melipat lengan panjang kemeja mereka sambil berlari sebagai tanda ‘siap bekerja’. Begitu pula pidato beliau yang sering menekankan kata: “kerja...kerja... kerja...”. Pada akhir November 2015 lalu, beliau juga menyuntikkan semangat

berani berkompetisi dalam sebuah forum para pengusaha yang diadakan oleh *Kompas* dan *BNI* 46. Bahkan pada tanggal 26 Desember 2015, di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah yang dihadiri sekitar 1.500 kepala desa, Presiden Jokowi mengingatkan seluruh rakyat untuk berani memasuki era *Masyarakat Ekonomi Asean* (MEA) yang akan berlaku 5 hari lagi (1 Januari 2016), dan mengajak semua kepala desa berperan aktif dan memberi dukungan guna memaknai dan mengisi perubahan besar tersebut. Arus barang, modal, jasa, tenaga kerja dan investasi di pasar besar Asia Tenggara adalah kenyataan yang wajib dihadapi tanpa rasa khawatir dan takut.

Merujuk data *The Global Competitiveness Report 2015* dan *World Economic Forum 2015* : Indonesia berada pada peringkat ke 37 dari 140 negara di bumi ini. Posisi daya saing Indonesia masih berada di bawah Singapura peringkat ke 2, Malaysia (18), dan Thailand (32). Ditambah lagi, beberapa negara mampu mendapatkan bea masuk 0% ke negara-negara Eropa dan Jepang, sementara Indonesia dikenai tarif 5 – 40% saat memasukkan produk serupa. Nyali berkompetisi harus dilengkapi penyiapan dan peningkatan kapasitas, fasilitas dan kapabilitas sumber daya manusia untuk memastikan kita layak memasuki arena persaingan. Inilah saat nya perjuangan diwujudkan-nyatakan!

Ditambah lagi, laporan Bank Dunia menyebutkan bahwa 1% rumah tangga (sekitar 2,5 juta orang) terkaya di Indonesia menguasai 50,3% dari seluruh kekayaan di negeri tercinta ini. Jika kisaran ini diperbesar 10% orang menguasai 70% kekayaan. Data laporan ini membuktikan bahwa *ketimpangan* di Indonesia menduduki urutan ketiga setelah Rusia (66,2%) lalu Thailand (50,5%). Beberapa penyebab ketimpangan adalah tidak meratanya penguasaan aset uang dan properti, akses pada pendidikan berkualitas, air bersih dan sanitasi, kesenjangan upah antara pertanian dan non-pertanian, tidak meratanya kepemilikan lahan, dan korupsi.

Bila ketimpangan di atas terus dipelihara maka kegagalan meraih *Bonus Demografi* (BD) yang akan dimulai tahun 2016 dan berlangsung 15 – 20 tahun lagi niscaya akan terjadi. Apabila separo saja penduduk Indonesia tidak menikmati hasil pembangunan dan tidak berhasil mengakumulasi kemakmuran, kita pasti gagal melompat menjadi Negara berpendapatan menengah, dan lupakan saja BD yang menuntut 2 orang berdaya menanggung 1 orang tak berdaya. Ini berarti kita memilih menjadi Negara melarat dan kena laknat. Mau bersaing apa pula, *bah?*

Ternyata tidak hanya MEA dan BD mulai berlaku di tahun 2016, tetapi juga *Sustainable Development Goals* (SDGs) turut serta berlangsung dan bergabung meramaikan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. SDGs menggantikan *Milenium Development Goals* yang berakhir pada 31 Desember 2015. SDGs berisi 17 tujuan dan

169 target. SDGs telah disepakati oleh 193 negara pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 25 – 27 September 2015. Pada kesempatan itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla berpidato meyakinkan para peserta sidang bahwa SDGs sudah ada dalam Nawacita. *Wow, keren!*

*“Keberuntungan akan membantu mereka yang gagah berani”*. Keberanian menjalani kesepakatan besar untuk MEA dan SDGs amat diperlukan. Demikian pula keberanian untuk mencapai Bonus Demografi. Keberanian macam apa kah? Pasti bukan asal berani, apalagi berani yang sembrono dan ceroboh, apa saja ditabrak dan dilabrak. Menghalalkan segala cara, bahkan bila perlu pakai kekerasan guna menciptakan ketakutan dan kengerian untuk memamerkan betapa beraninya aku, siapa berani lawan aku! Berani mempropagandakan teror di ranah virtual, media sosial, dan sejenisnya. Inilah yang disebut *‘terorisme memasuki fase baru yang berdaya meracuni pikiran pula’*. Pasti bukan demikian makna keberanian.

Di nyaris pengujung tahun 2015, tepat nya hari Rabu tanggal 30 Desember 2015, di Jakarta, diselenggarakan acara *Malam Anugerah Kerukunan Beragama*. Salah satu pagelaran yang menarik adalah dendang syair ‘Bentang’ berbahasa Sunda oleh *Dewi Kanti* (40 tahun), anak bungsu dari pasangan *Emalia Wirganingsih* (73 tahun) dan *Pangeran Djatikusuma* (93 tahun), penulis syair dan tokoh sesepuh Sunda Wiwitan. Dewi sambil memetik kecapi diiringi seruling Sunda oleh temannya mendendangkan lagu ‘*Gandrung Gunung*’ khas Sunda yang sangat merdu, syahdu dan merayu kalbu. Lirik syair berbahasa Sunda dan terjemahan nya sebagai berikut:

*tuh itu bintang di langit* (lihatlah bintang di langit)  
*baranang patinggarenclang* (gemerlap bersinar terang)  
*bentang teh silih corongan* (bintang saling menerangi)  
*najan teu sarua caang* (meski tak sama terangnya)  
*nu herang jeung nu teu herang* (yang jernih dan yang redup)  
*bentang teu pacaang caang* (bintang tak beradu terang)  
*tapi luyu sauyunan* (namun kompak satu tujuan)  
*wayah unggah bareng miang* (saat naik saat pulang selalu beriringan)  
*nu gede jeung nu leutik* (yang besar dan yang kecil)  
*siloka pikeun manusa* (pertanda untuk manusia)  
*ngumbara di alam dunya* (mengembara di alam dunia)  
*ulah rek pakia kia* (jangan saling berselisih)

Penggalan syair *'bintang tak beradu terang'* amat relevan dengan sambutan Menteri Agama. Dalam sambutan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin mengapresiasi syair yang didendangkan tersebut dengan beberapa pernyataan: *"keberagaman agama di Tanah Air sudah 'given' atau pemberian yang tidak bisa ditolak. Keragaman dalam keberagamaan bukan untuk diseragamkan. Agama adalah suatu alat untuk menjaga prilaku diri sendiri terhadap orang lain. Agama bukanlah menjadi alat untuk menilai perilaku orang lain. Ketika agama digunakan untuk menghakimi orang lain, yang terjadi adalah konflik sosial yang dapat merusak bangunan kebangsaan. Bintang pun bisa berperan sebagai alat penerang dan penanda mangsa atau musim bagi manusia di bumi. Begitu pula agama, juga menjadi penerang langkah nyata kehidupan di muka bumi ini. Bintang yang terang dan redup, yang besar dan kecil selalu beriringan. Begitu pula hendaknya manusia, mau hidup beriringan dan jangan saling berselisih. Konflik sosial yang membawa agama akan sangat destruktif dan bisa turun ke generasi berikutnya"*. Begitulah ujaran pak Menteri Agama kita.

Niscaya kita juga setuju dengan kalimat-kalimat sambutan pak Lukman di atas. Saya jadi teringat bahwa ada banyak bintang di sekitar kita. Ada bintang radio, televisi, film, pelawak, tari, dan seterusnya di bidang seni budaya. Ada pula bintang sepak bola, volley, basket, buku tangkis, tenis, pingpong, dan masih banyak lagi di arena olah raga. Bagaimana bila mereka beradu terang? Wah, pasti sangat menarik! Sayangnya, para bintang itu tidak pernah beradu terang untuk menentukan siapa 'mahabintang' nya. Coba bayangkan, seandainya sebuah klub sepak bola yang bertaburan bintang, lalu dalam pertandingan para bintang berebut menjadi yang paling cemerlang, saya yakin tidak akan menang. Kemenangan diraih karena para bintang kompak dalam satu tujuan, yakni menang. Para bintang di bidang apa pun telah menyinari dan mengharumkan daerah mau pun bangsa dan Negara mereka. Bintang bukanlah matahari atau bulan yang tidak ada (lebih tepat dibaca: tidak boleh ada) kembarannya. Ada ribuan bahkan jutaan bintang bertaburan di langit yang kita tatap pada malam hari. Mereka bersama-sama menerangi jagat raya ini.

Syair 'Bentang' karya Pangeran Djatikusuma mengajak kita yang mengaku amat sangat beragama dan melakukan nilai-nilai keagamaan secara taat, kuat, sehat dan bermanfaat (bahkan ada yang 'dahsyat') untuk berperan dan berfungsi membangun kerukunan para bintang agama yang tak beradu terang. Kerukunan tidak dapat dibangun dengan menyepakati siapa yang pantas menjadi 'sang mahabintang'. Kerukunan dijaga dan dirawat oleh para bintang yang kompak bertujuan memperindah kehidupan melalui cahaya mereka masing-masing. Hidup yang gemilang-cemerlang dilahirkan dan dihadirkan oleh kilau cahaya terang para bintang yang beriringan menyinari bumi ini. Kerukunan juga mewajibkan adanya

kesetaraan umat manusia, bukan saling mendiskriminasi, menafikan, apalagi saling meniadakan.

Sebagai salah satu dari anak yang lahir di lingkungan Sunda Wiwitan, Dewi Kanti akrab dengan berbagai tekanan yang juga dialami oleh anak-anak Sunda Wiwitan di sekolah dasar dengan perlakuan diskriminatif oleh para guru dan teman mereka. “Ini adalah utang peradaban yang harus dibayar Negara”, kata Dewi. Tak mengherankan apabila Dewi sangat rajin berkomunikasi dengan sejumlah kelompok minoritas lain, seperti *Ugamo Malim* dan *Parbaringin* di Sumatera Utara serta *Sedulur Sikep* (juga dikenal dengan sebutan ‘Komunitas Samin’) di Jawa Tengah. Tujuannya adalah untuk saling menguatkan dan tidak gampang menyerah dalam mempertahankan kebhinekaan. Hebat benar dia! Pantas beliau menjadi salah satu penerima Australia Award Fellowship dalam program Indonesian Women Human Right Defender di Queensland University of Technology, Brisbane, pada tahun 2014.

Sebagai insan yang bergulat dan bergelut dalam persahabatan, persaudaraan, kerukunan dan kemanusiaan, karya Pangeran Djatikusuma dan Dewi Kanti menginspirasi, bahkan mencelikkan mata batin sanubari saya bahwa menerangi Indonesia memang susah, tapi bukan tidak mungkin apabila para bintang tak beradu terang; para bintang agama tak berselisih pandang; agama menjadi cahaya bintang yang hidup dan menghidupi perbedaan dalam kesetaraan tulus ikhlas.

Pernah kudengar orang bilang: “Kerukunan itu bagaikan *bunga* yang beraneka warna dalam sebuah taman”. Saya setuju. Namun ada pula yang membantahnya dengan berkata: “Tapi akarnya tidak sama”. Beta juga setuju bahwa akarnya tidak sama, namun siapa tahu akar yang tidak sama itu berada dalam tanah (yang tak terlihat oleh mata telanjang kita) ternyata tidak saling menghancurkan, malah sebaliknya mereka saling menyapa bersentuhan dan bercumbu rayu. Yang jelas, manakala daku memandang dan menikmati keelokan aneka warna kembang, ‘bunga tak beradu warna sempurna’. Wow, luar biasa!

Terbukti bahwa alam mengajarkan kepada kita tentang kerukunan dan kedamaian hidup dalam pluralitas lintas terang dan warna. Malu lah kita (kalau masih punya malu) sebagai makhluk bermartabat dan berharkat mulia yang diciptakan Tuhan Allah dengan penuh cinta untuk saling mencinta malah saling beradu, iri, dengki, benci dan mendiskriminasi. Ayo kita belajar banyak dari alam dan bumi ini!

Socrates pernah berujar: “*Kebajikan tidaklah datang dari uang, tetapi dari kebajikanlah uang dan hal baik lainnya datang kepada manusia, baik kepada individu mau pun Negara*”. Betul, keberanian menebarkan dan menyebarkan kebajikan. Sungguh, untuk memperbanyak kebajikan menuntut keberanian sekarang ini, karena banyak



orang cenderung lebih berani berbuat jahat dan salah katimbang berperilaku baik dan benar (apalagi kalau bersangkut-paut dengan uang). Keberanian berisi nilai-nilai hidup luhur, agung dan mulia, seperti kejujuran, kebenaran, keadilan, kemanusiaan, persahabatan, persaudaraan, perdamaian dan pemelihara keutuhan ciptaan. Nilai-nilai hidup tersebut menghindarkan kita berbuat curang manakala kita bersaing dan bertanding. Kebajikan mengajarkan kepada kita lewat bisikannya yang lembut namun jelas dan tegas: *“Ayo bersaing sembari ingat bahwa kita juga butuh bersaling; silahkan bertanding namun kita hidup bersanding juga!”*

Ada banyak pekerjaan di Tanah Air tercinta, Indonesia yang menantikan karya dan peran bersama kita (*‘menasionalkan agenda global dan mengglobalkan agenda nasional’*), antara lain: *Sustainable Development Goals* (SDGs = Pembangunan Berkelanjutan) 2016 – 2030; Bonus Demografi 2030; Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berarah dan bermakna; Gerakan Membangun Desa sebagai wujud melaksanakan UU Desa; segudang masalah ekologis yang serius akan berdatangan susul-menyusul; dan lain sebagainya. Tidak akan ada perubahan di negeri ini tanpa melibatkan pemerintah. Pintu masuk untuk melibatkan pemerintah adalah ekonomi, ekologi, sosial dan budaya.

Pada akhirnya, daku menganjurkan: **“TETAPLAH MENJADI BINTANG YANG TAK BERADU TERANG DAN BUNGA YANG TAK BERADU WANGI-WARNA SEMPURNA”** dalam menjalani dan memaknai globalisasi dengan membangun dan memperjuangkan kerukunan, keadilan, kemanusiaan, persahabatan, persaudaraan, perdamaian dan keutuhan ciptaan!

**GLOBALISASI: MASALAH BAGI  
IDENTITAS INDONESIA?  
Catatan Diskusi Panel Pembicara Utama**

Oleh Agustinus Ryadi <sup>1</sup>

*Identitas merupakan sesuatu yang tak pernah utuh.*

-Edward Said-

Globalisasi ibarat bola salju yang menggelinding dari atas puncak gunung. Yang dilewatinya pasti terkena dampaknya, entah dingin bola salju tersebut, gesekan antar permukaan.

Tidak ada suatu masyarakat di dunia ini yang tidak terkena dampaknya. Globalisasi merupakan produk perkembangan ilmu pengetahuan, inovasi dan teknologi yang semakin mengecilkan tapal batas politik dan geografi. Globalisasi juga merupakan hasil dari proses perubahan besar-besaran di dunia finansial, manajemen perusahaan, dan tata kepengurusan negara modern yang semakin terbuka dan demokratis. Namun yang mendasar adalah sifat inheren manusia (selalu ingin tahu, lebih bebas, lebih maju, lebih terkoneksi) mendorong globalisasi.

### **Arus Globalisasi**

*Steering Committee* memberi pengantar pada awal Simposium. Anastasia Jessica memberi pertanyaan: “Apakah Indonesia merupakan negara sedang berkembang yang masih membicarakan globalisasi?”. Simon Untara menawarkan pemahaman tentang globalisasi dengan rumusan suatu perkembangan hidup manusia dalam mengatasi kesulitan-kesulitan hidupnya. Ada dua ekstrem yang muncul, pemuliaan globalisasi dan penolakan globalisasi.

Itulah yang ditengarai pada Simposium Nasional V, “Membentuk Identitas Indonesia dalam Arus Globalisasi”, di Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala, Surabaya, 2 April 2016. Mengkritisi arus globalisasi sangat penting karena berarti ada kesadaran untuk menentukan identitasnya dalam kancah global. Masalah yang ditimbulkan oleh globalisasi adalah pada saat pertumbuhan dunia diukur hanya

---

<sup>1</sup> Pengajar Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.  
Alamat email: [gusrynew@gmail.com](mailto:gusrynew@gmail.com)

melalui pasar dan teknologi (Liberalisasi) dan kehidupan yang melulu soal pemenuhan kenikmatan lahiriah (Kapitalisme). Yang berbahaya adalah pemberhentian dialog, diskusi dan pembentukan terus menerus sesuai dengan konteks zaman.

Simposium itu menarik karena diselenggarakan Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala, Surabaya untuk kelima kalinya setelah 6 (enam) tahun berdiri dan menyimpulkan berupa rekomendasi yang membantu perkembangan kehidupan masyarakat. “Globalisasi menimbulkan masalah pada Identitas” menjadi titik pijak simposium.

Berbagai referensi menunjukkan bahwa globalisasi memiliki pelbagai wajah. Armada Riyanto, Guru Besar & Direktur Program Magister STF Widya Sasana, Malang, memulai mengkurat wajah globalisasi dengan menekankan tiga (3) hal pokok, yakni metodologi, *fallacy* dan pertanyaan. Metodologi dibutuhkan sebagai cara yang teratur untuk memahami kehidupan sehari-hari yang cepat berubah. *Fallacy* merupakan cara pembuktian salah suatu pernyataan. Armada memberi contoh SBY klaim 5 keberhasilan pemimpin Indonesia (<http://www.neraca.co.id/article/44426/sby-klaim-5-keberhasilan-pimpin-indonesia-10-tahun-menjabat>, diunduh pada tanggal 1 Mei 2016, pk.11.40). De facto, klaim-klaim SBY tidak terbukti dalam kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia. Sedangkan pertanyaan merupakan buah kekritisan terhadap pernyataan atau fenomena kehidupan.

Budi Susanto, Pengajar Program Pascasarjana Ilmu Religi dan Budaya, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, berpendapat bahwa dasar dari globalisasi adalah imajinasi. Imajinasi Nasional, contohnya, dibangun untuk mengglobalkan rasa persaudaraan se tanah air. Lebih jauh lagi, globalisasi dapat menjadi masalah “kontestasi imajinasi” atau debat imajinasi yang menimbulkan ketakutan-ketakutan tertentu. Ada masa di mana pengurus negara Indonesia begitu takut dengan karya-karya Pramoedya Ananta Toer sehingga ada sensor terhadap buku-buku PAT.

Agus Sunyoto, Ketua LESBUMI (Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia) Nahdatul Ulama, memulai presentasi dengan bertitik tolak dari “bentrokan budaya” metafor kekerasan Samuel Huntington. Konflik perang dingin antara kapitalisme dan komunisme telah digantikan oleh konflik antar peradaban, terutama peradaban Barat (yang ditandai oleh kebudayaan universal) dan Islam (yang dipandang sebagai imperialisme). Agus melihat bahwa globalisasi memiliki hubungannya dengan kemenangan kapitalisme. Gereja Katolik di Situbondo dan gereja Katolik di Tasikmalaya dirusak, bahkan dibakar. Karena gereja-gereja merupakan lambang kapitalisme menurut orang Islam.

## Merajut Identitas

Abad ini juga menandai munculnya serangkaian upaya merajut identitas Indonesia dengan berbagai instrumen budaya lokal dan kearifan lokal.

Agus Sunyoto menyatakan posisi NU (Nahdatul Ulama) sebagai resistensi (*resistance identity*, lih. Manuel Castells [2001], hlm.9) terhadap globalisasi yang merusak identitas Indonesia. KH Sahal Mahfudh Raim Aam, MA menegaskan bahwa “NU lahir dan berkembang dengan corak dan budayanya sendiri sebagai organisasi keagamaan dan sekaligus organisasi kemasyarakatan” pada pidato Iftitah di Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU, Kamis, 27 Juli 2006 di Surabaya (<http://www.santrijagad.org/2014/10/agama-dan-tradisi-kultural.html>, diunduh pada tanggal 1 Mei 2016, pk.12.30). NU sebagai organisasi yang berwatak keagamaan Ahlusunnah Wal Jama’ah, menampilkan sikap akomodatif terhadap mashab keagamaan yang ada di sekitarnya. NU sebagai organisasi kemasyarakatan menampilkan sikap tolerans terhadap nilai-nilai lokal. Upaya dari komunitas NU untuk menanggapi tergerusnya/tidak adanya identitas Indonesia adalah membela budaya lokal dengan semangat empat puluh lima (1945).

Armada Riyanto menekankan untuk kembali kepada keseharian masyarakat Indonesia dengan menggunakan metodologi lokal. Ia membuktikan bahwa banyak insan Indonesia memiliki kesalahpahaman tentang identitas. Kita marah besar terhadap penjual terompet yang menggunakan kertas Al-Quran yang salah cetak. Namun kita tidak marah pada saat ada pejabat yang korup terhadap biaya pencetakan Al-Quran. Solusinya kita perlu mengubah cara berpikir kita tentang identitas. Konsep nasionalisme Indonesia (Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia) harus mengedepankan “skema pembentukan societias-kolaboratif “ yang menjunjung tinggi keberagaman.

Sedangkan, Budi Susanto menekankan cara paket campuran imajinasi. Ia mengusulkan suatu cara kontestasi imajinasi yang menimbulkan harapan (imajinasi bersama) untuk membentuk identitas Indonesia dalam arus globalisasi. Film *New Rules* dapat dimanfaatkan sebagai imajinasi bersama untuk mempersiapkan Indonesia menghadapi ekonomi global. Contoh-contoh lain yang merupakan campuran imajinasi adalah novel-novel dari Yudhistira ANM Massardi (Arjuna Mencari Cinta I [1977], Arjuna Mencari Cinta II [180], Yudhistira Duda [1981], Arjuna Wiwaha [1984], Wanita dalam Imajinasi [1994]) dan Eka Kurniawan (Cantik Itu Luka [2002], Lelaki Harimau [2004]).

Lalu apa yang perlu kita berbuat?

**APAKAH GLOBALISASI  
(Bahan Bacaan 1)  
dan  
“DE-PANCASILA-ISASI” DAN NASIONALISME  
(Bahan Bacaan 2)**

Oleh Armada Riyanto

**Abstrak**

*Ketika rivalitas ideologi dunia saling bertubrukan, para Pendiri Negara ini secara amat brilian mendefinisikan sebuah ideologi yang rekonsiliatif dengan kodrat Indonesia, “Pancasila”. Pancasila adalah kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa yang telah ada selama berabad-abad. Dengan Pancasila, identitas ideologi negara ini dengan melangkah mengatasi sekat-sekat primordial. Artinya, identitas itu tidak dimaknai secara personal, melainkan inter-personal; tidak per-golongan atau antargolongan, melainkan keseluruhan; tidak agamis, melainkan transendental-kultural-religius; tidak rasial, melainkan cita rasa bangsa; tidak historis dominasi mayoritas, melainkan peradaban kehidupan. Dalam memikirkan identitas, para Pendiri negara ini meletakkan fondasi filsafat yang sangat kokoh, yang jauh melampaui primordialitas. Kini, di era milenia baru, societies Indonesia terkadang masih ada dalam kegamangan. Ketika globalisasi, multikulturalisme, pluralisme, postmodernisme campur baur membangun peradaban tata dunia baru, Indonesia di sana sini terseok oleh aneka konflik kepentingan primordial. Inilah ‘krisis Identitas’ yang dialami oleh bangsa ini. Berhadapan dengan kondisi itu, konsep nasionalisme kita saat ini haruslah lebih mengedepankan skema-skema pembentukan societies kolaboratif yang menjunjung tinggi keanekaragaman dan tidak mereduksinya dalam keseragaman.*

**Kata kunci:** *Krisis Identitas, de-pancasilaisasi, societies negosiatif, Ideologi, Nasionalisme*

Pertanyaan tentang apakah itu “globalisasi” seringkali memiliki jawaban yang beraneka. Menurut saya terminologi “globalisasi” telah populer satu dua dekade silam. Saat ini mungkin bukan lagi zaman ekonomi “globalisasi” melainkan sudah bergeser ke ekonomi “aplikasi”. Tetapi, imbas pergeserannya bukan hanya perkara ekonomi melainkan menyentuh kehidupan sehari-hari. Bila orang masih berkuat pada mentalitas masa silam (yang lamban), dia benar benar akan tersingkir secara natural. Mungkin tidak terjadi secara cepat, tetapi bergulirnya seakan pasti.

Berikut ini nukilan tulisan tentang “globalisasi” yang pernah diterbitkan oleh *Seri Filsafat Teologi Widya Sasana, Malang* tahun 2007. Kendati silam, gagasan-gagasan pengertiannya saya pandang masih relevan untuk klarifikasi terminologi “globalisasi”. Anthony Giddens barangkali salah satunya yang tidak sekedar mengaitkan globalisasi dengan perkara ekonomi. *However*, klarifikasi ranah ekonomi globalisasi barangkali perlu disimak.

## Beberapa Definisi Badai “Globalisasi”

Dalam apa yang disebut “badai” globalisasi, dimaksudkan sebuah gelombang model relasi antarmanusia yang menerpa siapa pun. Tidak ada yang mampu mengelakkannya. Globalisasi tidak sekedar sebuah terminologi. Globalisasi merupakan fenomena kunci untuk dunia bisnis antarbangsa manusia tetapi juga menjadi tema penting diskusi akademik di seluruh dunia. Jan Aart Scholte membantu kita untuk memiliki beberapa gambaran konkret berkaitan dengan definisi globalisasi.<sup>1</sup> Menurut Scholte, terdapat lima rincian pengertian tentang globalisasi yang pada umumnya disebutkan:

### *Globalization as internationalization*

Dalam pengertian ini, globalisasi dimaknai sebagai internasionalisasi relasi antarbangsa. Globalisasi merupakan lukisan ketergantungan satu sama lain masyarakat internasional. Pengertian semacam ini konkret dalam kaitannya dengan aneka perkembangan lalu lintas perdagangan antarnegara, antarbangsa, antarinstansi di dunia ini. Aktivitas transaksi pasar sudah bukan lagi berupa penawaran dan pembelian melainkan menampilkan keterkaitan yang begitu dekat satu sama lain dan saling berpengaruh. Perubahan kebijakan fiskal yang terjadi dalam suatu negara telah berpengaruh secara konkret terhadap negara lain. Judul-judul “*globalized market*” dunia yang santer akhir-akhir ini: “Bursa Saham Global Mengharu Biru Terkena Hempasan Krisis *Subprime Mortgage*”, “Krisis *Subprime Mortgage* AS Terus Menelan Korban”, “Kredit Macet, *Subprime Mortgage*, di AS, kok Kita Kena?”, “Dolar AS Masih Terpuruk [Akibat Krisis *Subprime Mortgage*], Euro melambung, Rupiah Lari Kencang, IHSG Kalem”, dan seterusnya.<sup>2</sup> Judul-judul ini langsung mengatakan saling ketergantungan yang nyata atas apa yang terjadi dalam pasar internasional.

### *Globalization as liberalization*

Dalam aneka peristiwa perundingan tingkat dunia, negara-negara kerap memaksudkan globalisasi sebagai sebuah strategi liberalisasi perdagangan sedemikian rupa sehingga persaingan ekonomi menjadi sangat kejam terutama yang dialami oleh negara-negara yang infrastruktur dan sumber daya manusianya masih tertinggal. Globalisasi di sini mengajukan pengertian model ekonomi dunia yang

<sup>1</sup> Jan Aart Scholte, “Definition of Globalization”, [http://www.infed.org/biblio/defining\\_globalization.htm](http://www.infed.org/biblio/defining_globalization.htm) (Accessed on September 20, 2007). Cf. Scholte, J. A., *Globalization. A critical introduction*, London: Palgrave, 2000, 15-17.

<sup>2</sup> Judul-judul ini berasal dari Detik.com Keuangan (accessed 23 September 2007).

“borderless” (tanpa pembatas), “open” (terbuka). Repotnya, negara-negara yang kuat dan kokoh dalam neraca perdagangannya mengklaim bahwa inilah globalisasi yang sesungguhnya, yaitu ketika pemberlakuan tarif biaya masuk dinolkan sehingga lalu lintas perdagangan menjadi bebas. Para eksponen anti-globalisasi menyebut realitas “perdagangan bebas” semacam ini tidak lebih dari bentuk kolonialisme baru (*neokolonialisme*) dari negara kuat terhadap yang lemah dalam bidang ekonomi *in the name of globalization*. Peralnya, negara yang kaya semakin kaya, negara yang miskin semakin miskin karena produk-produk industri dan kerajinannya tidak mampu bersaing. Mereka yang anti-globalisasi juga menyebut bahwa globalisasi sesungguhnya tidak lebih dari sekedar “soft terminology” untuk kapitalisme baru.

### ***Globalization as universalization***

Ketika televisi BBC sudah dapat dilihat dari desa gunung, Petungsewu, Malang, terjadi sebuah fenomena baru. Yaitu, universalisasi informasi dunia. Tidak sekedar itu, di bilik kamar Anda, ketika melakukan *browsing internet*, perpustakaan di seluruh dunia ada di depan mata Anda. Amazing. Sungguh sayang, masih banyak dari kita yang melihat komputer sekedar sebagai sebuah mesin ketik. Sebagian yang lain, tergolek tergoda segala hal buruk yang ditawarkan. Atau, para mahasiswa dan pelajar kerap lebih tergoda untuk *chatting* dengan *friendster* atau yang lain, ketimbang melakukan riset ilmiah untuk pengembangan disiplin ilmu yang ditekuni. Proses globalisasi semacam ini dapat diringkas dalam simbol *www-isme (World Wide Web)*. Sungguh, jika selektif, cerdas, dan menjalankan studi secara konkret dan rajin memperbaharui diri, orang akan mendapatkan segala hal yang luar biasa. Studi tidak lagi berupa menghapuskan diktat atau membuat catatan atas apa yang dikatakan dosen di kelas lantas diingat-ingat dan “dimuntahkan” lagi ketika ujian. Melainkan, studi menjadi sebuah aktivitas eksplorasi dan kreasi tiada batas. Keseluruhan proses luar biasa perkembangan informasi dunia depan mata Anda ini namanya “universalisasi”.

### ***Globalization as westernization or modernization or MacDonalidization***

Umumnya sebutan ini untuk menandai “warung MacDonald” yang sudah ada di pojokan jalan Basuki Rahmat, di belakang rumah kita sendiri. “Made in USA” ini kini tidak perlu dilihat di televisi tetapi langsung menjadi warung sehari-hari kita. Invasi “Made in USA” dan disusul dengan “made in China or Italy” atau yang lain disebut sebagai fenomena konkret globalisasi. Globalisasi lantas identik dengan westernisasi atau lebih konkret lagi, MacDonaldisasi. Proses ini menyenangkan di satu pihak karena terlihat *modern* (pojok Jalan Basuki Rahmat, Malang seperti

tiada bedanya dengan pojok Oxford Street, London karena ada MacDonald-nya!), tetapi juga mencemaskan karena “Warung Pojok” kita telah diganti oleh warung MacDonaldd di lain pihak. Ujung-ujungnya, tanpa kita sadari ruang hidup kita menjadi ramai sekaligus sempit. Lihatlah lapangan di Jalan Tenes, Malang yang luluh lantak oleh pendirian supermarket baru yang sudah pasti akan ramai dikeroyok oleh “*made in China, Italy, USA, Singapore, Taiwan*” dan seterusnya. Akibatnya, kita bukan hanya terpepet habis tetapi juga secara kultural terdesak dan melakukan “bunuh diri” *self-destroying* mengenai kultur sendiri dan determinasi diri. Ruang publik kita lantas sempit, dan akhirnya lenyap. Tidak ada lagi pemandangan yang luas, tempat nongkrong bercengkerama di keremangan malam minggu, asyik ngobrol. Tidak hanya itu, tidak ada lagi “tape ketan” atau “rondo royal” atau “semar mendem”. Semuanya telah diganti dengan menu-menu *Mac-D*, menu modern!

### ***Globalization as deterritorialization***

Kemajuan komunikasi membuat jarak ribuan kilometer tidak bermakna. Rasa rindu atau kangen terhadap yang dicintai mudah sekali menemukan sarana pemenuhannya. Globalisasi telah menjadi sebuah intensifikasi komunikasi sedemikian rupa sehingga segala prosedur, protokol dalam berelasi menjadi tidak lagi penting. Lihatlah, untuk menulis tentang “globalisasi” ini penulis secara amat sederhana dapat berkontak langsung dengan Prof. Anthony Giddens di London yang sebelumnya belum pernah saya jumpai dan tidak pernah kenal satu sama lain. Giddens menyebut fenomena globalisasi sebagai “*the intensification of worldwide social relations which link distant localities in such a way that local happenings are shaped by events occurring many miles away and vice versa*”. Intensifikasi memaksudkan akses cepat, sederhana, efektif, konkret. Bisa dibayangkan apabila hal ini diaplikasikan pada ranah bisnis dan aktivitas ekonomi. Betapa dahsyat efektivitasnya. Istilah “deteritorialisasi” mengatakan lenyapnya wilayah atau teritori fisik sebagai penghalang “*globalized world*”. Deteritorialisasi juga dapat disebut “*supraterritoriality*” or “*trans-world relation*”. Karena teritori tidak lagi determinatif dalam hidup manusia, imbas lain yang konkret ialah kesadaran identitas yang perlahan lenyap. Hal semacam ini konkret di negara-negara Eropa yang telah membentuk apa yang disebut “pemerintahan komuniter”, Uni-Eropa. Dalam sistem komuniter global semacam itu, tidak penting lagi identitas karakter lokal sebagai yang sangat menentukan.

Bagaimanapun juga, lima pengertian di atas tidak tanpa kritik. Martin Shaw menyimak bahwa definisi-definisi Scholte sepertinya kurang memberi aksentuasi pada recognisi dan kreasi manusia-manusia. Artinya, interrelasi yang demikian luas



dan tiada batas, menurut Shaw, terlalu disimak pada aspek karakter modelnya yang trans-spasial (mengatasi ruang) dan kurang menampilkan konsentrasi kepada proses pembentukan komunitas-komunitas manusia baru.

Scholte's focus falls into the trap of confusing a shift in the *content* of social relations for changes in their spatial *form*, 'a question of sociology for one of geography'. Scholte's argument misses the maximum sense of the global: the recognition of human commonality on a worldwide scale, in the double sense that the world framework is increasingly constitutive of society, and of emergent common values. It is not that supraterritorial spaces are growing more important, but that both territorial and supraterritorial spaces - more fundamentally national-international as well as supranational-transnational *relations* - are *both* globalized in this double sense. In other words, the current scale, scope and speed of change in the spheres that Scholte labels as universalization and internationalization is such that it is possible to talk of our being in a qualitatively different situation. This shift, has a profound effect on the way we experience place (and vice versa).<sup>3</sup>

### ***Globalization as dialogicalization***

Kritik Martin Shaw membangkitkan inspirasi bagi saya untuk menambahkan pengertian baru, yakni globalisasi sebagai dialogalisasi. Di sini, dengan "dialogalisasi" (dari ajektif, "dialogal") saya maksudkan bahwa fenomena globalisasi mengajukan aksentuasi karakter ranah dialogal dalam tatanan hidup manusia di dunia. Bahkan fenomena dialogal adalah kriteria dari apa yang kita maksudkan sebagai sebuah tatanan baik dari hidup bersama. Ketika sebuah tatanan melenyapkan dialogalitas, kita menyebutnya sebagai sebuah bentuk kegagalan, ketragisan, kefatalan. Yang paling anyar dari kebenaran ini adalah apa yang tengah terjadi di Myanmar (Birma). Junta Militer yang membasmi gerakan demo damai para bhiksu menuai kutukan sekaligus embargo dan sabotase dari segala penjuru dunia. Jelas apa yang dikerjakan junta militer ialah pelenyapan dialog. Kebalikannya, sebuah fakta dialog memungkinkan segala hal baru yang mencengangkan. Dalam jalan pikiran ini, fenomena pulihnya secara perlahan namun pasti dialog Vatikan dan Cina yang ditandai dengan ditahbiskannya Uskup Beijing, pilihan Vatikan, mengalirkan cahaya pengharapan baru. Dalam hidup

<sup>3</sup> Shaw, M. (2001) 'Review - Jan Aart Scholte: *Globalization. A critical introduction*', *Milleneum*. A journal of international studies, <http://www.sussex.ac.uk/Users/hafa3/scholte.htm> (Accessed on September 10, 2007).

sehari-hari, di tanah air kita sendiri, fenomena dialogal menjadi emblem tatanan kebersamaan yang plural. Dialogalitas adalah rasionalitas. *Globalized society* identik dengan *societas dialogal*. Menafikan karakter dialogal sama dengan menyimpang dari jalur kodrati kesempurnaan tata hidup bersama. Poin pengertian globalisasi sebagai dialogalisasi ini merupakan aspek positif, tetapi tidak dari sendirinya demikian. *Societas dialogal* merupakan tantangan yang harus diperjuangkan.<sup>4</sup>

### ***Globalisasi dalam Adam Smith, Tiglitz, Soros, Giddens***

Fenomena globalisasi tidak terjadi serta-merta. Mula-mula globalisasi memiliki sejarah ide tentang pasar bebas milik Adam Smith. Kajian tentang globalisasi ekonomi saat ini juga tak bisa dipisahkan dari sumbangan ide Joseph E. Tiglitz, pemenang Nobel Ekonomi 2001. Sementara itu, George Soros, salah satu pelaku utama pasar global, yang mendadak namanya disebut-sebut sebagai salah satu pembobol ekonomi Asia tahun 1997, mengaitkankan globalisasi dengan ide tentang *open society*. Anthony Giddens pada gilirannya mengajukan tesis bahwa globalisasi bukanlah *par excellence* perkara ekonomi melainkan relasi *societas* dunia yang berubah dahsyat secara keseluruhan.

### ***“Globalization” in Adam Smith***

Adam Smith (1723-1790), filosof Skotlandia, bukanlah pencetus globalisasi. Tetapi, gagasannya yang dia rangkum dalam lima seri buku monumental berjudul *Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (terbit 17 Maret 1779) menggelindingkan konsep ekonomi pasar bebas dan kapitalisme yang menjadi cikal bakal ekonomi global. Konteks buku ini adalah periode Pencerahan yang sangat mendewakan ratio, akal budi, ilmu pengetahuan. Francis Bacon mendeklarasikan: *science is power*. Orang Eropa kerap mengasalkan *Western Culture* mengalir dari periode *Enlightenment*.

Judul panjang bukunya kerap diringkas sebagai *Wealth of Nations*, “kekayaan atau kemakmuran bangsa-bangsa”. Smith adalah pionir ilmu ekonomi modern. Dalam menggagas bagaimana agar relasi perdagangan antarbangsa dapat saling memakmurkan, ia keluar dari pakem yang ada pada waktu itu.

Pakem teori ekonomi kala itu disebut *mercantilism*, suatu teori ekonomi yang mengatakan bahwa kesejahteraan negara hanya menjadi mungkin kalau aset atau modal yang dimiliki cukup besar serta melakukan perdagangan yang menguntungkan.

<sup>4</sup> Lih. Armada Riyanto, “*Societas Dialogal*”, “*Societas Negosiatif*”, dalam <http://www.societasdialogal.blogspot.com> [5 Maret 2016].

Aset ekonomi atau modal negara dapat digambarkan secara nyata dengan jumlah kapital (terutama emas maupun komoditas lainnya) yang dimiliki oleh negara dan modal ini bisa diperbesar jumlahnya dengan meningkatkan ekspor. Merkantilisme mengajarkan bahwa pemerintahan suatu negara harus mencapai tujuan ini dengan melakukan perlindungan terhadap perekonomiannya (proteksi), mendorong ekspor (dengan banyak insentif) dan mengurangi impor (dengan pemberlakuan tarif tinggi biaya masuk). Kebijakan ekonomi yang bekerja dengan mekanisme seperti inilah yang dinamakan sistem ekonomi merkantilisme.

Smith punya ide revolusioner pada zamannya. Menurutnya, perdagangan bebas yang dari sendirinya memiliki cara kerja persaingan akan memicu banyak kemajuan dan kemakmuran luar biasa bagi negara-negara. *Wealth of Nations* mempromosikan kebenaran bahwa pasar memiliki mekanisme yang secara natural akan memberi keuntungan kepada para pelakunya. Sebaliknya, setiap restriksi dan pengekangan akan mengacaukan kodrat lalu lintas perdagangan. Smith mendasarkan teorinya pada konsep tentang manusia sebagai individu bebas yang memiliki interese (sekaligus di sisi gelapnya, ketamakan) dan rasionalitas.

Menurut Smith, yang kita tunggu-tunggu dalam mekanisme pasar bukanlah kebaikan para pelakunya (para pedagang), tetapi rasionalitas mereka dalam menggarap interesenya. Artinya, bila kita ingin membeli sebuah barang, janganlah kita mengharapkan “kebaikan hati” si penjual untuk menurunkan harganya. Yang harus kita harapkan (dan setiap kali kita andaikan), si penjual memasang harga sedemikian rupa sehingga secara rasional memberi keuntungan yang sepadan baginya dan kita pun tidak dibuatnya rugi bila memutuskan untuk membelinya. Ungkapan yang sangat terkenal dari Smith tentang ini dari *Wealth of Nations* demikian:

*It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker that we expect our dinner, but from their regard to their own interest. We address ourselves, not to their humanity but to their self-love, and never talk to them of our own necessities but of their advantages.*<sup>5</sup>

Smith meyakini kebenaran bahwa mengenai bagaimana pedagang memasang harga sedemikian rupa, tidak ada ketentuan manusia atau institusi macam apa pun

<sup>5</sup> “Bukanlah kebaikan dari tukang daging, tukang bir, atau tukang roti yang kita harapkan untuk makan malam kita, tetapi kepedulian mereka pada kepentingan mereka sendiri. Kita berkata kepada diri kita, bukan soal kebaikan manusiawi [dari para pedagang] tetapi pada kecintaan mereka pada diri sendiri [tin dakan mereka ditentukan], dan jangan pernah bicara pada mereka mengenai kebutuhan kita tetapi [perbincangkanlah] mengenai keuntungan mereka.”

yang mampu mengatur atau mengekanginya.<sup>6</sup> Sebab, bila harga yang mereka pasang terlalu tinggi, sudah pasti pasar akan merespon negatif. Barang tersebut terancam tidak laku. Dan, bila tidak laku, mereka pasti akan menyesuaikan harganya. Proses pasar di tangan para pelaku perdagangan semacam ini mendapat sebutan dalam bahasa Perancis, *laissez-faire*, yang berarti “biarkan [mereka] berbuat [menurut pertimbangannya]”.

Sebuah pasar yang kacau, menurut opini Smith, akan secara kodrati dipandu oleh “*invisible hands*”. Artinya, jika kelangkaan produk barang tertentu terjadi, misalnya, harga pasti naik, dan kenyataan itu akan membuat marjin keuntungan yang menjadi insentif daya dorong bagi yang lain untuk masuk ke produksi barang tersebut. Kelangkaan pun perlahan dapat diatasi. Tetapi, jika terlalu banyak produsen yang masuk ke pasar, kompetisi pasti meningkat dan kenaikan penawaran (karena kompetisi) akan membuat harga produk tersebut turun sampai titik tertentu dimana biaya keuntungan sepadan dan tidak berlebih dari biaya produksinya. Bahkan jika keuntungan sampai titik nol pada “harga natural”, maka akan ada insentif untuk memproduksi barang dan jasa, dan semua ongkos produksi, termasuk kompensasi untuk buruh dan pemilik, juga dimasukkan dalam harga barang jual. Sehingga, dari pembagian kerja tersebut, *toh* akan dapat diperoleh keuntungan (dengan dalih kompensasi dari macam-macam jasa). Jika harga jatuh di bawah keuntungan nol, produsen pasti akan keluar dari pasar untuk sementara atau beralih kepada produk alternatif (yang secara natural akan membuat pasar tidak jenuh oleh pasokan satu model barang). Dan, jika mereka melihat aktivitas produksi barang alternatif memberi keuntungan, produsen lain akan masuk ke pasar. Dan demikian seterusnya pasar itu bergerak “bebas”, tetapi sesungguhnya tidak sebebas-bebasnya.

Smith juga percaya kalau motivasi manusia seringkali egois dan tamak, sebab itu memang sifat manusia dan lebih-lebih mereka yang memiliki kekayaan. Namun demikian ia beranggapan bahwa Kompetisi dalam pasar bebas akan menguntungkan masyarakat seluruhnya dengan memaksa harga tetap rendah.

Apa yang dikawatirkan oleh Smith adalah monopoli. Filosof John Locke berkata bahwa individu memang bebas berbuat apa saja untuk membela kepentingan hak miliknya. Tetapi, menurut Locke, *hal itu tidak tanpa batas*. Batas kepemilikan manusia terletak pada kenyataan bahwa manusia tidak dapat mengkonsumsi segalanya dalam jumlah semaunya demi dirinya sendiri. Sejalan dengan “individualisme” Lockian

<sup>6</sup> Keyakinan Smith terungkap dalam kutipan berikut: “*People of the same trade seldom meet together, even for merriment and diversion, but the conversation ends in a conspiracy against the public, or in some contrivance to raise prices. It is impossible indeed to prevent such meetings, by any law which either could be executed, or would be consistent with liberty and justice.*” (Wealth of Nations).

yang sesungguhnya bukan tanpa batas, Smith meyakini bahwa monopoli merupakan praktek pasar yang tidak adil. Sebab secara etis monopoli melukiskan penguasaan egoistis dan kesombongan manusia. Hanya, Adam Smith belum bisa merinci cara-cara bagaimana sebuah bentuk pasar dapat “mencegah” monopoli tanpa campur tangan kekuatan penguasa/pemerintah. Sebab, Smith dengan keras menyerang pembatasan dan intervensi pemerintah dalam pasar, yang ia yakini justru akan meruntuhkan emosi pasar dan mengendorkan ekspansi industri serta diversifikasi perdagangan. Yang Smith tolak juga termasuk di dalamnya tarif atau biaya masuk produk-produk impor, karena secara natural akan melambungkan harganya dan mengerem pasar, yang pada saatnya juga akan dibalas oleh negara lain dan secara konkret juga akan berimbas pada pengurangan produk-produk ekspor sendiri.

Gagasan terakhir yang telah dikatakan Smith pada abad ke-18 ini menjadi konkret dalam apa yang disebut perdagangan global saat ini. Ketika mainan anak-anak produk Cina mendapat pengawalan ketat karena ada indikasi bahaya untuk anak (karena zat kimia dalam pewarnaan maupun bahannya), Cina membalas dengan melarang barang-barang produk ekspor Indonesia berupa makanan laut dengan dalih mengandung formalin dan zat kimia lain yang membahayakan.

Gambaran ekonomi pasar bebas Smithian sesungguhnya tidak hanya melukiskan relasi dagang dan bagaimana pasar bekerja secara bebas. Tetapi, teori Smith juga mencetuskan kebenaran bahwa antarbangsa, para pelaku pasar, sesungguhnya menampilkan relasi ketergantungan satu sama lain. Smith mungkin belum merinci secara detail tentang pasar saham/modal, tetapi lalu lintas perdagangan kapital bebas semacam ini jelas mendahului fenomena globalisasi zaman sekarang. Smith sudah memiliki alasannya dua abad yang lalu mengapa kredit macet *sub-prime mortgage* (kredit perumahan beresiko tinggi) di Amerika Serikat yang terjadi baru-baru ini toh juga berimbas kepada kelesuan pasar bisnis Indonesia dan dunia. Menteri keuangan Jerman, misalnya, sudah memperingatkan masa-masa sulit akan dialami bisnis Jerman, sebab ketika Dollar turun nilainya dihadapan mata uang Euro (karena kasus kredit macet tersebut) barang-barang ekspor Jerman ke Amerika mendadak akan menjadi lebih mahal dan akibatnya permintaan pasti akan merosot. Dan, apabila itu terjadi, industri Jerman dapat diramalkan akan mengalami masa-masa paceklik paling sedikit selama beberapa saat ke depan sampai ada kebijakan-kebijakan perimbangan baru.

Dalam gambaran teorinya yang demikian, memang tidak keliru jika Adam Smith kerap dipandang sebagai pencetus “benih-benih globalisasi”. Smith tentu belum dapat menjangkau segala kekompleksan relasi antarmanusia modern saat ini,

tetapi promosi pasar bebasnya telah berkembang sedemikian rupa sehingga menggilas konsep-konsep ekonomi tradisional.

### *Globalization in Joseph E. Stiglitz*

Joseph Stiglitz adalah pemenang Nobel dalam bidang ekonomi tahun 2001. Ia pernah menjabat sebagai “*Chairman of the US Council of Economic Advisers*” di bawah administrasi Presiden Bill Clinton. Dia juga “*Senior Vice President and Chief Economist of the World Bank*”, profesor di departemen ekonomi universitas Stanford, Yale, Princeton, Oxford dan terakhir Columbia. Pandangannya tentang pentingnya memperhatikan dinamika informasi dan perubahan teknis dalam ekonomi disimak sebagai sebuah teori revolusioner, yang karenanya membawanya kepada Nobel bidang ekonomi. Bukunya yang sangat laris dan diterjemahkan ke dalam banyak bahasa di planet bumi kita ini, *Making Globalization Work*. Setiap perbincangan tentang globalisasi, khususnya dalam bidang ekonomi, nyaris tak mungkin meninggalkan opini-opininya.

Pada bulan July 2007, Profesor Stiglitz menulis artikel pendek berjudul “*The Asian Crisis Ten Years After*”.<sup>7</sup> Ia menceritakan sebuah peristiwa yang menjadi tanda bagaimana Globalization telah memiliki imbas yang tidak menyenangkan pada ekonomi dunia.

“Pada waktu itu, di bulan Juli 1997, Baht mata uang Thailand jatuh melimpung bagai diterpa angin. Segera sesudahnya menyusul badai kepanikan dahsyat yang menghantam Indonesia dan Korea lantas Malaysia. Negara-negara ini kala itu santer dengan sebutan “macan-macan ekonomi Asia”. Tidak lebih dari satu tahun, badai krisis yang merobek-robek ekonomi Asia melesat menyebabkan *krisis finansial global* yang menyebabkan *crash* mata uang Ruble Rusia dan Real Brasil.”<sup>8</sup>

Mengapa krisis begitu hebat? Para pakar ekonomi sibuk menjelaskan rentetan keterkaitan sekaligus ketergantungan satu sama lain ekonomi negara-negara. Kita yang awam dalam bidang ekonomi mengalami akibatnya yang sangat kejam. Mendadak kebutuhan pangan sulit dicari. Minyak habis. Beras habis. Susu untuk anak-anak lenyap dari toko-toko. Pembalut wanita menjadi barang langka. Anak-anak meregang perutnya karena kekurangan segala makanan yang perlu untuk pertumbuhannya. Terjadilah kerusuhan hebat. Pemerintah kewalahan. Terjadi pula konflik yang tidak karu-karuan dengan dalih macam-macam yang dilabelkan pada agama, suku, kepercayaan. Para tradisional sibuk melakukan upaya-upaya ritual,

<sup>7</sup> <http://www.project-syndicate.org/commentary/stiglitz89> (Accessed on September 15, 2007).

<sup>8</sup> Ibid

ruwatan, *nglukat*, entah apalagi yang berkaitan dengan kepercayaan untuk mencegah kutukan. Tanpa disadari kita semua sesungguhnya telah mengalami “badai” globalisasi. Dan badai itu sangat dahsyat, sangat menyakitkan.

Badai itu, menurut para analis, berasal dari jatuhnya pasar saham. Ketika nilai tukar mata uang lokal mengalami kemerosotan tajam di hadapan mata uang raksasa semacam US \$, negara-negara yang sedang merangkak dalam membangun ekonominya (dan pembangunannya dipondasikan pada hutang) jatuh bergelimpangan. Indonesia, misalnya, mendadak mengalami kemerosotan cadangan devisa negara. Hutang luar negeri (dalam dollar) mendadak membubung tinggi nilainya karena mata uang sendiri merosot sangat tajam. Ekonomi secara keseluruhan macet. Bukan hanya berhenti di tempat, melainkan perusahaan-perusahaan yang ada juga rontok. Yang terjadi selanjutnya sangat ngeri, bukan hanya lapangan pekerjaan tidak tercipta bagi pemuda-pemuda angkatan kerja baru, tetapi lapangan kerja di banyak sektor yang ada pun kalang kabut. PHK adalah aktivitas harian dari para direksi. Di sinilah “kutukan” badai globalisasi benar-benar menyengsarakan. Resesi ekonomi menghantam rumah keluarga kita. Itulah yang terjadi sepuluh tahun yang lalu. Walaupun babak belurnya masih terasa, negara-negara Asia mulai merangkak bangkit. Indonesia terbilang yang paling terakhir atau masih dalam rangka merangkak.

Pelajaran krisis finansial Asia menorehkan sejarah pentingnya relasi keterkaitan bangsa-bangsa dalam membangun ekonominya. Para pemimpin negara duduk bersama untuk berikhtiar menciptakan tatanan ekonomi yang mampu mencegah terjadinya krisis global. Joseph E. Stiglitz adalah salah satu pakar ekonomi dunia yang memberikan masukan-masukan bagaimana *making globalization work*.

Menurut Stiglitz, “*capital market liberalization – opening up developing countries’ financial markets to surges in short-term ‘hot’ money – is dangerous*” Artinya, liberalisasi pasar modal sungguh sangat berbahaya bagi negara berkembang. Karena, hal itu akan mudah untuk “diserobot” oleh para petualang dan dengan gampang akan mengguncang ekonomi secara keseluruhan negara tersebut. India dan Cina tidak masuk dalam “hitungan” negara-negara yang mengalami krisis moneter 1997, karena menolak liberalisasi pasar modal, walaupun saat ini keduanya ditekan dunia untuk meliberalisasi pasar modalnya.

Krisis tahun 1997 juga memberikan jalan bagi negara-negara di dunia untuk *men-design* tata baru ekonomi yang lebih stabil dan mempromosikan pertumbuhan yang kokoh bagi negara-negara berkembang. Salah satu diantaranya, negara berkembang dapat memperoleh pinjaman dalam mata uangnya sendiri, sehingga kemungkinan peningkatan *value* mata uang asing tidak memperparah beban hutang

yang ada (walaupun pertumbuhan ekonominya tetap seret jika itu terjadi).

Dalam artikelnya, *Making Globalization Work*,<sup>9</sup> resume dari bukunya yang sangat laris terbit September 2006, Stiglitz mengemukakan bentuk-bentuk ketidakadilan globalisasi. Diantaranya, rezim perdagangan global yang tak adil yang menghalangi perkembangan, sistem global finansial yang tak stabil yang kerap membuat krisis pertukaran mata uang yang sudah pasti berujung pada penderitaan negara-negara miskin menyusul beban hutang yang menggunung, dan aneka defects interelasi negara-negara maju yang kurang cepat dalam memberikan bantuan untuk penanggulangan bencana semacam AIDS di negara-negara berkembang seperti Afrika.

Menurut Stiglitz, globalisasi juga menelorkan anomali-anomali yang menyesakkan, seperti: uang seharusnya mengalir dari negara kaya ke negara miskin, tetapi akhir-akhir ini justru kebalikannya yang terjadi. Ketika si kaya mampu menahan segala kemungkinan resiko fluktuasi (jatuh bangunnya) pasar modal, si miskin yang justru menanggung beban segala akibatnya.

Stiglitz mengemukakan sebagai contoh pembiayaan perang Irak. Amerika konon telah menghabiskan hingga 1,5 sampai 2 trilyun US \$ sampai sejauh ini untuk anggaran perang Irak yang pada kenyataannya justru tidak mendatangkan kebaikan melainkan justru kekacauan dan ketidakstabilan yang mencemaskan. Uang sejumlah itu luar biasa banyaknya. Jika diestimasi kurang lebihnya, menurut Stiglitz, dalam hanya satu minggu, habis 20-an milyar dollar. Padahalnya, “pemerintah saya hanya menghabiskan uang 5 milyar dollar untuk membantu Afrika dalam satu tahun”! Sebuah anomali yang menyesakkan. Juga sebuah ketidakadilan global.

Apakah Profesor Joseph E. Stiglitz seorang anti-globalisasi? *“Indeed, I have complained so loudly and vociferously about the problems of globalization that many have wrongly concluded that I belong to the anti-globalization movement. But I believe that globalization has enormous potential – as long as it is properly managed”*<sup>10</sup>

Buku Stiglitz, *Globalization and Its Discontents* (2002)—terjual lebih dari satu juta kopi—dan *Making Globalization Work* (2006), membukakan mata banyak orang tentang bagaimana Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia yang berpengaruh besar pada ekonomi negara-negara berkembang ternyata demi mendorong globalisasi ekonomi tidak selalu benar dalam meresepkan kebijakan untuk banyak negara.

Dalam beberapa tahun terakhir ada beberapa perubahan besar dalam debat

<sup>9</sup> <http://www.project-syndicate.org/commentary/stiglitz74>[http://www.project-syndicate.org/commen](http://www.project-syndicate.org/commentary/stiglitz74)  
tary /stiglitz74 (diakses pada 15 September, 2007).

<sup>10</sup> Ibid.



global bahkan juga di IMF. Sejumlah riset IMF memperlihatkan, liberalisasi pasar kapital membuka negara tersebut pada ketidakstabilan, seperti Indonesia. Liberalisasi pasar kapital tidak mendorong pemberian kredit untuk usaha kecil dan menengah (UKM), yang juga menjadi isu di Indonesia.

Saat belajar untuk program pascasarjana ekonomi, Stiglitz mulai mempertanyakan ilmu ekonomi standar yang mengajarkan pasar bekerja sempurna dan bekerjanya *invisible hands* dalam teori Adam Smith seperti kita lihat di atas. “Tentu banyak asumsi yang salah dalam ilmu ekonomi standar, tetapi mana yang paling salah. Akhirnya saya menyimpulkan, asumsi mengenai informasi yang sempurna dan mulai mengembangkan gagasan berdasarkan asimetri informasi. Itu membawa pada teori baru (mengenai pengaruh asimetri informasi pada ekonomi),” papar Stiglitz.<sup>11</sup>

“Banyak mereka yang mengikuti teori saya berpendapat, selama krisis keuangan Asia Timur, krisis Indonesia, tahun 1997, IMF mendasarkan teori ekonomi, rekomendasi, dan nasihatnya pada teori yang ketinggalan zaman, bahwa pasar, termasuk informasi, adalah sempurna. Dan bila Anda memiliki informasi yang sempurna, mungkin liberalisasi pasar kapital adalah baik. Namun, dalam dunia nyata hal itu tidak bekerja.”<sup>12</sup>

“Globalisasi tidak otomatis menguntungkan orang miskin. Harus dipikirkan siapa yang paling terkena dampak buruk dan apa yang dapat dilakukan untuk membantu mereka. Jawaban untuk ini tergantung dari situasi setempat. Misalnya, tidak adil untuk petani beras Indonesia bersaing dengan Washington (yang menyubsidi petani beras AS). Untuk membuat arena bermain selaras, bila Washington menyubsidi petaninya 50 persen, Indonesia dapat memajaki beras dari AS 50 persen.”<sup>13</sup>

### ***Globalization in George Soros***

Dalam estimasi waktu sejak dekade 90-an (1990), terminologi “globalisasi” telah menjadi a buzzword untuk dunia ekonomi dan relasi antarbangsa secara menyeluruh. Namun jelas, tidak semua sepakat dengan apa yang dimaksud “globalisasi” plus aneka konsekuensinya yang kerap kejam terhadap bagian dunia yang masih bergumul dengan kemiskinan. George Soros memiliki opini yang berbeda. Soros, seorang Yahudi, pialang terkemuka dunia dan seorang filantropis, adalah penulis beberapa buku *best-seller*, diantaranya, *The Alchemy of Finance*, *The Crisis of Global Capitalism*,

<sup>11</sup> Wawancara Ninuk Mardiana Pambudi dan Maria Hartiningsih dengan Joseph E. Toglitz yang sedang menyelesaikan buku barunya di Bali, Kompas, Minggu 12 Agustus, 2006.

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Ibid.

*and Open Society.*

Menurut George Soros, “*globalised society*” pertama-tama adalah “*Open Society*”. Term “global” kerap memaksudkan relasionalitas satu sama lain. Sedangkan “open” menampilkan aspek-aspek positif yang demokratis. Dengan kata lain, “*open society*” mengatakan sekaligus sistem relasi antarmanusia (yang terbuka) dan sistem ideologis dari kekuasaannya (yang demokratis). Sebuah societias yang tertutup (sebagai lawan dari *open society*) mengingatkan kita akan aneka bentuk pemerintahan “tertutup” di masa lalu yang kental dengan praktik-praktik kediktatoran, tiranisme, absolutisme. Pemerintahan NAZI Hitler, rezim komunisme Uni Soviet dengan *nomenklatura*-nya jelas merupakan contoh-contoh lawan frontal dari pemerintahan “*open society*”.

“*Open Society*” digelindingkan pertama kali oleh Henry Bergson.<sup>14</sup> Dalam apa yang disebut “*open society*” diandaikan dasar-dasar pemahaman tentang kebebasan manusia, penghormatan terhadap hak-hak asasi, promosi prinsip-prinsip hukum adil, dilenyapkannya segala hal berkaitan dengan bentuk-bentuk diskriminasi, diupayakannya *public service* yang memadai.

Sebuah “*open society*” juga mengandaikan interaksi saling belajar dan sharing. Apa yang di-sharing-kan? Apa saja: tradisi, pengalaman spiritual, kepentingan, cita-cita dan segala hal yang menjadi pengalaman keseharian. Konsep kebenaran lantas menjadi sebuah konsep “gado-gado” yang menampilkan campuran nilai-nilai kebenaran. Karena merupakan sebuah “gado-gado”, gambaran tentang kebenaran memiliki karakter ketidak-sempurnaan. Karl Popper menyebut karakter demikian sebagai sebuah pondasi perubahan dan kemajuan.<sup>15</sup> Justru ketika kebenaran tidak dipeluk sebagai sebuah kebenaran absolut, dimungkinkan segala sikap hati yang terbuka untuk saling belajar. Universalitas kebenaran menjadi sangat ketinggalan zaman. Universalitas merefleksikan falibilitas. “*Open Society*” lantas memiliki ranah prinsip falibilitas. Dan, setiap keyakinan akan infalibilitas mengatakan ketertutupan.

<sup>14</sup> Henri Bergson, dalam bukunya, *The Two Sources of Morality and Religion* (1932) menyebut pentingnya societias yang memiliki karakter “open” dengan inti maksud pada ranah kebebasan manusia yang harus dijunjung tinggi. “*One source, according to Bergson, is tribal and leads to a closed society whose members feel affinity for each other but fear or hostility towards others. The other source is universal, leading to an open society guided by universal human rights that protects and promotes the freedom of the individual.*”

<sup>15</sup> Karl Popper, dalam bukunya *The Open Society and Its Enemies* (1945) mempromosikan konsep-konsep dasar tata hidup bersama yang mengatakan sebuah societias modern. Popper memiliki keprihatinan yang mendalam berkaitan dengan realitas ketertutupan sekaligus penindasan rezim NAZI Hitlerian. “*Karl Popper modified this scheme in his seminal book The Open Society and Its Enemies, published in 1944. Popper pointed out that an open society can be endangered by abstract, universal ideologies like communism and fascism. Because these ideologies’ claim to be in possession of the ultimate truth is bound to be false, they can be imposed on society only through repression and compulsion. By contrast, an open society accepts uncertainty, and it establishes laws and institutions that allow people with divergent views and interests to live together in peace.*” George Soros, “*Europe’s Global Mission*”, dalam <http://www.project-syndicate.org/commentary/soros34> (Accessed on September 20, 2007).

*The term “open society” was coined by Henri Bergson, in his book *The Two Sources of Morality and Religion* (1932), and given greater currency by the Austrian philosopher Karl Popper, in his book *The Open Society and Its Enemies* (1945). Popper showed that totalitarian ideologies like communism and Nazism have a common element: they claim to be in possession of the ultimate truth. Because the ultimate truth is beyond the reach of humankind, these ideologies must resort to oppression to impose their vision on society. Popper juxtaposed these totalitarian ideologies with another view of society, one which recognizes that no one has a monopoly on the truth; different people have different views and different interests, and there is a need for institutions that allow them to live together in peace. These institutions protect the rights of citizens and ensure freedom of choice and freedom of speech. Popper called this form of social organization “open society.” Totalitarian ideologies were its enemies.*<sup>16</sup>

Soros memiliki pengalaman pribadi. Ia terjajah, tertindas, terusir dan terobsesi. Sebagai seorang Yahudi yang terlindas oleh absolutisme hitlerian namun dapat menyelamatkan diri, obsesi tunggalnya ialah mempromosikan “open society”. Di bawah ini merupakan sentuhan pengalaman personalnya berkaitan dengan “open society” yang memiliki segala kepentingan alasannya untuk dia deklarasikan mengingat betapa kejamnya sebuah societias yang secara ideologis absolut.

*Written during the Second World War, *The Open Society and Its Enemies* explained what Western democracies stood for and fought for. The explanation was highly abstract and philosophical, and the term “open society” never gained wide recognition. Nevertheless, Popper’s analysis was penetrating, and when I read it as a student in the late 1940s, having experienced at first hand both Nazi and Communist rule in Hungary, it struck me with the force of revelation. I was driven to delve deeper into Popper’s philosophy, and to ask why no one has access to the ultimate truth. The answer became clear: We live in the same universe that we are trying to understand, and our perceptions influence the events in which we participate. If our thoughts belonged to one universe and their subject matter to another, truth might be within our grasp. We could formulate statements corresponding to the facts, and the facts would serve as reliable criteria for deciding whether the statements were true.*<sup>17</sup>

<sup>16</sup> George Soros, “*The Capitalist Threat*”, dalam <http://www.project-syndicate.org/commentary/sor2> (Accessed on September 20, 2007).

<sup>17</sup> Ibid.

Global economy. Globalisasi dari sendirinya juga gandeng dengan fenomena ekonomi modern. George Soros menyebutnya “ekonomi global”. Di bawah ini, kutipan yang melukiskan gagasannya tentang ekonomi global.

*A global economy includes not only the free movement of goods and services but, more importantly, the free movement of ideas and capital (everything from direct investments to financial transactions). Though both gained in importance since WW II's end, globalization of financial markets accelerated in recent years so that movements in exchange rates, interest rates, and stock prices in various countries are intimately interconnected. Indeed, the character of the financial markets changed out of all recognition during the 40 years that I have worked in them. So the global economy should really be thought of as the global capitalist system.*<sup>18</sup>

Di sini “ekonomi global” mencakup lalu lintas bebas perdagangan sekaligus lalu lintas *ide* dan *kapital*. Yang dimaksud *ide* sudah barang tentu langsung berkaitan dengan informasi-informasi perkembangan kebijakan ekonomi politik yang secara signifikan menentukan aktivitas ekonomi. Dalam jalan pikiran ini, sebuah keputusan politik “perang dengan Irak”, misalnya, merupakan sebuah *ide* yang akan membuat anjlok pasar di hampir segala tempat di dunia di satu pihak, atau melambungnya harga minyak dunia, atau ujung-ujungnya terjadi kesulitan yang cukup hebat dalam aktivitas investasi di negara-negara internasional di lain pihak.

Yang paling terakhir, krisis yang terjadi di Amerika Serikat, *sub-prime mortgage* (kredit macet dalam bisnis perumahan beresiko tinggi), telah secara sangat konkret membuat ekonomi dunia mengalami babak belur. Nilai tukar Dollar terhadap Euro merosot tajam. Indonesia pun terkena dampaknya. Kendati krisis itu berimbas pada naiknya nilai tukar rupiah terhadap dollar (misalnya dari Rp. 9.400-an menjadi Rp. 9.100-an), para analisis ekonomi memperkirakan krisis itu “menghentikan” entusiasme iklim investasi dan ujung-ujungnya akan sedikit lapangan pekerjaan yang tercipta selama beberapa waktu ke depan.

Integrasi ekonomi global membawa dampak kemajuan yang luar biasa di beberapa negara. Tetapi, pada saat yang sama juga mengakibatkan derita luar biasa pada beberapa negara yang *miskin* kapital. Ketika perdagangan bebas dideklarasikan, dari sendirinya yang menang dalam persaingan adalah negara-negara yang memiliki komponen perdagangan ekonomi kuat. Yang menang adalah mereka yang mampu

<sup>18</sup> George Soros, “*Toward a Global Open Society*”, <http://www.project-syndicate.org/commentary/sor4> (accessed September 20, 2007).

menjual murah produk-produk industrinya, yang sanggup membiayai mutu dalam kancah persaingan pasar. Untuk sekedar diketahui, penjualan barang yang bermutu sekaligus murah membutuhkan biaya sangat besar. Dari sendirinya, siapa yang menguasai pasar? Negara-negara yang memiliki kapital dan infrastruktur ekonomi kuat.

Dalam jalan pikiran demikian, kita memahami mengapa Cina memiliki pertumbuhan ekonomi melejit. Ketika kapital tidak lagi dimiliki negara (sebagaimana menjadi obsesi komunis), kapital berjalan, berkembang seiring dengan agresivitas spirit kapitalisme. Cina tetap komunis dalam pemerintahan, tetapi paradigma ekonominya sudah sangat mengatasi bentuk-bentuk ekonomi sebagaimana dulu pernah dipromosikan oleh Karl Marx. Cina sudah memiliki pasar saham, sebuah bentuk “pasar” yang tak mungkin didominasi oleh kepemilikan pemerintah. Aneka penjelasan lain berkaitan dengan etos kerja dan mutu tata hukum dan *public service* Cina yang memang sangat potensial maju merupakan realitas yang juga tidak disangkal kebenarannya.

Tetapi tidak hanya Cina. India juga menyusul. India dikenal sebagai negara miskin. Sampai sekarang kemiskinan India juga masih konkret. Tetapi, India memiliki angka menakjubkan berkaitan dengan perolehan pendapatan dari kemajuan ekonominya. Banyak yang makin tahu bahwa di tengah kekacauan sistem kehidupan yang demikian kasat mata akrab dengan kekumuhan, bangsa India memiliki reputasi mengesankan dalam memacu pendapatannya. Ditopang dengan pengembangan SDM yang kemajuannya diupayakan secara agresif (India menempati urutan teratas dalam hal jumlah pengiriman para mahasiswanya untuk studi ke luar negeri khususnya Amerika Serikat, di bawahnya baru menyusul Cina), aneka keruwetan persoalan ekonomi dapat dicairkan. Kini, India menempati urutan kedua setelah Cina dalam hal pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Menurut George Soros, globalisasi memiliki kelemahan konkret. Kelemahannya terletak pada sandaran ekonomi global pada pasar saham yang *inherently unstable*. Kita menyebutnya pasar saham, untuk mengatakan sebuah perdagangan pasar yang tidak berhubungan dengan komoditas barang. Ketika pasar saham belum ada, yang dimaksud pasar ialah tempat di mana orang membawa barang untuk dijual dan di situ datang pihak lain untuk membelinya. Dalam apa yang disebut pasar saham, bukan barang yang diperdagangkan melainkan “saham”. Disebut pasar, karena di sana orang menjual dan membeli. Tetapi tidak hanya itu.

*Economic theory has created an artificial world in which the participants' preferences and the opportunities confronting them are independent of each other, and prices tend toward an equilibrium that brings the two forces into balance. But in financial markets prices are not merely the passive reflection of independently given demand and supply; they also play an active role in shaping those preferences and opportunities. This reflexive interaction renders financial markets inherently unstable. Laissez-faire ideology, however, denies the instability and opposes any form of government intervention aimed at preserving stability. History has shown that financial markets do break down, causing economic depression and social unrest. The breakdowns have led to the evolution of central banking and other forms of regulation.*<sup>19</sup>

Dalam “pasar virtual” ini kapital (modal) mudah sekali mengalami pasang surut. Soros melihat “kerapuhan” globalisasi terletak persis pada karakter “mobilitas” kapital. Dalam krisis moneter Asia yang diawali Juli tahun 1997 dan sesudahnya, apa yang terjadi adalah kekacauan pasar virtual “kapital”. Negara-negara yang mempondasikan ekonominya dari hutang luar negeri paling menderita, termasuk di dalamnya Indonesia.

### ***Globalization in Anthony Giddens***

Gagasan Anthony Giddens sangat penting untuk menyimak kenyataan bahwa perkara “globalisasi” bukanlah *par excellence* sekedar perkara ekonomi. Globalisasi mengatasi perbincangan sekitar pasar modal, pasar saham, fluktuasi pertukaran nilai mata uang atau lalu lintas perdagangan global.

*Globalization is not primarily economic. It's not solely driven by the global marketplace. It's actually about what we're doing now. The driving force of the new globalization is the communications revolution. And if you want to put a technological fix on it, the turning point would be would be the late 1960s and early 1970s, the first time when there was an effective communications satellite sent up above the earth that made possible instantaneous communication from one part of the world to another. To me, that changed more or less the whole of late 20th century history.*<sup>20</sup>

Anthony Giddens, mantan direktur *London School of Economics and Political Science*, dikenal luas sebagai seorang pakar politik dan sosiologi ekonomi yang

<sup>19</sup> George Soros, “*The Capitalist Threat*”, dalam <http://www.project-syndicate.org/commentary/sor2> (Accessed on September 20, 2007).

<sup>20</sup> *The Second Globalization Debate. A Talk With Anthony Giddens.*, Introduction by John Brockman, dalam <http://www.edge.org/documents/archive/edge81.html> (Accessed on September 13, 2007).

berpengaruh luas sekaligus mantan penasihat Perdana Menteri Tony Blair. Giddens, pengarang lebih dari 34 judul buku, diantaranya *The Third Way: The Renewal of Social Democracy and Runaway World: How Globalization is Reshaping our Lives*, yang mengalami penjualan jutaan copy dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, mengurai pemahaman globalisasi dalam jalan pikiran yang memikat.

Dalam ceramahnya 7 November 2007 di UCLA School of Public Affairs, Los Angeles, tentang “*Globalization: State of the Debate*” dan “*Globalization and Civil Society*”, Giddens mengurai globalisasi dalam tiga tahapan.<sup>21</sup> Menurutnya, globalisasi konkret dalam fenomena societias dunia yang makin menampilkan saling ketergantungan. “*Events on the far side of the world influence us directly wherever we are*”<sup>22</sup> Aneka peristiwa yang terjadi nun jauh di sana di belahan dunia yang lain demikian terasa dekat dan secara langsung mempengaruhi keberadaan kita di sini. Karenanya debat tentang globalisasi tidak bisa disempitkan dalam bidang ilmu ekonomi semata. Malahan, debat globalisasi merupakan debat yang mengatasi ilmu-ilmu sosial. “*The debate about globalization is, itself, truly a global debate. The word is a kind of expression of itself,*” tegasnya.

Giddens mengingat aneka diskusi ilmiah sekitar tahun 1980-an tentang globalisasi, saat mana dia sendiri juga menampilkan keterlibatannya. Pertanyaan santer pada waktu itu ialah apakah ada “globalisasi” itu. Atau, apakah gerangan “globalisasi” itu? Giddens meyakini bahwa globalisasi sungguh ada, dan bahwa peristiwa globalisasi ini jauh lebih mendalam dan luas dari apa yang pernah terjadi di masa-masa generasi sebelumnya.

Gagasan Giddens ini hendak menggarisbawahi kenyataan bahwa terdapat *shift of paradigms* (pergeseran-pergeseran paradigma) tatanan hidup manusia. Fase pertama dalam memahami apa itu globalisasi ialah dengan memiliki kesadaran bahwa dunia telah berubah, hidup manusia telah berubah, paradigma relasi telah sangat beda (dari sebelumnya), tatanan hidup bersama dari sendirinya juga mengajukan tantangan-tantangan baru. Pergeseran ini bukanlah pergeseran kecil melainkan sebuah perubahan besar-besaran di hampir segala bidang kehidupan. Jika dirinci, perubahan besar-besaran itu menjangkau bidang-bidang teknologi, perdagangan ekonomi, pendidikan, komunikasi, filsafat, agama, teologi.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> [http://www.spa.ucla.edu/main2.cfm?d=xr&f=news.cfm&s=school&news\\_id=13275](http://www.spa.ucla.edu/main2.cfm?d=xr&f=news.cfm&s=school&news_id=13275) (Accessed on September 10, 2007).

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Lih. Armada Riyanto, “*Globalisasi*” dan “*Dari Modern ke Postmodern: Skema Persaingan Nilai-Nilai*”, dalam Dr. B.A. Pareira, O.Carm, ed., Pendidikan Nilai di Tengah Arus Globalisasi (Seri Filsafat Teologi Widya Sasana, Vol. 12, No. 11, 2003), 1-21. Dalam dua artikel pendek tersebut, saya menggariskan beberapa poin pergeseran nilai-nilai. Dalam bidang teknologi, dari penawaran kemudahan hidup ke

Fase kedua debat globalisasi, menurut Giddens, terjadi ketika berlangsung sidang WTO (*World Trade Organization*) di Seattle tahun 1999. Ketika itu terjadi protes besar di jalan-jalan di sana terhadap aneka rancangan perdagangan bebas. Karena itu, fase ini dia sebut fase “*streets*”, artinya, debat tentang globalisasi tidak hanya terjadi di ruang-ruang akademik melainkan juga di jalan-jalan. Menurut para pemrotes di jalan-jalan waktu itu, isu globalisasi dianggap sebagai sebuah “*soft colonialism*” bidang ekonomi. Paradigma ekonomi global dipandang sebagai sumber dari segala bentuk ketidak-adilan yang diderita oleh negara-negara berkembang.

Giddens menyebut, “*globalization is reshaping the very tissue of our lives.*” Globalisasi adalah model, paradigma kehidupan itu sendiri saat ini. Globalisasi sedang memungkinkan kita sekarang untuk duduk bersama, menata ulang paradigma relasi perdagangan ekonomi sedemikian rupa sehingga keadilan dapat dipromosikan. Tetapi, Giddens menambahkan bahwa globalisasi bukanlah sekedar isu ekonomi. Globalisasi adalah fenomena kultural, politik dan sosial. Dia menyebut, “*there is no driving force behind globalization*”.<sup>24</sup> Tetapi, meskipun begitu, ada kekuatan dahsyat yang memungkinkan dominasi terhadap kehidupan ini, yakni revolusi komunikasi. Akses informasi yang demikian cepat dan efektif telah mengubah segalanya.

Seperti kita simak di atas, Joseph E. Stiglitz adalah salah satu teoretikus ekonomi yang mendasarkan tesis-tesisnya pada efektivitas dan kesimestrisan informasi. Ekonomi akan berkembang hebat ketika segala komponen pelakunya memiliki akurasi dan kecermatan dalam memberi dan menyerap informasi yang ada. *Globalized society* nyaris ditandai pertama-tama oleh dahsyatnya lalu lintas perkembangan informasi. “*Democracy, therefore, is an important piece in the mosaic of issues comprising the ‘runaway world’ created by globalization.*”<sup>25</sup>

Fase ketiga yang menyusul adalah fase krisis. Giddens menyimak bahwa seluruh masyarakat di dunia ini sedang dilanda krisis akibat cara kerja globalisasi yang sangat cepat. Globalisasi nyaris tak mungkin lagi direm atau dipelankan langkahnya. Di Jepang kita pernah belajar bagaimana orang-orangnya memiliki etos kerja yang

---

pada kritik teknologi yang menghancurkan alam dan menciptakan “*global warming*” yang membahayakan kehidupan. Ekonomi, dari ekonomi pembangunan (sekedar membangun) kepada ekonomi pemerataan dan keadilan. Pendidikan, dari sekedar pemahaman *hard science* kepada pendidikan pencapaian kecerdasan menyeluruh manusia (penguasaan *soft science*). Komunikasi, dari komunikasi cepat kepada komunikasi serentak (menyeluruh). Filsafat, dari sistem filsafat yang jadi kepada dekonstruksi pencarian nilai-nilai kultural. Agama, dari institusional kepada pengalaman eksistensial subjek-subjek yang beragam. Teologi, dari refleksi iman dogmatik, doktrinal kepada refleksi kontekstual, antropologis. Dan seterusnya

<sup>24</sup> [http://www.spa.ucla.edu/main2.cfm?d=xr&f=news.cfm&s=school&news\\_id=13275](http://www.spa.ucla.edu/main2.cfm?d=xr&f=news.cfm&s=school&news_id=13275) (Accessed on September 10, 2007).

<sup>25</sup> <http://www.edge.org/documents/archive/edge81.html> (Accessed on September 10, 2008).



begitu mempesona. Globalisasi seakan telah mengubah siapa pun di dunia ini, tidak hanya orang Jepang, untuk mencari dan menemukan kembali etos budayanya. India yang konon dikenal sebagai bangsa yang lamban dalam kerja kini menampilkan ritme kerja luar biasa sedemikian rupa sehingga roda ekonominya berputar cepat dan angka pertumbuhan melesat ke depan. Tetapi globalisasi juga memakan korban-korban. Dalam globalisasi kekuatan pemerintah bangsa seakan mendadak lenyap. Nasionalisme menjadi tidak lagi sejelas seperti sebelumnya. Kecintaan kepada negara memiliki karakter pragmatik. Kebanggaan sebagai sebuah negara terasa perlahan terkikis. Sebaliknya, dalam globalisasi terjadi aneka penguatan kultur lokal dan masyarakat ekonomi maju yang tak lagi berkuat dalam teritori geografis. Lihatlah misalnya seorang pemuda Solomon Islands yang demikian bangga dengan klub kesayangannya, AC Milan (Italia), semata karena melihat di televisi aneka prestasi gemilang klub tersebut. Padahalnya, dia tidak memiliki hubungan apa pun dengan bangsa atau negara Italia! Pertanyaan yang saat ini membuat kita mengernyitkan dahi setiap kali mendengarnya ialah *“What is your identity?”* Globalisasi memang seakan telah mencabut kita semua dari akar identitas sehari-hari kita.

Efek tidak menyenangkan lainnya dari apa yang kita sebut “globalisasi” ialah perubahan paradigma kekerasan di dunia. Percaya atau tidak, kekerasan dan kebrutalan saat ini sudah memiliki karakter baru lagi, yakni “global”. Terorisme menjadi emblem “globalisasi kekerasan”. Terorisme adalah bentuk kejahatan yang sepenuhnya menampilkan aspek visi-misi global, dan tak pernah lokal. Kita tentu mudah mengingat kejahatan para mafia di Sicilia. Kejahatan mafia siciliana saat ini terasa *out of date* jika dibandingkan dengan terorisme. Terorisme adalah propaganda kejahatan yang secara konkret memanfaatkan instrumen kemajuan teknologi komunikasi modern. Bahkan, sebuah kampung di Sleman Yogyakarta atau di Batu Malang, memiliki asumsi keterkaitan dengan jaringan terorisme dunia.

Namun demikian, tanpa juga kita sadari bangsa-bangsa di dunia ini memiliki instrumen kemudahan untuk belajar satu sama lain dalam hal demokrasi dan melakukan revisi-revisi efektivitasnya. Simaklah apa yang terjadi paling belakangan, demonstrasi dari para bhiksu Myanmar (Birma) atas kekuasaan rezim militer negaranya yang jelas-jelas telah represif dan membuat tidak kondusif ekonomi bangsa itu. Keprihatinan para bhiksu menandai fase baru dalam interelasi politik antarbangsa. Keprihatinan yang demikian besar dari sendirinya tidak pernah berlangsung mendadak. Peristiwa itu pasti memiliki preseden keprihatinan yang membuat mereka bergerak untuk berjuang melawan pemerintahan yang represif.

*A global civil society essentially is the underpinning of many institutional democracies. You could regard non-governmental associations and organizations as a kind of early beginning to a global civil society. It's essentially having a civic culture of global participation, and should in the end, one would certainly hope, lead to some kind of version of global citizenship. I don't believe that's impossible in an era of high communications, actually, and the European Union is a kind of possible model of how you can build transnational effective political governments. It also needs democratizing and has economic problems.<sup>26</sup>*

Diskusi tentang globalisasi juga merambah bidang-bidang lingkungan hidup. Negara yang memiliki keprihatinan mendalam akan pentingnya kelestarian alam benar-benar mengupayakan bagaimana alam dijaga keberlangsungannya. Negara-negara Skandinavia merupakan salah satu contohnya. Negara-negara ini memberikan porsi perhatian yang besar akan dampak hancurnya alam bila tidak mendapat penanganan yang cepat. Indonesia sementara itu menjadi salah satu emblem negara yang melalaikan masalah lingkungan hidup. Bukan hanya itu, malah merusaknya.

Perkara amat sangat krusial dan besar namun *ironisnya* tak terlalu menjadi keprihatinan konkret di Indonesia: pembalakan liar hutan-hutan kita. Indonesia akhir-akhir ini bukan hanya dikenal sebagai negara penebang kayu nomor satu di dunia, tetapi juga negara perusak keseimbangan alamnya sendiri dan dunia. Dari harian *Jawa Pos*, Selasa 4 September 2007, diajukan data-data yang sangat mencemaskan. Hutan Indonesia kritis. Laju degradasi hutan setiap tahun mencapai 2,83 juta hektar. Dari total 120,5 juta hektar wilayah hutan, lebih dari 59 juta hektarnya dalam kondisi kritis. Indonesia merupakan negara yang memiliki hutan cukup luas. Hampir 90 persen hutan di dunia dimiliki secara kolektif oleh Indonesia dan 44 negara lain. Bahkan negeri ini juga disebut sebagai paru-paru dunia. Sayangnya, aset negara tersebut dirusak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melalui aksi pembalakan liar. Pemerintah pernah mengklaim, sampai tahun 2005, memiliki kawasan hutan 126,8 juta hektar dengan berbagai pembagian fungsi. Tetapi, organisasi lingkungan dunia Green Peace menyebutkan 72 persen hutan Indonesia musnah. Kemudian, setengah wilayah hutan yang masih ada dalam kondisi terancam karena penebangan komersial, kebakaran hutan dan pembukaan hutan untuk kebun kelapa sawit. Sementara itu, Departemen Kehutanan memperkirakan jumlah lahan hutan di seluruh Indonesia yang rusak akibat penjarahan mencapai 2,8 juta hektar per tahun. Hingga kini sudah

<sup>26</sup> "Second Globalization debate", <http://www.edge.org/documents/archive/edge81.html> (Accessed on September 10, 2008).

mencapai 60 juta hektar. Kerugian yang diderita negara pun tidak sedikit, mencapai Rp. 40 triliun – Rp. 50 triliun. UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dan Inpres No. 4 Tahun 2005 tentang pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan pemberdayaannya di seluruh wilayah RI terasa tumpul. Praktik-praktik manipulatif dan ilegal terjadi secara luar biasa. Praktik-praktik ilegal sebenarnya tidak mungkin terjadi jika tidak ada yang memfasilitasi. Tanpa pihak lain yang membuka jalan atau membiarkan terjadinya penebangan liar, mustahil aksi tersebut berjalan. Pihak lain itulah yang memberikan izin untuk melegalkan sesuatu. Di sinilah ditengarai adanya keterlibatan oknum pejabat, bahkan aparat yang seharusnya melakukan pengawasan. Pada tahun 2005 saja terdapat tiga ribuan kasus *illegal logging*.<sup>27</sup> Sungguh data-data yang menyesakkan.

Bangsa kita barangkali masuk dalam bilangan “krisis identitas” seperti yang digagas Giddens. Keputusan-keputusan politik masih berkisar pada status quo. Artinya, aneka kebijakan politik adalah kebijakan untuk membela dan mempertahankan kekuasaan, tidak untuk mengeksplorasi kemajuan yang lebih kaya dan berorientasi pada pelestarian lingkungan. Hutan-hutan yang habis jelas tidak secara gampang dapat dipulihkan dalam beberapa tahun.

\*\*\*

---

<sup>27</sup> Sebagaimana dirilis oleh Jawa Pos, Selasa, 4 September 2007.

## “DE-PANCASILA-ISASI” DAN NASIONALISME

### [Bahan Bacaan 2]

Oleh Armada Riyanto

Konon tanggal 6 Juni 1901, saat Bung Karno (BK) lahir, Indonesia mendapat “pulung” (kilatan cahaya dari langit). Tradisi nenek moyang mengatakan bahwa jatuhnya “pulung” menandakan sebuah pesan datangnya peristiwa dahsyat di hari depan.

Salah satu peristiwa dahsyat itu terwujud ketika BK mencetuskan kristalisasi nilai-nilai luhur yang diderivasi dari tradisi tata hidup bersama bangsa sendiri. Kristalisasi itu disebutnya Pancasila.

Sejak di bangku SD, setiap orang Indonesia diajar menghafal ke-lima sila. Orang memang hapal Pancasila, tetapi kerap tidak mengerti nilai dan maknanya. Yang terlupakan: manusia Indonesia tidak pernah melakukan diskursus *rasional kebalikannya*, yang saya sebut “de-Pancasila-isasi”. “De-Pancasila-isasi” merupakan fenomena-fenomena peristiwa dan kemunculan paham ideologis-agamis maupun non agamis yang berusaha merelativir dan menggeser Pancasila.

Bangsa Indonesia telah lama merdeka. Tetapi, panorama kehidupan keseharian yang mengukir pembalikan nilai-nilai Pancasila tak pernah disimak serius. Padahalnya begitu konkret.

Pemikiran orisinal tentang Pancasila sesungguhnya memiliki konteks BK muda. Ketika mencetuskan Pancasila untuk pertama kalinya (1 Juni 1945), BK berusia 43 tahun. Bahkan BK sudah menulis secara ekstensif mengenai “Keindonesiaan” yang bisa disebut sebagai benih-benih konsep ideologi Pancasila sejak tahun 1926 di *Soeloeh Indonesia Muda*. Saat itu BK berusia 25 tahun. Humanisme BK muda adalah humanisme murni. Saat BK masih belum berada dalam ranah kekuasaan, pencariannya sepenuhnya terarah kepada konsep-konsep filsafat tradisi luhur kehidupan bangsa sendiri yang memerdekakan, membebaskan.

Dalam terminologi filosofis ala *Frankfurt Schüle*, Pancasila identik dengan filsafat emansipatoris manusia-manusia Indonesia konteks kulturalitas dan religiusitas yang luar biasa kaya dan plural. Pancasila adalah filsafat tata hidup bersama yang menginspirasi pembebasan dari keterasingan satu sama lain dalam lautan keanekaragaman suku, budaya, agama yang kaya.

Menurut BK, “de-Pancasila-isasi” terjadi ketika bangsa ini memeluk secara buta ideologi-ideologi “importiran”. Karena itu, ia menyebut Pancasila bukan individualisme. Bukan komunisme. Bukan fasisme. Bukan pula Islamisme atau Kristenisme atau segala “isme” yang berkaitan dengan agama apa pun maupun bukan agama (Lihat Sukarno, “*Der Untergang des Abendlandes*” dan “Indonesia versus Fasisme” dalam *Pandji Islam*, 1940).

Dalam logika jalan pikiran ini, “tujuh kata” khas Piagam Jakarta secara konkret tidak kompatibel dengan maksud asali semangat Pancasila (kendati BK ketika itu merupakan salah satu anggota yang menandatangani Piagam tersebut). Malahan, stipulasi “tujuh kata” yang mewajibkan umat Islam untuk melaksanakan syariatnya merupakan salah satu bentuk “de-Pancasila-isasi” konstitusional. Sebab, seperti yang diungkapkan oleh Admodarminto, salah satu eksponen sidang-sidang Konstituante tahun 1956, semangat Piagam Jakarta akan memicu semangat pengedepanan hegemonis kelompok manusia yang satu dan penyingkiran yang lain. Bukan hanya kelompok agama lain yang tersingkir, tetapi juga kelompok aliran yang berbeda dari agama yang sama (Simak Admodarminto, “*The Abangan Case against an Islamic State*”, dalam Herbert Feith and Lance Castles, *Indonesian Political Thinking 1945-1965*, Ithaca: Cornell Univ. Press, 1970, 192-196).

“De-Pancasila-isasi” juga tercetus dalam fenomena “totaliterisme” *societas* Indonesia. Secara formal Indonesia jelas bukan negara totaliter. Indonesia merupakan “negara hukum”. Pemerintahannya disebut “*office of justice*”. Tetapi, secara konkret bangsa kita di sana sini kerap menampakkan diri sebagai “*societas totaliter*”.

Mula-mula kita kenal totaliterisme dari warisan kekejaman pemerintahan Nazi Hitlerian. Tetapi, totaliterisme juga memaksudkan segala bentuk pemaksaan tata kehidupan yang menjarah dan menghancurkan keanekaragaman.

Admodarminto mengajak anggota sidang Konstituante untuk memelekkkan mata akan kemungkinan yang sangat konkret terwujudnya bentuk-bentuk “*societas totaliter*” manakala memaksakan negeri ini berjalan dan dipondasikan pada hukum agama tertentu.

“*Societas totaliter*” sangat mudah muncul dalam perspektif ranah agama. Ketika kehidupan keseharian dipondasikan pada agama (apa saja, bahkan bila segala agama disebut), terjadi “pengaplengan” atau “penyekatan” relasi satu sama lain. Dialogalisasi dan sikap-sikap beriman berangkulan pasti akan lenyap.

“*Societas totaliter*” dalam sejarah bangsa Indonesia terlihat dalam rupa-rupa pemberontakan berdarah-darah yang dipondasikan pada ideologi tertentu, baik komunisme maupun aneka model “ideologi agamis” apa pun. Tahun-

tahun perlawanan terhadap aneka pemberontakan tersebut tidak lain merupakan pengalaman duka, kecemasan, derita dan kepahitan. Karena itu, absurd jika diulang-ulang.

Totaliterisme konkret, ketika kehidupan direduksi dalam satu wajah, satu pengedepanan aturan, satu kebijakan, satu pondasi ranah nilai luhur kehidupan, satu religiusitas, satu kulturalitas, satu agama. Pendek kata, *societas totaliter* adalah *societas* yang menendang nilai-nilai pluralitas.

BK sendiri, di penghujung usia kekuasaannya, pernah jatuh dalam ranah depancasilaisasi. Sebab, eforia satu kebijakan politik telah membuatnya cenderung tampil sebagai penguasa totaliter. BK tidak sendirian. Suharto juga terjerembab dalam lubang yang sama, bahkan lebih parah. Orde Baru hanyalah slogan untuk segala hal yang secara konkret menampilkan hembusan ideologi totaliter. Almarhum Munir pernah mengingatkan bahwa jutaan manusia, sejak rejim Orde Baru berkuasa, telah mengalami rupa-rupa bentuk vonis sosial maupun hukuman tanpa prosedur pengadilan.

*Societas* Indonesia saat ini? Aneka pernik peristiwa penggerebekan atau perusakan rumah penduduk atas dasar macam-macam alasan berkaitan dengan peribadatan di rumah sendiri, aneka upaya ratifikasi perda-perda agamis dengan label “anti miras” atau “anti pelacuran” atau “anti komunisme” dan entah anti apalagi, serta penyingkiran komunitas-komunitas Ahmadiyah atau semacamnya, semua itu tidak dapat dipandang sepele. Semangat totaliterisme juga telah berhembus dalam *societas* kita.

De-Pancasila-isasi tidak jauh dari kehidupan sehari-hari. Mengingat “pulung” 6 Juni, harus segera dihentikan. Juga saat ini.

\*\*\*

### **Panorama Nasionalisme Indonesia**

Nasionalisme bukanlah *given* (terberi tiba-tiba), melainkan *discovered* (ditemukan, diperjuangkan) dari zaman ke zaman. Karena itu nasionalisme mengandaikan proses. Nasionalisme setiap kali menyembul bagai sumber air sebagai sebuah peristiwa revolusi akal budi yang mencerahkan peradaban kehidupan bersama.

Jika nasionalisme dimaknai seperti yang digagas Gandhi (yang juga dikutip Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945) bahwa “nasionalismeku ialah humanisme”, cetusan terdalamnya melampaui batas wilayah dan zaman apa pun. Gandhi tidak mengartikan nasionalisme sebagai cita rasa bangsa sejauh dalam batas-batas kultur, sejarah, tanah, suku, apalagi ras dan agama. *Nation* merujuk kepada

makna *human being*. Maka, nasionalisme identik dengan kemanusiaan.

Dan, dalam konteks nasionalisme sebagai humanisme inilah, bangsa Indonesia memiliki panorama peradaban *societas* yang mencengangkan, dinamis. Panorama ini memiliki kedalaman refleksi filosofis politis yang perlu disimak.

Kapan genealogi nasionalisme diasalkan? Nasionalisme menyembul ketika cita rasa keadilan mengemuka, ketika hati memberontak atas keterpurukan, ketika “penjajahan” itu sebuah keburukan, ketika “importisasi paham ideologis asing” menjarah kedalaman kearifan hidup sehari-hari. Konsep nasionalisme mengkristal kala masyarakat menjadi *societas* humanis.

Benih-benih humanisme dapat ditemukan dalam karya Multatuli (1820-1887), *Max Havelaar* (terbit tahun 1860). Di dalam karya itu, disajikan panorama memilukan keterpurukan kemanusiaan di bawah sistem kolonial yang kejam. Kisah tragis Saidjah dan Adinda seakan-akan menjadi deklarasi publik di dunia internasional bahwa di belahan bumi yang kelak bernama Indonesia ada sebuah pergumulan kemanusiaan. Surat-surat yang ditulis dalam kesunyian oleh R.A. Kartini (1879-1904) juga mengukir keprihatinan humanis yang kental. Benarlah judul “Habis Gelap Terbitlah Terang”, sebab perhelatan sunyi surat-surat tersebut adalah sembulan pencerahan budi dan hati seorang manusia yang tertindas.

*Societas* humanis makin terlukis pada gerakan 1908. Pendirian Boedi Oetomo mengukir kebenaran bahwa nasionalisme pertama-tama adalah revolusi kesadaran, revolusi akal budi. Sebutan “Boedi Oetomo” (atau akal budi yang berkeutamaan) lantas menjadi emblem tampilnya *societas* humanis bangsa Indonesia. “Boedi Oetomo” pertama-tama *bukan* organisasi politik (apalagi semacam partai politik), melainkan organisasi dari para tokoh muda yang peduli dengan nasib bangsa. Para anggotanya menaruh perhatian pada sesamanya yang terpuruk. Mereka bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan promosi pendidikan kepada sebanyak mungkin pemuda-pemudi Jawa.

### *Societas Negosiatif*

*Societas* negosiatif adalah keberadaan dan aktivitas manusia-manusia Indonesia yang menyeberangi keterbatasan-keterbatasan rasa primordialisme. Kita menyaksikan dinamismenya dalam pembentukan lembaga-lembaga pendidikan yang lebih egaliter. Kontribusi Zending Kristen, Muhammadiyah, NU, menyeruak mengatasi sekat-sekat stratifikasi sosiologis kaya-miskin atau jelata-ningrat masyarakat. Demikian juga “revolusi” pendidikan Romo van Lith SJ di Muntilan atau integrasi pendidikan, kesehatan, dan eksplorasi keluhuran budaya *ala* Kiai

Sadrach di Mojowarno atau perguruan Taman Siswa, mereka menjadi sembulan-sembulan pencerahan nasionalisme ke-Indonesia-an.

Malahan, tahun 1917 van Lith (pastor Katolik) justru diusulkan oleh K.H. Agus Salim (seorang Muslim) untuk menjadi anggota *Volksraad*. Ia diminta menjadi wakil yang memperjuangkan hak-hak kaum bumi putera! Persahabatan negosiatif mereka berdua telah menyeberangi keberpihakan primordial.

Dekade dua puluhan mengukir kekayaan pelajaran berharga bagi konsep nasionalisme. Periode ini penuh dengan lobi-lobi negosiasi tingkat tinggi di antara para pemuda untuk mengurai identitas perjuangannya. Kalimat-kalimat Sumpah Pemuda melukiskan identitas nasional dan kultural sekaligus. Mungkin periode ini dapat disebut sebagai dekade paling *flourishing* dari filsafat politik para tokoh pergerakan Indonesia untuk mengurai paham-paham kesatuan, kebangsaan, ke-Indonesia-an (kendati masih ada dalam imajinasi) yang mengatasi sekat-sekat kesukuan, budaya, ideologi, agama, dan – yang paling krusial – bahasa.

Nasionalisme Indonesia mengalami pergeseran perspektif di era Perang Dunia II, perang ideologis. Ketika itu planet ini terbelah-belah dalam aneka ideologi. Para tokoh Indonesia pun terpanggil untuk mendefinisikan ideologinya.

Revolusi Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dan kelanjutannya berada dalam konteks ini. Indonesia harus mendefinisikan ideologinya. Sebab, ideologi identik dengan identitas bangsa.

Ketika rivalitas ideologi dunia saling bertubrukan, para Pendiri Negara ini secara amat brilian mendefinisikan sebuah ideologi yang rekonsiliatif dengan kodrat Indonesia, “Pancasila”.

Pancasila adalah emblem ideologis yang tidak berpihak pada dua musuh bebuyutan, sosialisme dan liberalisme. Pancasila adalah kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa yang telah ada selama berabad-abad, sebelum kedatangan agama-agama. Nilai-nilai luhur yang terpatri dalam-dalam pada jiwa bangsa ini ialah “ke-gotong-royong-an”, “kekeluargaan”, “religiusitas”, “kesetiakawanan”, “kebersatuan”, dan seterusnya.

Tetapi, perumusan ideologi negara tidak pernah lepas dari ketegangan-ketegangan kontekstual. Kita terbiasa dengan sebutan bahwa ketika itu Indonesia terbelah menjadi dua kelompok “Nasionalis” dan “Islam”. Tetapi, istilah itu memiliki keragaman isi maksud yang beraneka. Golongan “Islam” pun tidak dapat dikategorikan sebagai “satu Islam.”

Para Pendiri Negara mendefinisikan identitas ideologi negara dengan melangkah *brilliantly* mengatasi sekat-sekat primordial. Apa maksudnya “melangkah



jauh mengatasi sekat-sekat primordial”? Artinya, identitas itu tidak dimaknai secara personal, melainkan inter-personal; tidak per-golongan atau antargolongan, melainkan keseluruhan; tidak agamis, melainkan transendental-kultural-religius; tidak rasial, melainkan cita rasa bangsa; tidak historis dominasi mayoritas, melainkan peradaban kehidupan. Yang terakhir ini maksudnya Indonesia itu bukan milik Islam (meskipun umat Islam adalah komponen mayoritas), sebab Indonesia *toh* pernah “dimayoritasi” oleh Hindu atau mereka dengan kepercayaan tradisional. Artinya, yang bukan Islam pun, dalam perspektif para Pendiri Negara ini, memiliki hak yang sama. Indonesia ini *tidak direbut* oleh Islam melainkan menjadi ruang kehidupan bagi siapa pun untuk bernafas dan bertumbuh serta berkembang, ya Islam, ya Hindu, ya Buddha, ya Kristen, Katolik, Konfusius, dan seterusnya.<sup>1</sup>

Dengan demikian “melangkah jauh mengatasi sekat-sekat primordial” juga memaksudkan cita rasa sebagai bangsa secara menyeluruh. Identitas adalah juga realitas yang menjangkau prinsip-prinsip persaudaraan, ketetangaan, solidaritas, dan dialogalitas. Dalam memikirkan identitas, para Pendiri negara ini meletakkan fondasi filsafat yang sangat kokoh, yang jauh melampaui primordialitas. Dan, ini bukan sebuah pergumulan yang sederhana.

Lagi, menurut Atmodarminto dalam sidang Konstituante 1957, sejarah bangsa Indonesia *bukanlah* sejarah Islam atau *menuju* Keislaman. Sejarah Indonesia adalah sejarah konflik dan rivalitas yang tidak berkesudahan sejak Hindu, Budha, dan tatkala kerajaan-kerajaan Islam. Tidak ada kesatuan dalam raja-raja Islam (Lih. Herbert Feith and Lance Castles, eds., *Indonesian Political Thinking 1945-1965*, Ithaca and London: Cornell University, 1970, chapter v).

Pidato Atmodarminto memiliki bahasa realis-historis. Pidato itu merupakan salah satu cetusan Pencerahan yang sulit dicari kembarannya dalam sejarah pergerakan politik Indonesia sejak pertama kalinya dijalankan perdebatan tentang ideologi negara hingga saat ini. Saya menyebutnya *Aufklaerung* Indonesia.

Di sinilah pentingnya pemahaman diskursus perumusan ideologi bangsa. Aneka rincian gagasan para Pendiri Negara kita adalah filsafat eksistensi *societas* Indonesia yang menjadi rujukan *perennial* perjalanan politik bangsa.

Di era Orde Baru nasionalisme mendapat makna baru yang nyaris secara hampir lengkap membingkai keberadaan manusia Indonesia. Orde Baru kerap disebut orde pembangunan.

Tetapi, era ini menyisakan sebuah panorama aneka drama pilu yang *gandeng*

<sup>1</sup> Alinea ini dikutip dari buku saya *Berfilsafat Politik* (Kanisius 2010), hlm. 124.

dengan etika utilitarian-machiavellian. Diawali dengan peristiwa tahun 1965. Jargon “membersihkan komunisme sampai seakan-akarnya” telah melindas prinsip-prinsip kemanusiaan tanpa rasa bersalah sedikit pun. Aneka pemberontakan di Aceh, Maluku dan Papua dimaknai secara simplistik sebagai yang melawan ideologi kesatuan bangsa. Demikian juga dengan berbagai protes ketidak-puasan atas manipulasi, korupsi, kolusi, nepotisme yang merajalela di lingkaran kekuasaan.

Nasionalisme di era Orde Baru tampak gemilang di luar, tetapi keropos di dalam. Nasionalisme yang kerap dimaknai sebagai aktivitas bela negara, dalam banyak praktek, telah meminggirkan rasa humanisme dalam aneka cetusannya.

Societas yang terbentuk pada periode ini saya sebut “societas kritis”. Societas kritis memiliki dua makna sekaligus: bangsa kita memang berada dalam *disposisi critical* dalam maksud senantiasa bergumul dengan kerawanan kediktatoran dan kekejaman otoritas di satu pihak; tetapi di lain pihak societas ini juga menampilkan keberanian-keberanian untuk tidak berhenti mengkritik kebobrokan.

Kini, di era milenia baru, societas Indonesia terkadang masih ada dalam kegamangan. Ketika globalisasi, multikulturalisme, pluralisme, postmodernisme campur baur membangun peradaban tata dunia baru, Indonesia di sana sini terseok oleh aneka konflik kepentingan primordial.

Maka, konsep nasionalisme kita saat ini haruslah lebih mengedepankan skema-skema pembentukan societas kolaboratif yang menjunjung tinggi keanekaragaman dan tidak mereduksinya dalam keseragaman. Kita harus menjadi sebuah societas yang dinamis dalam upaya-upaya kolaborasi konkret, cerdas dan kreatif. Satu sama lain dengan siapa saja. Membangun keutuhan bangsa manusia.

Konsep Nasionalisme harus juga merujuk kepada filsafat Keindonesiaan. Untuk maksud ini, saya merekomendasikan pembaca sekalian untuk menikmati buku yang kami garap bersama-sama dalam rangka 70 Tahun Indonesia Merdeka, *Kearifan Lokal Pancasila: Butir-Butir Filsafat Keindonesiaan* (Kanisius 2016).

\*\*\*

Armada Riyanto: dosen filsafat politik STF Widya Sasana, Malang.

## GLOBALISASI SEBAGAI NEO-IMPERIALIS DAN GERAKAN RESISTENSINYA

Oleh K Ng H Agus Sunyoto

### Abstrak

Semenjak berakhirnya Perang Dingin akibat runtuhnya Komunisme tahun 1990-an, tatanan dunia baru yang disebut Tatanan Global dijalankan dengan pertama-tama merealisasikan gagasan masyarakat global yang terbuka, yaitu masyarakat yang tidak lagi dicirikan oleh identitas lokal dalam etnisitas, kebahasaan, kebudayaan, keagamaan, bahkan teritorial Negara. *a global open society* ini, pada dasarnya adalah manifestasi lain dari pandangan Adam Smith yang menganjurkan sebuah persaingan bebas kapitalisme. Liberalisasi tatanan global diprediksi akan mengarah ke pasar bebas di mana terjadi keterbukaan dan transparansi. Namun, di sisi lain, globalisasi merupakan isu yang jelas-jelas lebih merugikan negara-negara berkembang dan sebaliknya menguntungkan secara besar-besaran negara-negara industri maju. Dalam Globalisasi terjadi hubungan antara negara pusat dan pinggiran yang bersifat hierarkis dan melanggengkan struktur dominasi dan eksploitasi.

Indonesia pun tidak lepas dari telikungan neo-kolonialisme dan imperialisme yang terbungkus dalam topeng Globalisasi ini. Dalam realitanya, masyarakat Indonesia yang menggunakan produk teknologi informasi, telah mengalami perubahan yang terpolarisasi ke dua kutub yang bertentangan. Pertama, masyarakat terseret arus untuk mengikuti nilai-nilai, ide-ide, gagasan-gagasan, konsep-konsep, dan pandangan-pandangan Liberal Barat. Kedua, masyarakat terseret arus untuk mengikuti nilai-nilai, ide-ide, gagasan-gagasan, konsep-konsep, dan pandangan-pandangan Fundamentalisme Islam. Perlu dibentuknya rancang gagasan untuk mempertahankan eksistensi diri Indonesia khususnya umat Islam dengan memperkuat akar nilai-nilai, gagasan-gagasan, ide-ide, pandangan-pandangan, dan konsep-konsep sosio-kultural-religius Islam Indonesia.

**Kata kunci:** *Globalisasi, Neo-imperialisme, Islam Indonesia*

---

Semenjak berakhirnya Perang Dingin akibat runtuhnya Komunisme tahun 1990-an, tatanan dunia baru yang disebut Tatanan Global dijalankan dengan pertama-tama merealisasikan gagasan masyarakat global yang terbuka, yaitu masyarakat yang tidak lagi dicirikan oleh identitas lokal dalam etnisitas, kebahasaan, kebudayaan, keagamaan, bahkan teritorial Negara. George Soros dalam buku berjudul *On Soros: Staying Ahead of the Curve* (1995) menyebutkan bahwa seiring meredanya ketegangan perang dingin (*cold war*) antara Barat dengan Timur yang ditandai runtuhnya komunisme, terjadi fenomena global tentang lahirnya tatanan baru yang disebut *a global open society*, yakni tatanan baru masyarakat global yang dibangun di atas empat ciri utama: (1) *effective competition*, yaitu bentuk persaingan di mana situasi nilai dan

peluang-peluang selalu berubah; (2) memaksimalkan kebebasan individual dengan membiarkan orang memasuki berbagai pilihan alternatif yang tersedia secara global; (3) hubungan sosial berdasar kontrak sosial di mana individu sebagai nucleus dari struktur masyarakat mengambang secara global tanpa perlu akar tempat berpijak yang mengikat; (4) nilai-nilai hanyalah masalah pilihan seperti orang memilih di tempat mana mau berinvestasi atau berspekulasi.

Definisi ‘masyarakat global yang terbuka’ yang dilontarkan George Soros inilah representasi pemikiran baru kapitalis global; yaitu sebuah masyarakat bersifat trans-nasional yang tidak dibatasi ras, suku, budaya, bahasa, teritorial, agama; sebuah masyarakat terbuka yang hak-hak asasinya dilindungi oleh undang-undang di berbagai negara.

Menurut Yasraf Amir Piliang (1995) tatanan baru yang disebut Soros dengan istilah *a global open society* ini, pada dasarnya adalah manifestasi lain dari pandangan Adam Smith yang menganjurkan sebuah persaingan bebas kapitalisme, di mana setiap orang diharuskan menanamkan di dalam dirinya motif mencari keuntungan dan mengumpulkan kekayaan pribadi, karena kekayaan itu diperlukan untuk kesuksesan usaha dan kemakmuran bangsanya. Hanya saja era yang disebut globalisasi adalah era liberalisasi berskala dunia di mana konsep-konsep lama tentang Negara, Bangsa, Komunitas Suku, Kepercayaan, Batas-batas Negara, Nasionalisme, digantikan oleh tatanan baru bersifat global yang memberi kebebasan kepada individu sebagai akibat berkembang pesatnya teknologi informasi.

### **Nekolim di Balik Topeng Globalisasi**

Liberalisasi tatanan global, sedikitnya telah diprediksi oleh Jean Baudrillard (1983) yang memaparkan prediksinya bahwa di dalam konteks ekonomi yang mengarah ke pasar bebas akan terjadi keterbukaan dan transparansi di mana setiap individu memiliki hak untuk berspekulasi dan mencari keuntungan di dalam ekonomi, di mana jaringan ekonomi global dapat dimasuki oleh apa saja, siapa saja, di mana saja dan kapan saja bahkan oleh berbagai lapisan masyarakat global yang *anonym* dan *invisible*, yang dapat berbuat apa pun sesuai keinginan mereka. Keadaan inilah yang dewasa ini sedang berlangsung sebagai fakta yang dengan sukarela atau terpaksa harus diterima oleh bangsa Indonesia, karena sudah menjadi bagian dari konstitusi baru yang memaksa pemerintah dan aparaturnya untuk menjalankannya sebagai keharusan fundamental Negara dunia ketiga yang menjadi kordinat dan sangat tergantung kepada Negara dunia pertama.

Di dalam buku berjudul *Globalization Unmasked: imperialism in 21<sup>st</sup> century*

(2001), James Petras dan Henry Veltmeyer secara kritis mengungkap bahwa fenomena globalisasi adalah isu yang jelas-jelas lebih merugikan negara-negara berkembang dan sebaliknya menguntungkan secara besar-besaran negara-negara industri maju. Petras dan Veltmeyer menjelaskan bahwa negara-negara berkembang dalam proses globalisasi itu justru akan menjadi semakin miskin karena yang disebut globalisasi itu adalah sebuah strategi negara-negara industri maju dalam memecahkan kejenuhan pasar mereka dengan mencari tempat-tempat penjualan bagi barang-barang yang sudah mengalami kesulitan di pasar dalam negeri negara-negara industri maju. Dengan demikian, di dalam proses globalisasi itu akan terjadi sebuah imperialisasi secara tidak langsung atas negara-negara miskin oleh negara-negara industri maju.

Immanuel Wallerstein dalam buku *A World Systems Reader: New Perspective on Gender, Urbanism, Cultures, Indigenous Peoples, and Ecology* (2000) dalam teorinya menjelaskan asal-usul dan proses kapitalisme, revolusi industri, dan hubungan yang rumit antara negara-negara Dunia Pertama, Kedua dan Ketiga dan peranan masing-masing dalam pertumbuhan kapitalisme dan industrialisasi, sampai pada dominasi dan hegemoni Dunia Pertama atas dunia Kedua dan Ketiga. Wallerstein dalam teorinya menjelaskan hubungan yang eksploitatif dan dominatif antara negara-negara pusat/ hegemon/ kapitalis/ imperialis sebagai *core/center* dengan negara-negara pinggiran yang dieksploitasi (*periphery*). Menurut Wallerstein, sistem imperialisme dunia adalah sebuah sistem yang melembagakan dan melanggengkan struktur hegemoni dan hierarki negara-negara Dunia Pertama (*core*) dengan negara-negara Dunia Kedua dan Dunia Ketiga (*periphery*).

Negara Dunia Pertama yang mempunyai tingkat distribusi dan produksi industri yang sangat tinggi, adalah negara terkuat, karena ia memiliki kelas borjuis yang kuat dan kelas pekerja yang besar. Sebaliknya, negara pinggiran memiliki tingkat produksi yang rendah (meski memiliki bahan mentah yang cukup), merupakan negara lemah, kelas borjuisnya kecil dan memiliki banyak petani. Hubungan antara negara pusat dan pinggiran bersifat hierarkis dan merupakan struktur dominasi dan eksploitasi (Chase-Dunn, 1998). Struktur hierarkis, dominatif dan eksploitatif itu, menurut Chase-Dunn, merupakan komponen utama dari sistem dunia kapitalis saat ini. Dalam perspektif politik dominasi dan ketergantungan itulah, hubungan antar-negara sesungguhnya tidak bersifat *equal*, melainkan yang kuat akan mengeksploitasi dan mengakumulasi, sedang yang lemah sekedar men-suplai dan tergantung pada yang kuat. Itulah hakikat terdalam dari imperialisme yang tetap kuat sampai saat ini.

WajahbaruimperialismemenurutPeterEvansdidalamDependentDevelopment (1979) memang mempesona. Dalam struktur politik, ia dimanifestasikan dalam

topeng pembungkus yang disebut “demokratisasi”. Sedang dalam struktur ekonomi diwujudkan dalam topeng “globalisasi”. Semua negara, dipaksa dan didikte untuk menjadi demokratis dan menghormati HAM, paling tidak secara formal-prosedural. Semua negara dipaksa untuk membuka diri dalam sektor ekonomi karena globalisasi diasumsikan tidak mungkin dilawan.

### ***Konflik Agama Sebagai Alih Masalah***

Sejak awal runtuhnya komunisme, teori *a global open society* yang digulirkan George Soros sebagai tatanan baru dunia tidak ditampakkan di permukaan, melainkan dijalankan sebagai kebijakan ‘siluman’ yang umumnya diketahui kalangan elit pemerintahan, akademisi, politisi, ekonom, dan elit penguasa media massa. Sebaliknya, tatanan baru yang ditampakkan di permukaan adalah teori Samuel P. Huntington tentang keniscayaan terjadinya ‘benturan peradaban’ pasca runtuhnya komunisme, yang dikemas di dalam buku *The Clash of Civilization and the Remaking of World Order* (1996), di mana dalam teori itu pasca perang dingin yang terjadi adalah konflik peradaban antara Barat dan Timur. Peradaban Barat diwakili oleh peradaban Kristen dan peradaban Timur diwakili oleh Islam dan Konghucu. Sejak bergulirnya teori Huntington, bermunculan gerakan-gerakan Islam radikal seperti Al-Qaeda, Jama’ah Islamiyyah, Thaliban, Jundullah, Boko Haram, Jabhat el-Nusrah, yang diikuti gerakan Konghucu radikal seperti Falun Gong.

Sejak April 1996 telah terjadi perusakan atas gereja di Pekalongan yang disusul Juni 1996 di Surabaya dilanjut ke Pasuruan, yang meledak dalam kerusuhan lebih besar pada 10 Oktober 1996 di Situbondo. Gereja Kristen dan Katholik dirusak dan dibakar umat Islam, toko-toko Cina dijarah umat Islam. Kasus serupa pecah di Tasikmalaya pada 25 Desember 1996, yang disusul kasus serupa di Bandar Lampung, Banjarmasin, Makassar, bahkan di Kupang Masjid dibakar umat Kristen. Teori abal-abal Huntington ternyata tidak dapat dibuktikan dalam skala lebih luas manakala pecah kerusuhan 13 – 14 Mei 1998 di Jakarta, di mana dalam kerusuhan yang menelan ribuan jiwa itu tidak terjadi pembakaran gereja-gereja di ibukota.

Meski terbukti teori Huntington hanya abal-abal, tetapi cakupan benturan agama yang diajukan Huntington ternyata diperluas bukan sekedar benturan antar peradaban, melainkan mencakup internal agama bersifat sektarian seperti Sunni-Syiah, Sunni-Wahhabi, Wahabi-Syiah, Islam versus agama lokal, dll. Sejak berakhirnya perang dingin – terutama setelah beredarnya buku Samuel Huntington – berita-berita seputar konflik berlatar agama menghiasi media massa cetak maupun elektronik dan menjadi perbincangan yang sengit di kalangan umat beragama.

### *Indonesia Dalam Telikungan Nekomim*

Hasyim Wahid dalam buku kecil berjudul *Telikungan Kapitalisme Global Dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia* (1999) memaparkan sebuah analisis bahwa kekuatan Kapitalisme Global telah menjalankan skenario Neo Imperialismenya di Indonesia dengan memanfaatkan kebijakan pemerintah yang disebut Paket Oktober 1988 (Pakto 88), di mana saat itu pemerintah memberikan kebebasan kepada BUMN dan Swasta Nasional untuk membuat hutang ke luar negeri dengan jaminan *comercial paper* dari pemerintah. Kebijakan Pakto 88 itu, menurut Hasyim Wahid, diikuti pembentukan Panitia Kredit Luar Negeri (PKLN) pada 1992 yang bertujuan membatasi jumlah hutang luar negeri BUMN dan Swasta Nasional, di mana hutang yang dijamin oleh pemerintah hanya hutang pada periode jatuh tempo lima tahun ke depan.

Tahun 1996 – menjelang jatuh tempo pembayaran utang luar negeri BUMN dan Swasta Nasional yang dijamin pemerintah -- secara tiba-tiba mata uang rupiah diperdagangkan di bursa keuangan dunia, dan ternyata diborong oleh spekulan (belakangan diketahui bahwa spekulan tersebut adalah George Soros). Dalam tempo singkat sejak rupiah diperdagangkan, mata uang rupiah yang diborong spekulan bernama Soros itu tiba-tiba ‘tumpah’ di bursa keuangan, sehingga sesuai hukum pasar, kurs rupiah terhadap dolar anjlok dari nilai 3.236 rupiah per US dolar menjadi 7000, 9000, 10.000, 14.000 bahkan mencapai 17.000 rupiah per US dolar. Merosotnya nilai rupiah dan sebaliknya melambungnya nilai kurs US dolar, mengguncang perekonomian Indonesia, terutama membuat bangkrut BUMN dan Swasta Nasional yang memiliki hutang luar negeri besar. Demikianlah tahun 1997, menjadi tonggak bagi terpuruknya Indonesia ke situasi krisis moneter (krismon) yang berlarut-larut hingga saat ini.

Di tengah krisis moneter itu, Presiden Soeharto terpaksa menandatangani *Letter Of Intens* dengan Michael Camdessus dari IMF yang berujung pada terbentuknya Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang diawasi Standard Chartered Bank dan Citybank, di mana lewat lembaga BPPN, aset-aset BUMN dan Swasta Nasional yang tak mampu membayar hutang luar negeri diambil-alih oleh BPPN, kemudian aset-aset BUMN dan Swasta Nasional itu oleh BPPN dijual (dengan istilah privatisasi) kepada para pemilik kapital dari negara-negara industri maju. Guna memuluskan skenario penjualan aset-aset BUMN dan Swasta Nasional, kaki tangan kapitalisme global yang ada di lingkaran eksekutif dan legislatif melakukan berbagai kebijakan bersifat deregulatif – termasuk mengamandemen UUD 1945 dan membuat undang-undang tentang penanaman modal asing dan pengelolaan sumber

daya air – yang mempermudah penguasaan aset-aset tersebut oleh pemilik kapital.

Sementara kalangan intelektual, media massa, LSM, dan akademisi bermental *kacung* asing berperan dengan sangat baik dalam usaha-usaha menopang imperialisme modern dengan “mengamankan” dan “mengawal” program-program kapitalisme global di dalam berbagai perdebatan wacana di tanah air. Demikianlah, fakta sejarah menunjuk bahwa melalui BPPN yang dikontrol Standard Chartered Bank dan Citybank, raksasa-raksasa kapitalis dunia seperti Caltex, Shell, Exxon Mobile, British Petroleum, Chevron, Amerada Hess, Standard Mobile Oil, Marathon, Gulf Union Oil mengambil -alih aset nasional di bidang pertambangan minyak dan gas, Freeport dan Newmont mengambil-alih semua aset nasional di bidang pertambangan emas dan tembaga, Cement Mexico mencaplok semua aset nasional di bidang produksi semen, Phillip Morris, British American Tobacco, Soros Corp membeli aset nasional di bidang rokok, cengkeh dan tembakau, ABN Amro Bank, Citybank, Standard Chartered, Chemical Bank, Chase-Manhattan Bank, Federal Reserve Bank membeli aset nasional di bidang perbankan, bahkan Golden Missisipi, Nestle, Danone mendominasi penguasaan sumber-sumber mata air yang dijadikan komoditi air dalam kemasan seperti Aqua, Ades, Aquades, Club, Cheers, Cleo, dsb.

Penjualan besar-besaran aset nasional dari BUMN sampai swasta nasional melalui BPPN, belum mencapai final selama kepastian hukumnya belum diperoleh secara legal, terutama karena privatisasi atas BUMN itu bertentangan dengan UUD 1945. Itu sebabnya, sejak 1999 lewat MPR/DPR RI hasil Pemilu yang dianggap paling demokratis, diubahlah UUD 1945 dengan istilah Amandemen. Melalui UUD 1945 hasil amandemen yang berlangsung sampai tahun 2004, dihasilkan berbagai macam UU baru yang tidak saja mengabsahkan kepemilikan aset Negara oleh *privat*, melainkan pula sangat menguntungkan pemilik kapital dan sebaliknya merugikan rakyat. Akibat amandemen UUD 1945 itu, bangsa Indonesia, yang secara ideal di dalam preambule UUD 1945 dikatakan bebas dan berdaulat, ternyata telah berubah menjadi komunitas buruh bermental *cargo cult* sekaligus konsumen utama dari arus barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan milik kapitalis global, yang ironisnya diproduksi dari kekayaan alam Indonesia sendiri.

Tampaknya, di dalam sistem ekonomi pasar bebas yang menandai era global yang mensahkan aset nasional untuk dimiliki pemilik capital asing, masyarakat Indonesia tanpa sadar telah terseret oleh arus barang-barang dan produk-produk ciptaan kapitalis global. Akibat dari sistem pasar bebas itu, tanpa sadar bagian terbesar masyarakat Indonesia telah terperangkap ke dalam lingkaran sistem konsumsi berdasar utang yang sengaja ditebar lewat *counter-counter hp*, *developer* perumahan,



*showroom* motor dan mobil, toko elektronik, toko computer, toko meubeler, toko khusus kredit, bank perkreditan rakyat, dsb. Dalam konteks inilah, terjadi proses pemelaran masyarakat Indonesia, di mana rata-rata masyarakat Indonesia terlilit lingkaran setan utang bunga-berbunga yang tak diketahui ujung dan pangkalnya. Bahkan tanpa sadar, masyarakat Indonesia diatur dan ditata oleh sistem yang disebut *Aristocracy of Money*.

### ***Globalisasi Sosial-Budaya***

Proses globalisasi yang berlangsung sejak dasawarsa 1990-an yang ditandai perkembangan tidak terkendali teknologi informasi, yang dalam kurun dua dasawarsa telah mengubah tidak saja struktur sosial masyarakat Indonesia, tetapi telah mengubah pula ide-ide, gagasan-gagasan, pandangan-pandangan, konsep-konsep, dan nilai-nilai lama yang dibangun di atas identitas Kenusantaraan yang tercermin dalam falsafah Negara Pancasila dan UUD 1945. Dalam realita, masyarakat Indonesia yang menggunakan produk teknologi informasi, telah mengalami perubahan yang terpolarisasi ke dua kutub yang bertentangan. Pertama, masyarakat terseret arus untuk mengikuti nilai-nilai, ide-ide, gagasan-gagasan, konsep-konsep, dan pandangan-pandangan Liberal Barat. Kedua, masyarakat terseret arus untuk mengikuti nilai-nilai, ide-ide, gagasan-gagasan, konsep-konsep, dan pandangan-pandangan Fundamentalisme Islam.

Fakta yang menunjuk pada terjadinya perubahan masyarakat Indonesia yang mengarah ke dua kutub yang berbeda, pada dasarnya dapat dimaknai sebagai keberhasilan dari teori Samuel Huntington yang menggambarkan terjadinya benturan peradaban (*clash of civilization*) antara Barat dan Timur pasca usainya perang dingin (*cold war*). Perubahan yang makin lama makin menguat ini, jika dibiarkan akan dapat membentuk kekuatan-kekuatan yang potensial akan benar-benar meletus dalam wujud konflik berdarah yang memecah-belah elemen bangsa.

Semenjak lengsernya KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dari jabatan presiden RI tahun 2001, sekumpulan intelektual NU binaan Gus Dur secara serius mengamati, mencermati, mencatat, dan memberi makna atas berbagai perubahan Sosio-Kultural-Religius, termasuk pendidikan, hukum, ekonomi, dan politik. Atas dasar hasil pengamatan dan pencermatan dari perubahan masyarakat akibat globalisasi yang mengarah kepada dua kutub yang bertentangan itu, pada 2010 dirancang gagasan bagi Jama'ah dan Jam'iyyah Nahdlatul Ulama untuk mempertahankan eksistensi diri sebagai umat Islam Indonesia dengan memperkuat akar nilai-nilai, gagasan-gagasan, ide-ide, pandangan-pandangan, dan konsep-konsep sosio-kultural-religius Islam

Indonesia sekaligus melakukan resistensi terhadap globalisasi, di mana gerakan itu disebut Islam Nusantara, yang baru diributkan pada Mukhtamar NU ke-33 di Jombang tahun 2015 lalu.

*Daftar Pustaka*

Arrighi, Giovanni & Beverly J Silver, *Chaos and Governance in the Modern World System*, 1999.

Baudrillard, J., *In The Shadow of the Silent Majorities*, New York: Semiotext (e), 1983.

Chomsky, N., *Hegemony or Survival: America's Quest for Global Dominance*, 2004

Green, R. W., *Protestantism, Capitalism, and Social Sciences: The Weber Thesis Controversy*, 1973.

Hull, T.D., "World-Systems Analysis: A Small Sample from a Large Universe" dalam Thomas D. Hull (ed.), *A World Systems Reader: New Perspective on Gender, Urbanism, Cultures, Indigenous Peoples, and Ecology*, 2000.

Huntington, Samuel P., *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*, 1996.

O'Connor, J., 'The Meaning of Economic Imperialism', dalam Michael Smith dkk (eds.), *Perspective on World Politics*, 1981.

Soros, George., *On Soros : Staying Ahead of The Curve*, 1995.

Tuathail, G. O. & Simon Dalby, *Rethinking Geopolitics*, 1998.

Wahid, Hasyim., *Telikungan Kapitalisme Global Dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia*, 1999.

Wallerstein, Immanuel, *The Modern World System II: Mercantilism and the Consolidation of the European World Economy 1600- 1750*, 1980.

\_\_\_\_\_, *The Modern World System III: The Second Era of Great Expansion of The Capitalist World Economy 1730-1840s*, 1989.

## ID/ENTITAS KOSMOPOLITAN GLOBAL (DI) JAWA TIMUR<sup>1</sup>

Oleh Budi Susanto <sup>2</sup>

### Abstrak

*Globalisasi yang nampak dalam wajah kapitalisme global berperan sangat penting dalam perubahan budaya masyarakat Indonesia. Pada masa VOC dan kolonialisme, wajah kapitalisme global ini nampak dalam berbagai pabrik dan perkebunan yang membangun banyak infrastruktur, salah satunya adalah kereta api. Dalam bidang budaya, pembangunan kereta api ini telah menyajikan gambaran yang kurang lebih seragam tentang Jawa. Hal ini didapatkan dari pengalaman yang kurang lebih sama: menjadi penumpang kereta api. Pada masa kini, kapitalisme global menampakkan dirinya dalam berbagai bentuk monopoli perusahaan transnasional. Dengan kekuatan kapitalnya, mereka sanggup memberi gambaran imajinasi yang kurang lebih seragam tentang dunia, tempat manusia hidup. Kesatuan umat manusia didukung oleh kesatuan bahasa yang memungkinkan tiap orang dari berbagai belahan dunia memahami suatu hal secara serupa. Kesatuan gambaran dan pemahaman ini melahirkan nasionalisme kebangsaan yang berciri kosmopolitan pada masyarakat nusantara. Nasionalisme kosmopolitan ini berciri terbuka namun kritis terhadap kondisi zamannya. Nasionalisme kosmopolitan inilah modal penting bangsa Indonesia dalam mengarungi globalisasi masa kini.*

**Kata kunci:** *kapitalisme global, identitas nasional, nasionalisme kosmopolitan*

Karena sudah hari kedua dalam bulan April, maka percakapan kita pagi hari ini, meskipun berbentuk cerita dan pengalaman pribadi, semoga tidak perlu dikait-kaitan dengan apa yang disebut sebuah “April Mop.” Kurang lebih dua bulan yang lalu panitia simposium berkabar apakah saya bersedia berbicara dalam sebuah simposium tentang hal dan masalah “Identitas lokal Indonesia sebagai negara pasca-kolonial di tengah arus globalisasi.” Dengan senang hati saya menerima undangan tersebut, dan berikut ini adalah cerita - dan cita-cita - penulis berkaitan dengan hal dan masalah globalisasi (di) Jawa Timur.

Sekitar empat bulan yang lalu, saya berkunjung ke Surabaya, saat itu sore hari, dan dalam suasana hujan deras. Perjalanan dari Jogja menggunakan mobil, dengan

<sup>1</sup> Disajikan dalam simposium nasioanl “Membentuk Identitas Indonesia dalam Arus Globalisasi,” diselenggarakan oleh Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, 2 April 2016.

<sup>2</sup> Staf pengajar Pascasarjana Universitas Sanata Dharma, Jogja.

seorang pengemudi handal, karyawan Universitas Sanata Dharma (USD). Mobil kami mempunyai peralatan Global Positioning System (GPS), karena memang disediakan waktu membeli mobilnya. Perjalanan tersebut ditemani dua sahabat dari Universitas Gajah Mada dan Universitas Sanata Dharma. Berikut sedikit informasi tentang “kehebohan” gadget GPS dalam konteks percakapan kita berempati dalam mobil berkaitan dengan globalisasi. GPS atau Global Positioning System adalah bantuan untuk mengetahui posisi kita berada saat ini, dan di tempat ini; berkat pelayanan sinyal dari satelit ke perangkat GPS (ponsel pintar, GPS tracker, dll.) yang ada dalam jangkauan atau bahkan genggam tangan kita. Gadget GPS mampu mengkalkulasi dan menampilkan seakurat mungkin posisi, kecepatan dan informasi sewaktu kepada pengguna GPS. Pelayanan publik GPS mulai sekitar tahun 1990-an. Keistimewaan GPS adalah mampu bekerja kapan saja dengan keakuratan bisa mencapai sekitar lima meteran; khususnya yang sudah diperlengkapi dengan teknologi *Wide Area Augmentation System* (WAAS). Bagi pengemudi mobil USD yang dilengkapi gadget GPS tersebut, perjalanan hari itu bukanlah untuk pertama kalinya pergi ke Jatim; bahkan lebih sudah lebih dari sepuluh kali. Itu sebabnya, tanpa GPS pun, dia tahu dengan baik dimana ada depot nasi rawon atau mie Jawa yang masih buka sampai tengah malam; di daerah perbatasan Jatim - Jateng.

Hari itu, Senin 14 Desember 2015 pagi saya bersama dua teman tadi bersama-sama naik mobil dari Jogja menuju Surabaya untuk melayat mendiang Benedict Anderson yang wafat, mendadak, pada tengah malam tanggal 12 Desember 2016, di Batu, kota wisata yang terletak di kaki gunung Arjuna. Dalam rangka mengenang mendiang Ben Anderson tersebut, maka cerita(cita-cita) perbincangan berikut ini saya tuliskan juga dengan memanfaatkan gagasan Ben yang memang pernah mempercakapkan tentang kaitan tiga hal: globalisasi kapitalisme, cara hidup kosmopolitan, dan nasionalisme kenegaraan.

### **Kapitalisme Global (di) JATIM**

Dalam perjalanan pulang setelah memberi penghormatan terakhir bagi Ben di rumah duka Adi Yasa, di jalan Demak, Surabaya, penulis berempati dalam mobil, menjadi sadar bahwa antara Surabaya dengan Caruban, kami menghitung, perlu melintasi jalur rel kereta (api) yang sama, lebih dari lima kali. Keterangan pengemudi mobil kami, hal itu terjadi karena KA jalur Solo - Surabaya perlu berbelak-belok menyinggahi kota-kota tertentu di wilayah Jateng -Jatim, yang sejak abad kesembilan belas terkenal dengan pusat perkebunan tebu dan pabrik gula. Nama raja gula Hindia Belanda paling kesohor pada waktu itu, Oei Tiong Ham, juga berbasis industri

perkebunan tebu dan pabrik gula yang difasilitasi jalur kereta api; yang kini diurus oleh PJKA.

Segera saja sambil menikmati kemacetan lalu-lintas saat harus berkali-kali melintasi rel KA di jalur jalan Caruban - Surabaya tersebut, ingatan dalam benak kepala saya terkesankan dengan imajinasi kemolekan pemandangan desa, sawah, perkebunan tebu, pohon jati, perbukitan, dll. yang dilintasi jalur rel KA (kereta api) tersebut. Industri dan bisnis KA di Hindia Belanda semula dibangun untuk mengangkut komoditi ekspor (tembakau, kopi, coklat, karet, dll.) ke pelabuhan di Surabaya, Semarang, Jakarta, dll.. Tetapi, dengan segera industri KA juga dimanfaatkan sebagai transportasi penumpang - dengan fasilitas kenyamanan berdasar perbedaan kelas sosial - untuk saling berkunjung, berjiarah, atau berwisata antar kota atau daerah di Jawa. Menurut Ben, terjemahan bahasa Inggris dari KA adalah “*carriages of fire.*”

Dalam bukunya yang paling terkenal *Imagined Communities*,<sup>3</sup> yang sudah diterbitkan di tigapuluh tiga negara, dan diterjemahkan kedalam duapuluh sembilan bahasa, termasuk ke dalam Bahasa Indonesia, dan tulisan lainnya, Ben sangat terkesan dengan sejarah hal dan masalah kehadiran (teknologi) perkereta-apian di Jawa, perkembangan peta dan pendirian museum. Pengalaman pandangan mata para penumpang dalam gerbong melalui jendela kereta, ter”nyata,” memberi imajinasi panorama yang bergerak dan berubah berkelanjutan. Terjadilah, sebuah pengalaman dan kesadaran baru tentang “Jawa.” Kalau kemudian para penumpang itu juga belajar dari gambar peta Mercatorian, akan memudahkan dia membayangkan poster “van Sabang tot Merauke” yang mulai dikenal awal abad keduapuluh di koloni Hindia Belanda.

Beberapa kolega dan kenalan Ben,<sup>4</sup> seperti Takashi Shiraisi pernah menulis bahwa pengalaman imajinatif bersama dari jutaan penumpang KA seperti itu pada dua dasa warsa awal abad keduapuluh, membuat massa rakyat di Hindia Belanda menjadi merasa merdeka untuk bergerak atas nama nasionalisme. Rekan Ben yang lain, seorang sejarawan Rudolf Mrazek, dengan jeli mencatat bahwa pengalaman berjarak dengan duduk nyaman dan terlindung di dalam gerbong KA - sama seperti dalam sebuah bunker atau kabin pesawat terbang - membuat yang bersangkutan

<sup>3</sup> Edisi bahasa Indonesia, Benedict Anderson, *Imagined Communities. Komunitas-komunitas Terbayang*. Yogyakarta: INSIST Press, 2001. Dalam edisi terbaru berbahasa Inggris, ada tambahan bab baru ber judul “Travel and Traffic: *On the Geo-biography of Imagined Communities.*” Buku edisi terbaru ini diprososikan dengan kata-kata “*A brilliant exegesis on nationalism.*”

<sup>4</sup> Berikut adalah tiga buku termaksud: Takashi Shiraisi, *An Age in Motion: Popular Radicalism in Java, 1912-1926*. Ithaca N.Y.: Cornell University Press, 1990. Rudolf Mrazek, *Engineers of Happy Land. Perkembangan Teknologi dan Nasionalisme di sebuah Koloni*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia & Princeton University Press 2002/2006. Rosalind Morris, *In the Place of Origins: Modernity and Its Mediums in Northern Thailand*. Durham: Duke University Press, 2000

mampu membayangkan sebuah negeri (dan bangsa) molek di Hindia Belanda. Murid Ben, Rosalind Morris, memaparkan kehadiran modernitas stasiun KA persis di ujung jalan utama kota tua Chiang Mai. Kota terbesar di Thailand utara itu memunyai tradisi “seribu vihara” Buddhisme kerakyatan yang mampu memberi “imajinasi” lain tentang militerisme dan kosmopolitanitas ala metropolitan Bangkok di Siam Selatan. Hal yang mirip, dapat pula dibayangkan dengan lokasi stasiun besar KA Tugu di Jogja yang berada di mulut jalan Malioboro.

Tidak mengherankan bahwa - singkat kata - globalisasi yang secara sistematis juga bermula di Indonesia - dulu Hindia Belanda - menghasilkan perubahan besar - baik maupun buruk - dalam hal kebudayaan; salah satunya yaitu hal dan masalah dan identitas kebangsaan - nasionalisme! Jangan kaget bahwa Jatim yang pernah di bawah pemerintah jajahan Hindia Belanda yang diawali hanya oleh kepentingan VOC (Perusahaan Dagang Hindia Belanda 1602-1799) pernah menjadi tempat paling subur untuk berkembangnya politik ekonomi dan kebudayaan global masa kini. Bisnis warisan VOC diteruskan pemerintah kerajaan Belanda sampai masa kini. Ketika VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799, hutangnya tercatat 136,7 juta gulden. “Kekayaan” aset VOC yang ditinggalkan berupa kantor dagang, gudang, benteng, kapal serta daerah kekuasaan di Indonesia. Globalisasi Perusahaan Dagang Hindia Timur (Inggris) yang berbasis di India (dengan Pakistan dan Bangladesh), berdiri tahun 1600.<sup>5</sup> Di bawah pemerintah kapitalis Kerajaan Belanda. Lahirlah politik strategi pembangunan pertanian, Cultuur Stelsel (di”sadur” oleh pemerintah nasionalis RI sebagai politik “Tanam Paksa”). Menurut Kahin,<sup>6</sup> ketika politik Cultuur Stelsel dihentikan (formal 1877, de facto 1915), pemerintah kolonial Belanda mencatat mampu membayar utang VOC sebesar 35.5 juta gulden (atau sekitar 18 juta US\$). Strategi pembangunan pertanian dan perkebunan (“Tanam Paksa”) tersebut juga membawa keuntungan ke negeri Belanda sebesar 664,5 juta gulden, dengan perincian: 236 juta untuk mengurangi beban hutang publik pemerintah Belanda. 115 juta untuk subsidi pajak, 153 juta pembangunan jaringan KA di Belanda, dan 146 juta gulden untuk penguatan sistem irigasi penahan banjir.

Kemajuan teknologi transportasi antar benua dengan kapal api atau kapal uap, memudahkan kedatangan para perantau dari daratan Tiongkok - hoakiau - khususnya

<sup>5</sup> Lihat, Mederd Gabel and Henry Bruner. Globalinc. *An Atlas of The Multinational Corporation*. New York: The New York Press (2003). Sebagaimana diringkaskan oleh Nayan Chanda, dalam YaleGlobal Online. <http://www.globalenvision.org>

<sup>6</sup> George McT. Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Introduction by Benedict R. O’G. Anderson. Ithaca NY: Southeast Asia Program Publications. First Pub. 1952, terjemahan bahasa Indonesia tahun 2003, 11

yang datang ke “Nan Yang” (Hindia Belanda) sejak awal abad ke 19. Mereka cukup “beruntung” karena kedatangan mereka mampu memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja untuk globalisasi ekonomi dan budaya tersebut. Perlu diketahui bahwa politik diskriminatif rasis dari pemerintah kolonial Belanda yang menggolongkan orang-orang Tionghoa Singkeh maupun peranakan menjadi “Timur Asing” adalah strategi Belanda yang diskriminatif; dan menyingkirkan mereka dari jabatan birokrat negara. Orang-orang Tionghoa perantauan tersebut (Hoakiau) cenderung tak punya ingatan nostalgik, dan terlalu peduli atau menyesal ketika meninggalkan daratan Tiongkok yang pada waktu itu sedang menderita di bawah kekuasaan dinasti kaisar Tsing; dengan demikian juga memudahkan untuk ikut membayangkan bibit-bibit “nasionalisme” di Hindia Belanda. Jejak langkah bisnis raja gula Oei Tiong Ham yang menjadi bagian dari perkembangan kapitalisme global di Indonesia, khususnya di Jateng dan Jatim - untung - juga diimbangi oleh beberapa orang Tionghoa peranakan Indonesia, salah satunya yang terkenal yaitu Kwee Thiam Tjing;<sup>7</sup> yang akan menjadi bahasan berikut dalam tulisan ini.

Data globalisasi - meskipun dari satu dasawarsa yang lalu<sup>8</sup> - yang berawal dari abad ke19 tersebut sangat menakjubkan. Tahun 1990, jumlah perusahaan dagang trans-nasional (Trans National Corporations, TNC) baru sekitar 3000an. Satu dasawarsa kemudian, jumlah TNC meingkat menjadi sekitar 63 ribu, yang mempunyai sekitar 90 juta tenaga kerja internasional; 20 juta diantaranya berada di negara-negara berkembang. Sumber yang sama mencatat bahwa tahun 2003 tersebut, dari seribu TNC paling top menghasilkan 80 persen dari pendapatan dunia. Dengan penghasilan sekitar 210 milyar dolar AS, perusahaan minyak ExxonMobil tercatat berada di urutan 21 di antara 100 lembaga ekonomi terbesar dunia. Perusahaan Exxon berada di belakang urutan negara Swedia dan Turki. Pada tahun 1962, 60 persen dari 500 top TNC dunia adalah perusahaan AS. Sejak tahun 1999, perusahaan AS hanya 36 persen saja.

Sebagai catatan ringkas dan perbandingan, pada tahun 2015, menurut Forbes (<http://www.forbes.com>), duapuluh lima perusahaan terbesar di dunia adalah: 1. ICBC (Industrial and Commercial Bank of China), 2. China Construction Bank, 3. Agricultural Bank of China, 4. Bank of China, 5. Berkshire Hathaway, 6. JPMorgan

<sup>7</sup> Dua buku yang memuat tulisan Kwee Thiam Tjing yaitu: *Indonesia Dalem Api dan Bara*. Malang 1947, Jakarta: Elkasa, 2004; dan *Menjadi Tjamboek Berdoeri*. Memoar Kwee Thiam Tjing. Jakarta: Komunitas Bambu, 2010. Editor Arief W.Djati & Ben Anderson, dengan Pengantar James Siegel.

<sup>8</sup> Lihat, Globalinc. *An Atlas of The Multinational Corporation*. Mederd Gabel and Henry Bruner. New York: The New York Press, 2003. Book review contributed by Nayan Chanda. Reprinted with permission from Yale Global Online. <http://www.globalenvision.org>

Chase, 7 Exxon, 8. Petro China, 9. General Electric, 10. Wells Fargo. Urutan selanjutnya: 11. Toyota, 12. Apple, 13. Ryal Dutch Shell, 13. VW, 15. HSBC UK, 16. Chevron, 17. Walmart, 18. Samsung, 19. City Bank, 20. China Mobile, 21. Allianz, 22. Verizon Communication, 23. Bank of America, 24. Sinopec dan 25. Microsoft. Sejauh penulis mampu mengamati, dari duapuluh lima perusahaan dagang global tersebut, tak lebih dari lima perusahaan saja yang tidak berdagang langsung di Indonesia. Perhatikan juga bahwa dari nama-nama tersebut, perusahaan mana saja yang paling sering muncul - dalam media Indonesia demi iklan gaya hidup politik ekonomi dan kebudayaan global terkait. Harap diingat bahwa total belanja iklan Indonesia tahun 2015 adalah kurang lebih sebesar Rp. 180 trilyun rupiah! Tentu saja, peran besar litbang IPTEK kampus Perguruan Tinggi di bidang pengembangan alat transportasi dan komunikasi dalam arus globalisasi sangat besar. Peran dinamika globalisasi ekonomi dan kebudayaan dengan peran ristek banyak perusahaan dan lembaga (perguruan tinggi) adalah seperti kaitan mana duluan: ayam atau telur.

Satu hal penting dari pengaruh globalisasi kapitalisme Barat tersebut adalah dalam hal perubahan kebudayaan dan agama. Dalam era globalisasi ini, hanya beberapa perusahaan dagang transnasional yang menguasai pasar produk tertentu. Misalnya, jaringan produksi dan distribusi musik rekaman, pada akhir tahun 1980an masih ada enam perusahaan: EMI, CBS, BMG, PolyGram, WEA dan MCA. Masa kini, hanya ada tiga besar yaitu : Sony Music Entertainment, Universal Music dan Warner Music. Perusahaan tersebutlah yang menguasai penjualan hampir 80 persen musik dan lagu di seluruh dunia. Hanya sejumlah kecil perusahaan seperti itulah, yang ternyata berkuasa menyajikan gagasan dan bayangan atau imajinasi global. Masuk akal jika beberapa negara dan kelompok agama tertentu menjadi begitu khawatir karena globalisasi seperti itu dianggap akan mengancam stabilitas masyarakat setempat.<sup>9</sup>

Kembali ke Kwee, buku tulisan dan catatan dia tentang apa yang terjadi di Jawa Timur - pada paruh pertama abad kesembilanbelas, singkat kata, kalau mau dihargai, adalah untuk mewaspadaikan dan jeli menghadapi serbuan yang nampaknya memanipulasi dan mengeksploitasi nilai-nilai dan peran kebudayaan dan agama tersebut.

### **Kebangsaan (Negara) Terbayangkan**

Adalah Benedict Anderson yang mengagas bahwa nasionalisme lahir atas jasa

---

<sup>9</sup> Ib.id.



kapitalisme cetak (Ben h.36). Tentu saja hal tersebut mengandaikan sebuah lingua franca (bahasa bersama) yang diperlukan oleh konsumen yang hidup dalam sebuah masyarakat plural seperti di Indonesia; dengan ribuan pulau dan ratusan bahasa daerah atau bahasa ibu. Dalam pluralitas politik ekonomi global seperti di atas, dan menjalani hidup di Hindia Belanda sejak abad kesembilanbelas berkembanglah sebuah masyarakat plural, yang mengikuti Furnivall, adalah “suatu masyarakat di mana hadir kelompok-kelompok orang yang hidup terpisah satu dengan yang lain, dengan kebudayaan masing-masing, dan hanya saling berjumpa di pasar. Mereka diatur oleh pemerintah kolonial.<sup>10</sup> Dalam keadaan politik ekonomi dan kebudayaan global seperti itulah, nampaknya adalah juga menjadi kekhususan masyarakat di Hindia Belanda, sekarang Indonesia. Pemakluman dan saling memahami dalam masyarakat plural seperti itu dapat berkembang karena ketersediaan sarana penting - menurut Siegel - yaitu sebuah lingua franca yang berbasis bahasa Melayu. Karena sebagaimana dipaparkan oleh Siegel, sesungguhnya sebuah lingua franca bukan milik siapa pun secara khusus.

Bahasa itu relatif terpisah dari tempat dan dari identitas para pemakainya. Dari sudut pandang tertentu bahasa Indonesia hanya terdapat dalam terjemahan, atau kalau lebih suka, sebagai terjemahan. Selama berlaku lingua franca yang ada yaitu keterjalinan antara orang-orang yang tidak saling mencerminkan; dan dengan demikian tidak saling menyebabkan rasa riku. <sup>11</sup>

Lingua franca adalah sebuah “bahasa tanpa nama” yang merupakan kejelian dan kewaspadaan untuk menjaga “bahasa bersama” - yang bukan milik salah satu bahasa ibu - yang menumbuh-kembangkan “keterjalinan sosial budaya antara warga masyarakat.

Di kemudian hari, lingua franca yang sama tersebut juga mampu melahirkan apa yang dinamakan nasionalisme. Patut dicatat bahwa menurut Siegel, nasionalisme berawal bukan dari bangsa - Indonesia sendiri - juga bukan karena kekuasaan kolonial Belanda; tetapi dari penerimaan begitu banyak kabar atau pesan dari Eropa dan Asia, dan juga dari berbagai penjuru dunia. Sebagai penikmat kajian budaya Indonesia, Siegel mengatakan bahwa “kemampuan dari kebangsaan Indonesia

<sup>10</sup> Sebagaimana dikutip dalam: James T. Siegel, *Fetish, Recognition, Revolution*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1997, 7.

<sup>11</sup> James T. Siegel, “*Berbahasa*,” dalam Henri Chambert-Loir (penyunting). Sadur. *Sejarah Terjemahan Di Indonesia Dan Malaysia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. Bekerja-sama dengan: Ecole française d’Extreme-Orient, Forum Jakarta-Paris, Pusat Bahasa, Universitas Pajajaran, 2009, 342

melalui negara untuk mengatur pengakuan atau pemakluman antar warga satu (se) sama lain, melampaui struktur patron-client yang lebih biasa terjadi di kawasan Asia Tenggara. Bagi Siegel, sejarah sebuah bangsa bukan sekedar dari sumber-sumber asli purba belaka, atau dari pinjaman bangsa-bangsa asing, tetapi dari hasil saduran berbahasa dari keterlibatan kesemuanya itu. Keindonesiaan adalah sesuatu yang dialami dalam perjumpaan dengan banyak kebudayaan dunia yang lalu-lalang di kepulauan Indonesia; dalam perjumpaan tersebut lingua franca memperoleh kuasa menakjubkan untuk berkomunikasi.<sup>12</sup> Dalam arti tertentu, dan secara ringkas - dari kajian politik simbol budaya antropologis - boleh dikatakan bahwa Jawa Timur, sejak zaman Majapahit yang dalam masa kini ditengarai dengan banyak “puing-puing” masa lalu, memang menerangkan perkembangan “negera kebangsaan” Indonesia yang mendasarkan diri pada peran kuasa lingua franca tersebut.

Cepat atau lambat, seseorang yang memahami cara kerja lingua franca, dan berkunjung ke Jatim - semoga?! - misalnya, akan mengenal Candi Penataran - dan situs-situs arkeologis sejenis. Candi dan bangunan arkeologis tersebut dibangun berdasar nilai dan sikap toleransi dan keterbukaan terhadap pluralitas: kebudayaan (Jawa, India, dll.), kepercayaan relijius (Hindu, Buddha, dll.), dan kesusasteraan (Panji, Ramayana, dll.) yang selama ini mampir dan hadir di Jawa Timur. Berdasar lokasi candi Penataran yang mempunyai latar belakang pemandangan gunung Kelud, dianggap bahwa candi tersebut dibuat dalam rangka ritus penghormatan terhadap kedahsyatan gejala alam gunung berapi di pulau Jawa.

Berbagai lakon sastra lisan maupun tertulis tradisional Jawa menegaskan bahwa demokratisasi dan liberalisasi - juga dalam kapitalisme global - bukan berarti asal sudah berhasil menyelenggarakan sebuah kontes lomba lari yang boleh diikuti oleh si/apa pun penghuni sebuah kebun binatang.<sup>13</sup> Kelucuan lomba seperti itu hanya untuk meresmikan identitas sepihak yang sedang mabuk hasrat berkekuasaan; daripada ungkapan entitas<sup>14</sup> kuasa hasrat yang muncul dari kalangan massa rakyat. Bersyukur bahwa Jatim pernah melahirkan dan membesarkan Kwee Thiam Tjing yang menulis novel IDAB - Indonesia Dalem Api dan Bara; berkat penggunaan “bahasa tanpa nama” sebagaimana digagas oleh Ben. Membaca IDAB adalah meyakini bahwa bahasa Indonesia ala Kwee akan menghasilkan kekuatan berbahasa yang bukan sekedar sebuah retorika belaka. Dari pembacaan IDAB tersebut akan terbayangkan

<sup>12</sup> Ib.id., 6, 44, 93

<sup>13</sup> Benedict Anderson, *Mythology and the Tolerance of the Javanese*. Ithaca NY: Cornell Modern Indonesia Project, 1965. Terjemahan bahasa Indonesia terbit tahun: 2000.

<sup>14</sup> Entity, something that has separate and distinct existence and objective or conceptual reality ~ *Merriam-Webster Dictionary*

sebuah solidaritas komunal, karena mengikuti gagasan Ben, sebuah “bangsa” adalah sesuatu yang terbayang karena para anggota bangsa terkecil sekali pun tidak dapat kenal dengan sebagaimana besar anggota lain, namun dalam pikiran setiap orang yang menjadi anggota bangsa itu hidup sebuah bayangan tentang kebersamaan mereka.<sup>15</sup> Membaca buku, koran, novel dan karya sastra yang lain ... dalam sebuah *lingua franca* - adalah yang juga dicita-citakan atau diharapkan untuk menghasilkan nasionalisme di Indonesia. Dalam situasi dan keadaan masyarakat plural yang rawan, rapuh dan mudah membara - atau lebih tepat dibuat membara - Kwee menyediakan bahan bacaan yang - semoga - berguna untuk membayangkan dan memahami bagaimana kuasa hasrat warga masyarakat yang biasa-biasa saja mampu berkonsensus, saling memaklumi dan bergerak maju; daripada mengingat-mengingat hasrat kuasa orang-orang tertentu yang kebetulan saja sedang berkuasa dan gemar melakukan “penyempurnaan” yang cenderung menjaga “stabilitas” dengan membakukan dan membekukan kuasa *lingua franca*. Anderson pernah mengatakan, “Dilihat dari segi apapun juga bahasa itu tidak perlu stabil, karena bahasa-bahasa ibu dibelakang dan sekitarnya akan melaksanakan fungsi psikologi sosial itu.”<sup>16</sup>

Bukankah candi Penataran - dan situs-situs budaya candi lainnya - justru memberi tawaran “ingat untuk melupa” tentang ke-“lain”-an dari yang sebenarnya adalah keber-sesama-an kita?! Gado-gado - kalau bukan rujak - imajinasi yang dipaparkan candi Penataran adalah suatu pengalaman atau meditasi (dan kontemplasi) tentang pemangkiran terhadap ingatan dan identitas? Selain cerita lokal Panji, Candi Panataran atau nama aslinya adalah Candi Palah yang berdasar kepercayaan Hinduisme, juga mempunyai relief dengan lakon Ramayana sebagaimana ada di candi Buddha Borobudur. Candi Penataran dibangun mulai masa pemerintahan Raja Srengga dari Kerajaan Kadiri sekitar tahun 1200 Masehi dan berlanjut digunakan sampai masa pemerintahan Wikramawardhana, Raja Kerajaan Majapahit sekitar tahun 1415. Hayam Wuruk ( “Ayam Terpelajar”) yang memerintah tahun 1350-1389, dan dibantu patih senior Gajahmada, mampu membuat kerajaan Majapahit mampu mempengaruhi kebudayaan-kebudayaan lokal di wilayah Nusantara maupun sebagian wilayah yang sekarang disebut Asia Tenggara.

<sup>15</sup> Benedict Anderson 2001 , op.cit. 8

<sup>16</sup> Benedict Anderson, “*Bahasa Tanpa Nama*,” dalam Sadur. h.391. Tulisan Ben ini berdasar tulisan Kwee Thiam Tjing, alias Tjamboek Berdoeri, dalam novelnya berjudul: Indonesia Dalem Api dan Bara. Jakarta: Elkasa, 2004 dan Malang 1947.

## Negara Kebangsaan Kosmopolitan

Ben sudah mengingatkan bahwa nasionalisme yang dibayang-bayangi (baca: didominasi, dihegemoni, diancam, dihantui, dll.) politik ekonomi dan kebudayaan global bukan pemberi harapan palsu atau janji-janji tentang sebuah “mooi Indie” (Indonesia molek), atau sebuah miniatur Indonesia Indah. Jejak langkah gaya dan praktek hidup sehari-hari masyarakat plural dan kosmopolitan di Indonesia membuat apa yang dinamakan sebagai nasionalisme, dapat secara tahan dan tangguh untuk dibayangkan. Sebagian dari beragam tulisan Kwee Thiam Tjing (alias Tjamboek Berdoeri), hidup pada sebagian besar masa kolonial di Jawa Timur, Hindia Belanda, dapat menjadi contoh percakapan tentang identitas dan/atau entitas nasionalisme kosmopolitan. Kwee Thiam Tjing (1900-1974) berasal dari keluarga besar Kwee yang sudah berada di Indonesia sejak abad ke-17. Dengan menguasai empat bahasa (Hokkien, Jawa, Belanda dan Indonesia/Melayu), menjadi tidak terlalu sukar bagi Kwee untuk menikmati pekerjaannya sebagai wartawan yang beraliran “jurnalisme sastra,” dan menjalani cara hidup kosmopolitan.<sup>17</sup> Kemampuan menulis Kwee dalam lingua franca mampu membuatnya menjadi seorang patriot Indonesia mengisi apa yang dibayangkan sebagai nasionalisme pada zamannya Beragam dan banyak karya Kwee seperti novel, cerpen, dan beragam jenis tulisan jurnalistik lainnya, sebenarnya memberi bukti betapapun “kacau-balau”nya<sup>18</sup> hubungan antara orang-orang Belanda, Indonesia dan Tionghoa pada masa itu dapat dijembatani dan dipahami, dimaklumi karena dapat ditulis dan dipaparkan dalam sebuah lingua franca; yang bukan milik salah satu bahasa ibu belaka.

Meskipun kolonisasi kapitalisme global sejak awal abad kesembilanbelas berjalan sukses di Hindia Belanda, dan memberi keuntungan finansial begitu besar bagi Belanda, akan tetapi, dalam perjalanan sejarah selanjutnya para penguasa Belanda tak mampu menundukkan kebangsaan Indonesia; yang berdasar sebuah lingua franca dan menyuburkan sikap dan cara hidup kosmopolitan. Dalam hal ini, kosmopolitan adalah gaya hidup semesta dari seseorang yang tanpa perlu pernah berkunjung ke luar-negeri; tetapi karena terbuka terhadap bermacam kebudayaan lain.<sup>19</sup> Tulisan dan gaya berbahasa Kwee menunjuk betapa besar sumbangan kalangan keturunan Tionghoa Indonesia pada awal kebangkitan nasionalisme Indonesia, dan

<sup>17</sup> Gagasan kosmopolitanisme ini dimuat dalam wawancara Cynthia Foo dengan Ben Anderson, tanggal 1 Oktober 2008, di Columbia University, New York.

<sup>18</sup> Sejarahwan Peter Carey pernah mencatat pada akhir abad kesembilan belas, di kota Jogja, seorang Tionghoa peranakan yang berbisnis dengan kalangan pihak keraton, sempat diberi julukan “*Cino wurung*, Jowo tanggung, Londo durung” (Bukan lagi Tionghoa, Jawa tanggung, belum Belanda).

<sup>19</sup> Benedict Anderson & Cynthia Foo 2008, op.cit.

tidak harus loyal terhadap penguasa di daratan Tiongkok. Berdasar kekuatan lingua franca, tulisan-tulisan Kwee tidak berteori tentang post-kolonialisme yang jalan ditempat, dan membaku-bekukan identitas masyarakat. Dengan mata, telinga, lidah, hidung dan kulit dan tangan (jurnalistik) nya, Kwee memaparkan sesuatu entitas kehidupan kerakyatan kosmopolitan global.

Memberi komentar terhadap buku *Menjadi Tjamboek Berdoeri* (MTB), Siegel mengingatkan para pembaca masa kini agar mereka mampu terus berkembang dan bergerak untuk menjadi warga negara bangsa yang nasionalis dan kosmopolitan; asal mereka memiliki,

kepercayaan pada diri sendiri dan pada sumber sejarah serta kebudayaan bangsanya untuk menggapai kedamaian tanpa bersandar pada negara. Dia menunjukkan jalan bagi suatu bangsa tanpa perlu mengabaikan masa lalunya sekalipun mengetahui, sehingga berhenti mengandalkan kontrol atas rakyat sebagai *raison d'etre*.<sup>20</sup>

Meski sudah melampaui usia HUT proklamasi kemerdekaan nasional yang ketujuh puluh, Indonesia tetap berada dalam arus politik ekonomi dan kebudayaan global dan masyarakat plural. Bagaimanapun juga, meskipun dalam keadaan kurang teratur tetapi dapat saling mengakui, saling memahami dan saling memaklumi sesamanya. Masa kini, berdasar hasrat (ber)kuasa yang sering ditopengi budaya, adat, tradisi dengan asal-usul asli dan hirarkis, patutlah pembaca atau konsumen “kapitalisme cetak “ - misalnya IDAB dan MTB - untuk menjadi semakin jeli mewaspadaai kehadiran sesama yang pada suatu proses perubahan ekonomi, sosial dan politik, dapat berganti wajah *gepeupel* (massa rakyat jelata) dan/atau *gespuis* (kriminal, pencoleng); tanpa melakukan balas dendam ketika menjadi korban.<sup>21</sup>

Benedict Anderson yang sangat terkesan, dan memujikan kuasa bahasa tulisan-tulisan Kwee, memberi dua pesan masing-masing bagi orang muda Tionghoa keturunan dan anak muda pribumi.

<sup>20</sup> James T. Siegel, *The Establishment of Revolutionary Violence*, dalam Indonesia. vol.79, April 2005. hlm.35 Ditulis kembali dan disadur dalam bahasa Indonesia dalam buku: *Menjadi Tjamboek Berdoeri*. Memoar Kwee Thiam Tjing. Editor: Arief W. Djati dan Ben Anderson. Pengantar James Siegel. Jakarta: Komunitas Bambu, 2010.

<sup>21</sup> James T. Siegel, “*Kisah Dua Buku, Atau Membaca Tjamboek Berdoeri*,” dalam, *Menjadi Tjamboek Berdoeri*. Memoar Kwee Thiam Tjing (Jakarta: Komunitas Bambu, 2010), h.xxix. Editor: Arief W. Djati dan Benedict Anderson

Anak2 muda dari dari golongan keturunan berhak merasa bangga 'punya' pengarang sebesar Opa Kwee, asal mereka memperhatikan 'critiek2nja' atas kesombongan, snobisme, kemasa-bodoan, oportuniste, sikap materialistis, eksklusivisme, dan laen2 tjatjat sebagian golongan mereka.<sup>22</sup>

Sementara kepada kalangan pribumi, Anderson menulis,

Anak muda pribumi berhak merasa bangga bahwa bumi Indonesia pernah melahirkan seorang pengarang bahasa Indonesia (Melaju) yang hebat, sekaligus kepribadian jang brani, bersih dari prasangka jang sempit, dan penuh humor jang orisinil dan akrab. Pun seorang jang walaupun setia kepada Ibu Pertiwinya (jang juga Ibu Pertiwi mereka), tidak menutupi mata-matanja terhadap tindakan2 buas jang terlalu sering dilakukan atas Namanja.

Pemangkiran yang secara sengaja dan terencana dilakukan oleh rejim militer Orde Baru untuk menutupi kehadiran sesungguhnya kalangan rakyat biasa, hanya mungkin kalau para penikmat hasrat kuasa itu mengira bahwa hanya ada retorika - kuasa dalam bahasa - dan ingkar bahwa bahasa yang hakekatnya dapat terus berubah dan berkembang sesungguhnya mempunyai kuasa (ajaib) di balik kata-kata yang dipilih untuk disuratkan, dituliskan. Tulisan Kwee dalam IDAB dan MTB, dan banyak jurnalis dan penulis lain - berangkat dari pengalaman memanfaatkan lingua franca - akan terus menghasilkan dan memperkembangkan nasionalisme. Bukan sebaliknya, bahwa nasionalisme ideologis akan menghasilkan bahasa bersama. Mengakhiri pesannya bagi para pembaca IDAB, Benedict Anderson mengatakan,

Di antara anak2 muda ini, insjallah, akan timbul perasaan solidariteit nasional jang betul sehat, jauh di atas sentimen2 suku, agama, 'tradisi' dan lembaga, jang selalu pitjik dan narsistik."<sup>23</sup>

Opa Kwee - entah di manapun beliau sekarang ini sedang berada - menjadi waspada dan jeli untuk tidak melupa tentang cerita (dan cita-cita) sesama eks hoakiau untuk menghidupi bara api kuasa hasrat kosmopolitanisme dan nasionalisme masa lalu mereka untuk sesama orang-orang Indonesia masa kini.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Benedict Anderson 2000, IDAB, op.cit., 78

<sup>23</sup> Ib.id.

<sup>24</sup> Cukup banyak orang Tionghoa Indonesia masa kini yang juga menulis suka-duka mereka sebagai

## Kata-kata Akhir

Bagaimana peran sebuah universitas dan/atau lembaga akademis sejenis berkaitan dengan penelitian dan pengembangan IPTEK mereka terhadap hal dan masalah yang disebut globalisasi tersebut? Sementara ini, biasanya ada dua sikap.<sup>25</sup> Pertama, bagaimana ikut menghadapi dominasi dan penyeragaman TNC yang begitu hegemonis. Kedua, hal dan masalah globalisasi - termasuk ironi kehadiran gadget pintar dan media sosial modern - sesungguhnya malah dapat menjadi sumber atau inspirasi pembebasan dari budaya lokal - diharapkan dengan bantuan dunia akademis - apalagi dari perangkap atau kerangkeng intoleransi pihak-pihak dengan kepentingan sepihak berdasar diskriminasi SARA yang (masih) marak selama ini. Bukan sebuah cita-cita muluk kalau panitia mengharap para peserta adalah dari kalangan tertentu<sup>26</sup> - bahkan mayoritas, mungkin, berasal dari daerah Jatim – yang tidak terlalu “asing” dan “tidak rikuh” ketika perlu menghargai dan membaca warisan Kwee Thiam Tjing, alias Tjamboek Berdoeri.<sup>27</sup>

Rakyat kebanyakan tetap dapat tangguh dalam beragam hidup sosial-budaya mereka meski ada banyak perselisihan dan pertarungan dalam hidup sehari-hari. Rakyat tetap saja terus memproduksi cerita (dan cita-cita), teks dan hal-hal lain demi gotong-royong (relasi sosial) hidup sehari-hari. Tetap saja rakyat mampu menjaga dan merawat harapan dan tidak takut untuk menghadapi sikap berlebihan, kalau bukan malah serakah, terhadap gaya hidup konsumtif yang dipicu iklan-iklan “PHP.” Menurut Ben Anderson, sebuah *lingua franca* yang berdasar pengalaman hidup sehari-hari masyarakat plural - di tengah-tengah sebuah “pasar” - harus terbuka untuk semua bahasa di sekitarnya. Tulis Anderson.

Mau tidak mau, bahasa itu selalu berubah-ubah, selalu menerima dan membuang, bkan karena diharuskan suatu otoritas pusat tetapi karena tangan tidak kentara dari pasar katjau-balau para pemakai dan pembatjanja. Dilihat dari segi apapun djuga bahasa itu tidak perlu stabil, karena bahasa2 ibu

---

peranakan. Misal, Margareta Astaman, Excuse Moi. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2011. Sio Hong Wai, Menjadi (Tionghoa) Indonesia. Yogyakarta: L.S.Realino & Penerbit Universitas Sanata Dharma, 2016

<sup>25</sup> Lihat, Masao Miyoshi, “Globalization,” *Culture, and the University.*” dalam Fredric Jameson & Masao Miyoshi (eds.), *The Cultures of Globalization.* Durham & London: Duke University Press. 1998. h.xiii, 247, 261

<sup>26</sup> Panitia menyebutkan bahwa sasaran peserta simposium nasional ini adalah: 1. Pimpinan Perguruan Tinggi dan para dosen.2. Pimpinan Organisasi Kemahasiswaan dan para mahasiswa.3. Kepala Sekolah, Guru dan para pembina siswa pada semua tingkatan.4. Pimpinan dan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat, dan 5. Pengurus Organisasi Keagamaan.

<sup>27</sup> Tjamboek Berdoeri, *Indonesia Dalem Api dan Bara.* Jakarta: Elkasa, 1947/2004

dibelakang dan sekitarnja melaksanakan fungsi psikologis sosial itu.<sup>28</sup>

Mengikuti gagasan Ben Anderson, apa yang ditulis Opa Kwee bagi pembaca IDAB - penerbitan tahun 1947 dan 2010 - dalam bahasa bersama Indonesia, sebuah lingua franca - adalah yang juga dicita-citakan atau diharapkan untuk menghasilkan dan menumbuhkan nasionalisme di Indonesia. Bukan hal sebaliknya, bahwa nasionalisme yang menghasilkan sebuah bahasa bersama untuk sebuah masyarakat yang lebih adil dan manusiawi.<sup>29</sup>

Akhir kata, dalam sebuah pertemuan Kreisky Forum tahun 2007 di Wina, Austria, Ben Anderson ditanya oleh moderator tentang identitas nasional dia dalam masyarakat kosmopolitan global masa kini. Ben kelahiran Kunming (1936), di daratan Tiongkok. Ayahnya berkebangsaan Inggris, dan ibunya Irlandia. Ben menyelesaikan studi sastra di Universitas Cambridge (1957), kemudian melanjutkan studi doktoral dalam ilmu politik di Universitas Cornell (1958-1967), dan menjadi dosen tetap di sana sampai pensiun. Kata orang, ketika Ben pindah ke AS, dia dianggap terlalu Irlandia bagi rekan-rekan Amerika. Ben sering berkunjung ke Indonesia dan punya apartemen di Bangkok. Dia sangat lancar berbahasa Indonesia, Perancis, Jerman, Belanda dan Spanyol; cukup lancar berbahasa Thai. Terhadap pertanyaan moderator itu, dengan ringan, Ben menjawab, “sesungguhnya saya hanya punya satu paspor, paspor Irlandia.”

Kalau mungkin - seandainya saja - kita dapat menambahkan pertanyaan yang sama kepada Ben Anderson. Meskipun hanya memiliki paspor Irlandia, dan mempunyai kampung halaman di kota kecil Freeville, tidak jauh dari lokasi kampus Universitas Cornell, di negara bagian New York, mengapa pada tengah malam tanggal 12 Desember 2015, Ben Anderson (kok memilih) meninggal di Jawa Timur? Saat akhir hidup Ben Anderson itupun terjadi hanya beberapa saat sesudah dia menikmati kunjungannya di Candi Belahan dan Candi Jolotundo yang terletak di lereng Gunung Penanggungan. Apa yang (telah) dibayang-bayangkan oleh seorang “Irlandia” di Jawa (Timur), yang menyempatkan diri berkunjung ke Candi Belahan atau Sumber Tetek yang dibangun tahun 1009 CE oleh Raja muda Airlangga; dan ke Candi Petirtaan Jolotundo yang dibangun oleh raja Udayana, ayah Airlangga pada tahun 991 CE, untuk merayakan kelahiran putranya itu.

<sup>28</sup> Benedict Anderson, “*Bahasa Tanpa Nama*,” dalam Sadur 2009, op.cit., 391

<sup>29</sup> Lihat Benedict Anderson, *Kuasa Kata. Jelajah Budaya-Budaya Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Mata Bangsa, 2000. h.420. Terbit pertama kali tahun 1990.



## BIODATA PENULIS

### Dr. Reza A.A. Wattimena

Alumnus program sarjana dan magister filsafat sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Jakarta. Alumnus Hochschule fur Philosophie Munchen, Jerman. Dosen Filsafat politik di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Penulis buku: *Melampaui Negara Hukum Klasik* (Kanisius, 2007), *Filsafat dan Sains* (Grasindo, 2008), *Bahagia, Kenapa Tidak?* (Penerbit Maharsa, 2015) dan aktif menulis artikel dalam surat kabar maupun jurnal ilmiah. Dapat dihubungi di blog pribadi: [www.rumahfilsafat.com](http://www.rumahfilsafat.com)

### Dr. Valentinus Saeng

Alumnus program sarjana Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi (STFT) Widya Sasana Malang. Alumnus program S-2 Filsafat dan Doktoral di Universitas st. Thomas Aquino Angelicum, Roma, Italia. Dosen filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi (STFT) Widya Sasana Malang. Penulis Buku: *Menyibak Selubung Ideologi Kapitalis dalam Imperium Iklan* (Kanisius, 2011), *Herbert Marcuse: Perang Semesta Melawan Kapitalisme Global* (PT Gramedia Pustaka Utama, 2012)

### Drs. I. Basis Susilo MA

Alumnus program Sarjana FISIPOL Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta. Alumnus program Pascasarjana Universitas Indonesia (UI), Jakarta dan program doktoral di University of Minnesota, Amerika Serikat. Saat ini menjadi dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Airlangga (UNAIR), Surabaya.

### Drs. St. Kartono, M.Hum.

Guru di SMA Kolese De Britto, Yogyakarta sejak 1991. Menyelesaikan pendidikan di Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, IKIP Sanata Dharma (1993), dan Program Linguistik Terapan, Pascasarjana (S2), Universitas Negeri Yogyakarta (2010). Kolomnis pendidikan, telah mengkorankan lebih dari 500 artikel di Harian JOGJA, BERNAS, KOMPAS, Kedaulatan Rakyat, Majalah BASIS, dll. Menulis 11 buku, antara lain, *Menulis Bersama Murid* (2015), *Menjadi Guru Untuk Muridku* (2011), *Menulis*

*Tanpa Rasa Takut (2009), Sekolah Bukanlah PASAR (2009), Menabur Benih Keteladanan (2001), Menebus Pendidikan Yang Tergadai (2002), Reformasi Pendidikan (2003, dkk).* Pembicara di berbagai forum/workshop di perguruan tinggi, sekolah, dan parpol, mulai dari Aceh, Sumut, Sumsel, Kepri, Kalbar, Kalteng, Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim,DIY, sampai Papua.

**Dr. Ramon Antonio Eguia Nadres**

Alumnus program sarjana bidang zoologi di University of the Philippines. Alumnus sarjana filsafat di Pontifical University of the Holy Cross, Roma. Gelar Licentiate in philosophy dan doktor diperoleh dari Universitas Navvare, Pamplona, Spanyol. Sekarang bekerja sebagai dosen di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya

**Pdt. Simon Filantropa**

Seorang Pendeta Gereja Kristen Indonesia (GKI) yang juga menjabat sebagai humas GKI sinode wilayah Jawa Timur. Aktif sebagai pembicara dalam berbagai forum diskusi dan seminar lintas agama. Saat ini juga menjabat sebagai Ketua Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) wilayah Jawa Timur.

**Dr. Ahmad Zainul Hamdi**

Dosen Filsafat pada Prodi Perbandingan Agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya. Aktif menulis dan menjadi pembicara di berbagai seminar. Kini menjabat sebagai Direktur CMARs (*Center for Marginalized Communities Studies*) Surabaya.

**Prof. Dr. FX. E. Armada Riyanto**

Alumnus program doktoral filsafat di Universitas Gregoriana, Roma, Italia. Penulis buku: *Politik, Sejarah, Identitas dan Posmodernitas (1999), Interreligius: Historisitas, Tesis, Pergumulan, Wajah (Kanisius, 2010)*. Saat ini menjadi guru besar etika dan filsafat politik di Sekolah Tinggi Filsafat Widya Sasana, Malang.

**K.Ng.H. Agus Sunyoto**

Alumnus PLS IKIP Negeri Malang. Aktif menulis dan menjadi pembicara di berbagai seminar dan diskusi. Pengasuh Pesantren Global Tarbiyatul Arifin, Malang. Saat ini menjabat sebagai ketua LESBUMI PBNU dan pengurus pesantren Budaya Nusantara.

**Dr. Alb. Budi Susanto**

Alumnus program doktoral di Cornell University Amerika Serikat dalam bidang Anthropologi Budaya. Penulis: *Siasat Kebudayaan, Imajinasi Penguasa dan Identitas Poskolonial* (Penerbit Kanisius, 2000), *Masih(kah) Indonesia?* (Penerbit Kanisius 2007), *Sisi Senyap Politik Bising*, (Penerbit Kanisius, 2007). Saat ini menjabat sebagai Direktur Lembaga Studi Realino dan Dosen Program Pascasarjana Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

**Dr. Agustinus Ryadi**

Alumnus program doktoral filsafat di Pontifica Universita Urbaniana, Roma, Italia. Aktif menulis buku dan artikel populer di media massa. Kini menjadi dosen di fakultas filsafat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.

**Simon Untara M.Hum.**

Alumnus program magister di Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara. Sekarang menjadi pengajar di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.

**Aloysius Widyawan Lic.Phil.**

Alumnus studi Licensiate filsafat di Universidad de Navarra, Spanyol. Kini menjadi dosen di Fakultas filsafat Universitas Widya Mandala Surabaya.

**Anastasia Jessica A.S. M.Phil.**

Alumnus program magister filsafat di Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta. Penulis buku *Menelusuri Pragmatisme* (PT Kanisius dan Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, 2015). Kini sebagai pengajar di Fakultas Filsafat Universitas Widya Mandala Surabaya.

**Datu Hendrawan M.Phil.**

Alumnus program magister filsafat di Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta. Kini sebagai pengajar di Fakultas Filsafat Universitas Widya Mandala Surabaya.

